

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KENDAL  
NOMOR 28 TAHUN 2025  
TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
KENDAL TAHUN 2026

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL  
TAHUN 2026

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Potret Kabupaten Kendal**

Sejarah Kabupaten Kendal tidak terlepas dari peranan sosok ulama yang disegani bernama Ki Tumenggung Bahurekso yang juga seorang admiral angkatan laut dan gubernur pesisir Jawa bagian utara. Tokoh sentral yang pada tanggal 12 Robbiul Awal 1014 Hijriyah atau bertepatan dengan tanggal 28 Juli 1605 dikukuhkan sebagai Bupati Kendal yang pertama. Beliau dikenal sebagai sosok pejuang yang heroik. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2006 tentang Hari Jadi Kabupaten Kendal, menetapkan “Jumenengan” Tumenggung Bahurekso sebagai Bupati Kendal tersebut sebagai momen awal berdirinya Kabupaten Kendal. Nama Kendal sendiri berasal dari sebuah pohon Kendal yang dimaknai dengan “Penerang”. Dengan makna tersebut diharapkan Kabupaten Kendal kedepan menjadi penerang bagi rakyatnya, penerang bagi kawasan baik regional, nasional maupun internasional.

Kabupaten Kendal adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Ibukota Kabupaten Kendal adalah Kecamatan Kendal yang masuk dalam Wilayah Metropolitan Kedungsepur yang merupakan Wilayah Metropolitan terbesar keempat setelah Jabodetabekpunjur, Gerbangkertosusila, dan Cekungan Bandung. Kabupaten Kendal berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kota Semarang dan Kabupaten Semarang di timur, Kabupaten Temanggung di selatan, serta Kabupaten Batang di barat. Kendal dikenal sebagai Kota Santri yang kental dengan keberadaan Pondok Pesantren terutama di Kecamatan Kaliwungu,

serta juga dikenal dengan Kota Seni dan Budaya. Secara umum Kabupaten Kendal terdiri dari dataran rendah (pantai) dan dataran tinggi (pegunungan).

Dengan kondisi geografis tersebut, terdapat potensi-potensi yang dapat dikembangkan mulai dari sektor pertanian, kehutanan, kelautan serta perindustrian. Hal tersebut menjadikan peluang dan tantangan bagi pembangunan di Kabupaten Kendal yang didukung dengan bonus demografis yang ada dimana penduduk usia produktif lebih dominan dibandingkan dengan penduduk usia non produktif. Sektor industri akan berkembang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan Kawasan Industri Kendal sebagai Kawasan Ekonomi Khusus yang didukung dengan pengembangan pelabuhan Kendal yang direncanakan sebagai pengembangan pelabuhan Tanjung disisi barat dan pelabuhan darat (*dryport*) secara terpadu sebagai pintu ekspor dan impor Jawa Tengah serta upaya untuk mengurangi biaya logistik di Jawa Tengah. Potensi Daerah dan sinkronisasi pembangunan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kendal merupakan modal utama dalam pembangunan di Kabupaten Kendal untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Kendal yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang menjadi pedoman Kabupaten Kendal dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal Tahun 2026.

## **1.2. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengamanatkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan Daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah, yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Pada ketentuan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa dokumen perencanaan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

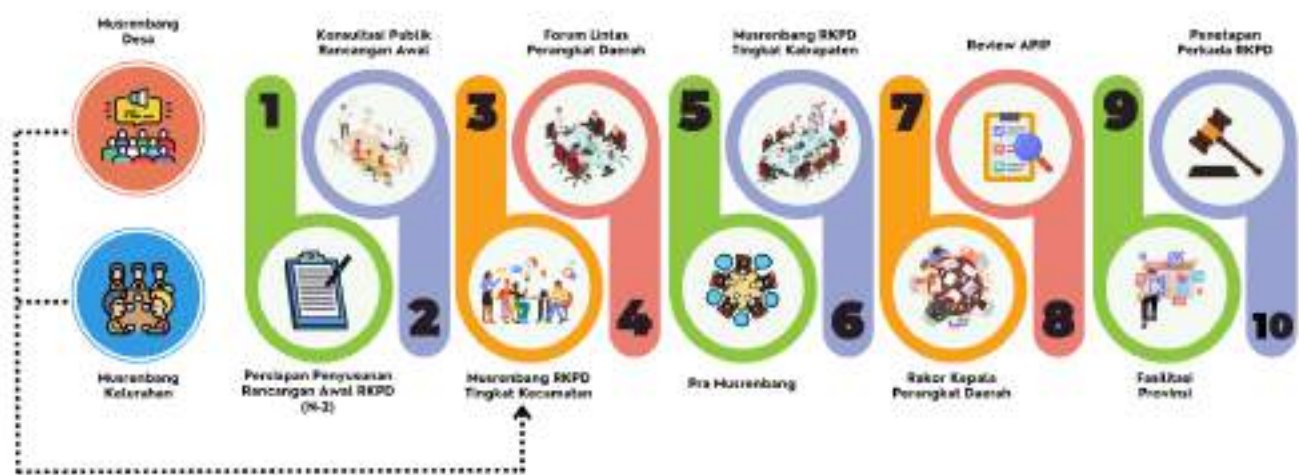
RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam tahap penyusunan perencanaan pembangunan sampai dengan penyusunan anggaran.

Untuk menjamin kualitas perencanaan pembangunan, sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa penyusunan dokumen RKPD yang berorientasi pada proses dilakukan menggunakan pendekatan Teknokratik, Partisipatif, Politis serta Atas-Bawah (*top-down*) dan Bawah-Atas (*bottom-up*). Sedangkan penyusunan dokumen RKPD yang berorientasi pada substansi menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS), dengan menganut konsep *Money Follows Program*. Tahapan penyusunan RKPD mendasarkan pada ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan Musrenbang;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Dalam upaya meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah, penyusunan dokumen RKPD menggunakan konsep pembangunan *pentahelix*, dimana unsur pemerintah, masyarakat atau komunitas, akademisi, pengusaha, dan media bersatu membangun kebersamaan dalam pembangunan. Pemerintah dengan *political power* sebagai perumus kebijakan didukung oleh peran serta masyarakat atau komunitas, akademisi, pengusaha dan media yang berkolaborasi dalam pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Penyusunan dokumen RKPD dilakukan melalui beberapa tahapan, dimulai dari persiapan penyusunan RKPD pada bulan Desember tahun 2024, penjangkaran saran dan masukan dari *stakeholder* dan masyarakat melalui Konsultasi Publik dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa dan Kecamatan, Forum Lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten, serta hasil Reses dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD. Guna penyelarasan dan sinkronisasi program dan kegiatan maka dilakukan Rapat Koordinasi Kepala Perangkat Daerah. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 1.1  
Proses Penyusunan RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2026

Penyusunan RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Dokumen RKPD ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kendal yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang mengacu pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS),

serta menjadi pedoman dalam mengevaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2026 adalah **“Kendal Hebat : Peningkatan kualitas SDM yang unggul dan produktif sebagai akseptor pencapaian tujuan pembangunan serta mendorong kemandirian pangan dan pemerataan infrastruktur pembangunan”**. Pada tahun 2026, difokuskan untuk meningkatkan kualitas SDM Kabupaten Kendal yang unggul dan produktif melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, penguatan pendidikan karakter dan nilai-nilai kebudayaan masyarakat. Selain itu, juga berfokus pada peningkatan kemandirian pangan yang meliputi ketercukupan cadangan pangan dan kemampuan masyarakat untuk mengakses pangan yang berkualitas. Untuk mendukung hal ini, perlu didorong peningkatan hasil pertanian, baik melalui peningkatan sarana maupun prasarana pertanian, serta peningkatan hasil peternakan, perikanan maupun olahannya. Arah kebijakan tahun 2026 juga difokuskan pada pemerataan infrastruktur daerah, baik jalan, jembatan, transportasi, rumah layak huni, dan pemerataannya baik di perkotaan maupun perdesaan.

### **1.3. Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar hukum dalam penyusunan RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2026 mendasarkan pada peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 241);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 246);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435).

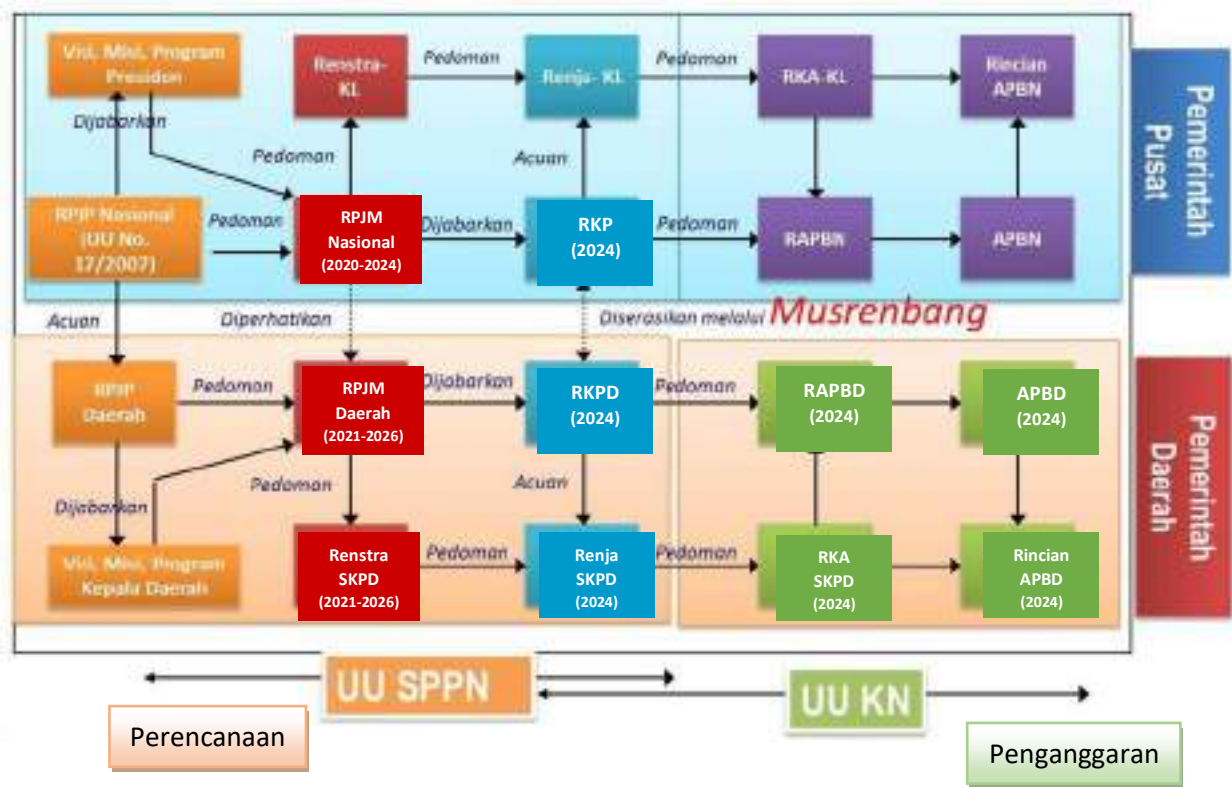
#### **1.4. Hubungan Antar Dokumen**

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi pedoman pembangunan 20 (dua puluh) tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah jangka waktu 5 (lima) tahunan serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah tahunan. Dokumen RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2026 ini merupakan rencana pembangunan yang bersifat tahunan yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029. Selain itu juga memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, yang memuat visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah yang dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan RKPD.

RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2026 disusun dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJPD dan RPJMD Kabupaten Kendal, untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah. RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2026 dijadikan acuan bagi Perangkat Daerah di Kabupaten Kendal dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penyusunan dokumen RKPD mempedomani RPJMD Kabupaten, dan diselaraskan terhadap RKPD Provinsi, RKP dan Rencana Strategis Nasional serta pedoman penyusunan RKPD.

Sebagai wujud komitmen Kabupaten Kendal dalam pembangunan ekonomi khususnya di Kawasan Kedungsepur, penyusunan RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2026 juga memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobongan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang. Selain itu, dalam penyusunan RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2026 juga memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, serta perwujudan *smart governance* menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

Adapun hubungan antar dokumen perencanaan dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan dan keuangan digambarkan dengan alur sebagai berikut:



Gambar 1.2  
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Penyusunan RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2026 juga akan diselaraskan terhadap dokumen lainnya sebagai berikut :

a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011 – 2031, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011 – 2031, bahwa penataan ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman dalam penyusunan program pembangunan untuk menetapkan lokasi kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi dan kawasan permukiman, pola jaringan sarana dan prasarana wilayah, serta kawasan strategis dalam wilayah Kabupaten Kendal yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun.

b. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD)

RPKD merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2021 – 2026 dalam bentuk arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan beserta indikatif penganggarannya. Menurut data dari Bappeda Provinsi Jawa Tengah, sebanyak 25 (dua puluh lima) desa dari lima kecamatan di Kabupaten Kendal ditetapkan menjadi lokus kemiskinan ekstrem. Sebagai upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Kabupaten Kendal melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) telah melakukan sejumlah intervensi yang didukung oleh perangkat daerah dengan program pengentasan kemiskinan dan pihak swasta dengan program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Strategi lainnya yang diupayakan yaitu pendampingan perangkat daerah untuk desa dan kelurahan yang menjadi lokus kemiskinan ekstrem.

c. Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

Kebijakan pengembangan inovasi daerah berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, pada Pasal

4 dan Pasal 5 ditegaskan bahwa inovasi daerah bersifat strategis dan menyeluruh, meliputi bidang-bidang pembangunan sebagai berikut :

- Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah, merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen pemerintahan.
- Inovasi Pelayanan Publik, merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- Inovasi Daerah Lainnya, merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

d. *Sustainable Development Goals (SDGs)*

TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat yang mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesenjangan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Dalam mendukung pencapaian target SGD, Pemerintah Kabupaten Kendal berkolaborasi dengan seluruh *stakeholders* melalui tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dan instansi vertikal.

e. *Standar Pelayanan Minimal (SPM)*

Mendasarkan pada ketentuan umum dalam Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, disampaikan bahwa

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar untuk daerah kabupaten/kota terdiri atas 29 jenis yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta sosial.

Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, secara umum Kabupaten Kendal telah menindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 83 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal. Bahkan secara spesifik, Kabupaten Kendal menetapkan beberapa peraturan terkait SPM bidang kesehatan yaitu Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal dan Peraturan Bupati Kendal Nomor 73 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kendal.

f. Reformasi Birokrasi (RB)

Reformasi Birokrasi dimaknai sebagai perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan, menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah, merevisi dan membangun berbagai regulasi. Tujuan dari Reformasi Birokrasi yaitu menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan PermerPANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, Pemerintah Kabupaten Kendal telah merilis Keputusan Bupati Kendal Nomor 171 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Kendal yang bertugas menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara

berkala, termasuk pelaksanaan *Quick Wins* agar pelaksanaan reformasi birokrasi konsisten, terarah, dan berkelanjutan.

- g. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kabupaten Kendal.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima didorong peningkatan keterpaduan dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.

### **1.5. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2026 adalah sebagai pedoman arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2026 dan upaya penyusunan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2026.

Sedangkan tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2026 adalah :

- a. Sebagai landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dalam menyusun Renja PD Tahun 2026;
- b. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahun 2026 yang menjadi instrumen pelaksanaan pembangunan yang berpedoman pada dokumen RPJPD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2045 serta RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029;
- c. Dasar dalam penyusunan Rancangan KUA PPAS Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026 dan RAPBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026;
- d. Sebagai dasar evaluasi rancangan Peraturan Tentang APBD untuk memastikan APBD disusun berdasarkan RKPD; dan
- e. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan di Kabupaten Kendal.

### **1.6. Sistematika Dokumen RKPD**

RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2026 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan sistematika sebagai berikut :

## BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, yang memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika RKPD.

## BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat kondisi umum daerah dalam berbagai aspek, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2024 dan realisasi capaian terhadap target RPJMD 2021-2026 yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintah daerah, permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang dihadapi, serta inovasi-inovasi yang telah dilaksanakan dan penghargaan-penghargaan yang diraih.

## BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun 2024 dan perkiraan tahun 2025-2026, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

## BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2024 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan dan prioritas pembangunan di tingkat daerah dan nasional, serta inovasi-inovasi tahun 2026.

## BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang

direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

#### BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

#### BAB VII PENUTUP

**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

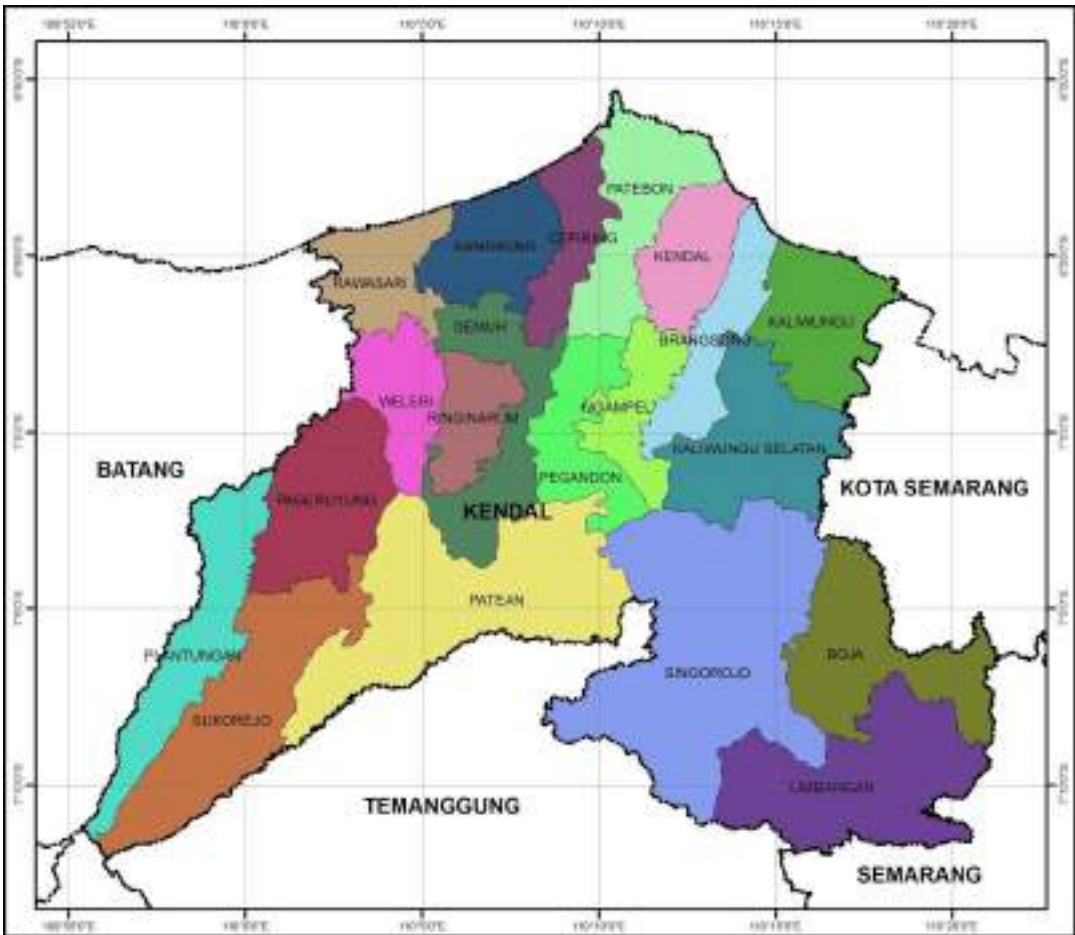
**2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah.**

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi.

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah.

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi.

Kabupaten Kendal memiliki luas wilayah sebesar 1.002,23 km<sup>2</sup>. Wilayah Kabupaten Kendal di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah timur berbatasan dengan Kota Semarang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang, serta di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Batang.



Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Kendal  
(Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal 2024)

Jumlah kecamatan di Kabupaten Kendal sebanyak 20 (dua puluh) kecamatan. Jumlah seluruh desa/kelurahan adalah 286 (dua ratus delapan puluh enam) yang terdiri 266 desa dan 20 kelurahan. Terdiri dari

1.165 dukuh, 1.592 RW dan 8.566 RT.

b. Letak dan Kondisi Geografis.

Secara geografis, Kabupaten Kendal terletak pada posisi 109°40' - 110°18' Bujur Timur dan 6°32' - 7°24' Lintang Selatan. Posisi Kabupaten Kendal berada pada jalur penghubung Pulau Jawa bagian utara (PANTURA) sehingga posisinya menjadi sangat strategis. Selain itu juga Kabupaten Kendal letaknya berbatasan langsung dengan Kota Semarang yang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah.

Kabupaten Kendal merupakan wilayah dengan karakter agraris. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya luas lahan yang digunakan untuk pertanian, yaitu tanah sawah pada tahun 2023 seluas 236,49 km<sup>2</sup> (23,60%), dan tanah tegalan 223,31 km<sup>2</sup> (22,28%). Sedangkan sisanya dipergunakan untuk peruntukan lain (hutan, perkebunan, lahan bukan pertanian dan lain-lain).

c. Topografi.

Topografi Kabupaten Kendal terbagi dalam tiga jenis yaitu : daerah pegunungan yang terletak di bagian paling selatan dengan ketinggian antara 0 sampai dengan 2.579 m dpl. Suhu berkisar antara 25<sup>0</sup> C. Kemudian daerah perbukitan berada di sebelah tengah dan dataran rendah serta pantai di sebelah utara dengan ketinggian antara 0 s/d 10 m dpl dan suhu berkisar 27<sup>0</sup>C.

Kecamatan Plantungan yang termasuk dalam wilayah dataran tinggi, memiliki ketinggian 697,99 meter di atas permukaan laut (mdpl), sedangkan Kecamatan Sukorejo berada pada kisaran 524,26 mdpl. Kecamatan Weleri adalah kecamatan yang memiliki ketinggian terendah di atas permukaan laut yaitu 4,88 mdpl.

d. Geologi

Kondisi Geologi Kabupaten Kendal berdasarkan struktur geologinya terdiri atas dataran aluvial, perbukitan bergelombang, perbukitan berelief sedang, plato dan tubuh gunung api.

- Wilayah Kabupaten Kendal bagian utara meliputi wilayah Kecamatan Rowosari, Kangkung, Cepiring, Patebon, Kendal, Brangsong, sebagian Kaliwungu, Weleri, Ringinarum, Gemuh, Pegandon dan Ngampel merupakan dataran aluvial dengan kemiringan antara 3-5%.
- Wilayah Kabupaten Kendal bagian tengah yang meliputi wilayah Kecamatan Pageruyung, Weleri, Ringinarum, dan Kaliwungu merupakan wilayah perbukitan bergelombang dengan kemiringan antara 3-10%, dan didominasi batu pasir, breksi, tufa, dan aliran lava.

- Wilayah Kabupaten Kendal bagian tengah yang meliputi Kecamatan Patean dan Singorojo merupakan daerah berelief sedang dengan kemiringan 15-30%.
- Wilayah Kabupaten Kendal bagian selatan yang meliputi sebagian Kecamatan Plantungan, Sukorejo, Patean, Limbangan, dan Boja merupakan plato dengan kemiringan lebih dari 30%.
- Wilayah selatan lain yang meliputi Kecamatan Limbangan merupakan tubuh gunung api dengan kemiringan 15-30% didominasi lava andesit basal dan bongkah vulkanik lahar.
- Wilayah selatan lain yang meliputi sebagian wilayah Limbangan dan Singorojo merupakan daerah perbukitan berelief kasar dengan kemiringan antara 30-70%.

e. Hidrologi

Suplai air tanah maupun air tawar seluruhnya datang dari hujan yang berasal dari penguapan air laut, yang merupakan bagian dari proses siklus hidrologi. Hujan yang jatuh akan meresap ke dalam tanah, sebagian menjadi air tanah yang mengisi akuifer (formasi tanah yang mengandung dan menghantarkan air tanah dan sebagian besar mengalir di permukaan sebagai run off, dalam kenyataannya siklus hidrologi ini sangat rumit meskipun pada dasarnya hidrologi adalah bagian dari ilmu bumi.

Namun kenyataannya hidrologi harus berhubungan dengan atmosfer sebagai medium yang meneruskan air ke muka bumi maupun dari muka bumi. Kabupaten Kendal memiliki sekitar 20 mata air dengan debit yang beranekaragam. Mata air yang ada tersebut pada umumnya terletak di Kecamatan Sukorejo, Plantungan, Singorojo, Limbangan, dan Patean.

Kabupaten Kendal termasuk dalam wilayah Sub DAS Bodri, Sub DAS Besar Pemali-Comal-Jratun-Seluna. Sungai-sungai yang mengalir sebagian besar hulunya masih di lingkup Kabupaten Kendal yaitu bagian tengah dan selatan. Secara umum, bagian tengah dan selatan Kabupaten Kendal merupakan daerah resapan air hujan yang diharapkan dapat mengisi akuifer yang berguna sebagai sumber air. Wilayah daerah Aliran Sungai Kabupaten Kendal itu sendiri dilalui oleh 10 sungai, antara lain kali Aji/slembang, kali waridin, kali glodog, kali blorong, kali kendal, kali buntu, kali bodri, kali blukar, kali bulanan/pening, dan kali kuto yang sebagian besar digunakan untuk sistem irigasi teknis persawahan dan perkebunan.

f. Klimatologi.

Wilayah Kabupaten Kendal bagian utara yang berdekatan dengan Laut Jawa (dataran rendah), kondisi iklim di daerah tersebut cenderung lebih panas. Sedangkan wilayah Kabupaten Kendal bagian selatan (dataran tinggi), kondisi iklim didaerah tersebut cenderung lebih sejuk.

Berdasarkan data Kabupaten Kendal Dalam Angka 2025, suhu rata-rata di Kabupaten Kendal tahun 2024 sebesar 28,89 °C, dengan rata-rata kelembaban sebesar 75,00%. Rata-rata curah hujan di Kabupaten Kendal pada tahun 2023 sebesar 183 mm/bulan dan rata-rata hari hujan sebanyak 10 hari.

2.1.1.2. Demografi.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal Tahun 2025, jumlah penduduk Kabupaten Kendal tahun 2024 tercatat sebanyak 1.064.812 jiwa yang terdiri atas 563.543 (50,39%) laki-laki dan 528.269 (49,61%) perempuan. Penduduk terbesar ada di Kecamatan Boja dengan jumlah penduduk 87.806 (8,24%). Sedangkan Kecamatan Plantungan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit, yaitu sebesar 34.049 jiwa (3,19%).

Tabel 2.1

Jumlah Penduduk Kabupaten Kendal per Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Kendal Tahun 2023

| NO | KECAMATAN         | JUMLAH PENDUDUK |        |        | %    | Sex ratio (%) |
|----|-------------------|-----------------|--------|--------|------|---------------|
|    |                   | L               | P      | JUMLAH |      |               |
| 1  | PLANTUNGAN        | 17.523          | 16.526 | 34.049 | 3,20 | 106,03        |
| 2  | SUKOREJO          | 31.402          | 30.115 | 61.517 | 5,78 | 104,27        |
| 3  | PAGERUYUNG        | 19.117          | 18.187 | 37.304 | 3,50 | 105,11        |
| 4  | PATEAN            | 27.348          | 26.735 | 54.083 | 5,08 | 102,29        |
| 5  | SINGOROJO         | 27.722          | 27.504 | 55.226 | 5,19 | 100,79        |
| 6  | LIMBANGAN         | 18.289          | 18.301 | 36.590 | 3,44 | 99,93         |
| 7  | BOJA              | 43.661          | 44.145 | 87.806 | 8,25 | 98,90         |
| 8  | KALIWUNGU         | 34.764          | 34.368 | 69.132 | 6,49 | 101,15        |
| 9  | KALIWUNGU SELATAN | 27.741          | 27.296 | 55.037 | 5,17 | 101,63        |
| 10 | BRANGSONG         | 26.744          | 26.189 | 52.933 | 4,97 | 102,12        |
| 11 | PEGANDON          | 19.927          | 19.803 | 39.730 | 3,73 | 100,63        |
| 12 | NGAMPEL           | 19.174          | 18.577 | 37.751 | 3,55 | 103,21        |
| 13 | GEMUH             | 27.934          | 27.293 | 55.227 | 5,19 | 102,35        |
| 14 | RINGINARUM        | 20.107          | 18.402 | 38.509 | 3,62 | 109,27        |
| 15 | WELERI            | 30.843          | 30.498 | 61.341 | 5,76 | 101,13        |
| 16 | ROWOSARI          | 28.361          | 28.185 | 56.546 | 5,31 | 100,62        |
| 17 | KANGKUNG          | 26.335          | 26.724 | 53.059 | 4,98 | 98,54         |

| NO | KECAMATAN | JUMLAH PENDUDUK |         |           | %      | Sex ratio (%) |
|----|-----------|-----------------|---------|-----------|--------|---------------|
|    |           | L               | P       | JUMLAH    |        |               |
| 18 | CEPIRING  | 27.270          | 27.587  | 54.857    | 5,15   | 98,85         |
| 19 | PATEBON   | 31.376          | 30.752  | 62.128    | 5,83   | 102,03        |
| 20 | KENDAL    | 30.905          | 31.082  | 61.987    | 5,82   | 99,43         |
|    |           | 536.543         | 528.269 | 1.064.812 | 100,00 | 101,57        |

(Sumber : Kabupaten Kendal Dalam Angka 2025)

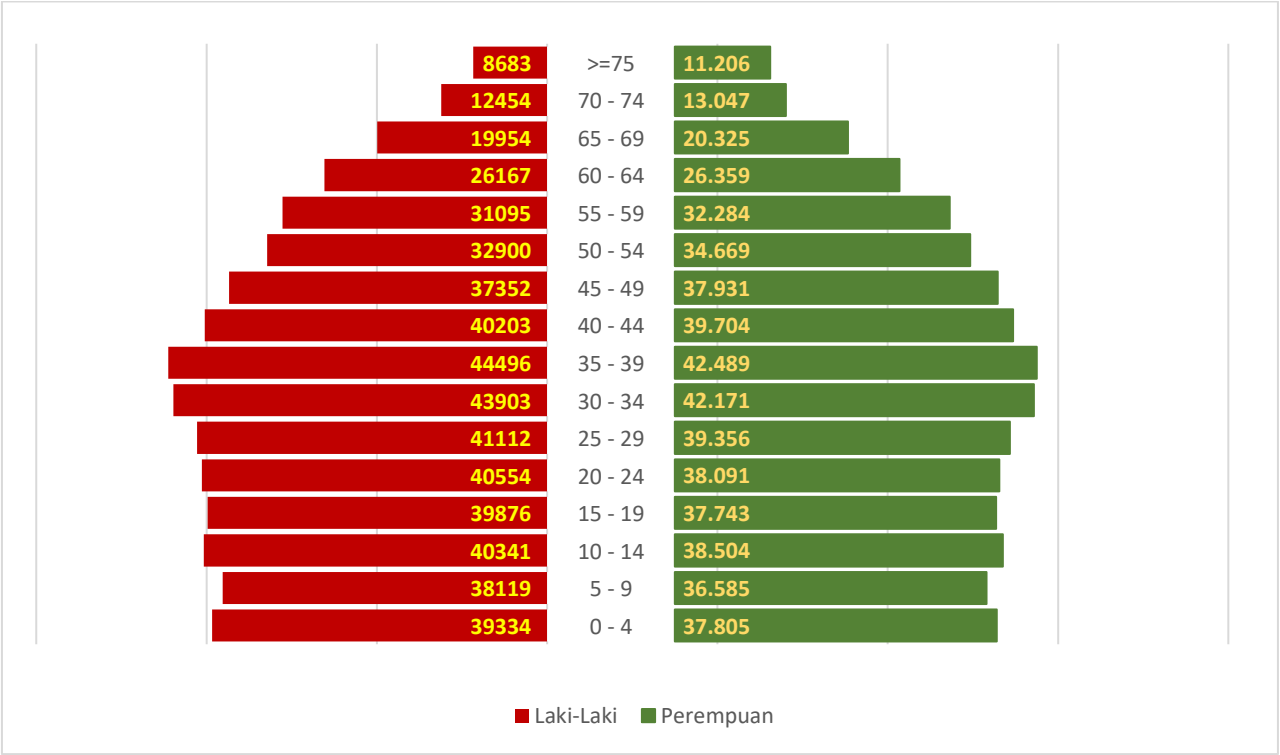
Berdasarkan data jumlah penduduk sesuai kelompok umur, jumlah penduduk tertinggi berada pada rentang usia 35 – 39 tahun yaitu sebanyak 86.985 penduduk. Selanjutnya, rentang usia terbanyak adalah kelompok umur yang 30 – 34 tahun sebanyak 86.074 penduduk. Rentang usia terbanyak selanjutnya adalah kelompok umur 25 – 29 tahun sebanyak 80.468 penduduk. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa rentang usia dengan jumlah penduduk terbanyak berada pada rentang usia produktif yaitu usia 15 – 64 tahun. Jumlah penduduk pada usia produktif sebesar 742.820 penduduk atau sebesar 70,55% jumlah penduduk di Kabupaten Kendal. Hal ini menjadikan Kabupaten Kendal mengalami bonus demografi, sehingga dapat dimanfaatkan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan sebaran penduduk berdasarkan kelompok umur, jumlah penduduk Kabupaten Kendal Tahun 2023 jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 Tahun) sejumlah 742.820 Jiwa (70,55%) dan jumlah penduduk usia tidak produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun keatas) sejumlah 310.010 jiwa (29,45%). Sehingga dengan membandingkan antara jumlah penduduk tidak produktif dengan penduduk produktif dikalikan 100, maka diketahui Rasio Beban Ketergantungan (*dependency ratio*) Kabupaten Kendal Tahun 2023 adalah sebesar 41,73% yang artinya setiap 10.000 penduduk produktif menanggung sebanyak 4.173 penduduk yang tidak produktif. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini.

Tabel 2.2  
Data Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di  
Kabupaten Kendal Tahun 2024

| Kelompok Umur | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---------------|-----------|-----------|--------|
| 0 - 4         | 39.334    | 37.805    | 77.139 |
| 5 - 9         | 38.119    | 36.585    | 74.704 |
| 10 - 14       | 40.341    | 38.504    | 78.845 |
| 15 - 19       | 39.876    | 37.743    | 77.619 |
| 20 - 24       | 40.554    | 38.091    | 78.645 |
| 25 - 29       | 41.112    | 39.356    | 80.468 |

| Kelompok Umur | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah    |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 30 - 34       | 43.903    | 42.171    | 86.074    |
| 35 - 39       | 44.496    | 42.489    | 86.985    |
| 40 - 44       | 40.203    | 39.704    | 79.907    |
| 45 - 49       | 37.352    | 37.931    | 75.283    |
| 50 - 54       | 32.900    | 34.669    | 67.569    |
| 55 - 59       | 31.095    | 32.284    | 63.379    |
| 60 - 64       | 26.167    | 26.359    | 52.526    |
| 65 - 69       | 19.954    | 20.325    | 40.279    |
| 70 - 74       | 12.454    | 13.047    | 25.501    |
| >=75          | 8.683     | 11.206    | 19.889    |
| Jumlah        | 536.543   | 528.269   | 1.064.812 |

(Sumber : BPS Kabupaten Kendal, Kabupaten Kendal Dalam Angka 2025)



Gambar 2.2.  
Grafik Penduduk Kabupaten Kendal Menurut Usia  
(Sumber: Kabupaten Kendal Dalam Angka 2025)

Persebaran penduduk yang tidak merata mengakibatkan beberapa kecamatan mengalami kepadatan penduduk yang cukup tinggi seperti Kecamatan Kendal dan Weleri. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal Tahun 2024, kepadatan penduduk Kabupaten Kendal mencapai 1.050/km<sup>2</sup> yang mana kedua kecamatan tersebut kepadatan penduduk mencapai 2.235 dan 2.013 jiwa setiap kilometer persegi, sedangkan di Kecamatan Singorojo dan Limbangan kepadatan penduduknya hanya 458 dan 504 setiap kilometer persegi.

Tabel 2.3

Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kendal Tahun 2024

| NO | KECAMATAN         | Luas Wilayah (km <sup>2</sup> ) | Jumlah penduduk | Kepadatan penduduk per km <sup>2</sup> |
|----|-------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| 1  | PLANTUNGAN        | 48,82                           | 34.049          | 697                                    |
| 2  | SUKOREJO          | 76,01                           | 61.517          | 809                                    |
| 3  | PAGERUYUNG        | 51,43                           | 37.304          | 725                                    |
| 4  | PATEAN            | 92,94                           | 54.083          | 582                                    |
| 5  | SINGOROJO         | 119,32                          | 55.226          | 463                                    |
| 6  | LIMBANGAN         | 71,72                           | 36.590          | 510                                    |
| 7  | BOJA              | 64,09                           | 87.806          | 1.370                                  |
| 8  | KALIWUNGU         | 47,73                           | 69.132          | 1.448                                  |
| 9  | KALIWUNGU SELATAN | 65,19                           | 55.037          | 844                                    |
| 10 | BRANGSONG         | 34,54                           | 52.933          | 1.533                                  |
| 11 | PEGANDON          | 31,12                           | 39.730          | 1.277                                  |
| 12 | NGAMPEL           | 33,88                           | 37.751          | 1.114                                  |
| 13 | GEMUH             | 38,17                           | 55.227          | 1.447                                  |
| 14 | RINGINARUM        | 23,50                           | 38.509          | 1.639                                  |
| 15 | WELERI            | 30,28                           | 61.341          | 2.026                                  |
| 16 | ROWOSARI          | 32,64                           | 56.546          | 1.732                                  |
| 17 | KANGKUNG          | 38,98                           | 53.059          | 1.361                                  |
| 18 | CEPIRING          | 30,08                           | 54.857          | 1.824                                  |
| 19 | PATEBON           | 44,30                           | 62.128          | 1.402                                  |
| 20 | KENDAL            | 27,49                           | 61.987          | 2.255                                  |
|    | Jumlah            | 1.002,23                        | 1.064.812       | 1.062                                  |

(Sumber : Kabupaten Kendal Dalam Angka 2025)

Berdasarkan tingkat pendidikannya, komposisi penduduk Kabupaten Kendal usia 7 tahun keatas dengan persentase terbesar adalah tamat SD/Sederajat sebesar 28,41% atau sejumlah 282.055 orang, disusul dengan tidak/belum sekolah sebesar 24,47% atau sejumlah 242.990 orang, dan SLTA/Sederajat sebesar 17,19% atau sejumlah 170.619 orang. Sedangkan jumlah penduduk tamat Perguruan Tinggi (Diploma I sampai Strata III) sebanyak 50.771 jiwa atau sebesar 5,11%. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini.

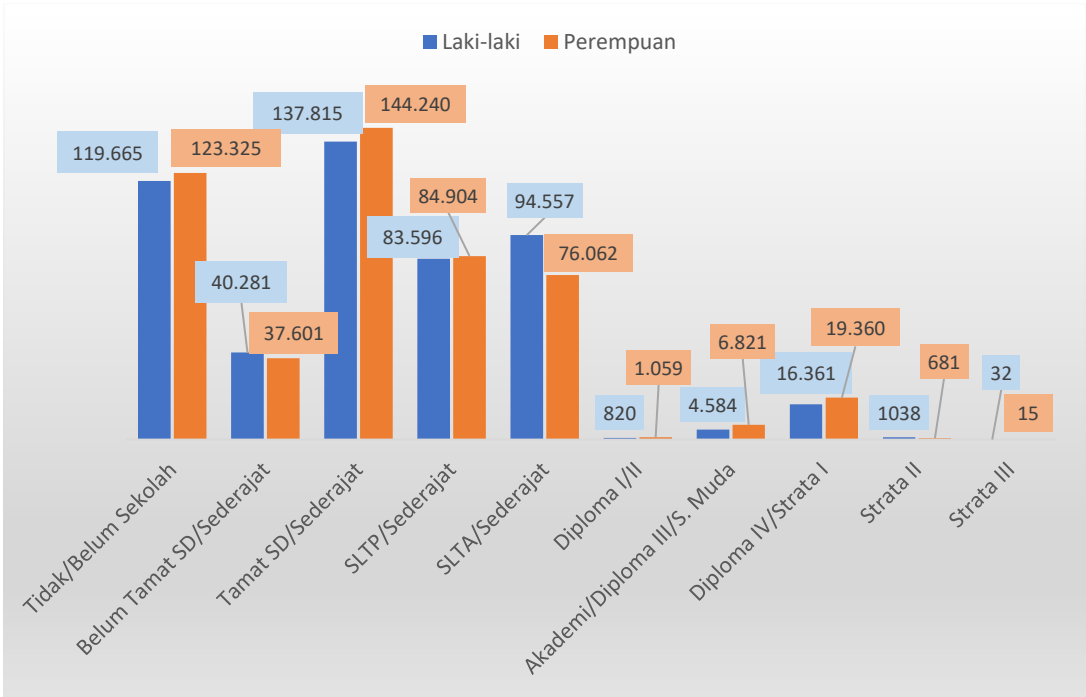
Tabel 2.4

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Pendidikan di Kabupaten Kendal Tahun 2024

| No | Pendidikan Akhir         | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah  | Prosentase |
|----|--------------------------|-----------|-----------|---------|------------|
| 1  | Tidak/Belum Sekolah      | 119.665   | 123.325   | 242.990 | 24,47      |
| 2  | Belum Tamat SD/Sederajat | 40.281    | 37.601    | 77.882  | 7,84       |
| 3  | Tamat SD/Sederajat       | 137.815   | 144.240   | 282.055 | 28,41      |

| No | Pendidikan Akhir            | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah  | Prosentase |
|----|-----------------------------|-----------|-----------|---------|------------|
| 4  | SLTP/Sederajat              | 83.596    | 84.904    | 168.500 | 16,97      |
| 5  | SLTA/Sederajat              | 94.557    | 76.062    | 170.619 | 17,19      |
| 6  | Diploma I/II                | 820       | 1.059     | 1.879   | 0,19       |
| 7  | Akademi/Diploma III/S. Muda | 4.584     | 6.821     | 11.405  | 1,15       |
| 8  | Diploma IV/Strata I         | 16.361    | 19.360    | 35.721  | 3,60       |
| 9  | Strata II                   | 1.038     | 681       | 1.719   | 0,17       |
| 10 | Strata III                  | 32        | 15        | 47      | 0,00       |
|    | JUMLAH                      | 498.749   | 494.068   | 992.817 | 100        |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, 2024 (diolah)



Gambar 2.3.

Jumlah Penduduk Usia 7 Tahun Keatas Berdasarkan Kelompok Pendidikan di Kabupaten Kendal Tahun 2024

(Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, 2024 (diolah))

2.1.1.3. Arahkan Potensi Pengembangan Wilayah

Adapun pemanfaatan dan pengembangan wilayah Kabupaten Kendal berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031, yang telah mendapatkan persetujuan substansi dari Kementerian ATR/BPN memiliki arah pengembangan sebagai berikut:

1. Rencana Struktur Ruang

a. Sistem perkotaan

Perwujudan sistem perkotaan meliputi :

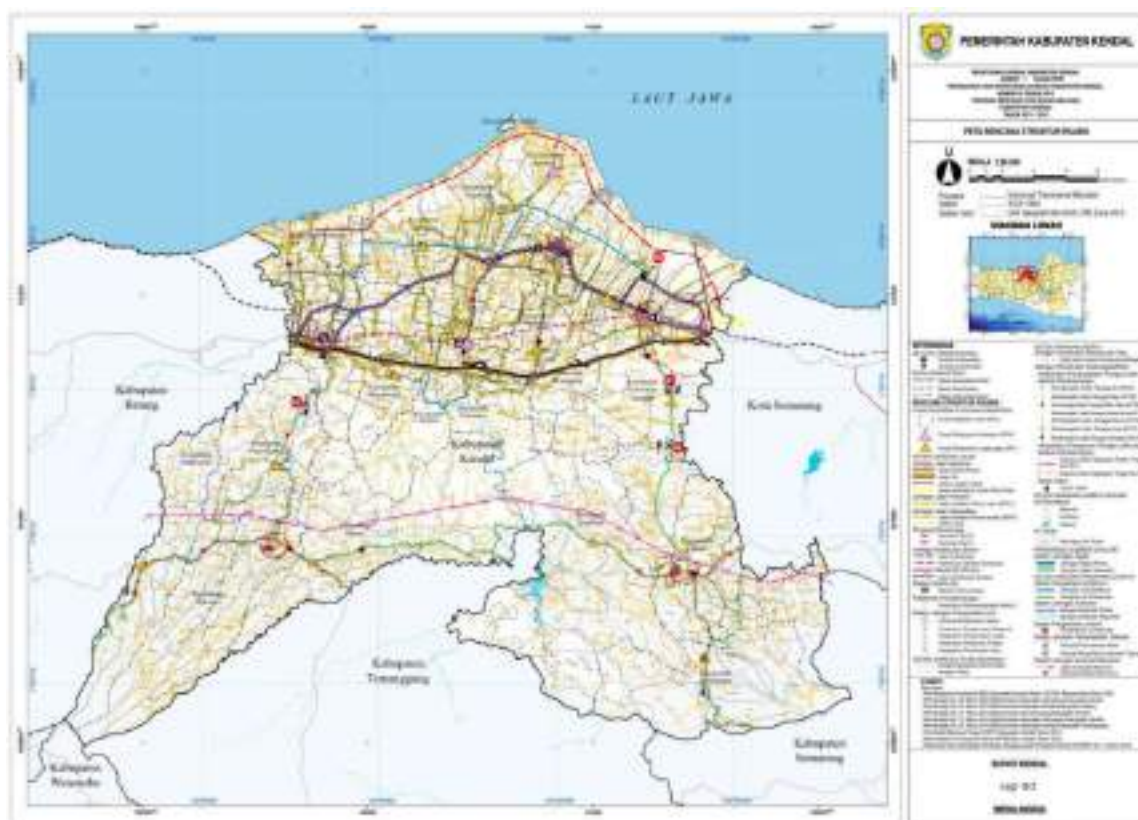
- Penetapan hirarki pusat pelayanan;

- Pengembangan sistem pusat pelayanan;
- Pengembangan sistem pusat permukiman perkotaan dan perdesaan.

b. Sistem jaringan prasarana

Perwujudan sistem jaringan prasarana meliputi :

- Perwujudan sistem jaringan transportasi;
- Perwujudan sistem jaringan energi;
- Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- Perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
- Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.



Gambar 2.4.

Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Kendal

(Sumber : Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031)

2. Rencana Pola Ruang

a. Kawasan peruntukan lindung;

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

- 1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya.

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan

bawahannya terdiri atas :

- a) Kawasan hutan lindung dengan luas kurang lebih 1.706 (seribu tujuh ratus enam) hektar meliputi :
  - (1) sebagian Kecamatan Limbangan;
  - (2) sebagian Kecamatan Boja;
  - (3) sebagian Kecamatan Plantungan; dan
  - (4) sebagian Kecamatan Sukorejo.
- b) Kawasan resapan air meliputi :
  - (1) sebagian Kecamatan Limbangan;
  - (2) sebagian Kecamatan Boja;
  - (3) sebagian Kecamatan Singorojo;
  - (4) sebagian Kecamatan Patean;
  - (5) sebagian Kecamatan Sukorejo;
  - (6) sebagian Kecamatan Plantungan; dan
  - (7) sebagian Kecamatan Pageruyung.

2) Kawasan perlindungan setempat;

Kawasan perlindungan setempat terdiri atas:

- a) Kawasan sempadan pantai dengan luas kurang lebih 183 (seratus delapan puluh tiga) hektar meliputi :
  - (1) Kecamatan Rowosari;
  - (2) Kecamatan Kangkung;
  - (3) Kecamatan Cepiring;
  - (4) Kecamatan Patebon;
  - (5) Kecamatan Kendal;
  - (6) Kecamatan Brangsong; dan
  - (7) Kecamatan Kaliwungu.
- b) Kawasan sempadan sungai dengan luas kurang lebih 835 (delapan ratus tiga puluh lima) hektar meliputi:
  - (1) Kecamatan Kendal;
  - (2) Kecamatan Weleri;
  - (3) Kecamatan Kaliwungu;
  - (4) Kecamatan Boja;
  - (5) Kecamatan Sukorejo;
  - (6) Kecamatan Pegandon;
  - (7) Kecamatan Cepiring;
  - (8) Kecamatan Patebon;
  - (9) Kecamatan Gemuh;
  - (10) Kecamatan Rowosari;

- (11) Kecamatan Kangkung;
  - (12) Kecamatan Pageruyung;
  - (13) Kecamatan Patean;
  - (14) Kecamatan Singorojo;
  - (15) Kecamatan Limbangan;
  - (16) Kecamatan Kaliwungu Selatan;
  - (17) Kecamatan Ringinarum;
  - (18) Kecamatan Ngampel;
  - (19) Kecamatan Brangsong; dan
  - (20) Kecamatan Plantungan.
- c) Kawasan sekitar danau/ waduk/ embung dengan luas kurang lebih 79 (tujuh puluh sembilan) hektar berada di Kecamatan Singorojo;
- d) Kawasan ruang terbuka hijau perkotaan termasuk di dalamnya hutan kota berfungsi untuk menjaga fungsi hidrologis, memelihara keindahan, mikrolimat, ekosistem, dan habitat fauna dengan luas kurang lebih 1.646 (seribu enam ratus empat puluh enam) hektar atau 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan perkotaan.
- e) Kawasan sempadan rel kereta api dengan luas kurang lebih 32 (tiga puluh dua) hektar meliputi:
- (1) Kecamatan Weleri;
  - (2) Kecamatan Ringinarum;
  - (3) Kecamatan Gemuh;
  - (4) Kecamatan Pegandon;
  - (5) Kecamatan Ngampel;
  - (6) Kecamatan Brangsong; dan
  - (7) Kecamatan Kaliwungu.
- 3) Kawasan konservasi;
- Kawasan konservasi berupa kawasan cagar alam Pagerwunung Darupono dengan luas kurang lebih 34 (tiga puluh empat) hektar berada di Kecamatan Kaliwungu Selatan.
- 4) Kawasan cagar budaya;
- Kawasan cagar budaya meliputi :
- a) Situs Seloarjuno berada di Kecamatan Limbangan;
  - b) Tugu Gerbang Kabupaten Lama berada di Kecamatan Kaliwungu;
  - c) Tugu Gerbang Pasarean Berada di Kecamatan Kendal; dan
  - d) Candi Gunung Gentong berada di Kecamatan Limbangan.

5) Kawasan lindung geologi;

Kawasan lindung geologi merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah meliputi:

- a) Kawasan imbuhan air berada di Cekungan Air Tanah (CAT) Kendal, Cekungan Air Tanah (CAT) Semarang – Demak, Cekungan Air Tanah (CAT) Subah dan Cekungan Air Tanah (CAT) Sumowono, yang meliputi:
  - (1) sebagian Kecamatan Weleri;
  - (2) sebagian Kecamatan Ringinarum;
  - (3) sebagian Kecamatan Gemuh;
  - (4) sebagian Kecamatan Pegandon;
  - (5) sebagian Kecamatan Kaliwungu Selatan; dan
  - (6) sebagian Kecamatan Singorojo.
- b) Kawasan sempadan mata air ditetapkan selebar 200 (dua ratus) meter di sekeliling mata air.

6) Kawasan rawan bencana;

Kawasan rawan bencana terdiri atas :

- a) kawasan rawan bencana banjir meliputi :
  - (1) sebagian Kecamatan Brangsong;
  - (2) sebagian Kecamatan Cepiring;
  - (3) sebagian Kecamatan Gemuh;
  - (4) sebagian Kecamatan Kaliwungu;
  - (5) sebagian Kecamatan Kaliwungu Selatan;
  - (6) sebagian Kecamatan Kangkung;
  - (7) sebagian Kecamatan Kendal;
  - (8) sebagian Kecamatan Ngampel;
  - (9) sebagian Kecamatan Sukorejo;
  - (10) sebagian Kecamatan Patean;
  - (11) sebagian Kecamatan Patebon;
  - (12) sebagian Kecamatan Pegandon;
  - (13) sebagian Kecamatan Ringinarum;
  - (14) sebagian Kecamatan Rowosari;
  - (15) sebagian Kecamatan Boja; dan
  - (16) sebagian Kecamatan Weleri.
- b) kawasan rawan bencana banjir bandang meliputi :
  - (1) sebagian Kecamatan Rowosari;
  - (2) sebagian Kecamatan Kangkung;
  - (3) sebagian Kecamatan Cepiring;

- (4) sebagian Kecamatan Patebon;
- (5) sebagian Kecamatan Kendal;
- (6) sebagian Kecamatan Brangsong; dan
- (7) sebagian Kecamatan Kaliwungu.

c) kawasan rawan bencana kekeringan meliputi :

- (1) Kecamatan Boja;
- (2) Kecamatan Gemuh;
- (3) Kecamatan Kaliwungu;
- (4) Kecamatan Kaliwungu Selatan;
- (5) Kecamatan Limbangan;
- (6) Kecamatan Pageruyung;
- (7) Kecamatan Patean;
- (8) Kecamatan Pegandon;
- (9) Kecamatan Plantungan;
- (10) Kecamatan Ringinarum;
- (11) Kecamatan Singorojo;
- (12) Kecamatan Sukorejo;
- (13) Kecamatan Weleri;
- (14) Kecamatan Brangsong;
- (15) Kecamatan Ngampel;
- (16) Kecamatan Rowosari;
- (17) Kecamatan Kangkung;
- (18) Kecamatan Cepiring;
- (19) Kecamatan Patebon; dan
- (20) Kecamatan Kendal.

d) kawasan rawan bencana tanah longsor meliputi :

- (1) sebagian Kecamatan Pageruyung;
- (2) sebagian Kecamatan Plantungan;
- (3) sebagian Kecamatan Gemuh;
- (4) sebagian Kecamatan Boja;
- (5) sebagian Kecamatan Singorojo;
- (6) sebagian Kecamatan Kaliwungu Selatan;
- (7) sebagian Kecamatan Kaliwungu;
- (8) sebagian Kecamatan Singorojo;
- (9) sebagian Kecamatan Limbangan;
- (10) sebagian Kecamatan Patean;
- (11) sebagian Kecamatan Sukorejo;
- (12) sebagian Kecamatan Weleri;

- (13) sebagian Kecamatan Ringinarum;
  - (14) sebagian Kecamatan Pegandon; dan
  - (15) sebagian Kecamatan Ngampel.
- e) kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi meliputi:
- (1) sebagian Kecamatan Rowosari;
  - (2) sebagian Kecamatan Kangkung;
  - (3) sebagian Kecamatan Cepiring;
  - (4) sebagian Kecamatan Patebon;
  - (5) sebagian Kecamatan Kendal;
  - (6) sebagian Kecamatan Brangsong; dan
  - (7) sebagian Kecamatan Kaliwungu.
- f) kawasan rawan bencana kebakaran hutan meliputi :
- (1) sebagian Kecamatan Limbangan;
  - (2) sebagian Kecamatan Sukorejo;
  - (3) sebagian Kecamatan Plantungan;
  - (4) sebagian Kecamatan Singorojo;
  - (5) sebagian Kecamatan Limbangan;
  - (6) sebagian Kecamatan Kaliwungu Selatan;
  - (7) sebagian Kecamatan Ringinarum;
  - (8) sebagian Kecamatan Boja;
  - (9) sebagian Kecamatan Pageruyung;
  - (10) sebagian Kecamatan Kaliwungu;
  - (11) sebagian Kecamatan Gemuh; dan
  - (12) sebagian Kecamatan Weleri.
- 7) Kawasan ekosistem mangrove.

Kawasan ekosistem mangrove berupa kawasan pantai berhutan bakau dengan luas kurang lebih 183 (seratus delapan puluh tiga) hektar meliputi:

- a) sebagian Kecamatan Rowosari;
- b) sebagian Kecamatan Kangkung;
- c) sebagian Kecamatan Cepiring.

Kawasan peruntukan industri yang berdasarkan peraturan perundang-undangan masih ditetapkan sebagai kawasan pantai berhutan bakau yang selanjutnya disebut kawasan peruntukan industri/kawasan pantai berhutan bakau ditetapkan sebagai kawasan Holding Zone.

Kawasan peruntukan industri/kawasan pantai berhutan bakau berada di Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Brangsong, Kecamatan

Kendal dan Kecamatan Patebon seluas kurang lebih 552 (lima ratus lima puluh dua) hektar.

Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan pantai berhutan bakau dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Kawasan peruntukan budi daya.

Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

1) Kawasan hutan produksi

Kawasan hutan produksi terdiri atas :

a) Kawasan hutan produksi terbatas dengan luas kurang lebih 1.193 (seribu seratus sembilan puluh tiga) hektar meliputi :

- (1) Kecamatan Limbangan;
- (2) Kecamatan Sukorejo;
- (3) Kecamatan Plantungan; dan
- (4) Kecamatan Singorojo.

b) Kawasan hutan produksi tetap dengan luas kurang lebih 15.441 (lima belas ribu empat ratus empat puluh satu) hektar meliputi:

- (1) Kecamatan Boja;
- (2) Kecamatan Brangsong;
- (3) Kecamatan Gemuh;
- (4) Kecamatan Kaliwungu;
- (5) Kecamatan Kaliwungu Selatan;
- (6) Kecamatan Limbangan;
- (7) Kecamatan Ngampel;
- (8) Kecamatan Pageruyung;
- (9) Kecamatan Patean;
- (10) Kecamatan Pegandon;
- (11) Kecamatan Plantungan;
- (12) Kecamatan Ringinarum;
- (13) Kecamatan Singorojo;
- (14) Kecamatan Sukorejo; dan
- (15) Kecamatan Weleri.

2) Kawasan hutan rakyat

Kawasan hutan berupa hutan produksi di luar kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dengan luas kurang lebih 5.284 (lima ribu dua ratus delapan puluh empat) hektar meliputi :

- a) sebagian Kecamatan Boja;
- b) sebagian Kecamatan Gemuh;
- c) sebagian Kecamatan Limbangan;
- d) sebagian Kecamatan Pageruyung;
- e) sebagian Kecamatan Patean;
- f) sebagian Kecamatan Pegandon;
- g) sebagian Kecamatan Plantungan;
- h) sebagian Kecamatan Ringinarum;
- i) sebagian Kecamatan Singorojo;
- j) sebagian Kecamatan Sukorejo; dan
- k) sebagian Kecamatan Weleri.

### 3) Kawasan pertanian

Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c terdiri atas :

- a) Kawasan tanaman pangan dengan luas kurang lebih 25.213 (dua puluh lima ribu dua ratus tiga belas) hektar meliputi:
  - (1) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas kurang lebih 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar meliputi:
    - (a) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas kurang lebih 22.666 (dua puluh dua ribu enam ratus enam puluh enam) hektar;
    - (b) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas kurang lebih 2.284 (dua ribu dua ratus delapan puluh empat) hektar; dan
    - (c) Lahan penunjang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas kurang lebih 50 (lima puluh) hektar.
  - (2) Penunjang kawasan tanaman pangan seluas kurang lebih 213 (dua ratus tiga belas) hektar.

Kawasan Tanaman Pangan meliputi:

- (1) sebagian Kecamatan Rowosari;
- (2) sebagian Kecamatan Kangkung;
- (3) sebagian Kecamatan Cepiring;
- (4) sebagian Kecamatan Patebon;
- (5) sebagian Kecamatan Kendal;
- (6) sebagian Kecamatan Brangsong;
- (7) sebagian Kecamatan Ngampel;
- (8) sebagian Kecamatan Pegandon;

- (9) sebagian Kecamatan Gemuh;
  - (10) sebagian Kecamatan Weleri;
  - (11) sebagian Kecamatan Ringinarum;
  - (12) sebagian Kecamatan Sukorejo;
  - (13) sebagian Kecamatan Limbangan;
  - (14) sebagian Kecamatan Singorojo;
  - (15) sebagian Kecamatan Boja;
  - (16) sebagian Kecamatan Patean;
  - (17) sebagian Kecamatan Plantungan;
  - (18) sebagian kecamatan Kaliwungu Selatan; dan
  - (19) sebagian kecamatan Pageruyung.
- b) Kawasan hortikultura dengan luas kurang lebih 16.303 (enam belas ribu tiga ratus tiga) hektar meliputi:
- (1) sebagian Kecamatan Rowosari;
  - (2) sebagian Kecamatan Kangkung;
  - (3) sebagian Kecamatan Cepiring;
  - (4) sebagian Kecamatan Patebon;
  - (5) sebagian Kecamatan Kaliwungu;
  - (6) sebagian Kecamatan Brangsong;
  - (7) sebagian Kecamatan Ngampel;
  - (8) sebagian Kecamatan Pegandon;
  - (9) sebagian Kecamatan Gemuh;
  - (10) sebagian Kecamatan Weleri;
  - (11) sebagian Kecamatan Ringinarum;
  - (12) sebagian Kecamatan Sukorejo;
  - (13) sebagian Kecamatan Limbangan;
  - (14) sebagian Kecamatan Singorojo;
  - (15) sebagian Kecamatan Boja;
  - (16) sebagian Kecamatan Patean;
  - (17) sebagian Kecamatan Plantungan;
  - (18) sebagian Kecamatan Kaliwungu Selatan; dan
  - (19) sebagian Kecamatan Pageruyung.
- c) Kawasan perkebunan dengan luas kurang lebih 13.844 (tiga belas ribu delapan ratus empat puluh empat) hektar meliputi:
- (1) sebagian Kecamatan Limbangan;
  - (2) sebagian Kecamatan Boja;
  - (3) sebagian Kecamatan Singorojo;
  - (4) sebagian Kecamatan Patean;

- (5) sebagian Kecamatan Pageruyung;
  - (6) sebagian Kecamatan Plantungan;
  - (7) sebagian Kecamatan Sukorejo;
  - (8) sebagian Kecamatan Kaliwungu;
  - (9) sebagian Kecamatan Weleri;
  - (10) sebagian Kecamatan Gemuh;
  - (11) sebagian Kecamatan Pegandon; dan
  - (12) sebagian Kecamatan Ringinarum.
- d) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d terdiri atas:
- (1) Sapi, kerbau dan kuda meliputi:
    - (a) Kecamatan Sukorejo;
    - (b) Kecamatan Pageruyung;
    - (c) Kecamatan Plantungan;
    - (d) Kecamatan Patean;
    - (e) Kecamatan Singorojo;
    - (f) Kecamatan Limbangan;
    - (g) Kecamatan Boja;
    - (h) Kecamatan Kaliwungu Selatan;
    - (i) Kecamatan Kaliwungu;
    - (j) Kecamatan Gemuh;
    - (k) Kecamatan Pegandon; dan
    - (l) Kecamatan Patebon;
  - (2) Kambing, domba, itik, merpati dan ayam buras tersebar di seluruh kecamatan.
  - (3) Kelinci meliputi:
    - (a) Kecamatan Cepiring;
    - (b) Kecamatan Plantungan;
    - (c) Kecamatan Limbangan;
    - (d) Kecamatan Gemuh;
    - (e) Kecamatan Boja;
    - (f) Kecamatan Pageruyung;
    - (g) Kecamatan Pegandon;
    - (h) Kecamatan Kaliwungu;
    - (i) Kecamatan Kaliwungu Selatan; dan
    - (j) Kecamatan Patean.
  - (4) Ayam ras meliputi:
    - (a) Kecamatan Pageruyung;

- (b) Kecamatan Plantungan;
- (c) Kecamatan Sukorejo;
- (d) Kecamatan Patean;
- (e) Kecamatan Singorojo;
- (f) Kecamatan Kaliwungu Selatan;
- (g) Kecamatan Limbangan;
- (h) Kecamatan Boja;
- (i) Kecamatan Pegandon; dan
- (j) Kecamatan Gemuh.

4) Kawasan perikanan;

Kawasan perikanan terdiri dari:

- a) Kawasan pengembangan perikanan tangkap terdiri dari :
  - (1) perikanan tangkap di laut yang memanfaatkan potensi perairan pantai utara; dan
  - (2) perikanan tangkap di perairan umum yang memanfaatkan potensi waduk, rawa, sungai, dan embung.
- b) Kawasan pengembangan perikanan budidaya seluas kurang lebih 355 (tiga ratus lima puluh lima) hektar terdiri dari:
  - (1) Kawasan pengembangan perikanan budidaya air tawar tersebar di seluruh kecamatan;
  - (2) Kawasan pengembangan perikanan budidaya air payau, sepanjang pesisir utara meliputi:
    - (a) Kecamatan Cepiring;
    - (b) Kecamatan Kangkung; dan
    - (c) Kecamatan Rowosari.

5) Kawasan pertambangan dan energi;

Kawasan pertambangan dan energi terdiri atas :

- a) Kawasan pertambangan mineral terdiri atas:
  - (1) Kawasan pertambangan mineral bukan logam meliputi:
    - (a) Kecamatan Pegandon;
    - (b) Kecamatan Weleri;
    - (c) Kecamatan Pageruyung;
    - (d) Kecamatan Patean;
    - (e) Kecamatan Sukorejo;
    - (f) Kecamatan Singorojo; dan
    - (g) sepanjang Sungai Bodri.
  - (2) Kawasan pertambangan, meliputi:
    - (a) Kecamatan Kaliwungu Selatan;

- (b) Kecamatan Kaliwungu;
  - (c) Kecamatan Brangsong;
  - (d) Kecamatan Ngampel;
  - (e) Kecamatan Pegandon;
  - (f) Kecamatan Weleri;
  - (g) Kecamatan Pageruyung; dan
  - (h) sepanjang Sungai Bodri.
- b) Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi berskala kecil berada di Kecamatan Gemuh.
- c) Kawasan panas bumi berada di Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Gunung Ungaran dan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Dieng.
- 6) Kawasan peruntukan industri;
- Kawasan peruntukan industri terdiri atas:
- a) Kawasan peruntukan industri seluas kurang lebih 5.109 (lima ribu seratus sembilan) hektar berada di:
    - (1) sebagian Kecamatan Kaliwungu;
    - (2) sebagian Kecamatan Brangsong;
    - (3) sebagian Kecamatan Kendal; dan
    - (4) sebagian Kecamatan Patebon.
  - b) Sentra industri kecil dan menengah berada di seluruh kecamatan.
- 7) Kawasan pariwisata;
- Pengembangan kawasan pariwisata terdiri atas:
- a) Kawasan pariwisata budaya meliputi:
    - (1) Makam Pangeran Juminah dan Makam Sunan Katong berada di Kaliwungu Selatan;
    - (2) Makam Nyai Dapu dan Makam Sunan Bromo berada di Kecamatan Boja;
    - (3) Situs Batu Seloarjuno dan Kampung Jawa Sekatul berada di Kecamatan Limbangan;
    - (4) Goa Maria berada di Kecamatan Weleri;
    - (5) Pengembangan potensi wisata di seluruh kecamatan.
  - b) Kawasan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    - (1) Pantai Sendangkulon, Pantai Jungsemi, dan Pantai Tanjungmojo berada di Kecamatan Kangkung;
    - (2) Pantai Sendangsikucing berada di Kecamatan Rowosari;
    - (3) Wana Wisata berada di Kecamatan Ringinarum;

- (4) Curug Semawur, Tuk Air Hangat Tirtomoyo, dan Agrowisata Ngebruk berada di Kecamatan Patean;
- (5) Goa Kiskendo dan Bendung Singorojo berada di Kecamatan Singorojo;
- (6) Air Panas Gonoharjo, Goa Jepang, dan Air Terjun Panglebur Gongso berada di Kecamatan Limbangan;
- (7) Pantai Muara Kencan di Kecamatan Patebon;
- (8) Pengembangan potensi wisata di seluruh kecamatan.

c) Kawasan pariwisata buatan meliputi:

- (1) Plantera berada di Kecamatan Patean;
- (2) Agrowisata Ngadiwarno berada di Kecamatan Sukorejo;
- (3) Wisata Kuliner Pemancingan berada di Kecamatan Weleri;
- (4) Pantai Cahaya/Atraksi Lumba-lumba berada di Kecamatan Rowosari;
- (5) Agrowisata Darupono, Agrowisata Kedungsuran, dan Agrowisata Jerukgiling berada di Kecamatan Kaliwungu Selatan;
- (6) Kampung Jawa Sekatul berada di Kecamatan Limbangan;
- (7) Pengembangan potensi wisata di seluruh kecamatan.

8) Kawasan permukiman;

Kawasan permukiman meliputi :

a) Kawasan permukiman perkotaan dengan luas kurang lebih 5.485 (lima ribu empat ratus delapan puluh lima) hektar meliputi:

- (1) Kecamatan Boja;
- (2) Kecamatan Brangsong;
- (3) Kecamatan Cepiring;
- (4) Kecamatan Gemuh;
- (5) Kecamatan Kaliwungu;
- (6) Kecamatan Kaliwungu Selatan;
- (7) Kecamatan Kangkung;
- (8) Kecamatan Limbangan;
- (9) Kecamatan Ngampel;
- (10) Kecamatan Pageruyung;
- (11) Kecamatan Patean;
- (12) Kecamatan Patebon;
- (13) Kecamatan Pegandon;
- (14) Kecamatan Plantungan;
- (15) Kecamatan Ringinarum;

- (16) Kecamatan Rowosari;
- (17) Kecamatan Singorojo;
- (18) Kecamatan Sukorejo;
- (19) Kecamatan Weleri; dan
- (20) Kecamatan Kendal.

- b) Kawasan permukiman perdesaan dengan luas kurang lebih 12.817 (dua belas ribu delapan ratus tujuh belas) hektar berada di seluruh kecamatan.

Fokus pengembangan kawasan permukiman berada pada Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Brangsong, Kecamatan Kendal, Kecamatan Patebon, Kecamatan Pegandon, dan Kecamatan Kaliwungu Selatan.

#### 9) Kawasan pertahanan dan keamanan

Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi :

- a) Komando Distrik Militer (Kodim) 0715 yang berada di Kelurahan Pekauman Kecamatan Kendal;
- b) POSAL Kendal yang berada di Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari; dan
- c) Kepolisian Resor (Polres) Kendal yang berada di Kelurahan Karangsari Kecamatan Kendal.

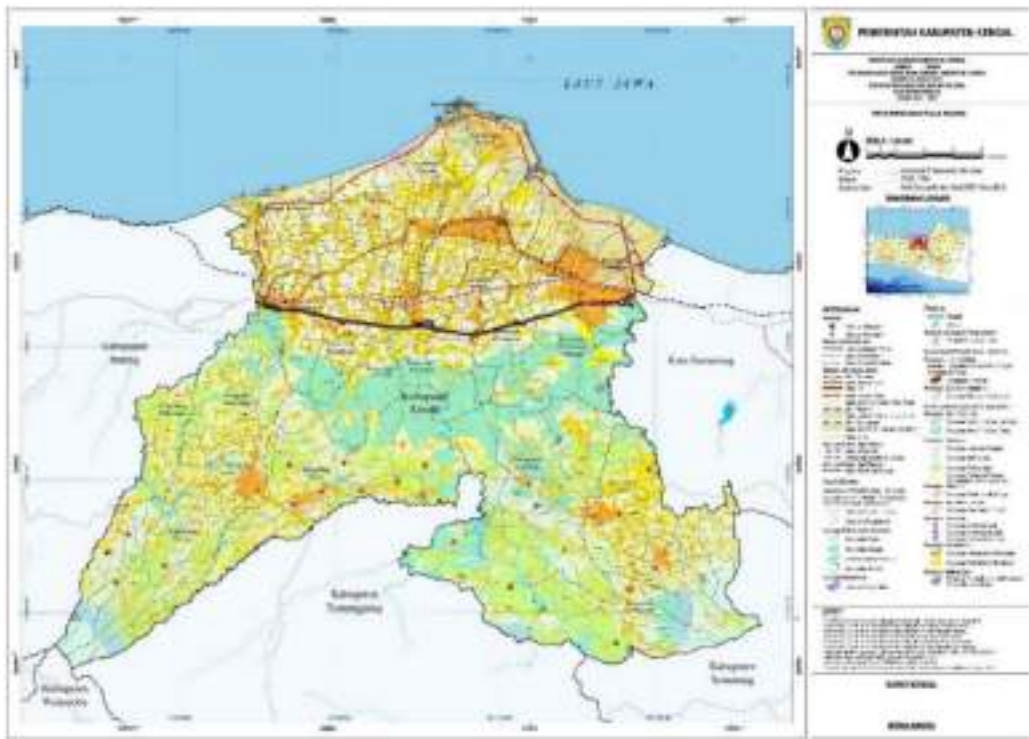
#### c. Kawasan Strategis

- 1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dengan luas kurang lebih 123 (seratus dua puluh tiga) hektar berada di kawasan panas bumi Gunung Ungaran.
- 2) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berada di Kecamatan Kaliwungu dengan luas kurang lebih 5.109 (Lima ribu seratus sembilan) hektar, meliputi:
  - a) Kecamatan Kaliwungu;
  - b) Kecamatan Brangsong;
  - c) Kecamatan Kendal; dan
  - d) Kecamatan Patebon.
- 3) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dengan luas kurang lebih 46.289 (Empat puluh enam ribu dua ratus delapan puluh sembilan) hektar, meliputi:

- a) sebagian Kecamatan Limbangan;

- b) sebagian Kecamatan Boja;
- c) sebagian Kecamatan Sukorejo;
- d) sebagian Kecamatan Patean; dan
- e) sebagian Kecamatan Plantungan.



Gambar 2.5.

Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Kendal

(Sumber : Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031)

3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

a. Daya Dukung Air

Status daya dukung dan daya tampung (DDDT) penyedia air Kabupaten Kendal dihitung untuk mengetahui lahan yang kebutuhan Jasa lingkungannya melebihi ketersediaannya. Status tersebut diketahui dari nilai negatif (-) yang berarti daya dukung terlampaui, dan nilai positif (+) yang artinya daya dukung belum terlampaui. Identifikasi status daya dukung air tiap grid dapat dilakukan dengan mencari selisih ketersediaan dan kebutuhan tiap grid. Perhitungan ketersediaan air sangat dipengaruhi oleh ketersediaan air permukaan yang berada pada wilayah aliran sungai (WAS), sedangkan untuk kebutuhan air sangat dipengaruhi oleh kebutuhan domestik dan juga pertanian sebagai dasar untuk perhitungan kebutuhan air sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kepublik Indonesia No.

SK.146/MENLHK/SETJEN/Kum.1/2/2023    Tentang    Penetapan    Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional.

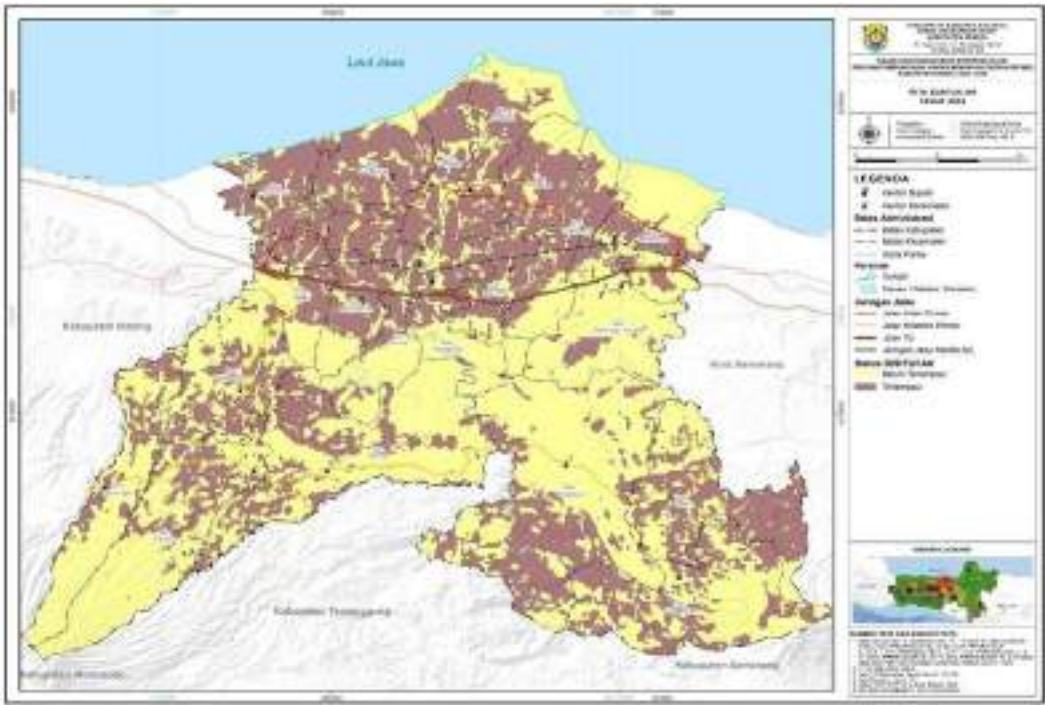
Kondisi daya dukung air di Kabupaten Kendal secara keseluruhan dalam kondisi defisit sebesar -53.445.040,14 m<sup>3</sup>/tahun dengan total ketersediaan airnya sebesar 852.893.355,67 m<sup>3</sup>/tahun sementara kebutuhan air mencapai 906.338.395,81 m<sup>3</sup>/tahun. Kondisi defisit ini menandakan bahwa kebutuhan air di Kabupaten Kendal lebih besar dari ketersediaan air yang ada. Dari 20 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kendal, 13 Kecamatan memiliki status DDDT air defisit atau sudah terlampaui, sedangkan 7 Kecamatan lainnya masih dalam status surplus atau belum terlampaui. Rincian perhitungan daya dukung dan daya tampung air perkecamatan di Kabupaten Kendal dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5  
Status Daya Dukung Air per Kecamatan Kabupaten Kendal

| No          | Nama Kecamatan    | Ketersediaan Air (m <sup>3</sup> /tahun) | Kebutuhan Air (m <sup>3</sup> /tahun) | Selisih (m <sup>3</sup> /tahun) | Daya Dukung Air | Belum Terlampaui (%) | Terlampaui (%) |
|-------------|-------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| 1.          | Boja              | 50.579.996,84                            | 69.587.520,87                         | -19.007.524,04                  | Defisit         | 41,77%               | 58,23%         |
| 2.          | Brangsong         | 32.522.288,08                            | 39.408.613,10                         | -6.886.325,02                   | Defisit         | 51,90%               | 48,10%         |
| 3.          | Cepiring          | 25.200.880,85                            | 39.672.177,07                         | -14.471.296,23                  | Defisit         | 29,07%               | 70,93%         |
| 4.          | Gemuh             | 41.136.290,57                            | 47.437.035,69                         | -6.300.745,12                   | Defisit         | 50,64%               | 49,36%         |
| 5.          | Kaliwungu         | 34.328.503,78                            | 25.681.688,19                         | 8.646.815,58                    | Surplus         | 70,44%               | 29,56%         |
| 6.          | Kaliwungu Selatan | 39.641.816,14                            | 21.506.149,98                         | 18.135.666,16                   | Surplus         | 84,50%               | 15,50%         |
| 7.          | Kangkung          | 33.296.323,97                            | 56.341.169,64                         | -23.044.845,68                  | Defisit         | 20,99%               | 79,01%         |
| 8.          | Kendal            | 23.831.012,81                            | 34.561.427,23                         | -10.730.414,42                  | Defisit         | 34,28%               | 65,72%         |
| 9.          | Limbangan         | 64.760.479,78                            | 56.178.821,18                         | 8.581.658,60                    | Surplus         | 55,18%               | 44,82%         |
| 10.         | Ngampel           | 22.329.652,84                            | 34.977.077,11                         | -12.647.424,27                  | Defisit         | 36,51%               | 63,49%         |
| 11.         | Pageruyung        | 45.931.953,66                            | 49.105.246,74                         | -3.173.293,08                   | Defisit         | 57,42%               | 42,58%         |
| 12.         | Patean            | 87.155.271,28                            | 74.120.184,47                         | 13.035.086,81                   | Surplus         | 67,51%               | 32,49%         |
| 13.         | Patebon           | 39.582.438,27                            | 49.869.024,88                         | -10.286.586,61                  | Defisit         | 44,75%               | 55,25%         |
| 14.         | Pegandon          | 21.808.641,34                            | 23.302.846,76                         | -1.494.205,42                   | Defisit         | 58,47%               | 41,53%         |
| 15.         | Plantungan        | 47.414.360,05                            | 40.185.395,34                         | 7.228.964,71                    | Surplus         | 72,67%               | 27,33%         |
| 16.         | Ringinarum        | 21.911.134,69                            | 30.998.780,97                         | -9.087.646,27                   | Defisit         | 37,50%               | 62,50%         |
| 17.         | Rowosari          | 27.599.605,71                            | 47.967.077,53                         | -20.367.471,83                  | Defisit         | 17,88%               | 82,12%         |
| 18.         | Singorojo         | 109.596.581,22                           | 81.520.787,58                         | 28.075.793,64                   | Surplus         | 67,65%               | 32,35%         |
| 19.         | Sukorejo          | 60.251.842,47                            | 52.691.865,29                         | 7.559.977,18                    | Surplus         | 73,99%               | 26,01%         |
| 20.         | Weleri            | 24.014.281,33                            | 31.225.506,17                         | -7.211.224,84                   | Defisit         | 44,90%               | 55,10%         |
| KAB. KENDAL |                   | 852.893.355,67                           | 906.338.395,81                        | -53.445.040,14                  | Defisit         | 56,30%               | 43,70%         |

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kendal 2025-2029

Berdasarkan tabel diatas, Kecamatan Kangkung menjadi wilayah dengan status defisit dimana nilai selisih antara ketersediaan dan kebutuhan air tertinggi di Kabupaten Kendal yaitu sebesar -23.044.845,68 m<sup>3</sup>/tahun dan juga Kecamatan Roworsari dengan selisih antara ketersediaan air permukaan dan kebutuhan air sebesar -20.367.471,83 m<sup>3</sup>/tahun. Selain itu, wilayah dengan status surplus terbesar di Kabupaten Kendal adalah Kecamatan Singorojo dengan ketersediaan air mencapai 109.596.581,22 m<sup>3</sup>/tahun sedangkan kebutuhan air untuk keperluan domestik dan pertanian hanya sebesar 81.520.787,58 m<sup>3</sup>/tahun sehingga surplus air di Kecamatan Singorojo mencapai 28.075.793,64 m<sup>3</sup>/tahun. Secara spasial, status daya dukung dan daya tampung air di Kabupaten Kendal dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2.6.

Peta Status Daya Dukung Air Kabupaten Kendal  
(Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kendal 2025-2029)

b. Daya Dukung Pangan

Status daya dukung dan daya tampung (DDDT) penyedia pangan Kabupaten Kendal dihitung untuk mengetahui lahan yang kebutuhan Jasa lingkungannya melebihi ketersediaannya. Perhitungan DDDT Pangan di Kabupaten Kendal mempertimbangkan jenis pangan beras sebagai perhitungan dikarenakan beras menjadi sumber kalori pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat di Kabupaten Kendal. Identifikasi status daya dukung air tiap grid dapat dilakukan dengan mencari selisih ketersediaan dan kebutuhan tiap grid. Perhitungan Status tersebut diketahui dari nilai negatif (-) yang berarti daya dukung terlampaui, dan

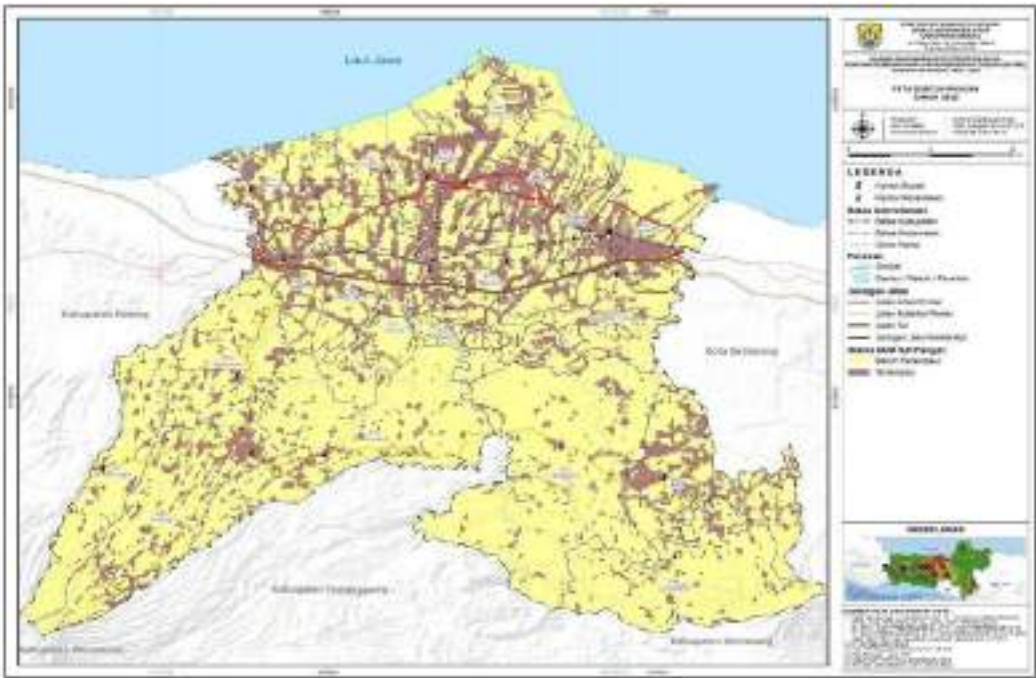
nilai positif (+) yang artinya daya dukung belum terlampaui. Secara lengkap hasil perhitungan daya dukung dan daya tampung pangan di Kabupaten Kendal dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6  
Perhitungan Daya Dukung Pangan per Kecamatan di Kabupaten Kendal

| No          | Nama Kecamatan    | Ketersediaan Pangan (Ton) | Kebutuhan Pangan (Ton) | Selisih (Ton) | Daya Dukung Pangan | Belum Terlampaui (%) | Terlampaui (%) |
|-------------|-------------------|---------------------------|------------------------|---------------|--------------------|----------------------|----------------|
| 1.          | Boja              | 6.390,80                  | 6.261,74               | 129,05        | Surplus            | 63,97%               | 36,03%         |
| 2.          | Brangsong         | 4.074,36                  | 3.955,03               | 119,33        | Surplus            | 63,57%               | 36,43%         |
| 3.          | Cepiring          | 3.051,07                  | 4.116,84               | -1.065,77     | Defisit            | 52,10%               | 47,90%         |
| 4.          | Gemuh             | 4.714,66                  | 4.092,26               | 622,40        | Surplus            | 71,53%               | 28,47%         |
| 5.          | Kaliwungu         | 4.879,90                  | 4.976,63               | -96,73        | Defisit            | 64,00%               | 36,00%         |
| 6.          | Kaliwungu Selatan | 4.140,89                  | 3.905,34               | 235,54        | Surplus            | 68,03%               | 31,97%         |
| 7.          | Kangkung          | 4.179,69                  | 3.953,90               | 225,79        | Surplus            | 67,33%               | 32,67%         |
| 8.          | Kendal            | 3.017,79                  | 4.580,85               | -1.563,07     | Defisit            | 46,86%               | 53,14%         |
| 9.          | Limbangan         | 6.831,23                  | 2.754,66               | 4.076,56      | Surplus            | 89,21%               | 10,79%         |
| 10.         | Ngampel           | 2.765,81                  | 2.827,20               | -61,39        | Defisit            | 65,38%               | 34,62%         |
| 11.         | Pageruyung        | 5.047,37                  | 2.826,37               | 2.221,00      | Surplus            | 83,67%               | 16,33%         |
| 12.         | Patean            | 9.325,65                  | 4.126,87               | 5.198,78      | Surplus            | 88,35%               | 11,65%         |
| 13.         | Patebon           | 4.918,78                  | 4.712,12               | 206,66        | Surplus            | 61,94%               | 38,06%         |
| 14.         | Pegandon          | 2.494,07                  | 3.003,86               | -509,79       | Defisit            | 59,97%               | 40,03%         |
| 15.         | Plantungan        | 5.169,82                  | 2.534,12               | 2.635,70      | Surplus            | 88,49%               | 11,51%         |
| 16.         | Ringinarum        | 2.651,73                  | 2.932,16               | -280,43       | Defisit            | 64,54%               | 35,46%         |
| 17.         | Rowosari          | 3.484,19                  | 4.204,00               | -719,82       | Defisit            | 56,91%               | 43,09%         |
| 18.         | Singorojo         | 11.311,13                 | 4.153,03               | 7.158,09      | Surplus            | 92,40%               | 7,60%          |
| 19.         | Sukorejo          | 6.366,74                  | 4.738,59               | 1.628,15      | Surplus            | 73,62%               | 26,38%         |
| 20.         | Weleri            | 2.813,33                  | 4.770,78               | -1.957,45     | Defisit            | 49,03%               | 50,97%         |
| KAB. KENDAL |                   | 97.629,00                 | 79.426,36              | 18.202,64     | Surplus            | 74,42%               | 25,58%         |

(Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029)

Berdasarkan hasil perhitungan DDDT pangan di Kabupaten Kendal pada tabel diatas, secara keseluruhan status daya dukung dan daya tampung pangan di Kabupaten Kendal masih berada pada status belum terlampaui atau surplus sebesar 18.202,64 ton/tahun. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa ketersediaan pangan di Kabupaten Kendal pada tahun 2022 masih dapat mencukupi kebutuhan pangan penduduk, dimana ketersediaan pangan besar sebesar 97.629,00 ton/tahun sedangkan untuk kebutuhannya hanya 79.426,36 ton/tahun. Dari 20 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kendal, 8 Kecamatan (Cepiring, Kaliwungu, Kendal, Ngampel, Pegandon, Ringinarum, Rowosari dan Weleri) menjadi wilayah dengan status DDDT Pangan berstatus defisit atau terlampaui, sedangkan untuk 13 Kecamatan lainnya masih memiliki status DDDT Pangan belum terlampaui/surplus. Secara spasial DDDT Pangan di Kabupaten Kendal dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2.7.

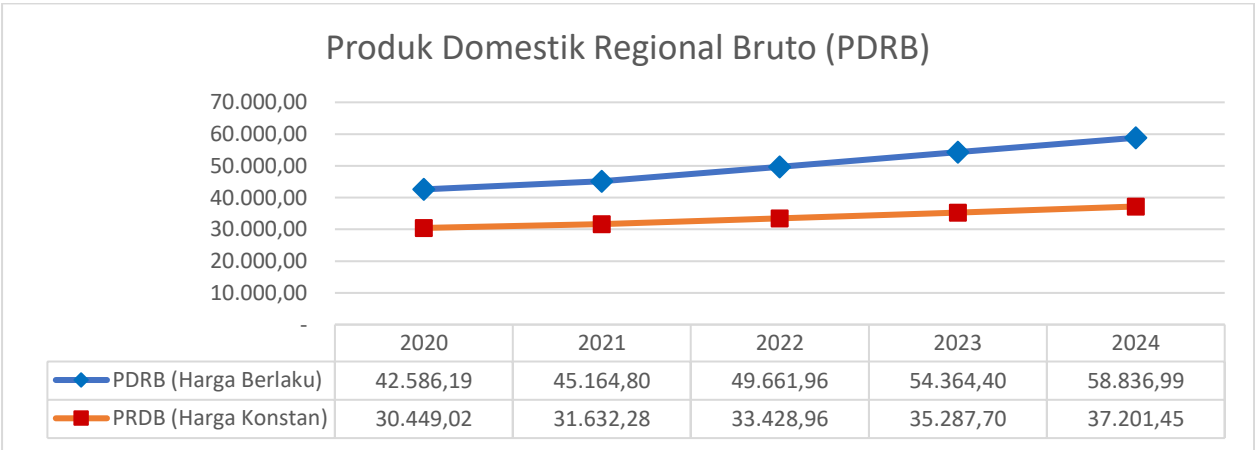
Peta Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Kendal  
(Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kendal 2025-2029)

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kabupaten Kendal menunjukkan peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2023 PDRB ADHB sebesar Rp. 54.364,96 Triliyun, kemudian meningkat menjadi Rp. 58.836,99 Triliyun pada tahun 2024. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) juga mengalami peningkatan, tahun 2023 sebesar Rp. 35.287,70 Triliyun menjadi Rp. 37.201,45 Triliyun pada tahun 2024. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

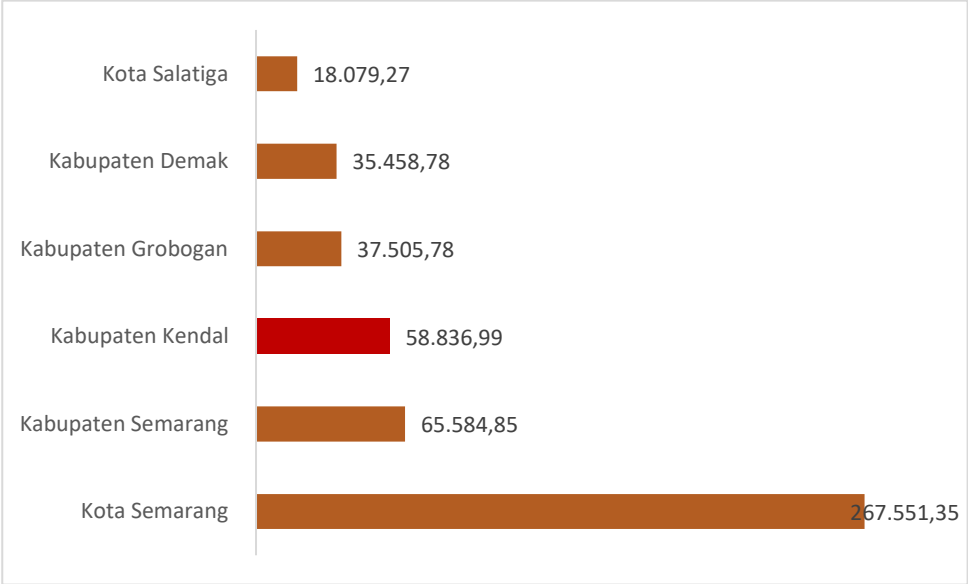


Gambar 2.8.

Perkembangan PDRB ADHB Kabupaten Kendal Tahun 2020 – 2024  
(miliar rupiah)

(Sumber : Kabupaten Kendal Dalam Angka Tahun 2025)

PDRB ADHB Kabupaten Kendal menempati peringkat ketiga di antara wilayah Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Semarang, Salatiga, dan Purwodadi) dengan nilai sebesar Rp58.836,99 miliar pada tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun memiliki potensi besar di sektor industri, pertanian, dan pariwisata, kontribusi ekonomi Kabupaten Kendal masih tertinggal dibandingkan dengan daerah lain di kawasan Kedungsepur. Data selengkapnya disajikan dalam gambar berikut:



Gambar 2.9.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)  
Wilayah Kedungsepur Tahun 2024  
(Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2025)

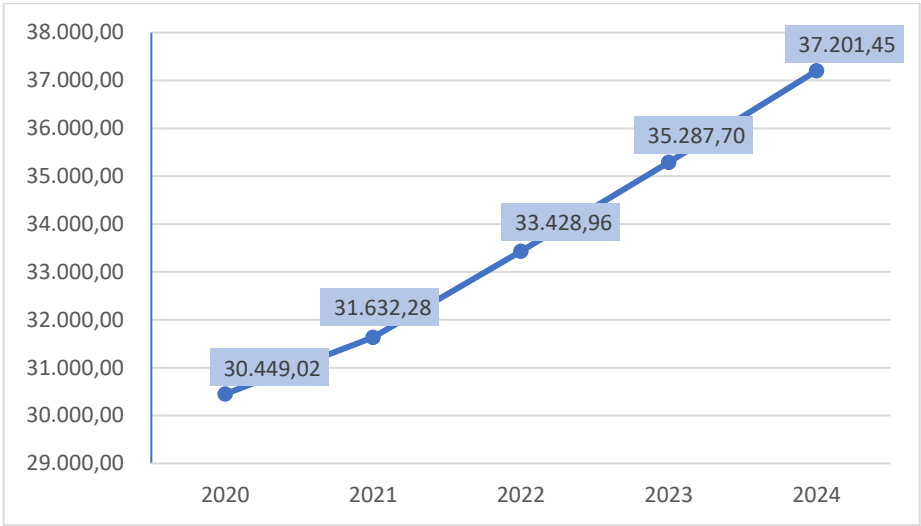
Perekonomian Kabupaten Kendal pada tahun 2024 tercatat mengalami pertumbuhan positif, yaitu sebesar 5,42%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yaitu sebesar 11,55%. Secara struktur, Lapangan Usaha Industri Pengolahan masih mendominasi struktur ekonomi Kabupaten Kendal pada tahun 2024 dengan kontribusi sebesar 41,70%, sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) dengan kontribusi sebesar 58,05%. Lebih lengkapnya distribusi masing-masing sektor dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.7  
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kendal  
Tahun 2020-2024 (%)

| NO. | LAPANGAN USAHA                      | 2020  | 2021  | 2022  | 2023* | 2024** |
|-----|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 1.  | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 19,24 | 19,06 | 18,57 | 18,33 | 18,07  |
| 2.  | Pertambangan dan Penggalian         | 1,39  | 1,36  | 1,22  | 1,18  | 1,17   |
| 3.  | Industri Pengolahan                 | 42,29 | 42,27 | 41,94 | 41,73 | 41,70  |



Sementara itu Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Kendal dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu pada tahun 2019 sebesar Rp. 30.916,38 miliar terus meningkat hingga tahun 2023 menjadi sebesar Rp. 35.286,23 miliar. Capaian PDRB ADHK Tahun 2023 belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 35.330 miliar. Perkembangan PDRB ADHK dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.11.

Perkembangan PDRB ADHK Tahun Dasar 2010 Kabupaten Kendal  
Tahun 2020 – 2024 (miliar rupiah)  
(Sumber : Kabupaten Kendal Dalam Angka Tahun 2025)

Berdasarkan PDRB harga konstan kenaikan terjadi hampir disemua sektor perekonomian. Kenaikan tertinggi terjadi pada sektor Industri Pengolahan yaitu senilai Rp. 605,48 M. Pada tahun 2023, sektor ini mencapai Rp. 13.876,24 M dan meningkat menjadi Rp. 14.481,72 M pada tahun 2024.

Tabel 2.8

Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha  
Kabupaten Kendal Tahun 2020 – 2024 (Miliar Rupiah)

| NO. | LAPANGAN USAHA                                                    | 2020      | 2021      | 2022      | 2023*     | 2024**    |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1.  | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                               | 5.985,39  | 6.148,39  | 6.299,25  | 6.481,95  | 6.668,79  |
| 2.  | Pertambangan dan Penggalian                                       | 313,61    | 324,33    | 307,34    | 316,55    | 338,88    |
| 3.  | Industri Pengolahan                                               | 12.342,13 | 12.744,04 | 13.291,30 | 13.876,24 | 14.481,72 |
| 4.  | Pengadaan Listrik, Gas                                            | 64,62     | 68,37     | 72,62     | 77,85     | 82,56     |
| 5.  | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang         | 24,88     | 26,10     | 26,37     | 28,40     | 29,06     |
| 6.  | Konstruksi                                                        | 1.997,25  | 2.171,81  | 2.246,56  | 2.361,11  | 2.589,86  |
| 7.  | Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 3.608,77  | 3.829,74  | 4.043,78  | 4.311,05  | 4.565,31  |

| NO. | LAPANGAN USAHA                                                 | 2020             | 2021             | 2022             | 2023*            | 2024**           |
|-----|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 8.  | Transportasi dan Pergudangan                                   | 472,82           | 487,53           | 891,69           | 971,84           | 1.026,56         |
| 9.  | Penyedia Akomodasi dan Makan Minum                             | 1.059,59         | 1.125,18         | 1.335,76         | 1.541,54         | 1.719,61         |
| 10. | Informasi dan Komunikasi                                       | 1.679,23         | 1.783,34         | 1.846,83         | 2.057,02         | 2.237,36         |
| 11. | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 550,13           | 564,15           | 576,91           | 593,69           | 605,23           |
| 12. | Real Estate                                                    | 302,93           | 309,48           | 330,19           | 360,17           | 382,66           |
| 13. | Jasa Perusahaan                                                | 88,34            | 91,00            | 97,63            | 106,04           | 116,23           |
| 14. | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 559,20           | 555,96           | 572,05           | 600,58           | 636,52           |
| 15. | Jasa Pendidikan                                                | 760,63           | 761,22           | 786,08           | 841,83           | 913,71           |
| 16. | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 226,85           | 227,25           | 235,86           | 253,85           | 274,27           |
| 17. | Jasa Lainnya                                                   | 412,21           | 414,40           | 468,73           | 507,99           | 533,12           |
|     | <b>PDRB ADHK</b>                                               | <b>30.449,02</b> | <b>31.632,28</b> | <b>33.428,96</b> | <b>35.287,70</b> | <b>37.201,45</b> |

(Sumber : Kabupaten Kendal Dalam Angka Tahun 2025)

Keterangan: \*Angka sementara, \*\*Angka sangat sementara

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal tercatat melambat pada tahun 2024. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal sebesar 5,56%, sedangkan pada tahun 2024 melambat menjadi 5,42%. **Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal pada tahun 2024 ini telah melampaui target yang ditetapkan, yaitu sebesar 5,38% – 5,70%.** Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, **capaian pertumbuhan Kabupaten Kendal berada di atas keduanya.** Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah tercatat sebesar 4,95% dan Nasional tercatat sebesar 5,03%. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.12.

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (%)  
(Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2025)

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal dapat disetarakan dengan 11 wilayah lain di Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten batang, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang dan Kota Pekalongan. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di wilayah setara tersebut adalah 5,49%. Kabupaten Kendal masuk dalam wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang termasuk tinggi di Provinsi Jawa Tengah, namun Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal belum lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi di wilayah setara tersebut. Untuk lebih lengkapnya, pertumbuhan ekonomi di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.9  
Pembagian Wilayah Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah  
Tahun 2024

| No | Wilayah I |             | Wilayah II |              | Wilayah III |                 |
|----|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|-----------------|
|    | PE        | Kab/Kota    | PE         | Kab/Kota     | PE          | Kab/Kota        |
| 1  | 2,65      | Cilacap     | 5,11       | Banjarnegara | 5,29        | Banyumas        |
| 2  | 4,55      | Purbalingga | 5,06       | Magelang     | 5,30        | Kebumen         |
| 3  | 4,79      | Purworejo   | 5,11       | Klaten       | 5,54        | Karanganyar     |
| 4  | 4,57      | Wonosobo    | 5,08       | Rembang      | 5,39        | Sragen          |
| 5  | 4,64      | Boyolali    | 5,13       | Pati         | 5,41        | Grobogan        |
| 6  | 4,97      | Sukoharjo   | 5,06       | Demak        | 5,42        | Kendal          |
| 7  | 4,93      | Wonogiri    | 5,04       | Temanggung   | 6,03        | Batang          |
| 8  | 3,06      | Blora       | 5,02       | Pekalongan   | 5,56        | Kota Magelang   |
| 9  | 2,78      | Kudus       | 5,11       | Pemalang     | 5,61        | Kota Surakarta  |
| 10 | 4,22      | Jepara      | 5,07       | Tegal        | 5,37        | Kota Salatiga   |
| 11 | 4,73      | Semarang    | 5,02       | Brebes       | 5,62        | Kota Semarang   |
| 12 |           |             | 5,22       | Kota Tegal   | 5,34        | Kota Pekalongan |



Gambar 2.13.  
Grafik Sebaran Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah  
Tahun 2024

Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah adalah sebesar 4,937%, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten kendal dengan wilayah setara dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.14.  
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal dibandingkan dengan wilayah setara

Pertumbuhan ekonomi berkorelasi dengan penurunan tingkat kemiskinan. Perbandingan antara pertumbuhan ekonomi dengan perubahan tingkat kemiskinan dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.10  
Tabel Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dan Perubahan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, Nasional dan Wilayah yang Setara

| KABUPATEN/KOTA | PERTUMBUHAN EKONOMI | PERUBAHAN TINGKAT KEMISKINAN |
|----------------|---------------------|------------------------------|
| Nasional       | 5,03                | -0,1                         |
| Jawa Tengah    | 4,98                | -0,3                         |
| Banyumas       | 5,29                | -0,58                        |
| Kebumen        | 5,30                | -0,63                        |
| Karanganyar    | 5,54                | -0,18                        |
| Sragen         | 5,39                | -0,46                        |
| Grobogan       | 5,41                | -0,29                        |
| Kendal         | 5,42                | -0,04                        |
| Batang         | 6,03                | -0,19                        |
| Kota Magelang  | 5,56                | -0,17                        |

| KABUPATEN/KOTA  | PERTUMBUHAN EKONOMI | PERUBAHAN TINGKAT KEMISKINAN |
|-----------------|---------------------|------------------------------|
| Kota Surakarta  | 5,61                | -0,13                        |
| Kota Salatiga   | 5,37                | -0,09                        |
| Kota Semarang   | 5,62                | -0,20                        |
| Kota Pekalongan | 5,34                | -0,10                        |

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal lebih baik jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, namun untuk perubahan tingkat kemiskinan, Kabupaten Kendal tercatat sebesar -0,04%, belum lebih baik jika dibandingkan perubahan tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah yang tercatat sebesar -0,3 maupun Nasional yang tercatat sebesar -0,1. Perbandingan pertumbuhan ekonomi dengan perubahan tingkat kemiskinan secara lebih lengkap dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.15.

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dengan Perubahan Tingkat Kemiskinan Kabupaten kendal dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, Nasional dan Wilayah yang Setara

Selain berkorelasi dengan penurunan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi juga berkorelasi dengan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Semakin berkurang pengangguran terbuka, maka pendapatan masyarakat meningkat, yang akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Perbandingan pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Kendal dengan Provinsi Jawa Tengah, Nasional dan wilayah setara dapat dilihat pda tabel berikut.

Tabel 2.11

Tabel Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dan Perubahan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, Nasional dan Wilayah yang Setara

| KABUPATEN/KOTA  | PERTUMBUHAN EKONOMI | PERUBAHAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) |
|-----------------|---------------------|----------------------------------------------|
| Nasional        | 5,03                | -0,41                                        |
| Jawa Tengah     | 4,98                | -0,35                                        |
| Banyumas        | 5,29                | -0,17                                        |
| Kebumen         | 5,30                | -0,04                                        |
| Karanganyar     | 5,54                | -0,88                                        |
| Sragen          | 5,39                | -0,34                                        |
| Grobogan        | 5,41                | -0,79                                        |
| Kendal          | 5,42                | -0,75                                        |
| Batang          | 6,03                | -0,39                                        |
| Kota Magelang   | 5,56                | -0,85                                        |
| Kota Surakarta  | 5,61                | 0,03                                         |
| Kota Salatiga   | 5,37                | -0,71                                        |
| Kota Semarang   | 5,62                | -0,17                                        |
| Kota Pekalongan | 5,34                | -0,11                                        |

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi pada wilayah setara adalah sebesar 5,49% dengan rata-rata perubahan TPT sebesar -0,43%. Penurunan TPT Kabupaten Kendal sebesar -0,75% **lebih baik** jika dibandingkan dengan Nasional yang sebesar 0,41% maupun Provinsi Jawa Tengah yang turun sebesar -0,35%. Selengkapnya, perbandingan pertumbuhan ekonomi dengan perubahan TPT dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.16.

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dengan Perubahan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten kendal dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, Nasional dan Wilayah yang Setara

Selain berkorelasi dengan tingkat kemiskinan dan TPT, pertumbuhan ekonomi juga berkorelasi dengan Rasio Gini. Rasio gini merupakan gambaran ketimpangan wilayah antara salah satu daerah dengan daerah lain. Perbandingan pertumbuhan ekonomi dengan perubahan rasio gini Kabupaten Kendal dengan wilayah setara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.12  
Tabel Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dan Perubahan Rasio Gini Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, Nasional dan Wilayah yang Setara

| KABUPATEN/KOTA  | PERTUMBUHAN EKONOMI | PERUBAHAN RASIO GINI |
|-----------------|---------------------|----------------------|
| Nasional        | 5,03                | -0,007               |
| Jawa Tengah     | 4,98                | -0,002               |
| Banyumas        | 5,29                | -0,012               |
| Kebumen         | 5,30                | -0,006               |
| Karanganyar     | 5,54                | -0,037               |
| Sragen          | 5,39                | -0,027               |
| Grobogan        | 5,41                | 0,012                |
| Kendal          | 5,42                | -0,024               |
| Batang          | 6,03                | -0,021               |
| Kota Magelang   | 5,56                | 0,043                |
| Kota Surakarta  | 5,61                | -0,003               |
| Kota Salatiga   | 5,37                | -0,015               |
| Kota Semarang   | 5,62                | 0,020                |
| Kota Pekalongan | 5,34                | 0,009                |

Berdasarkan data di atas, rata-rata perubahan rasio gini wilayah setara adalah sebesar -0,005. Nilai perubahan rasio gini Kabupaten Kendal tercatat sebesar -0,024, yang berarti capaian tersebut **lebih baik** jika dibandingkan dengan perubahan rasio gini Provinsi Jawa Tengah, Nasional maupun wilayah setara. Perbandingan pertumbuhan ekonomi dengan perubahan rasio gini di wilayah setara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.17.

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dengan Rasio Gini Kabupaten kendal dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, Nasional dan Wilayah yang Setara

b. PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto per kapita merupakan Produk Domestik Regional Bruto dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku mencerminkan nilai PDRB dan per (orang) penduduk. PDRB per Kapita atas dasar harga Konstan dapat mencerminkan pertumbuhan nyata pendapatan per kapita penduduk di wilayah bersangkutan.

Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum bisa ditunjukkan oleh meningkatnya tingkat pendapatan perkapita suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan per kapita menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Sebaliknya penurunan pada tingkat pendapatan per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin menurun. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor dan transfer yang mengalir ke luar (*transfer out*) sama dengan yang masuk (*transfer in*), maka pendapatan per kapita dapat ditunjukkan melalui tingkat PDRB per kapita.

Di Kabupaten Kendal, PDRB per kapita ADHB menunjukkan tren peningkatan dari 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, PDRB per kapita ADHB tercatat sebesar Rp41,90 juta, kemudian meningkat menjadi Rp43,90 juta pada 2021. Tren kenaikan berlanjut pada 2022, dengan PDRB per kapita mencapai Rp47,70 juta, lalu meningkat lagi pada 2023 menjadi Rp51,60 juta dan meningkat pada tahun dengan nilai Rp55,26 juta. **Capaian PDRB per kapita ADHB Kabupaten Kendal tahun 2024 melampaui target yang**

**ditetapkan yaitu sebesar Rp. 54,21 juta.** Secara umum, peningkatan PDRB per kapita ADHB ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang stabil serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kendal dalam periode 2020–2024. Berikut disajikan data PDRB per kapita Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024:



Gambar 2.18.

PDRB per Kapita Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020 – 2024 (juta)  
(Sumber: BPS Kabupaten Kendal Tahun 2024)

Dari sisi PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), PDRB per Kapita ADHK Kabupaten Kendal mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2020 sampai 2024. Pada tahun 2024, PDRB per Kapita ADHK Kabupaten Kendal tercatat sebesar Rp. 34,937 juta, meningkat dari tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp. 29,367 juta. **Capaian PDRB per Kapita ADHK tahun 2024 ini melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 34,79 juta.** Dengan peningkatan ini, maka tingkat kesejahteraan masyarakat terlihat semakin meningkat dalam kurun waktu tersebut. Jika dibandingkan dengan PDRB per Kapita ADHK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp. 30,535 juta, capaian Kabupaten Kendal lebih tinggi, namun belum mampu melampaui capaian PDRB per Kapita ADHK Nasional yang tercatat sebesar Rp. 45,881 juta.

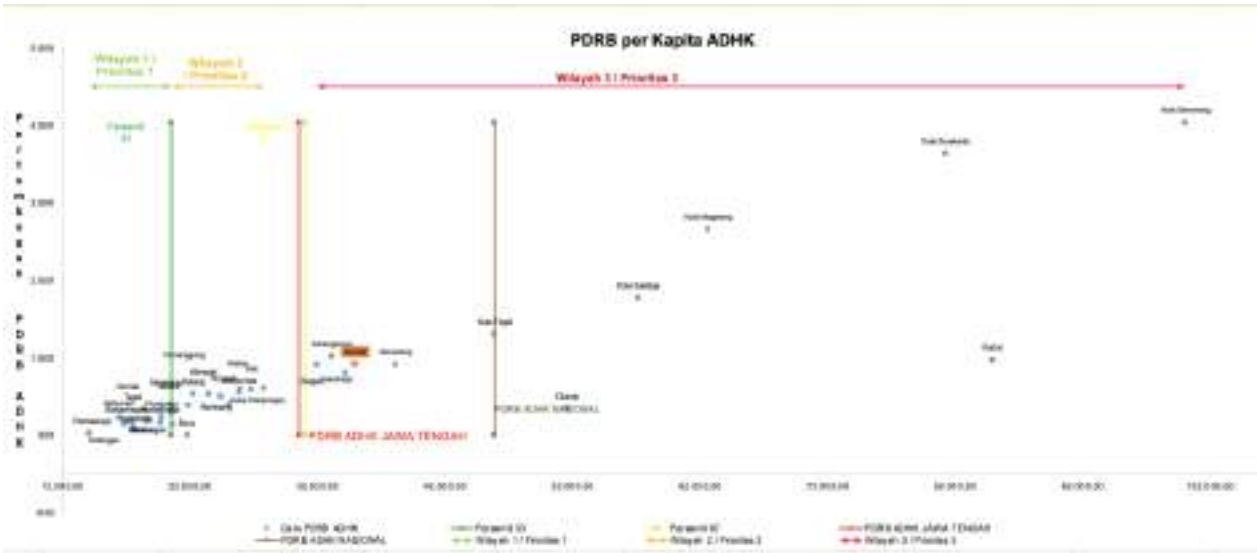


Gambar 2.19.  
PDRB Per Kapita ADHK Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020 – 2024 (ribu rupiah)

PDRB per Kapita ADHK Kabupaten Kendal tercatat setara dengan Kabupaten Cilacap, Sukoharjo, Karanganyar, Sragen, Kudus, Semarang, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang dan Kota Tegal yang berada pada wilayah dengan PDRB per kapita ADHK tinggi. Sebaran PDRB per Kapita ADHK Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 2.13  
Tabel Wilayah Setara PDRB per Kapita ADHK di Provinsi Jawa Tengah (ribu rupiah)

| No | Wilayah I |              | Wilayah II |                 | Wilayah III |                |
|----|-----------|--------------|------------|-----------------|-------------|----------------|
|    | PE        | Kab/Kota     | PE         | Kab/Kota        | PE          | Kab/Kota       |
| 1  | 19.682,00 | Purbalingga  | 25.876,00  | Banyumas        | 51.564,00   | Cilacap        |
| 2  | 17.069,00 | Banjarnegara | 25.054,00  | Boyolali        | 34.182,00   | Sukoharjo      |
| 3  | 16.849,00 | Kebumen      | 25.966,00  | Klaten          | 33.146,00   | Karanganyar    |
| 4  | 19.805,00 | Purworejo    | 23.459,00  | Wonogiri        | 31.932,00   | Sragen         |
| 5  | 17.501,00 | Wonosobo     | 21.780,00  | Blora           | 84.919,00   | Kudus          |
| 6  | 20.529,00 | Magelang     | 24.425,00  | Rembang         | 38.109,00   | Semarang       |
| 7  | 15.661,00 | Grobogan     | 26.831,00  | Pati            | 34.937,00   | Kendal         |
| 8  | 17.474,00 | Demak        | 20.669,00  | Jepara          | 62.638,00   | Kota Magelang  |
| 9  | 18.923,00 | Pekalongan   | 21.912,00  | Temanggung      | 81.238,00   | Kota Surakarta |
| 10 | 14.126,00 | Pemalang     | 22.302,00  | Batang          | 57.162,00   | Kota Salatiga  |
| 11 | 17.581,00 | Tegal        | 27.807,00  | Kota Pekalongan | 100.038,00  | Kota Semarang  |
| 12 | 18.662,00 | Brebes       |            |                 | 45.898,00   | Kota Tegal     |



Gambar 2.20.  
Grafik Sebaran PDRB per Kapita ADHK Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

PDRB per kapita ADHK Kabupaten Kendal setara dengan wilayah yang tergolong tinggi, dengan rata-rata capaian wilayah setara sebesar Rp. 54,646 juta, yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian Kabupaten Kendal.



Gambar 2.21.  
PDRB Per Kapita ADHK Kabupaten Kendal dengan Kabupaten/kota Wilayah Setara, Rata-rata Capaian Wilayah Setara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024

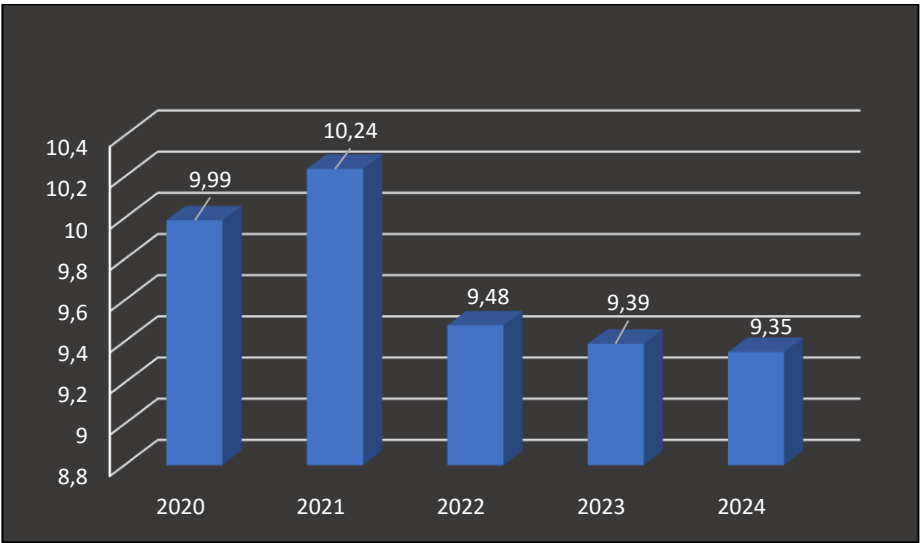
Dilihat dari sisi pertumbuhannya, PDRB per Kapita ADHK Kabupaten Kendal tumbuh sebesar Rp. 1,41 juta. Pertumbuhan ini tercatat lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah yang sebesar Rp. 1,165 juta, tetapi belum dapat lebih baik jika dibandingkan dengan Nasional yang tercatat sebesar Rp. 1,74 juta dan Rata-rata Pertumbuhan Wilayah Setara yang sebesar Rp. 2,10 juta.



Gambar 2.22.  
Perbandingan Pertumbuhan DPRB per Kapita ADHK Kabupaten Kendal dengan Wilayah setara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2024

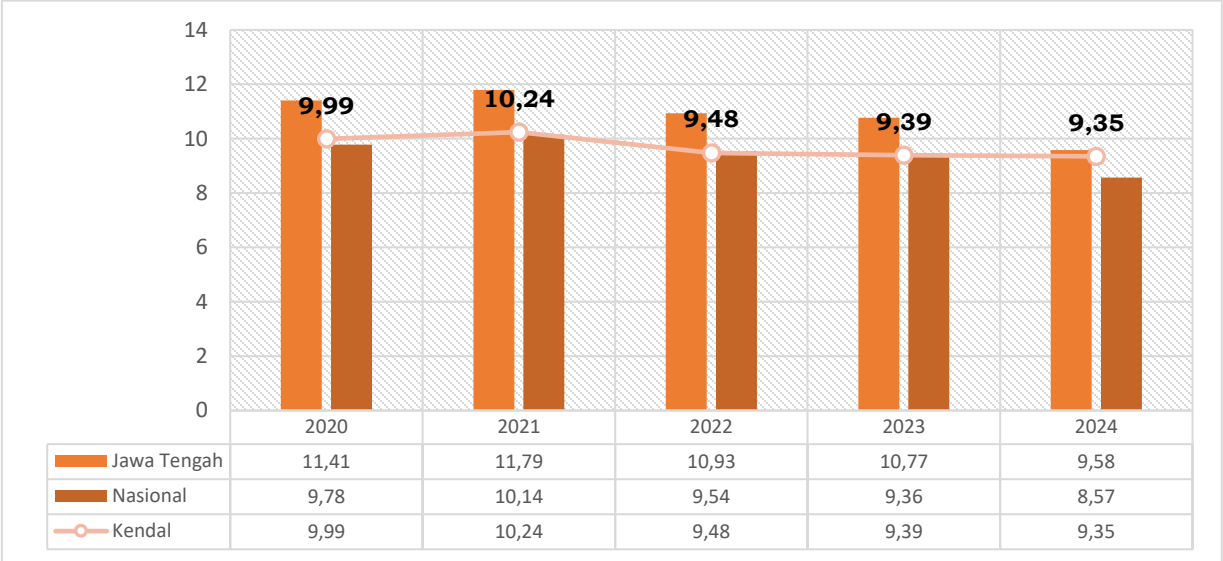
c. Penduduk Miskin

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kendal mengalami penurunan dari 9,48% pada tahun 2022 menjadi 9,39% pada tahun 2023. Sesuai rilis BPS Kabupaten Kendal bulan September 2024, tingkat kemiskinan menurun 0,04% pada tahun 2024, menjadi 9,35% (92,7 ribu jiwa). Upaya-upaya untuk menanggulangi kemiskinan dengan beberapa program dan kegiatan dilakukan dengan baik dan tepat sasaran. Untuk menekan tingkat kemiskinan lebih lanjut, diperlukan kebijakan yang mendorong penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta penguatan program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Tingkat perkembangan penurunan kemiskinan di Kabupaten Kendal pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2.23.  
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kendal Tahun 2020 – 2024  
(Sumber : Rilis BPS bulan September 2024)

Pada tahun 2024, persentase penduduk miskin (tingkat kemiskinan) Kabupaten Kendal sebesar 9,35%, sehingga telah **mencapai target** tingkat kemiskinan yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu sebesar 9,39 – 9,19%. Tingkat kemiskinan Kabupaten Kendal tahun 2024 juga **lebih baik** jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 9,58% namun masih dibawah Nasional sebesar 8,57%. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2.24.

Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020 – 2024 (%)  
(Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024)

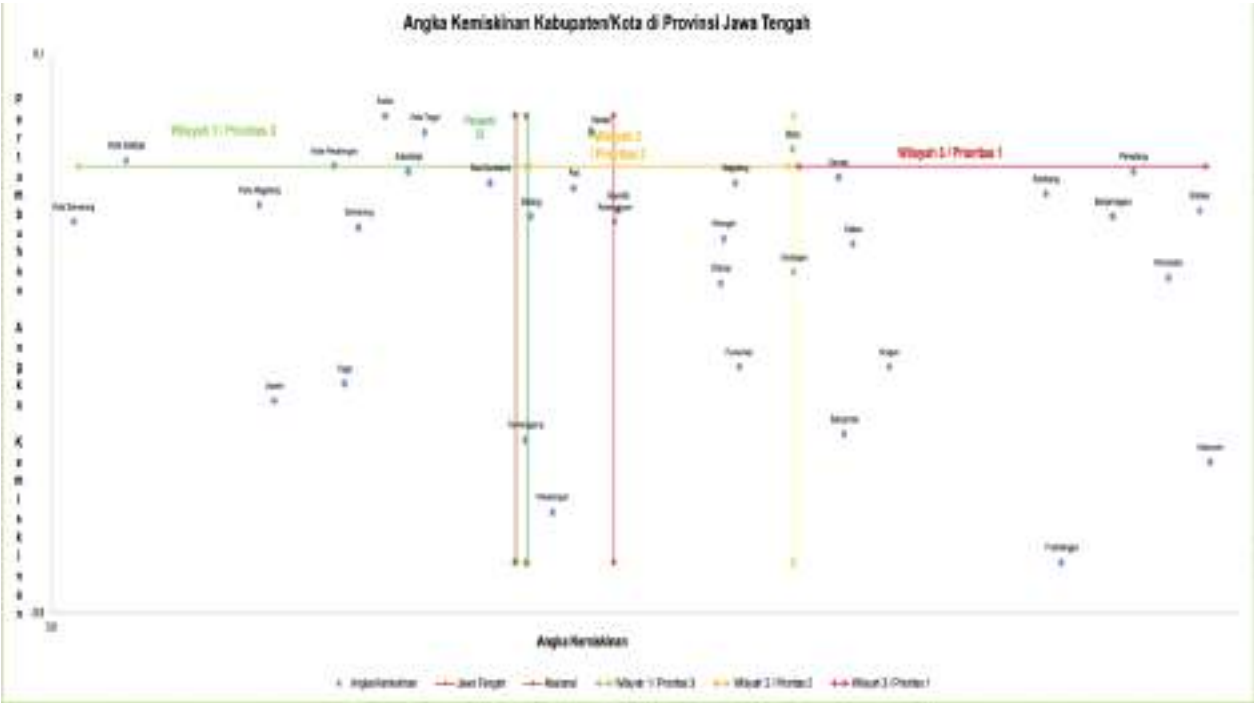
Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kendal tergolong dalam wilayah menengah diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Kendal setara dengan Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Blora, Kabupaten Pati, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Pekalongan. Persebaran wilayah dengan mendasarkan pada tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.14

Tabel Wilayah Setara Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

| No | Wilayah I |           | Wilayah II |             | Wilayah III |              |
|----|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|--------------|
| 1  | 7,47      | Sukoharjo | 10,68      | Cilacap     | 11,95       | Banyumas     |
| 2  | 7,23      | Kudus     | 10,87      | Purworejo   | 14,18       | Purbalingga  |
| 3  | 6,09      | Jepara    | 10,83      | Magelang    | 14,71       | Banjarnegara |
| 4  | 6,96      | Semarang  | 9,63       | Boyolali    | 15,71       | Kebumen      |
| 5  | 8,73      | Batang    | 10,71      | Wonogiri    | 15,28       | Wonosobo     |
| 6  | 6,81      | Tegal     | 9,59       | Karanganyar | 12,04       | Klaten       |

| No | Wilayah I |                 | Wilayah II |            | Wilayah III |          |
|----|-----------|-----------------|------------|------------|-------------|----------|
| 7  | 5,94      | Kota Magelang   | 11,42      | Blora      | 12,41       | Sragen   |
| 8  | 8,31      | Kota Surakarta  | 9,17       | Pati       | 11,43       | Grobogan |
| 9  | 4,57      | Kota Salatiga   | 8,67       | Temanggung | 14,02       | Rembang  |
| 10 | 4,03      | Kota Semarang   | 9,35       | Kendal     | 11,89       | Demak    |
| 11 | 6,71      | Kota Pekalongan | 8,95       | Pekalongan | 14,92       | Pemalang |
| 12 | 7,64      | Kota Tegal      |            |            | 15,60       | Brebes   |



Gambar 2.25.

Grafik Sebaran Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Tingkat kemiskinan Kabupaten Kendal tergolong cukup baik jika dibandingkan dengan wilayah yang setara, terlihat dari tingkat kemiskinan Kabupaten Kendal yang **lebih baik** jika dibandingkan dengan rata-rata wilayah setara yang tercatat sebesar 9,99%. Untuk lebih lengkapnya, perbandingan tingkat kemiskinan di wilayah yang setara dengan Kabupaten Kendal dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.26.  
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kendal dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Wilayah Setara Tahun 2024

Dilihat dari sisi perubahannya, perubahan tingkat kemiskinan Kabupaten Kendal tercatat sebesar -0,040%. Capaian ini belum lebih baik jika dibandingkan dengan perubahan tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah yang tercatat sebesar -1,19%, Nasional yang tercatat sebesar -0,8% maupun Rata-rata Wilayah Setara yang tercatat sebesar -0,279%.



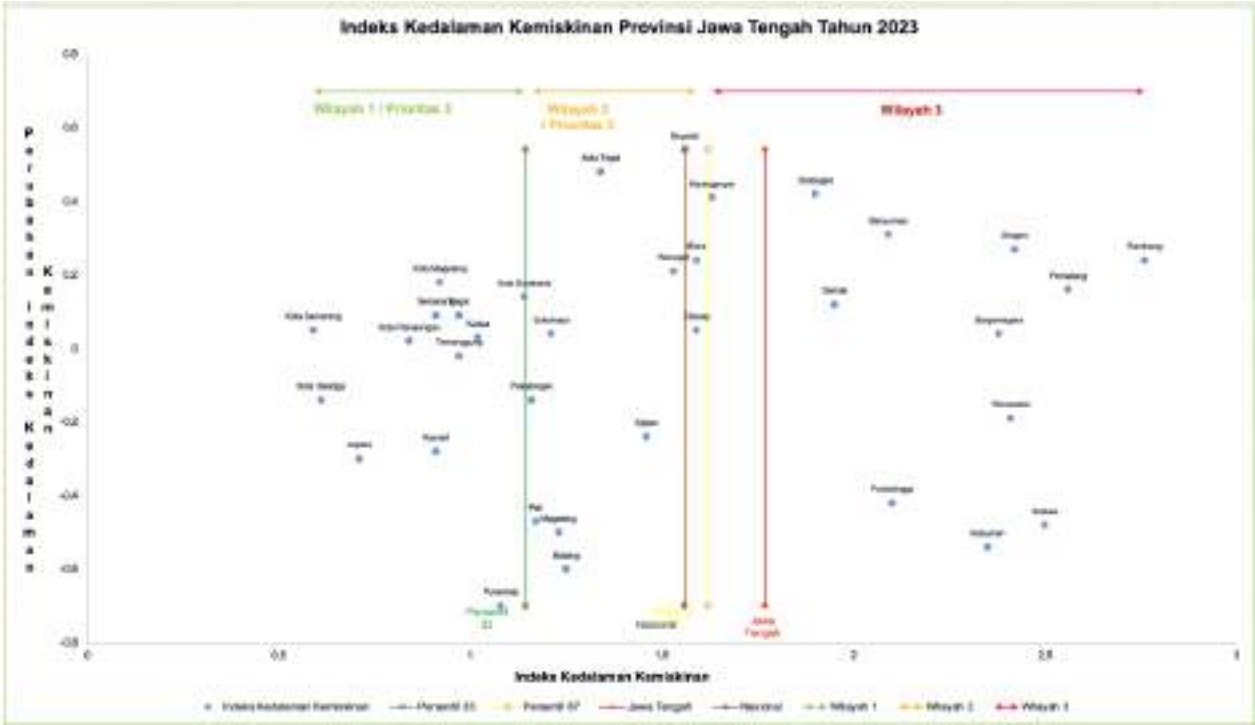
Gambar 2.27.  
Grafik Perbandingan Perubahan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kendal dengan Wilayah Setara Tahun 2024

Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kendal tahun 2024 yaitu sebesar 0,91% meningkat sebesar -0,28% atau dengan kata lain **menurun** dari capaian tahun 2023 sebesar 1,29%.

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, Indeks Kedalaman Kabupaten Kendal masuk dalam kategori wilayah yang rendah kedalaman kemiskinannya, bersama dengan Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang dan Kota Pekalongan. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

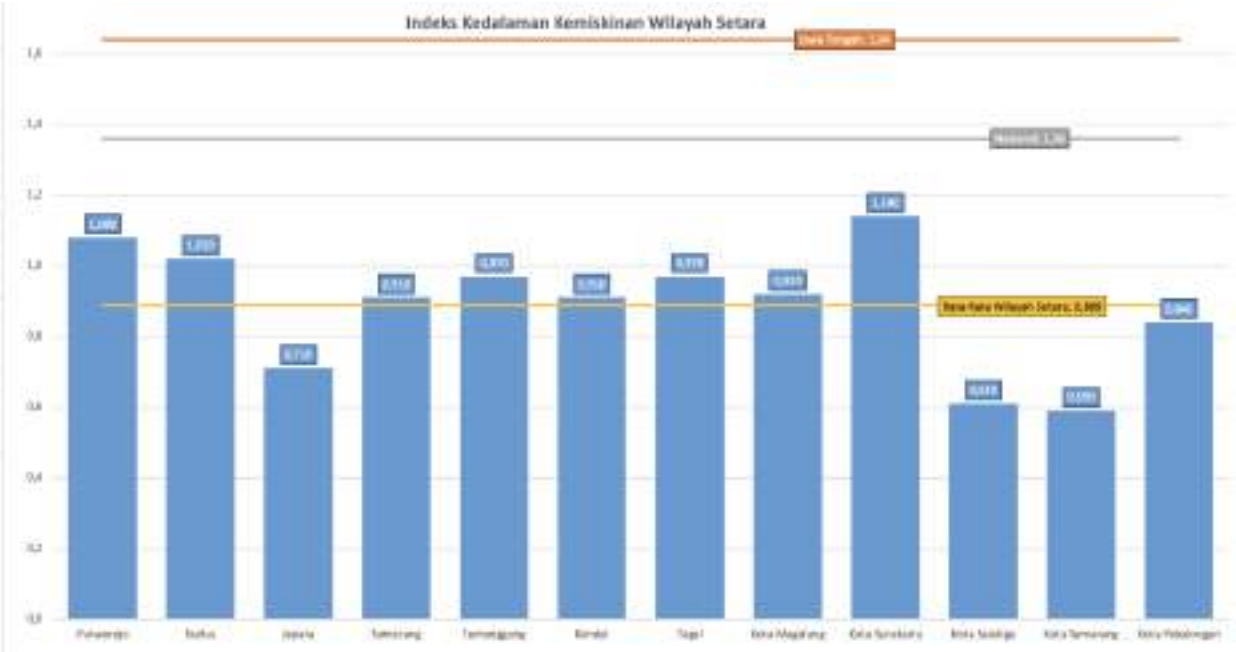
Tabel 2.15  
Tabel Wilayah Setara Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

| No | Wilayah I |                 | Wilayah II |            | Wilayah III |              |
|----|-----------|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|
| 1  | 1,080     | Purworejo       | 1,590      | Cilacap    | 2,090       | Banyumas     |
| 2  | 1,020     | Kudus           | 1,230      | Magelang   | 2,100       | Purbalingga  |
| 3  | 0,710     | Jepara          | 1,560      | Boyolali   | 2,380       | Banjarnegara |
| 4  | 0,910     | Semarang        | 1,460      | Klaten     | 2,350       | Kebumen      |
| 5  | 0,970     | Temanggung      | 1,210      | Sukoharjo  | 2,410       | Wonosobo     |
| 6  | 0,910     | Kendal          | 1,530      | Wonogiri   | 1,630       | Karanganyar  |
| 7  | 0,970     | Tegal           | 1,590      | Blora      | 2,420       | Sragen       |
| 8  | 0,920     | Kota Magelang   | 1,170      | Pati       | 1,900       | Grobogan     |
| 9  | 1,140     | Kota Surakarta  | 1,250      | Batang     | 2,760       | Rembang      |
| 10 | 0,610     | Kota Salatiga   | 1,160      | Pekalongan | 1,950       | Demak        |
| 11 | 0,590     | Kota Semarang   | 1,340      | Kota Tegal | 2,560       | Pemalang     |
| 12 | 0,840     | Kota Pekalongan |            |            | 2,500       | Brebes       |

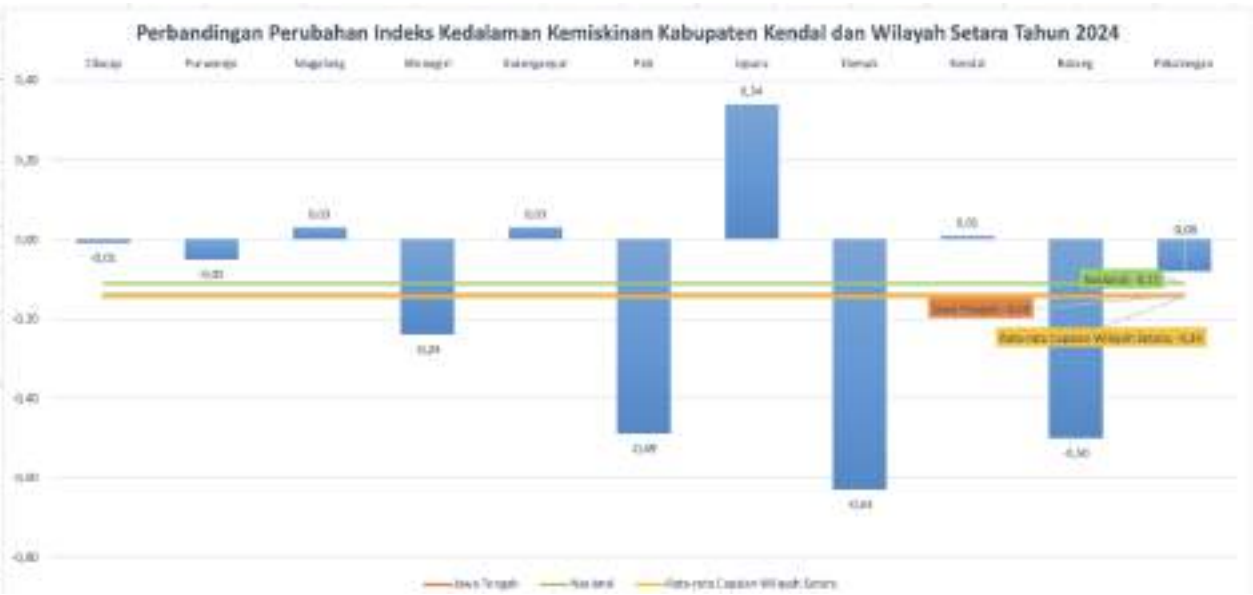


Gambar 2.28.  
Sebaran Capaian Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kendal tercatat lebih rendah jika dibandingkan Indeks Kedalaman Kemiskinan Jawa Tengah yang tercatat sebesar 1,64, maupun Nasional yang tercatat sebesar 1,36, namun lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata wilayah setara yang tercatat sebesar 0,889. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.29.  
Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kendal dengan Provinsi Jawa Tengah, Nasional dan Wilayah Setara



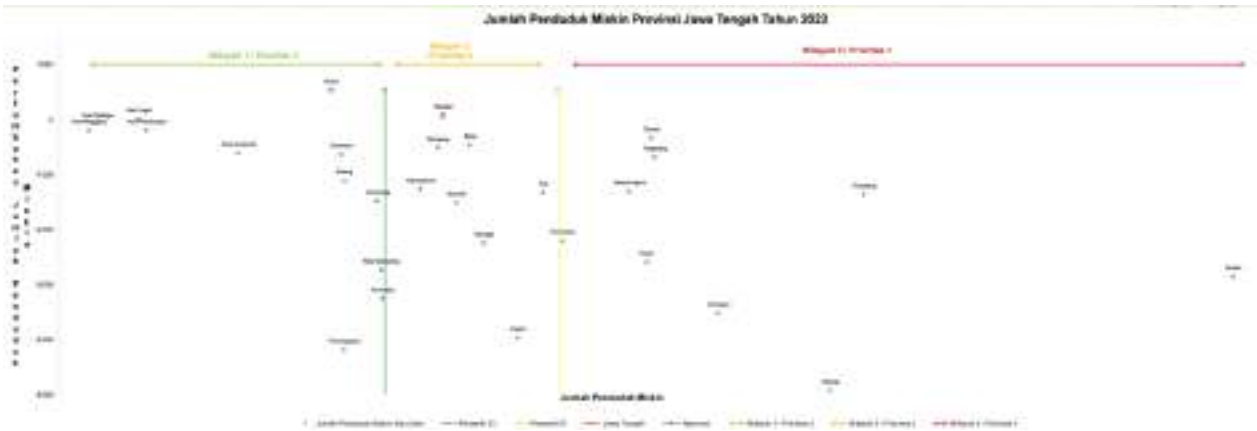
Gambar 2.30.  
Perbandingan Perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, Nasional dan Wilayah Setara

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Kendal Tahun 2024 tercatat sebesar **92.710** jiwa, capaian ini **lebih baik** dari target yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu 97.858 jiwa. Jumlah penduduk miskin ini masih **lebih baik** jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin Provinsi Jawa

Tengah yang tercatat sebanyak 3.704.330 jiwa, dan jumlah penduduk miskin Nasional yang tercatat sebesar 25.219.210 jiwa. Sebaran penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

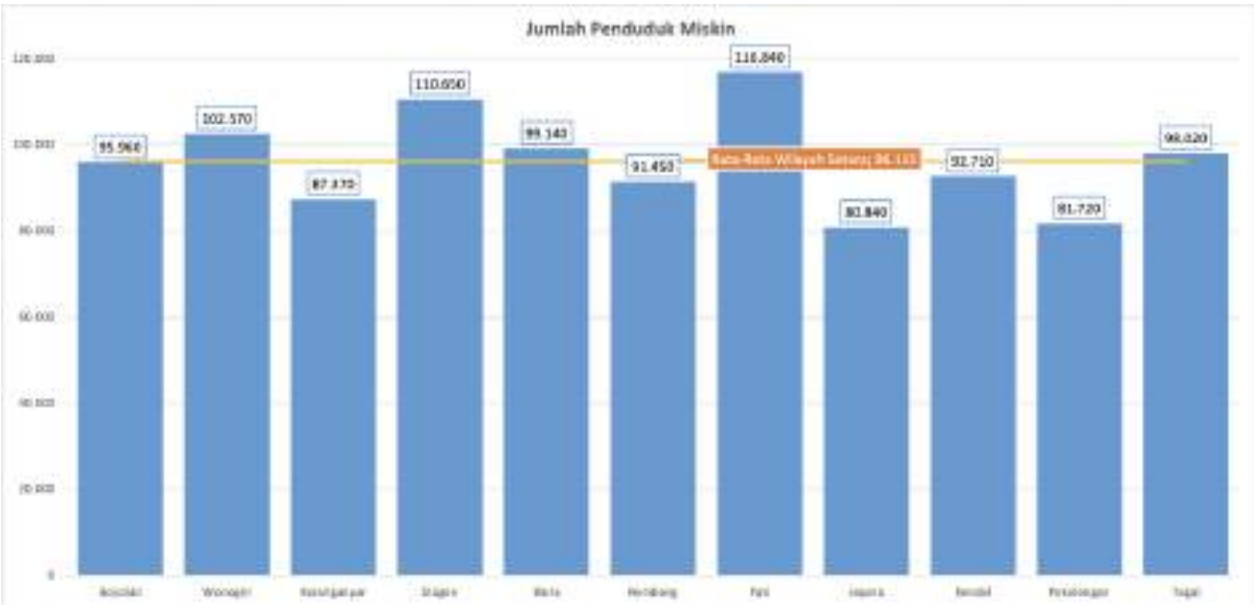
Tabel 2.16  
Tabel Wilayah Setara Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

| No | Wilayah I |                 | Wilayah II |             | Wilayah III |              |
|----|-----------|-----------------|------------|-------------|-------------|--------------|
| 1  | 78.020    | Purworejo       | 95.960     | Boyolali    | 191.000     | Cilacap      |
| 2  | 68.150    | Sukoharjo       | 102.570    | Wonogiri    | 216.500     | Banyumas     |
| 3  | 65.690    | Kudus           | 87.370     | Karanganyar | 143.410     | Purbalingga  |
| 4  | 76.870    | Semarang        | 110.650    | Sragen      | 138.990     | Banjarnegara |
| 5  | 68.770    | Temanggung      | 99.140     | Blora       | 195.450     | Kebumen      |
| 6  | 68.850    | Batang          | 91.450     | Rembang     | 123.700     | Wonosobo     |
| 7  | 7.250     | Kota Magelang   | 116.840    | Pati        | 144.490     | Magelang     |
| 8  | 43.280    | Kota Surakarta  | 80.840     | Jepara      | 141.840     | Klaten       |
| 9  | 9.330     | Kota Salatiga   | 92.710     | Kendal      | 162.520     | Grobogan     |
| 10 | 77.790    | Kota Semarang   | 81.720     | Pekalongan  | 143.260     | Demak        |
| 11 | 21.160    | Kota Pekalongan | 98.020     | Tegal       | 195.570     | Pemalang     |
| 12 | 19.220    | Kota Tegal      |            |             | 286.140     | Brebes       |



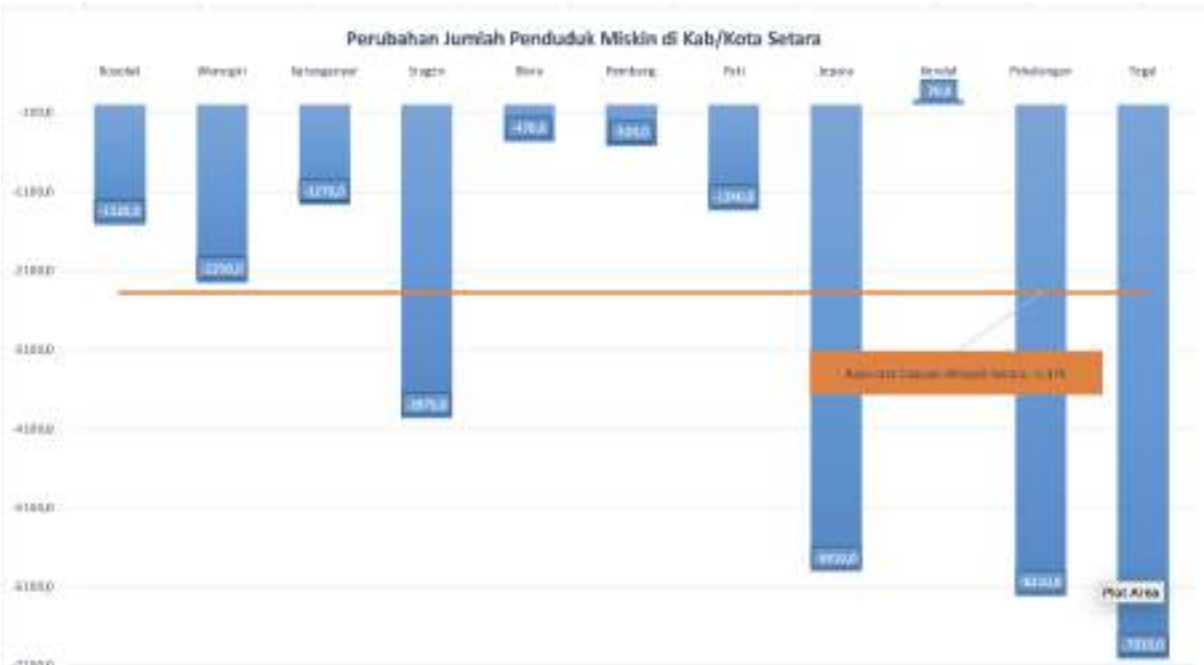
Gambar 2.31.  
Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Dibandingkan dengan rata-rata wilayah setara, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kendal masih **lebih baik**. Rata-rata jumlah penduduk miskin pada wilayah setara adalah sebesar 96.115 jiwa. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.32.  
Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kendal dengan Wilayah Setara

Meskipun tingkat kemiskinan menurun, namun jumlah penduduk miskin tercatat meningkat 70 jiwa dari tahun sebelumnya yang sebesar tercatat sebesar 92.640 jiwa. Capaian ini tidak lebih baik dari rata-rata wilayah setara yang jumlah penduduk miskinnya menurun, maupun rata-rata pertumbuhan wilayah setara yang menurun sebesar 2.375 jiwa. Selengkapnya, dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.33.  
Perbandingan Perubahan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kendal dengan Wilayah Setara

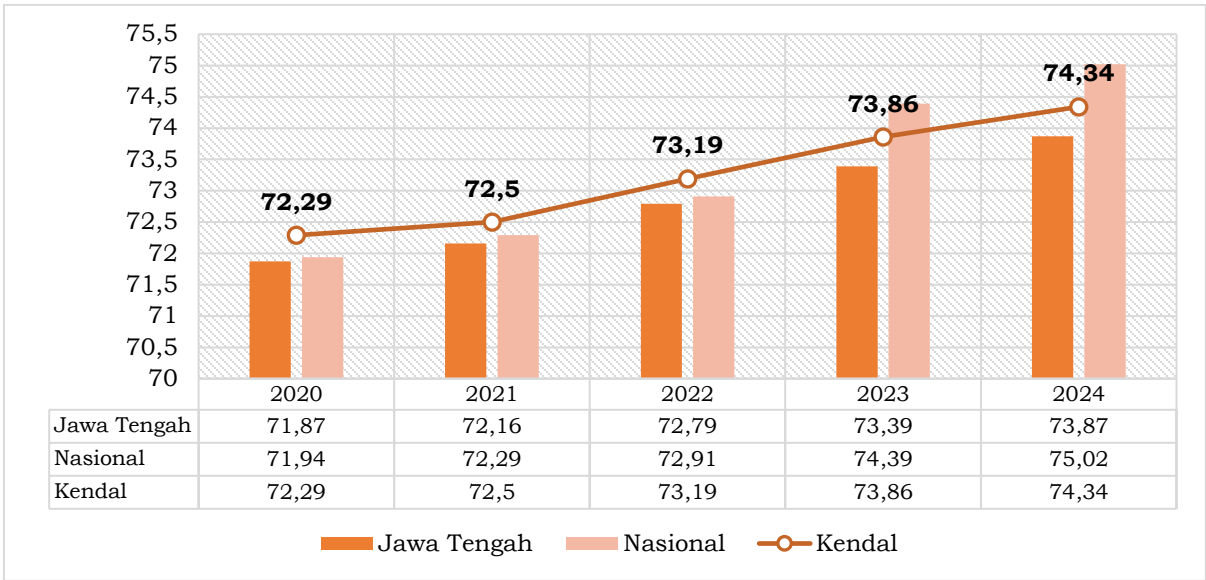
### 2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial.

#### a. Indeks Pembangunan Manusia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (1) Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*); (2) Pengetahuan (*knowledge*); (3) Standar hidup layak (*decent standard of living*). Indikator pada metode baru meliputi: angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kendal tahun 2024 mencapai 74,34, meskipun belum mencapai target tahun 2024 yakni 75,61, namun capaian IPM tahun 2024 meningkat 0,48 poin dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 73,86. Perkembangan IPM di Kabupaten Kendal dalam periode 2020–2024 menunjukkan adanya peningkatan. Kenaikan ini menggambarkan adanya kemajuan yang berkelanjutan dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Peningkatan IPM yang konsisten juga menunjukkan bahwa pembangunan di Kendal tidak hanya terfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga diarahkan pada peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh.

Tahun 2020 IPM Kabupaten Kendal sebesar 72,29, kemudian meningkat menjadi 74,34 pada tahun 2024. Pada tahun 2024, IPM Kabupaten Kendal sebesar 74,34, **berada diatas** IPM Provinsi Jawa Tengah sebesar 73,87 namun masih dibawah angka IPM Nasional yang tercatat sebesar 75,02. Meskipun IPM Tahun 2024 ini cukup tinggi, tetapi belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 75,61. Selengkapnya disajikan pada Gambar di bawah ini.



Gambar 2.34.  
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020 – 2024  
(Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025)

IPM Kabupaten Kendal masuk dalam kategori menengah diantara Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Capaian IPM tersebut setara dengan Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Demak. Selengkapnya, capaian IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.17  
Tabel Wilayah Setara Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

| No | Wilayah I |              | Wilayah II |           | Wilayah III |                 |
|----|-----------|--------------|------------|-----------|-------------|-----------------|
| 1  | 70,97     | Purbalingga  | 72,55      | Cilacap   | 75,96       | Boyolali        |
| 2  | 69,62     | Banjarnegara | 74,52      | Banyumas  | 78,16       | Klaten          |
| 3  | 70,63     | Wonosobo     | 72,48      | Kebumen   | 79,30       | Sukoharjo       |
| 4  | 72,10     | Magelang     | 75,16      | Purworejo | 78,11       | Karanganyar     |
| 5  | 72,02     | Grobogan     | 72,54      | Wonogiri  | 77,21       | Kudus           |
| 6  | 71,42     | Blora        | 75,53      | Sragen    | 75,67       | Semarang        |
| 7  | 71,86     | Temanggung   | 72,53      | Rembang   | 82,15       | Kota Magelang   |
|    | 70,73     | Batang       | 74,10      | Pati      | 84,41       | Kota Surakarta  |
| 9  | 71,95     | Pekalongan   | 74,32      | Jepara    | 85,72       | Kota Salatiga   |
| 10 | 68,65     | Pemalang     | 74,57      | Demak     | 85,24       | Kota Semarang   |
|    | 71,70     | Tegal        | 74,34      | Kendal    | 77,21       | Kota Pekalongan |
| 12 | 70,18     | Brebes       |            |           | 77,50       | Kota Tegal      |



dibandingkan dengan peningkatan IPM Nasional yang mencapai 0,610 poin dan rata-rata pertumbuhan wilayah setara yang mencapai 0,55 poin. Selengkapnya, dapat dilihat pada gambar berikut.

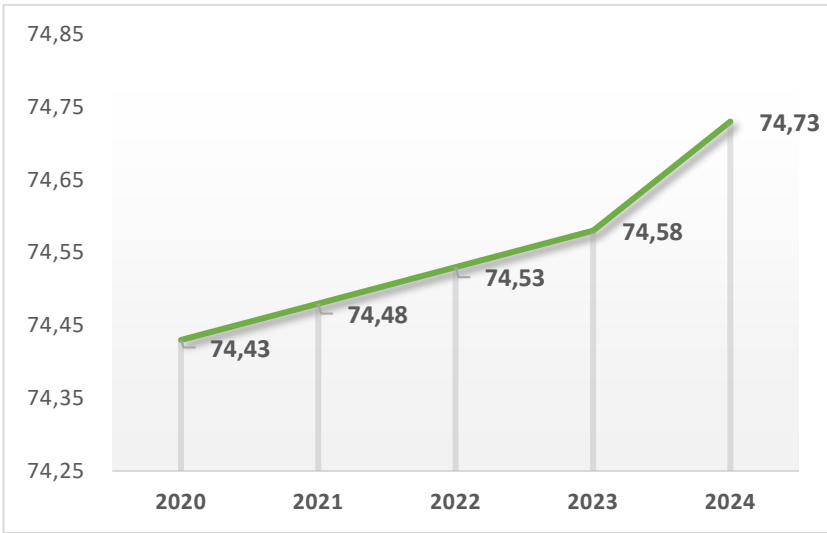


Gambar 2.37. Perbandingan Pertumbuhan IPM Kabupaten Kendal dengan Provinsi Jawa Tengah, Nasional dan Wilayah Setaranya Tahun 2024

Sementara itu, indeks pembentuk IPM Kabupaten Kendal yaitu Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita akan diuraikan di bawah ini.

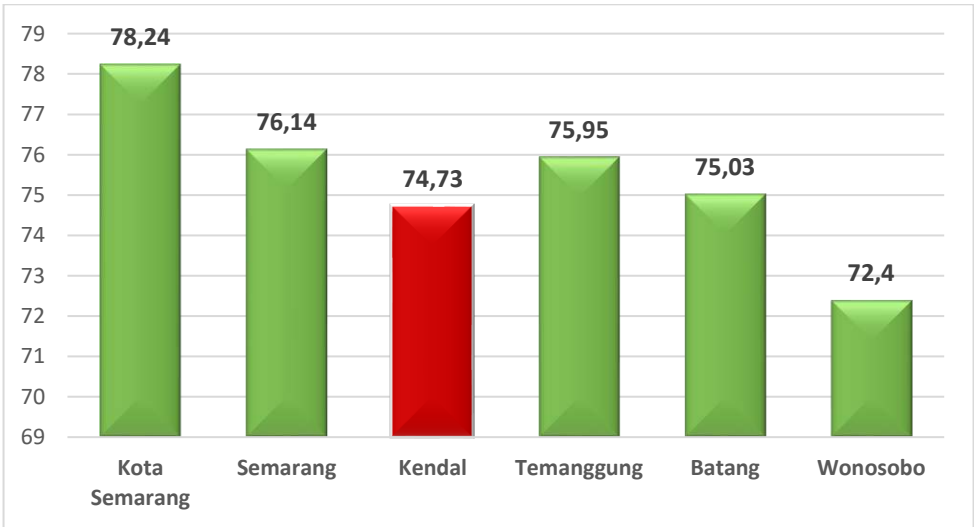
- 1) Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia Harapan Hidup atau disingkat UHH, merupakan angka yang menunjukkan perkiraan usia seseorang dihitung sejak dilahirkan. Perkembangan UHH Kabupaten Kendal dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, UHH Kabupaten Kendal sebesar 74,43 tahun meningkat menjadi 74,73 tahun pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan peningkatan kualitas layanan kesehatan, gizi, serta kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat. Meskipun meningkat, capaian UHH ini belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 74,88 tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2.38.  
Perkembangan Usia Harapan Hidup (tahun) Kabupaten Kendal  
Tahun 2020 – 2024  
(Sumber: Kabupaten Kendal Dalam Angka 2025)

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain disekitarnya yaitu Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Batang, UHH Kabupaten Kendal tahun 2024 masih lebih rendah yakni sebesar 74,73. Namun, capaian UHH Kabupaten Kendal lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten Wonosobo. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



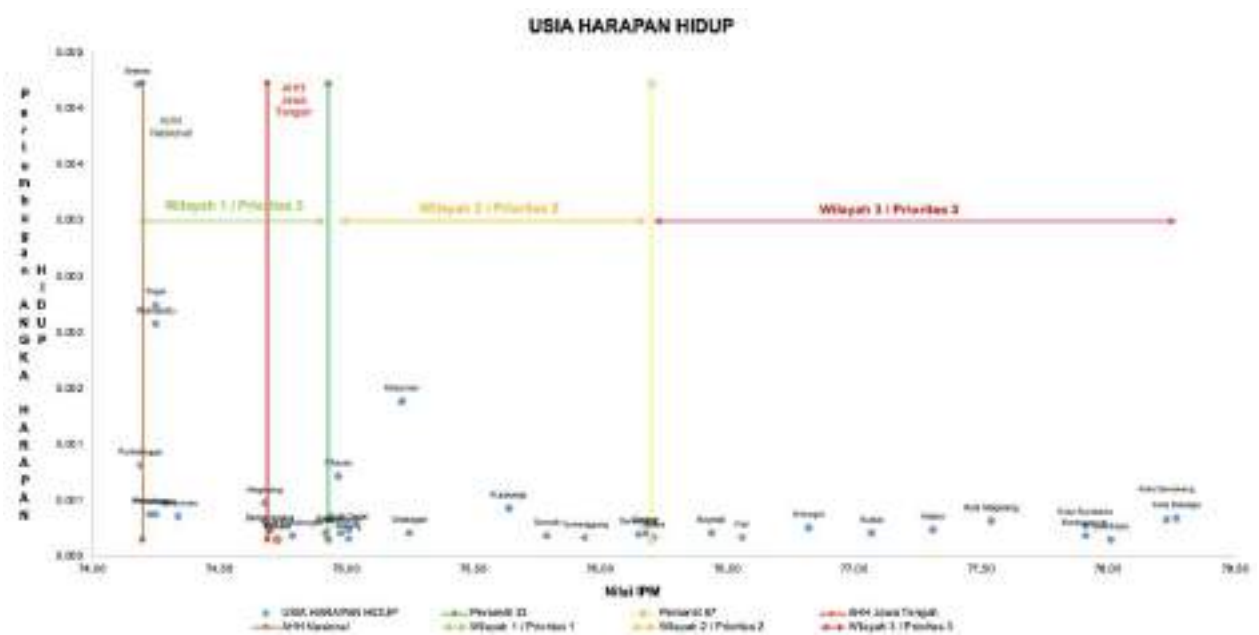
Gambar 2.39.  
Perbandingan Usia Harapan Hidup Kabupaten Kendal dengan  
Kabupaten/Kota Lainnya Tahun 2024  
(Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025)

Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Kendal masuk dalam kategori rendah diantara Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Capaian UHH tersebut setara dengan Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Blora, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes dan Kota

Pekalongan. Selengkapnya, capaian UHH Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.18  
Tabel Wilayah Setara Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota  
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

| No | Wilayah I |                 | Wilayah II |            | Wilayah III |                |
|----|-----------|-----------------|------------|------------|-------------|----------------|
| 1  | 74,34     | Banyumas        | 74,97      | Cilacap    | 76,44       | Boyolali       |
| 2  | 74,19     | Purbalingga     | 75,22      | Kebumen    | 77,31       | Klaten         |
| 3  | 74,70     | Banjarnegara    | 75,64      | Purworejo  | 78,01       | Sukoharjo      |
| 4  | 74,25     | Wonosobo        | 76,18      | Sragen     | 76,82       | Wonogiri       |
| 5  | 74,68     | Magelang        | 75,25      | Grobogan   | 77,91       | Karanganyar    |
| 6  | 74,92     | Blora           | 74,98      | Rembang    | 76,56       | Pati           |
| 7  | 74,73     | Kendal          | 75,79      | Demak      | 77,07       | Kudus          |
| 8  | 74,25     | Pekalongan      | 76,15      | Semarang   | 76,21       | Jepara         |
| 9  | 74,23     | Pemalang        | 75,94      | Temanggung | 77,54       | Kota Magelang  |
|    | 74,25     | Tegal           | 75,01      | Batang     | 77,91       | Kota Surakarta |
| 11 | 74,18     | Brebes          | 75,01      | Kota Tegal | 78,27       | Kota Salatiga  |
| 12 | 74,79     | Kota Pekalongan |            |            | 78,23       | Kota Semarang  |



Gambar 2.40.  
Sebaran Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, Provinsi  
Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024

Dibandingkan dengan wilayah setara, UHH Kabupaten Kendal tergolong baik. Jika dibandingkan dengan rata-rata wilayah setara yang tercatat sebesar 74,46 tahun, dan Nasional yang tercatat sebesar 74,2 tahun, UHH Kabupaten Kendal masih **lebih baik**, namun masih belum lebih baik jika dibandingkan dengan UHH Provinsi Jawa Tengah yang tercatat sebesar 74,91 tahun. Selengkapnya, perbandingan UHH Kabupaten Kendal dengan wilayah setara dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.41.  
Perbandingan UHH Kabupaten Kendal dengan Provinsi Jawa Tengah,  
Nasional dan Wilayah Setaranya Tahun 2024

Dilihat dari sisi pertumbuhannya, UHH Kabupaten Kendal meningkat 0,150 tahun jika dibandingkan dari tahun sebelumnya, peningkatan ini belum lebih baik dengan peningkatan IPM Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 0,220 tahun, UHH Nasional yang mencapai 0,300 tahun dan rata-rata pertumbuhan wilayah setara yang mencapai 0,979 tahun. Selengkapnya, dapat dilihat pada gambar berikut.

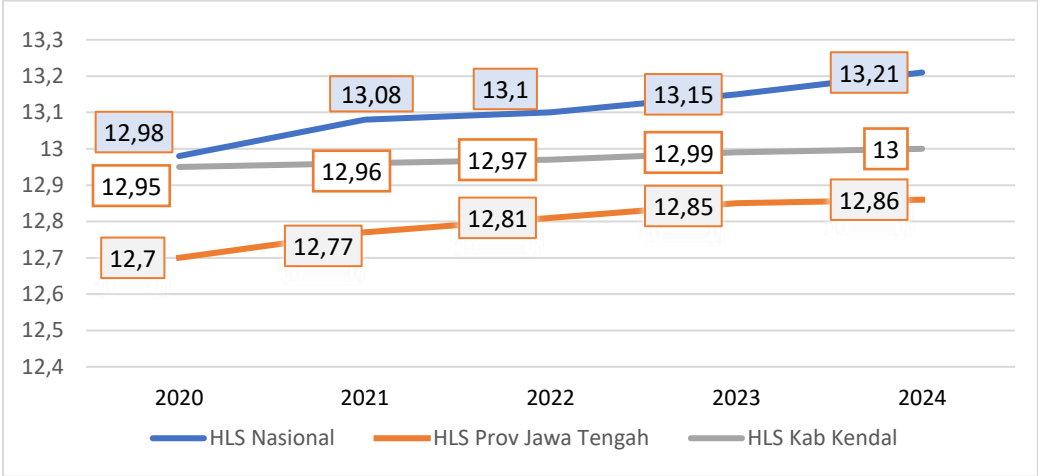


Gambar 2.42.  
Perbandingan Pertumbuhan UHH Kabupaten Kendal dengan Provinsi Jawa  
Tengah, Nasional dan Wilayah Setaranya Tahun 2024

2) Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan

peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 (tujuh) tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2.43.

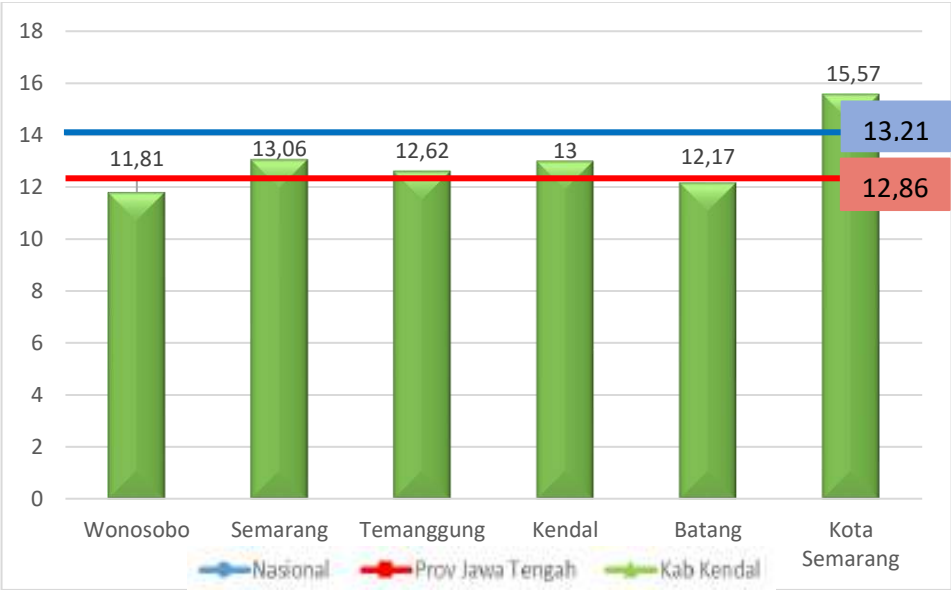
Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kendal dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

(Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025 (diolah))

Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Kendal dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan, yaitu dari tahun 2020 sebesar 12,95 tahun terus mengalami peningkatan sampai tahun 2024 menjadi sebesar 13,00 tahun. Ini menunjukkan bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk sekolah selama 13,00 tahun. Pada tahun 2024, Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kendal berada diatas Provinsi Jawa Tengah, namun masih di bawah Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan di Kabupaten Kendal dari tahun ke tahun menunjukkan perbaikan, meskipun demikian masih perlu upaya-upaya perbaikan khususnya untuk menekan Angka Putus Sekolah baik tingkat Sekolah Dasar ataupun Sekolah Menengah Pertama. Target Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kendal tahun 2024 adalah 13,55 tahun, sehingga capaian HLS tahun 2024 ini belum mencapai target yang ditetapkan.

Pada tahun 2024, HLS Kabupaten Kendal sebesar 13,00 tahun, **berada diatas capaian Provinsi Jawa Tengah** sebesar 12,86 tahun

tetapi berada dibawah Nasional sebesar 13,21 tahun serta berada di posisi ke-3 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain disekitarnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2.44.

Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2024  
(Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025)

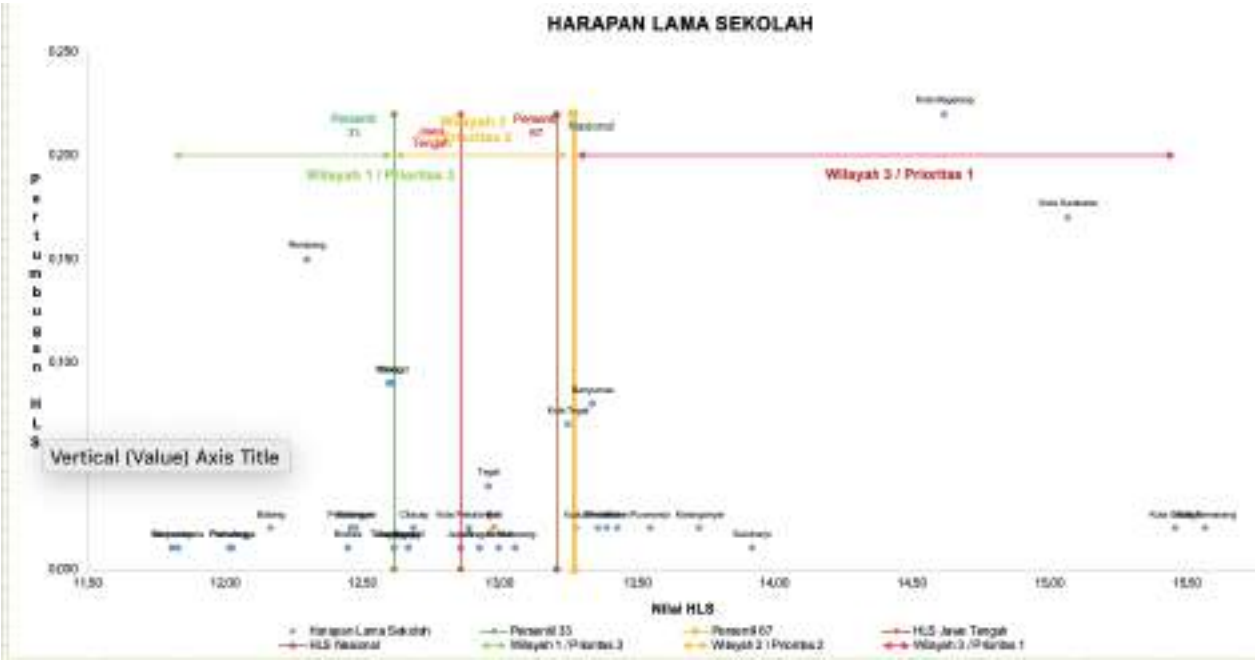
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kendal tergolong menengah dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. HLS Kabupaten Kendal setara dengan Kabupaten Cilacap, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Tegal, Kota Pekalongan dan Kota Tegal. Kabupaten/kota dengan HLS menengah ini merupakan kabupaten/kota dengan capaian HLS antara 12,62 tahun sampai dengan 13,25 tahun. Untuk lebih lengkapnya, sebaran HLS Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.19

Tabel Wilayah Setara Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

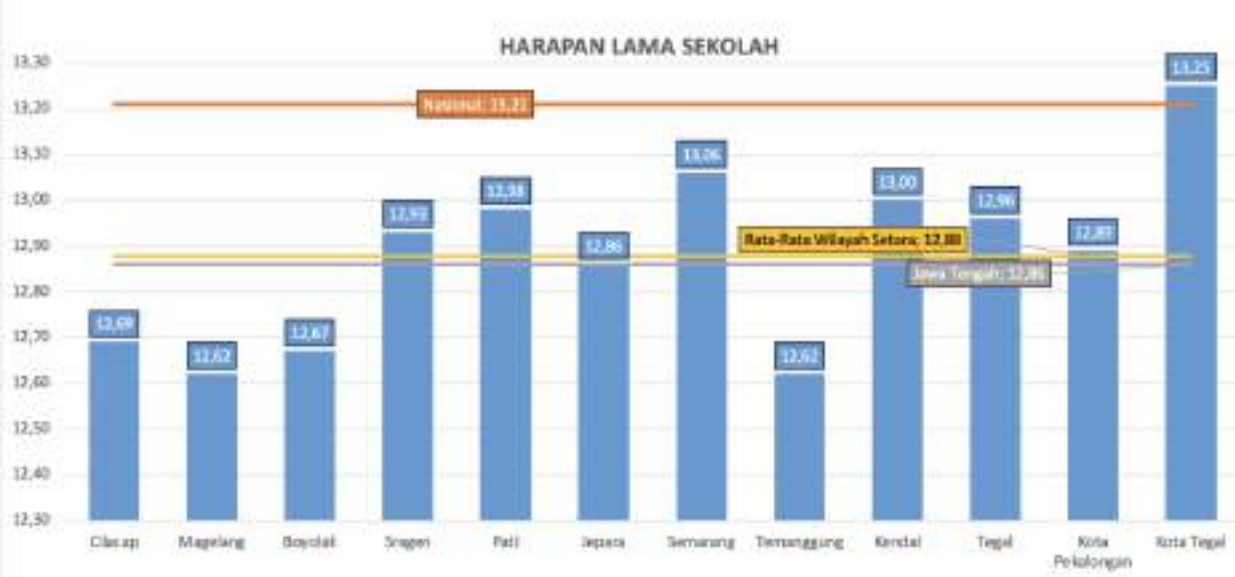
| No | Wilayah I |              | Wilayah II |            | Wilayah III |                |
|----|-----------|--------------|------------|------------|-------------|----------------|
| 1  | 12,03     | Purbalingga  | 12,69      | Cilacap    | 13,34       | Banyumas       |
| 2  | 11,83     | Banjarnegara | 12,62      | Magelang   | 13,39       | Kebumen        |
| 3  | 11,81     | Wonosobo     | 12,67      | Boyolali   | 13,55       | Purworejo      |
| 4  | 12,61     | Wonogiri     | 12,93      | Sragen     | 13,43       | Klaten         |
| 5  | 12,48     | Grobogan     | 12,98      | Pati       | 13,92       | Sukoharjo      |
| 6  | 12,60     | Blora        | 12,86      | Jepara     | 13,73       | Karanganyar    |
| 7  | 12,30     | Rembang      | 13,06      | Semarang   | 13,28       | Kudus          |
| 8  | 12,17     | Batang       | 12,62      | Temanggung | 13,36       | Demak          |
| 9  | 12,46     | Pekalongan   | 13,00      | Kendal     | 14,62       | Kota Magelang  |
| 10 | 12,02     | Pemalang     | 12,96      | Tegal      | 15,07       | Kota Surakarta |

| No | Wilayah I |        | Wilayah II |                 | Wilayah III |               |
|----|-----------|--------|------------|-----------------|-------------|---------------|
| 11 | 12,45     | Brebes | 12,89      | Kota Pekalongan | 15,46       | Kota Salatiga |
| 12 |           |        | 13,25      | Kota Tegal      | 15,57       | Kota Semarang |



Gambar 2.45.  
Sebaran Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024

Dibandingkan dengan wilayah setaranya, capaian Kabupaten Kendal tergolong tinggi, terlihat dari capaian HLS Kabupaten Kendal yang **lebih baik** jika dibandingkan dengan rata-rata wilayah setara yang tercatat sebesar 12,88 tahun. Selengkapnya, dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.46.  
Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kendal dibandingkan dengan Wilayah Setara, Rata-rata Wilayah Setara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional

Dilihat dari sisi pertumbuhannya, Kabupaten Kendal setara dengan pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 0,01 tahun, dan tercatat lebih rendah dari pertumbuhan Rata-Rata wilayah setara yang tercatat sebesar 0,02 tahun, maupun pertumbuhan nasional yang tercatat sebesar 0,06 tahun. Selengkapnya, dapat dilihat pada gambar berikut.

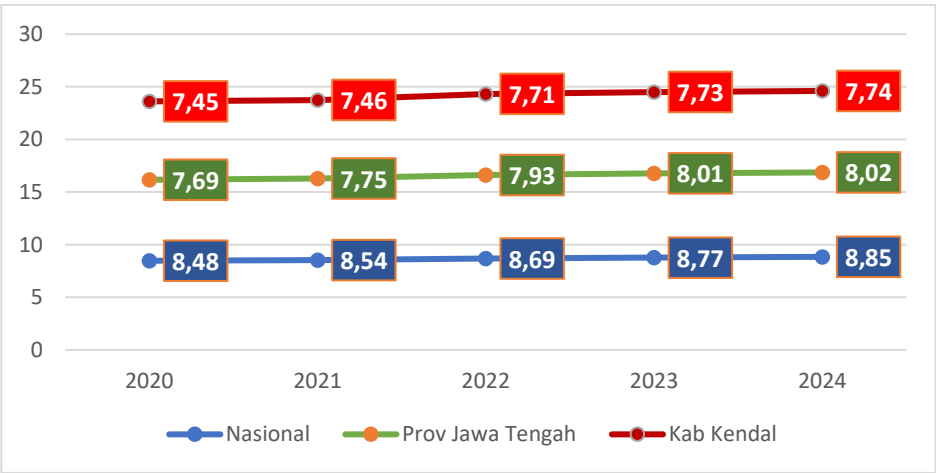


Gambar 2.47.

Perbandingan Pertumbuhan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kendal dibandingkan dengan Wilayah Setara, Rata-rata Wilayah Setara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional

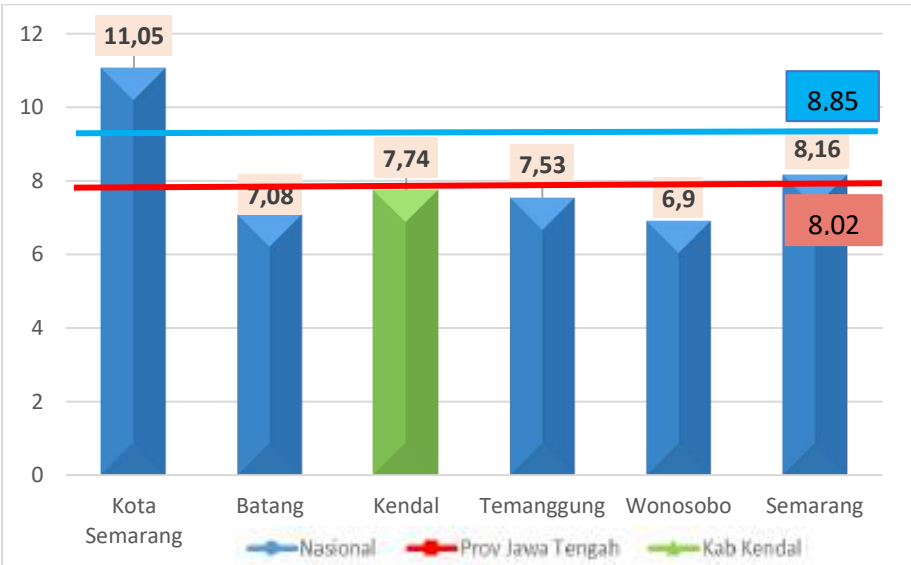
3) Rata-Rata Lama Sekolah

Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kendal pada tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2020 sebesar 7,45 tahun menjadi sebesar 7,74 tahun pada tahun 2024. Kondisi tersebut relevan dengan Jawa Tengah dan Nasional yang sama-sama mengalami peningkatan. Meskipun demikian masih diperlukan upaya dalam meningkatkan akses dan kesempatan bagi anak dalam memperoleh pendidikan yang lebih tinggi serta upaya-upaya guna meningkatkan kemampuan masyarakat supaya masyarakat dapat mendapatkan pendidikan yang layak. Target rata-rata lama sekolah tahun 2024 Kabupaten Kendal sebesar 8,25 tahun, yang berarti belum tercapai pada tahun 2024. Selengkapnya, perkembangan rata-rata lama sekolah Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2.48.  
Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kendal dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pada Tahun 2020-2024  
(Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025 (diolah))

Pada tahun 2024, RLS Kabupaten Kendal sebesar 7,74 tahun, berada dibawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 8,02 tahun dan Nasional sebesar 8,85 tahun, serta berada di posisi ke-3 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain disekitarnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



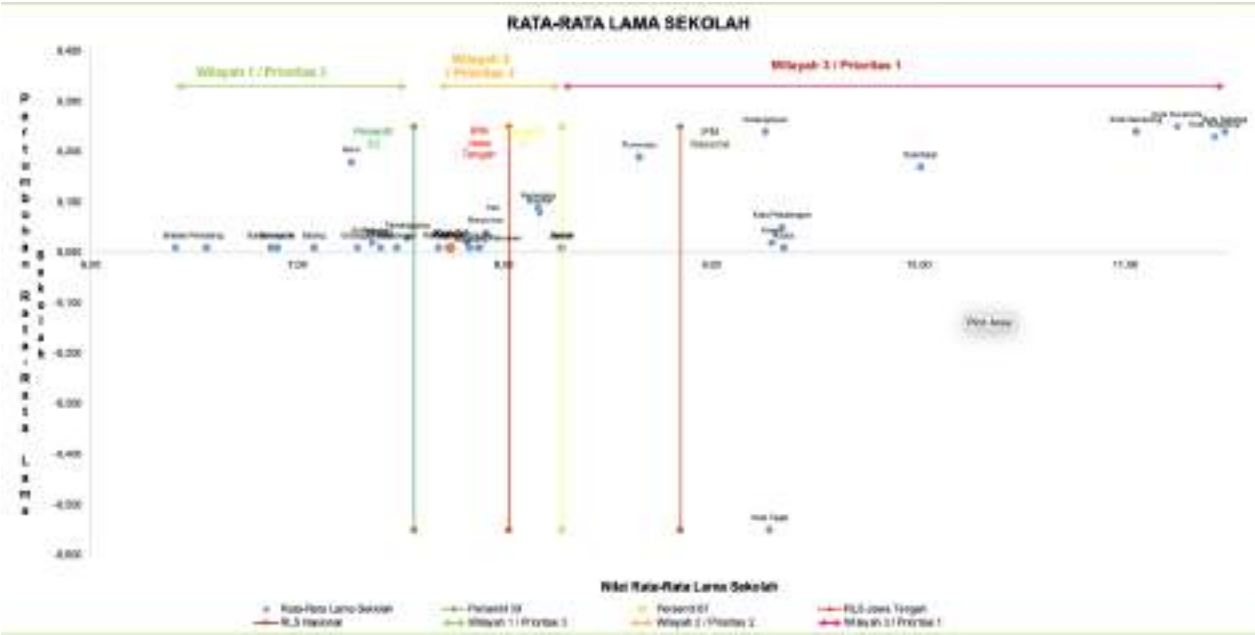
Gambar 2.49.  
Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2024  
(Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024)

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Kendal tergolong dalam Kabupaten/Kota dengan capaian menengah dengan capaian antara 7,68 hingga 8,27 tahun. RLS Kabupaten Kendal setar dengan Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Rembang,

Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Semarang. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 2.20  
Tabel Wilayah Setara Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

| No | Wilayah I |              | Wilayah II |          | Wilayah III |                 |
|----|-----------|--------------|------------|----------|-------------|-----------------|
| 1  | 7,40      | Cilacap      | 7,91       | Banyumas | 8,65        | Purworejo       |
| 2  | 7,36      | Purbalingga  | 7,87       | Kebumen  | 9,29        | Klaten          |
| 3  | 6,87      | Banjarnegara | 7,83       | Magelang | 10,01       | Sukoharjo       |
| 4  | 6,90      | Wonosobo     | 8,17       | Boyolali | 9,26        | Karanganyar     |
| 5  | 7,29      | Grobogan     | 7,68       | Wonogiri | 9,35        | Kudus           |
| 6  | 7,26      | Blora        | 7,88       | Sragen   | 8,28        | Demak           |
| 7  | 7,53      | Temanggung   | 7,73       | Rembang  | 11,43       | Kota Magelang   |
|    |           |              |            |          |             |                 |
| 8  | 7,08      | Batang       | 7,82       | Pati     | 11,25       | Kota Surakarta  |
|    |           |              |            |          |             |                 |
| 9  | 7,48      | Pekalongan   | 8,27       | Jepara   | 11,48       | Kota Salatiga   |
| 10 | 6,56      | Pemalang     | 8,16       | Semarang | 11,05       | Kota Semarang   |
|    |           |              |            |          |             |                 |
| 11 | 7,36      | Tegal        | 7,74       | Kendal   | 9,34        | Kota Pekalongan |
|    |           |              |            |          |             |                 |
| 12 | 6,41      | Brebes       |            |          | 9,28        | Kota Tegal      |



Gambar 2.50.  
Sebaran Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024

Dibandingkan dengan capaian wilayah setaranya, Kabupaten Kendal tergolong cukup rendah, jika dibandingkan dengan rata - rata wilayag setara yang tercatat sebesar 7,91 tahun, capaian Kabupaten Kendal belum lebih baik. Begitu juga jika dibandingkan dengan capaian

Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.51.  
Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kendal dengan Wilayah Setara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024

Dari sisi pertumbuhannya, capaian Kabupaten Kendal setara dengan pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 0,01, namun belum lebih baik jika dibandingkan dengan pertumbuhan wilayah setara yang tercatat sebesar 0,027, maupun Nasional yang tercatat sebesar 0,08. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

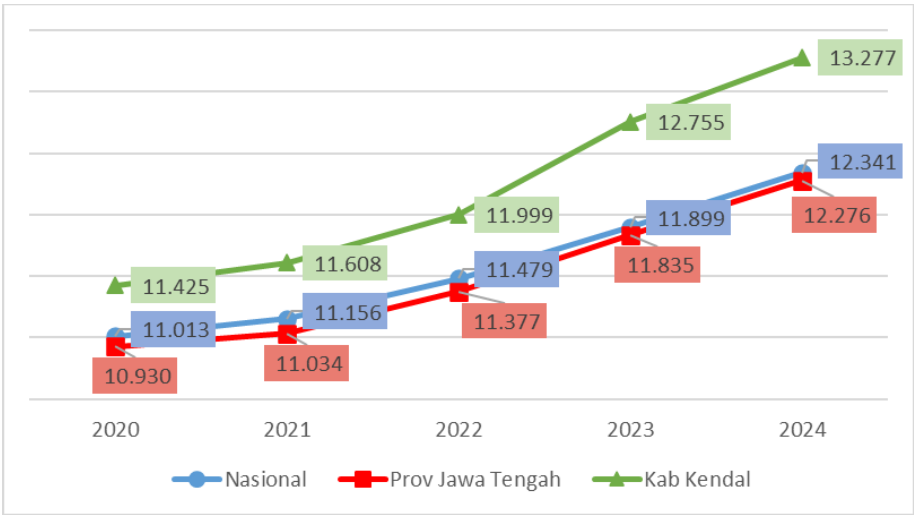


Gambar 2.52.  
Perbandingan Pertumbuhan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kendal dengan Wilayah Setara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024

4) Pengeluaran per Kapita

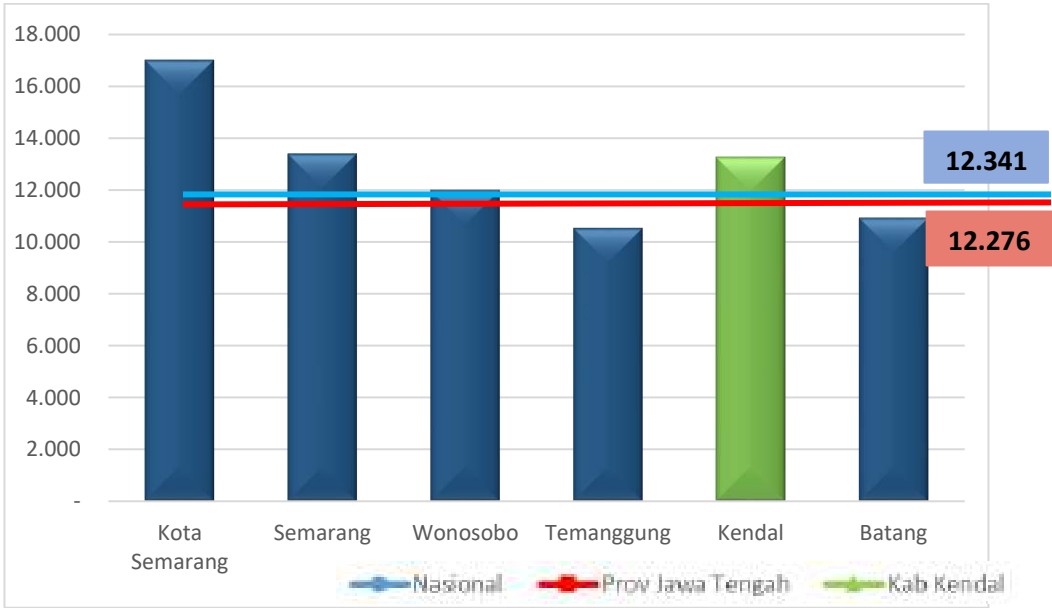
Capaian pengeluaran per kapita Kabupaten Kendal menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 sampai 2024. Pada tahun 2020 sebesar Rp.11.425.000/kapita/tahun, mengalami kenaikan sampai tahun 2024

menjadi Rp. 13.277.000/kapita/tahun. Capaian tahun 2024 ini **lebih baik** jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 13.054.000/tahun. Capaian pengeluaran per kapita Kabupaten Kendal tahun 2024 berada diatas capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Hal tersebut menunjukkan daya beli masyarakat yang semakin membaik. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Gambar 2.53.  
Perkembangan Pengeluaran Per Kapita (ribu Rp) Kabupaten Kendal dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024  
(Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025)

Sedangkan jika dibandingkan dengan wilayah sekitar Kabupaten Kendal, maka Kabupaten Kendal berada di posisi ke-3. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

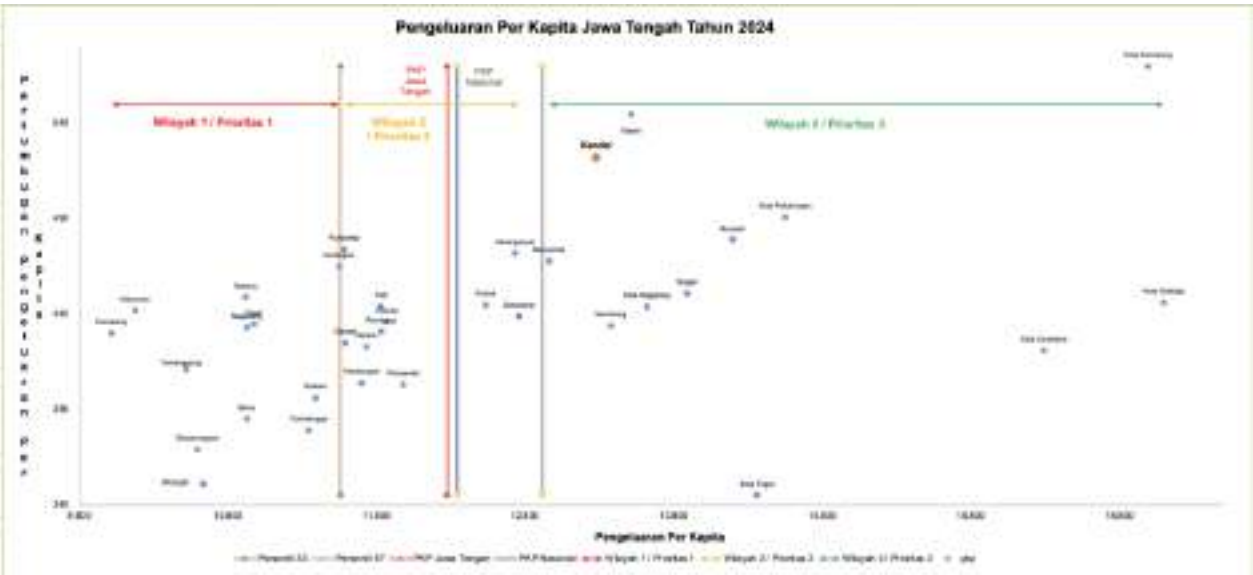


Gambar 2.54.  
Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024 (Ribu Rupiah)  
(Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024)

Pengeluaran per Kapita Kabupaten Kendal termasuk dalam wilayah dengan capaian pengeluaran per kapita yang tinggi di Jawa Tengah. Pengeluaran per kapita Kabupaten Kendal setara dengan Kabupaten Banyumas, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sragen, Kabupaten Semarang, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, kota Semarang, Kota Pekalongan dan Kota Tegal. Sebaran Pengeluatan per Kapita Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.21  
Tabel Wilayah Setara Pengeluaran per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 (ribu rupiah)

| No | Wilayah I |              | Wilayah II |             | Wilayah III |                 |
|----|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------------|
| 1  | 11.343,00 | Purbalingga  | 11.868,00  | Cilacap     | 12.960,00   | Banyumas        |
| 2  | 10.595,00 | Banjarnegara | 11.584,00  | Purworejo   | 14.195,00   | Boyolali        |
| 3  | 10.176,00 | Kebumen      | 11.980,00  | Wonosobo    | 13.513,00   | Klaten          |
| 4  | 10.926,00 | Magelang     | 12.758,00  | Sukoharjo   | 13.890,00   | Sragen          |
| 5  | 10.634,00 | Wonogiri     | 12.732,00  | Karanganyar | 13.377,00   | Semarang        |
| 6  | 11.548,00 | Grobogan     | 11.830,00  | Rembang     | 13.277,00   | Kendal          |
| 7  | 10.926,00 | Blora        | 11.829,00  | Pati        | 13.619,00   | Kota Magelang   |
| 8  | 10.519,00 | Temanggung   | 12.533,00  | Kudus       | 16.291,00   | Kota Surakarta  |
| 9  | 10.919,00 | Batang       | 11.729,00  | Jepara      | 17.096,00   | Kota Salatiga   |
| 10 | 10.017,00 | Pemalang     | 11.591,00  | Demak       | 16.990,00   | Kota Semarang   |
| 11 | 10.972,00 | Tegal        | 11.701,00  | Pekalongan  | 14.547,00   | Kota Pekalongan |
| 12 | 11.389,00 | Brebes       |            |             | 14.358,00   | Kota Tegal      |



Gambar 2.55.

Sebaran Pengeluaran Per Kapita Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024





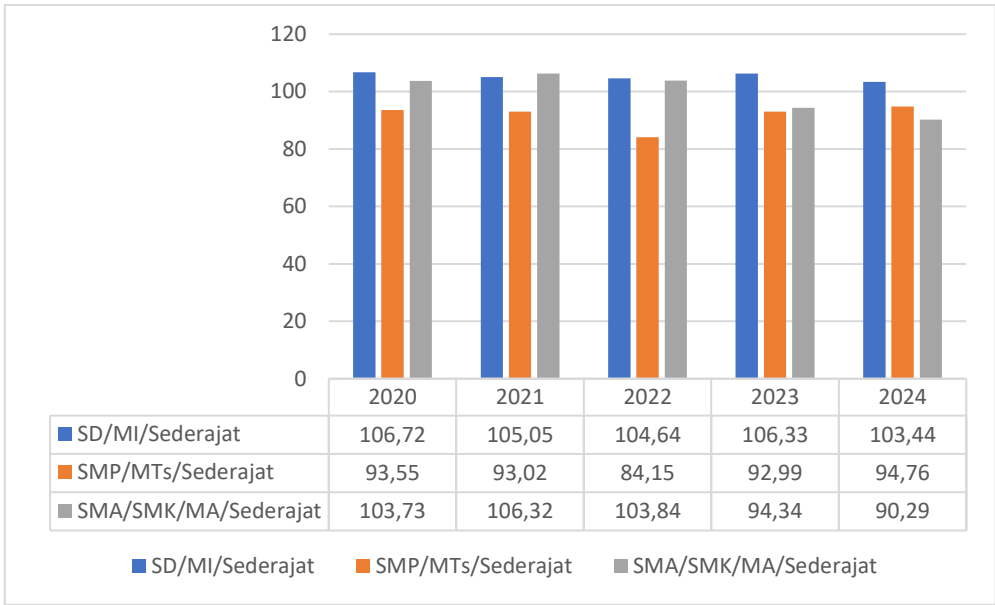
Gambar 2.57.

Perbandingan Pertumbuhan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Kendal dengan Wilayah Setara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024

5) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu.

Angka Partisipasi Kasar untuk SD sederajat di Kabupaten Kendal pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun 2023. Pada tahun 2023, APK untuk SD sederajat di Kabupaten Kendal mencapai 106,33 kemudian pada tahun 2024 menurun menjadi 103,44. Sedangkan APK SMP sederajat mengalami peningkatan 1,77 persen dari tahun 2023, dimana capaian tahun 2023 sebesar 92,99 meningkat menjadi 94,76 pada tahun 2024. Namun APK SMA Sederajat mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar 94,34 menjadi 90,29. Penurunan APK ini dapat mengindikasikan menurunnya partisipasi dari peserta didik yang usianya tidak sesuai dengan jenjang pendidikan tertentu (misalnya siswa yang terlalu muda atau terlalu tua). Oleh karena itu perlunya intervensi kebijakan yang konsisten untuk meningkatkan kualitas dan keterjangkauan pendidikan di Kabupaten Kendal. Perkembangan APK di Kabupaten Kendal dapat dilihat dalam gambar berikut.

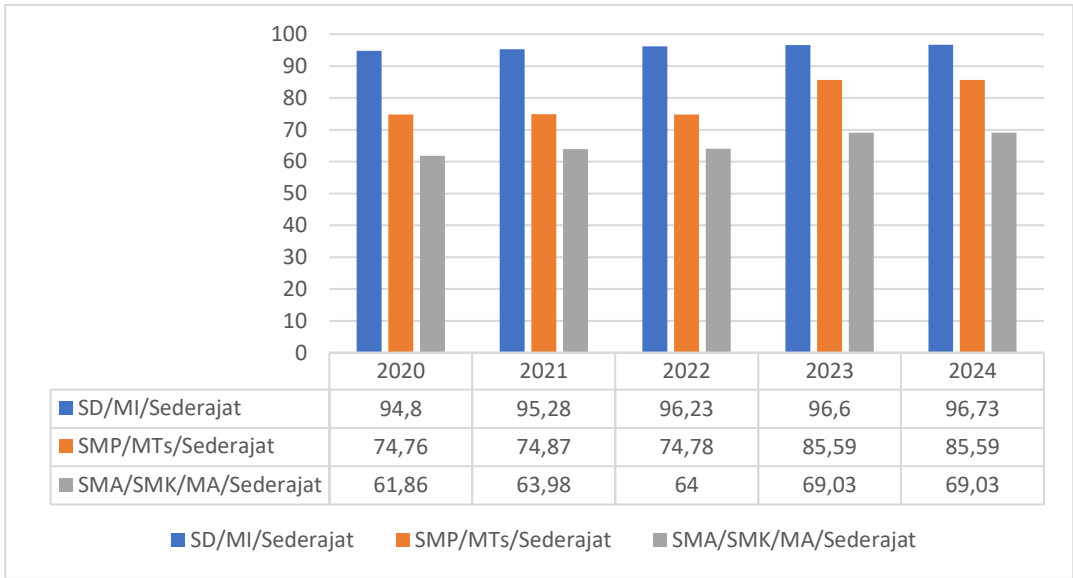


Gambar 2.58.  
Angka Partisipasi Kasar Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Kendal  
Tahun 2020-2024  
(Sumber : *Kabupaten Kendal Dalam Angka Tahun 2025*)

6) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap seluruh anak pada kelompok usia tersebut.

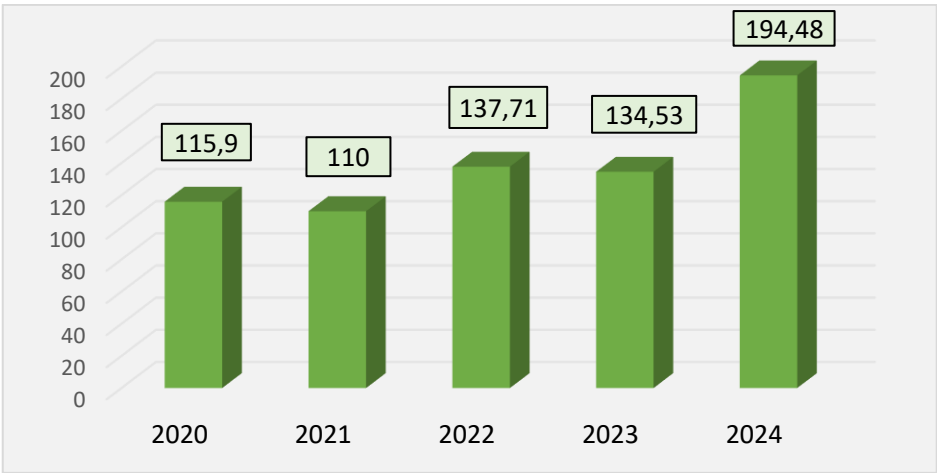
Angka Partisipasi Murni jenjang pendidikan SD/MI/Sederajat di Kabupaten Kendal mengalami perbedaan pada capaian tahun 2024. APM jenjang pendidikan SD/MI/Sederajat mengalami sedikit peningkatan dari tahun 2023 sebesar 96,6 menjadi 96,73 pada tahun 2024. APM untuk jenjang SMP/MTs/Sederajat dan jenjang SMA/SMK/Sederajat tidak mengalami perubahan capaian dari tahun 2023 hingga tahun 2024, namun menunjukkan perkembangan positif dari tahun 2020 yakni sebesar 74,76 dan 61,86 meningkat hingga mencapai 85,59 dan 69,03 pada tahun 2024. Perkembangan tersebut menandakan bahwa akses terhadap pendidikan formal bagi kelompok usia sekolah di Kabupaten Kendal semakin merata dan tepat sasaran. Adapun capaian APM di Kabupaten Kendal tersaji dalam gambar berikut.



Gambar 2.59.  
Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Kendal  
Tahun 2020 – 2024  
(Sumber : *Kabupaten Kendal Dalam Angka Tahun 2025*)

7) Angka Kematian Ibu

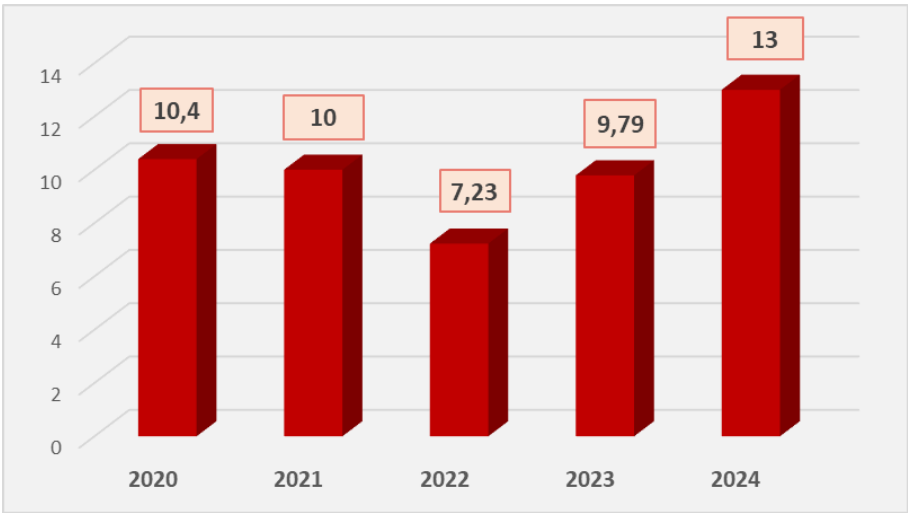
Angka Kematian Ibu di Kabupaten Kendal masih merupakan masalah yang belum dapat ditanggulangi. Pada tahun 2022, AKI di Kabupaten Kendal sebesar 137,71/ 100.000 kelahiran hidup, kemudian pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 134,53/100.000 kelahiran hidup. Namun pada tahun 2024, AKI di Kabupaten Kendal mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu menjadi 194,48/ 100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, jumlah kasus kematian ibu juga meningkat dari 18 kasus pada tahun 2023 menjadi 22 kasus pada tahun 2024. Peningkatan ini menandakan masih lemahnya sistem deteksi dini, penanganan komplikasi kehamilan, serta belum optimalnya layanan kesehatan ibu dan bayi, terutama di tingkat primer dan rujukan. Penyebab utama kematian ibu kemungkinan masih berkaitan dengan faktor risiko kehamilan dan penyakit penyerta yang belum tertangani secara sistematis. Sehingga dapat dikatakan bahwa usaha untuk menekan angka kematian ibu sudah dilaksanakan namun masih belum optimal. Capaian AKI di Kabupaten Kendal selama kurun waktu 2020-2024 dapat dilihat dalam gambar berikut.



Gambar 2.60.  
Angka Kematian Ibu di Kabupaten Kendal Tahun 2020-2024  
(Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2025)

8) Angka Kematian Bayi

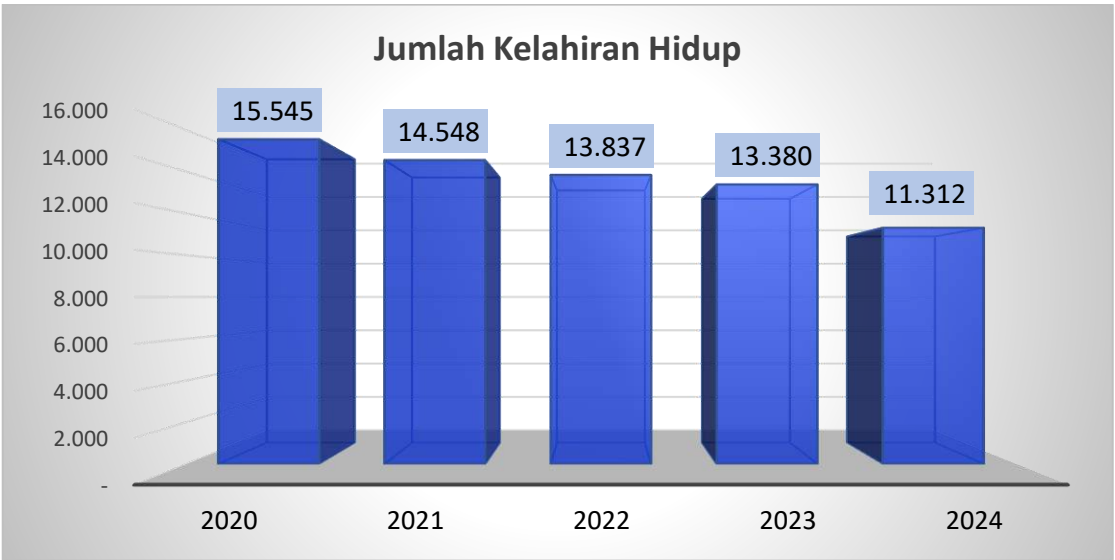
Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya kematian bayi usia dibawah satu tahun, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. AKB di Kabupaten Kendal mengalami fluktuasi dan masih merupakan masalah yang belum dapat ditanggulangi. AKB di Kabupaten Kendal pada tahun 2024 mencapai 13,00 per 1000 kelahiran hidup. Angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2023 yang mencapai 9,79 per 1000 kelahiran hidup. Namun pada tahun 2023, AKB Kabupaten Kendal mengalami kenaikan yakni mencapai 9,79 per 1000 kelahiran hidup. Lonjakan ini menunjukkan bahwa sistem deteksi dini masih lemah, serta belum optimalnya layanan kesehatan ibu dan bayi. Capaian AKB di Kabupaten Kendal selama kurun waktu 2019-2023 dapat dilihat dalam gambar berikut.



Gambar 2.61.  
Angka Kematian Bayi di Kabupaten Kendal Tahun 2020-2024  
(Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2024)

9) Jumlah Kelahiran Hidup

Jumlah kelahiran hidup di Kabupaten Kendal terus mengalami penurunan selama lima tahun terakhir. Penurunan fertilitas mengakibatkan proporsi anak-anak dalam populasi ikut menurun. Kondisi ini dapat mengakibatkan rasio ketergantungan menjadi lebih rendah dan menciptakan bonus demografi. Untuk lebih detailnya, penurunan jumlah kelahiran hidup di Kabupaten Kendal dalam kurun waktu 2020-2024 dapat dilihat dalam gambar berikut.



Gambar 2.62.  
Jumlah Kelahiran Hidup di Kabupaten Kendal Tahun 2020-2024  
(Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2025)

10) Tingkat Pengangguran Terbuka

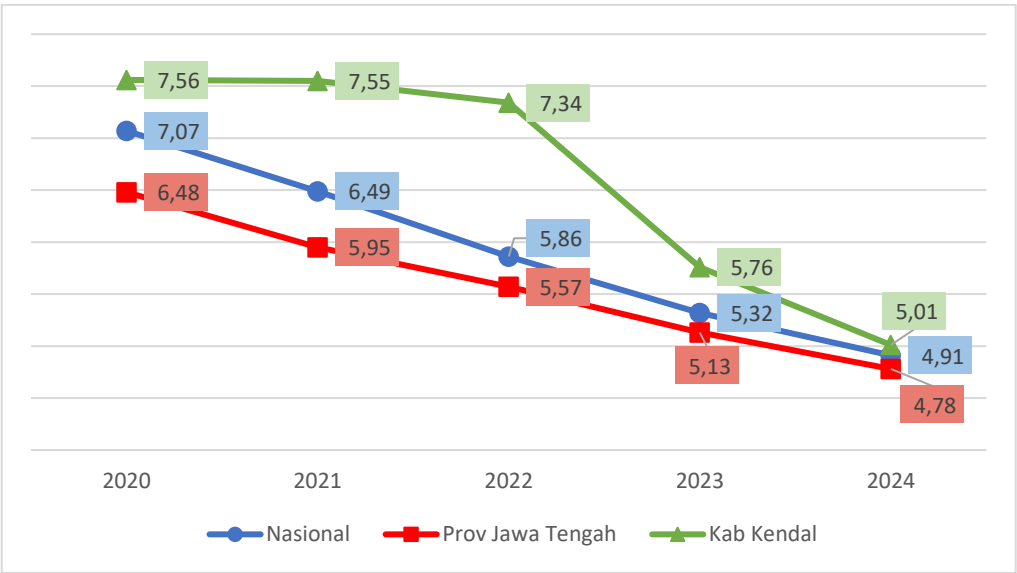
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan tenaga kerja yang ada. Artinya, semakin tinggi nilai TPT maka semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak terserap/ termanfaatkan dalam pasar kerja. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

TPT di Kabupaten Kendal mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 7,55% menjadi sebesar 7,34% di tahun 2022. Kemudian pada tahun 2023 terjadi penurunan cukup signifikan yakni mencapai 5,76%. Pada tahun 2024, TPT kembali mengalami penurunan hingga mencapai 5,01%, yang artinya **sudah melampaui target** tahun 2024 yakni sebesar 5,43%. Pada tahun 2024, sudah lebih banyak angkatan kerja di Kabupaten Kendal yang bekerja daripada menganggur. Penurunan TPT

didukung oleh adanya perluasan lapangan kerja dan pelatihan siap kerja, serta kerjasama dengan Perusahaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kendal masih berada diatas rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 4,78% dan Nasional sebesar 4,91%.

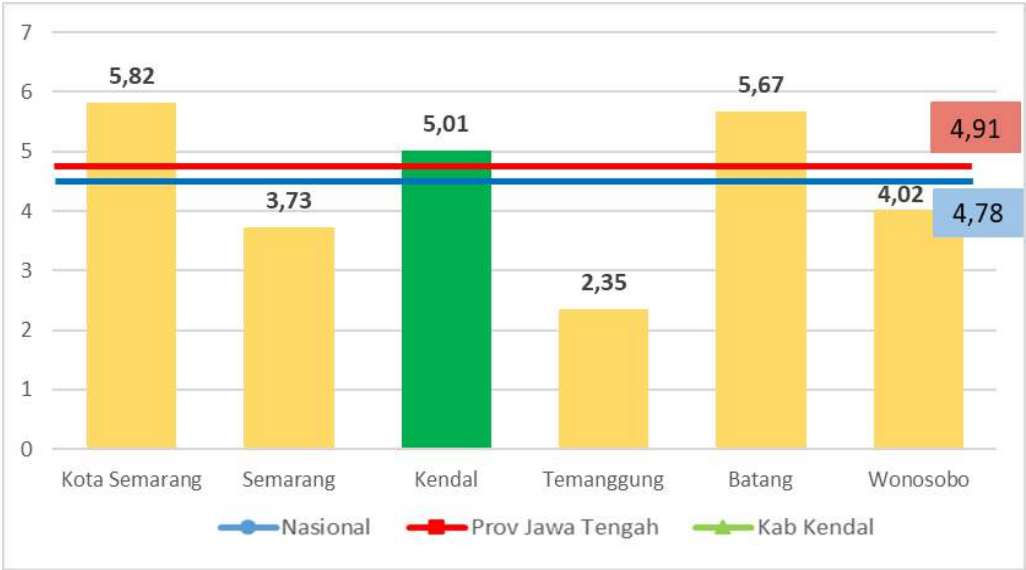
Meskipun mengalami penurunan, TPT di Kabupaten Kendal tergolong masih lebih tinggi dibanding Provinsi Jawa Tengah dan nasional serta kabupaten lainnya. Kurangnya kompetensi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan menjadi salah satu sebab tingginya TPT di Kabupaten Kendal. Adanya KIK belum dapat menekan angka TPT dengan signifikan, karena saat ini investor yang ada merupakan investor padat modal, sehingga tidak terlalu banyak membutuhkan tenaga kerja, dan tenaga kerja yang dipekerjakan pun harus sesuai dengan kompetensi tertentu. Selain kompetensi tenaga kerja, kurangnya kemampuan berwirausaha juga menjadi penyebab lain tingginya TPT. Angkatan kerja yang tidak mempunyai kompetensi yang sesuai ataupun yang tidak memungkinkan bekerja di luar rumah, belum dapat menjadi wirausaha. Sehingga, selain diperlukan peningkatan kompetensi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri, juga diperlukan pelatihan kewirausahaan agar tidak semua tenaga kerja fokus mencari pekerjaan, tetapi juga dapat membuka lapangan pekerjaan. Angkatan kerja yang tidak dapat bekerja di luar rumah misalnya ibu rumah tangga dapat diberikan pelatihan dan pendampingan untuk menjadi wirausaha. Maka angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dapat meningkat dan angka TPT dapat diturunkan.

Berikut disajikan grafik perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kendal dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2020-2024:



Gambar 2.63.  
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kendal dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020 – 2024  
(Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025)

Dibandingkan dengan wilayah sekitar, TPT Kabupaten Kendal tergolong cukup tinggi, masih lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo. Untuk lebih lengkapnya, dapat dilihat pada gambar berikut.



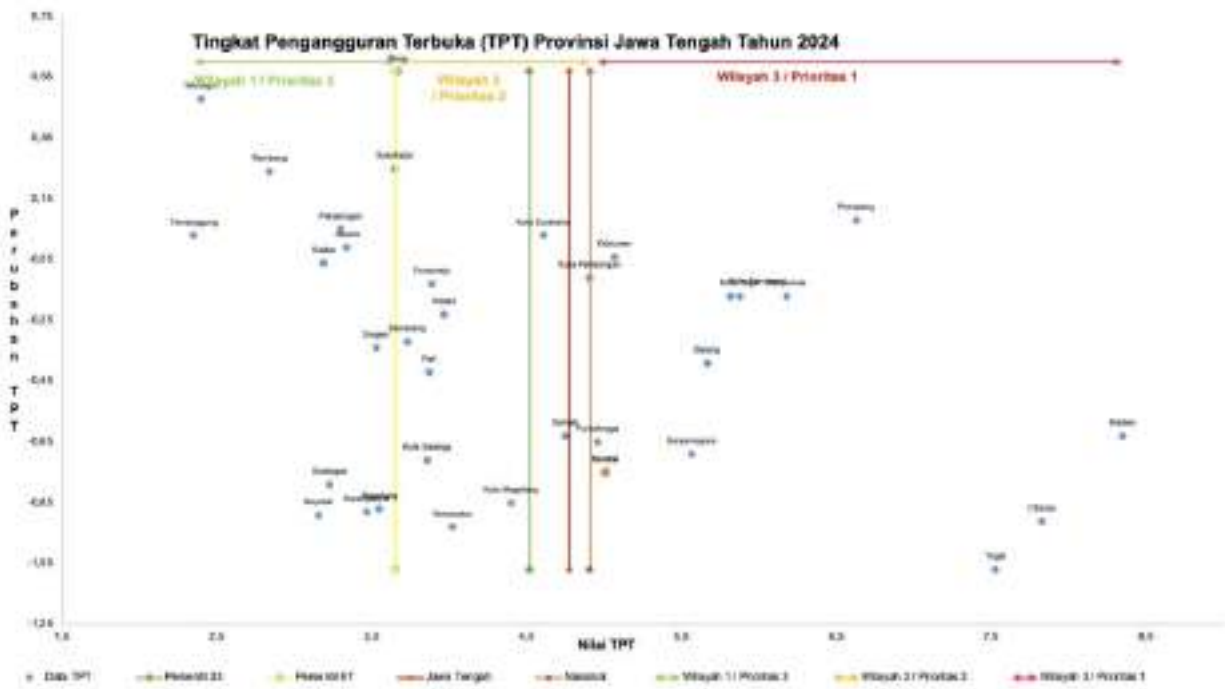
Gambar 2.64.  
Perbandingan Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2024  
(Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025)

TPT Kabupaten Kendal termasuk dalam wilayah yang tinggi TPT nya, setara dengan Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten

Brebes, Kota Semarang dan Kota Tegal. Selengkapnya, dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.22  
Tabel Wilayah Setara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

| No | Wilayah I |             | Wilayah II |                 | Wilayah III |               |
|----|-----------|-------------|------------|-----------------|-------------|---------------|
| 1  | 3,55      | Magelang    | 3,89       | Purworejo       | 7,83        | Cilacap       |
| 2  | 3,16      | Boyolali    | 4,02       | Wonosobo        | 6,18        | Banyumas      |
| 3  | 3,65      | Sukoharjo   | 3,97       | Klaten          | 4,96        | Purbalingga   |
| 4  | 2,4       | Wonogiri    | 3,67       | Blora           | 5,57        | Banjarnegara  |
| 5  | 3,47      | Karanganyar | 3,87       | Pati            | 5,07        | Kebumen       |
| 6  | 3,53      | Sragen      | 4,75       | Demak           | 5,01        | Kendal        |
| 7  | 3,23      | Grobogan    | 3,73       | Semarang        | 5,67        | Batang        |
| 8  | 2,84      | Rembang     | 4,4        | Kota Magelang   | 6,63        | Pemalang      |
| 9  | 3,19      | Kudus       | 4,61       | Kota Surakarta  | 7,53        | Tegal         |
| 10 | 3,34      | Jepara      | 3,86       | Kota Salatiga   | 8,35        | Brebes        |
| 11 | 2,35      | Temanggung  | 4,91       | Kota Pekalongan | 5,82        | Kota Semarang |
| 12 | 3,3       | Pekalongan  |            |                 | 5,88        | Kota Tegal    |



Gambar 2.65.  
Sebaran Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024

Capaian Kabupaten Kendal tercatat **lebih baik** jika dibandingkan dengan capaian rata-rata wilayah setaranya yang tercatat sebesar 6,21%. Selengkapnya, dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.66.  
Perbandingan TPT Kabupaten Kendal dengan Wilayah Setara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024

Dilihat dari sisi pertumbuhannya, pertumbuhan Kabupaten Kendal tergolong cukup baik yaitu sebesar 0,75%. Hal ini terlihat dari pertumbuhannya yang tercatat **lebih baik** dari pertumbuhan Nasional yang tercatat 0,41%, Provinsi Jawa Tengah yang tercatat sebesar 0,35% maupun rata-rata wilayah setara yang tercatat sebesar 0,46%. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



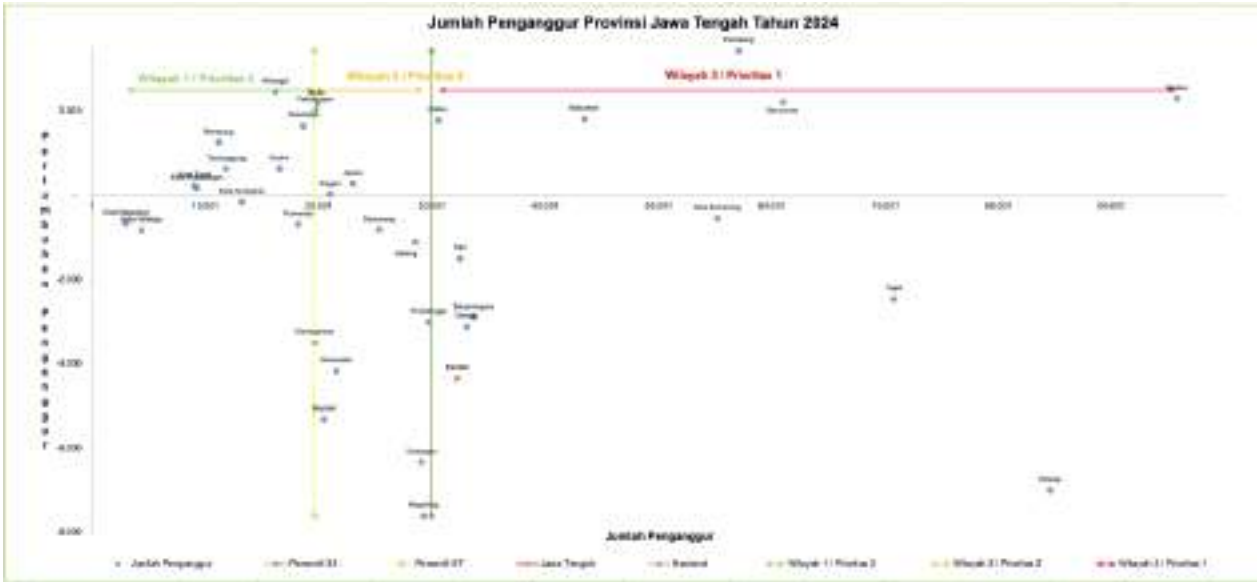
Gambar 2.67.  
Perbandingan Pertumbuhan TPT Kabupaten Kendal dengan Wilayah Setara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024

Jumlah penganggur di Kabupaten Kendal tercatat sebesar 32.194 jiwa, capaian ini **lebih** baik jika dibandingkan jumlah penganggur Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 1.047.451 jiwa, dan Nasional yang mencapai 7.466.000 jiwa. Namun, meskipun lebih baik dibandingkan provinsi dan nasional, capaian Kabupaten Kendal termasuk dalam wilayah dengan capaian yang tinggi, setara dengan Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Klaten, Kabupaten Pati, Kabupaten Demak, Kabupaten

Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, dan Kota Semarang. Selengkapnya, dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

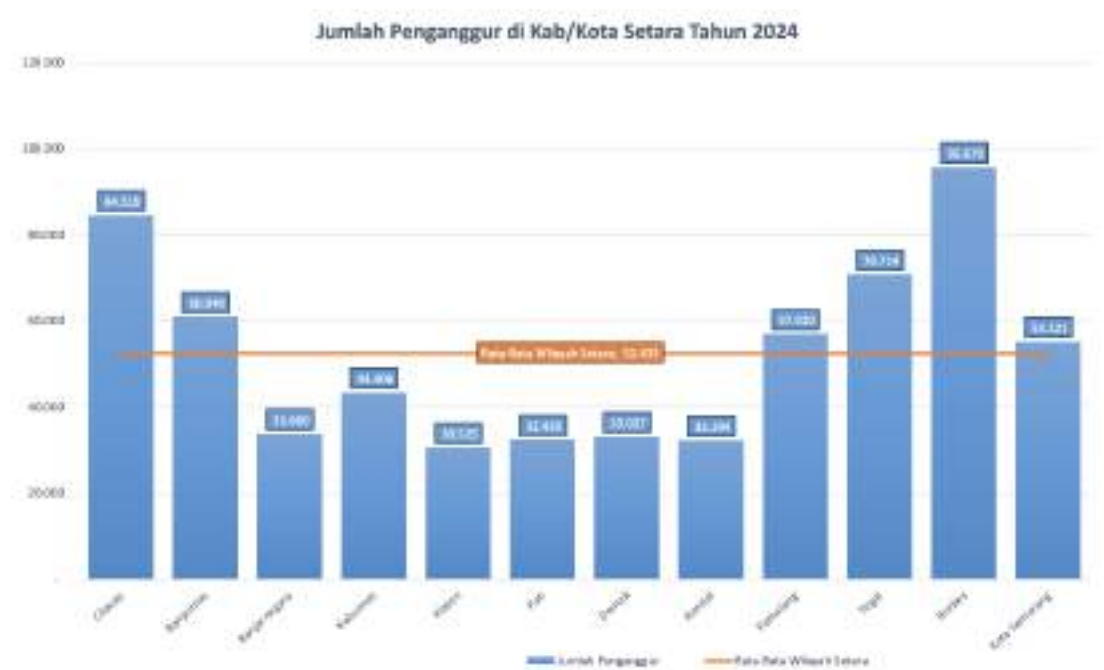
Tabel 2.23  
Tabel Wilayah Setara Jumlah Penganggur Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

| No | Wilayah I |                 | Wilayah II |             | Wilayah III |               |
|----|-----------|-----------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 1  | 18.190    | Purworejo       | 29.713     | Purbalingga | 84.519      | Cilacap       |
| 2  | 18.631    | Sukoharjo       | 21.548     | Wonosobo    | 60.940      | Banyumas      |
| 3  | 16.195    | Wonogiri        | 29.240     | Magelang    | 33.660      | Banjarnegara  |
| 4  | 19.627    | Karanganyar     | 20.469     | Boyolali    | 43.406      | Kebumen       |
| 5  | 11.156    | Rembang         | 20.992     | Sragen      | 30.525      | Klaten        |
| 6  | 16.508    | Kudus           | 29.053     | Grobogan    | 32.420      | Pati          |
| 7  | 11.823    | Temanggung      | 19.801     | Blora       | 33.027      | Demak         |
| 8  | 2.979     | Kota Magelang   | 22.976     | Jepara      | 32.194      | Kendal        |
| 9  | 13.204    | Kota Surakarta  | 25.322     | Semarang    | 57.020      | Pemalang      |
| 10 | 4.354     | Kota Salatiga   | 28.516     | Batang      | 70.714      | Tegal         |
| 11 | 9.242     | Kota Pekalongan | 19.642     | Pekalongan  | 95.679      | Brebes        |
| 12 | 9.045     | Kota Tegal      |            |             | 55.121      | Kota Semarang |



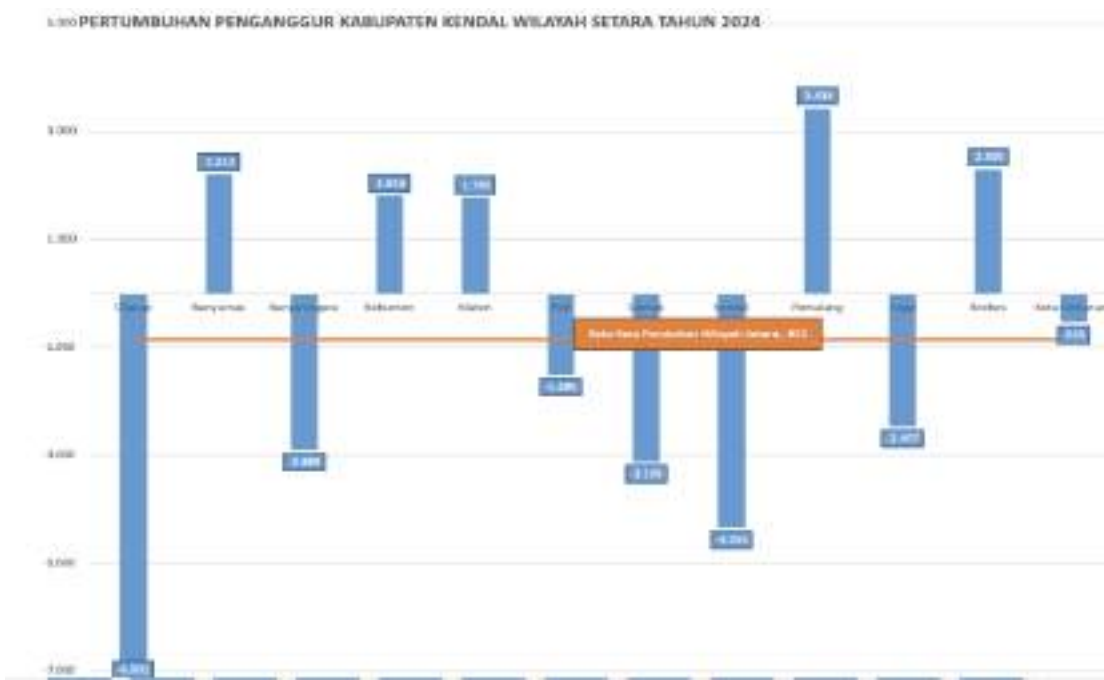
Gambar 2.68.  
Sebaran Jumlah Penganggur Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024

Capaian Kabupaten Kendal tercatat **lebih baik** jika dibandingkan dengan capaian rata-rata wilayah setaranya yang tercatat sebesar 52.435 jiwa. Selengkapnya, dapat dilihat pada gambar berikut.



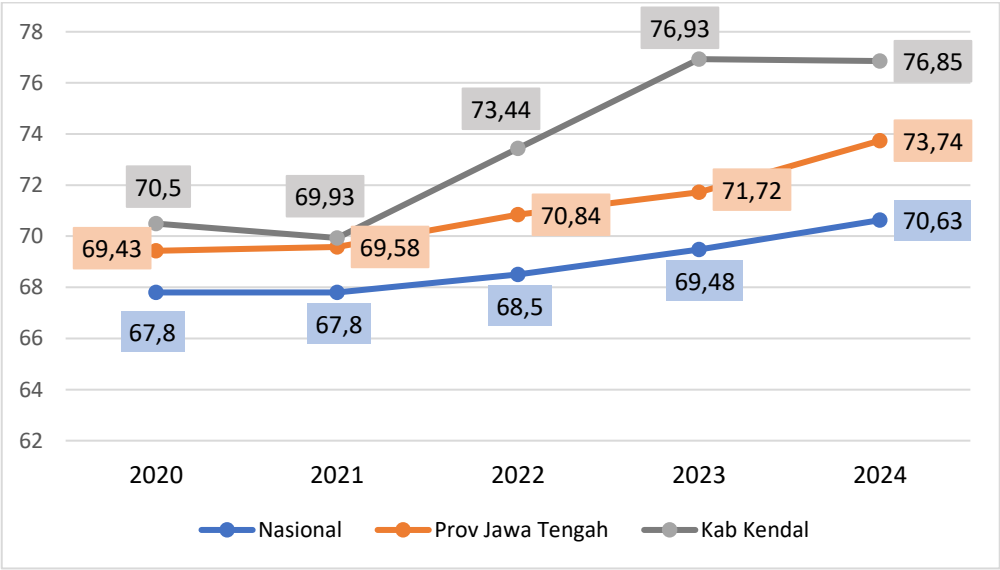
Gambar 2.69.  
Perbandingan Jumlah Penganggur Kabupaten Kendal dengan Wilayah Setara Tahun 2024

Dilihat dari sisi pertumbuhannya, pertumbuhan Kabupaten Kendal menurun sebesar 3.109 jiwa. Namun, capaian ini belum lebih baik jika dibandingkan dengan penurunan Nasional yang mencapai 389.080 jiwa, maupun Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 32.809 jiwa, namun lebih baik dibandingkan dengan penurunan rata-rata wilayah setara yang sebesar 855 jiwa. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.70.  
Perbandingan Jumlah Penganggur Kabupaten Kendal dengan Wilayah Setara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024

TPAK merupakan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di Kabupaten Kendal. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa pada perekonomian di Kabupaten Kendal. Pada tahun 2023, TPAK Kabupaten Kendal sebesar 76,93 %, artinya dari 100 orang penduduk usia kerja, sekitar 76 orang termasuk angkatan kerja. Atau dapat diartikan dari 1.000 orang penduduk usia kerja sekitar 760 orang diantaranya aktif secara ekonomi. Pada tahun 2024, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Kendal cenderung mengalami sedikit penurunan menjadi 76,85% dari tahun 2023 yang tercatat sebesar 76,93%. Namun TPAK Kabupaten Kendal lebih tinggi dari TPAK Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang masing-masing tercatat sebesar 73,74% dan 70,63%. Peningkatan TPAK ini menunjukkan meningkatnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, sehingga semakin tinggi tenaga kerja yang tersedia pada Kabupaten Kendal. Untuk lebih lengkapnya, perbandingan TPAK di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada gambar di bawah.

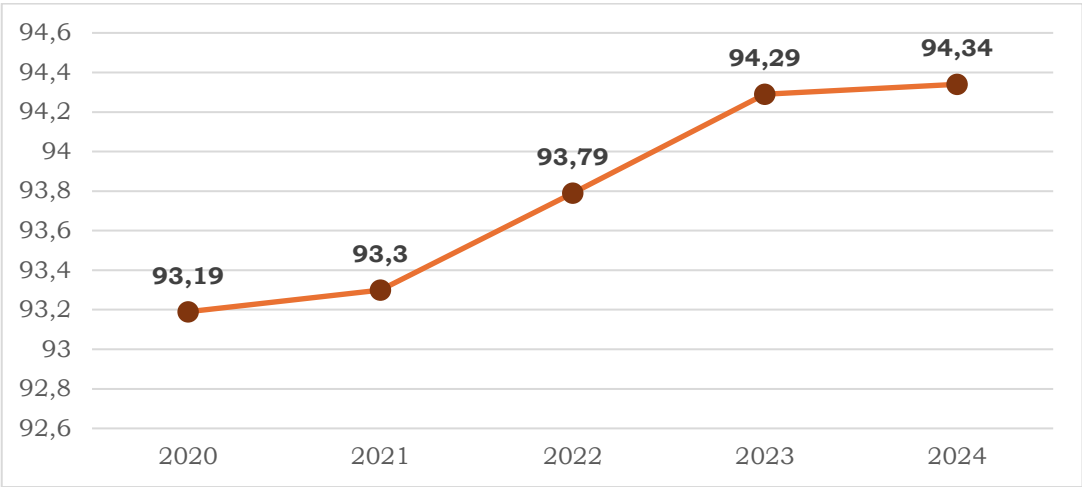


Gambar 2.71.  
Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2024  
(Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024)

11) Indeks Pembangunan Gender

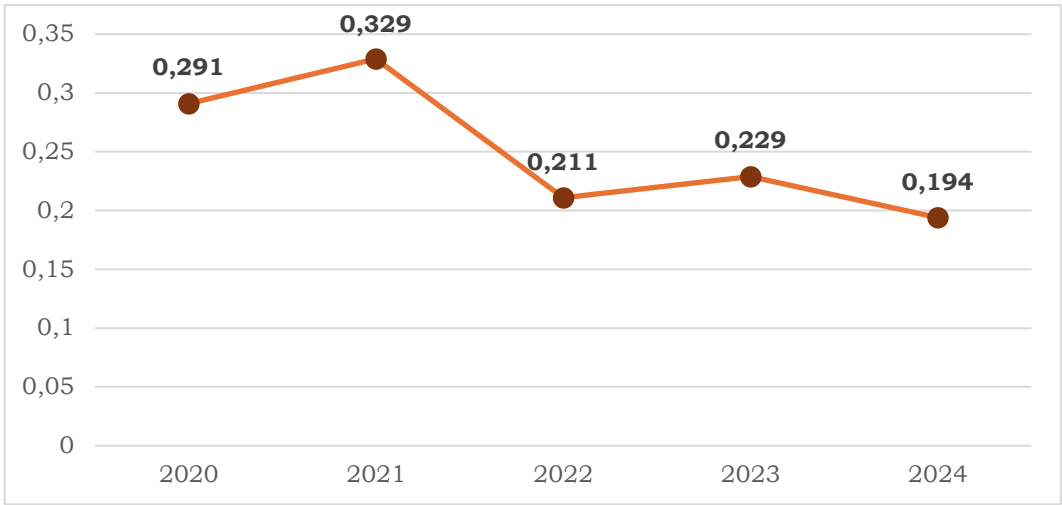
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Kendal tercatat mengalami peningkatan positif dari tahun 2020 sebesar 93,19, menjadi 94,34 pada tahun 2024. Capaian ini tidak hanya menunjukkan tren

kenaikan yang konsisten, tetapi juga berhasil melampaui target yang ditetapkan sebesar 93,2. Kenaikan IPG mencerminkan semakin kecilnya kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Peningkatan IPG ini mencerminkan keberhasilan Kabupaten Kendal dalam mendorong kesetaraan gender melalui kebijakan yang lebih inklusif dan responsif. Berikut disajikan gambar grafik perkembangan IPG Kabupaten Kendal dari tahun 2020 hingga 2024.



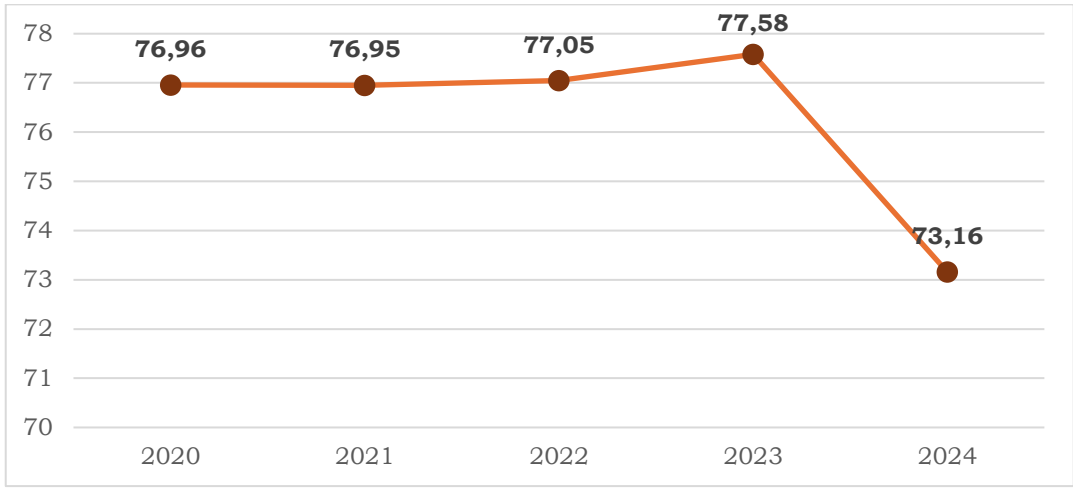
Gambar 2.72.  
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Kendal Tahun 2020 – 2024  
(Sumber : BPS Kabupaten Kendal, 2025)

Ukuran ketimpangan gender yang menunjukkan capaian pembangunan manusia karena ketimpangan antara perempuan dengan laki-laki ditunjukkan dengan Indeks Ketimpangan Gender (IKG). IKG di Kabupaten Kendal cenderung menunjukkan perubahan yang fluktuatif dari tahun ke tahun selama periode 2020 hingga 2024. IKG tercatat sebesar 0,291 pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 0,329 pada tahun 2021. Selanjutnya, nilai IKG menurun menjadi 0,211 pada tahun 2022 dan sedikit meningkat menjadi 0,229 pada tahun 2023 dan menurun menjadi 0,194 pada tahun 2024. Berdasarkan klasifikasi IKG, yaitu rendah (kurang dari 0,405), menengah bawah (0,405–0,450), menengah atas (0,450–0,495), dan tinggi (lebih dari 0,495), Kabupaten Kendal termasuk dalam kategori rendah sepanjang periode tersebut. Indeks Ketimpangan Gender di Kabupaten Kendal menunjukkan adanya tantangan dalam mewujudkan kesetaraan dan perlindungan hak perempuan. Adapun IKG Kabupaten Kendal Tahun 2020 – 2024 disajikan pada grafik berikut ini:



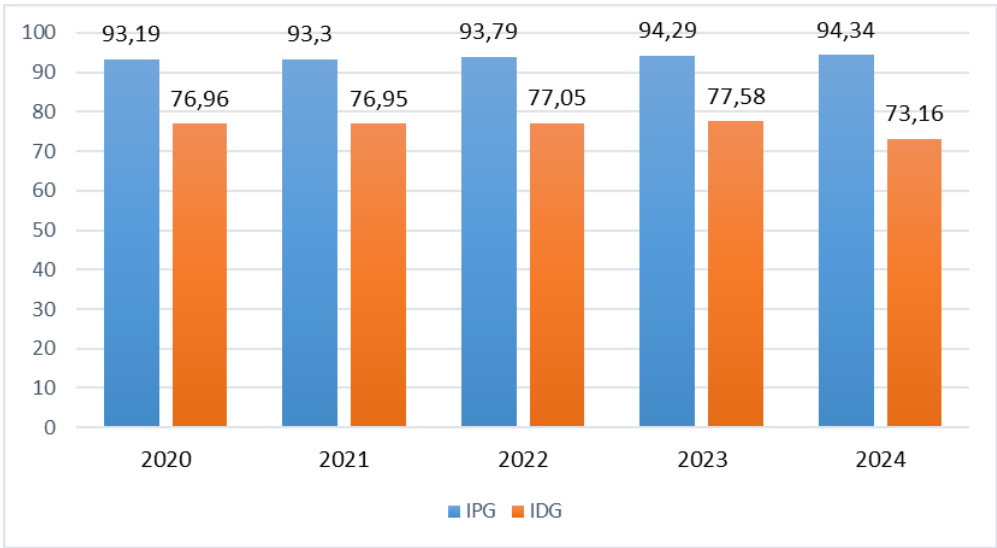
Gambar 2.73.  
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Kendal Tahun 2020 – 2024  
(Sumber : BPS Kabupaten Kendal, 2025)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Kendal menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2023, yakni dari 76,96 menjadi 77,58. Hal ini menunjukkan adanya keaktifan dan penguatan peran perempuan dalam bidang politik, ekonomi, dan ketenagakerjaan formal. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan signifikan menjadi 73,16. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan kembali kebijakan afirmatif, pelatihan kepemimpinan perempuan, serta pemberdayaan ekonomi yang lebih inklusif guna mendorong peningkatan IDG di masa mendatang. Perkembangan IDG Kabupaten Kendal Tahun 2020 – 2024 disajikan dalam grafik sebagai berikut:



Gambar 2.74.  
Perkembangan IDG Kabupaten Kendal Tahun 2020-2024  
(Sumber : BPS Kabupaten Kendal, 2025)

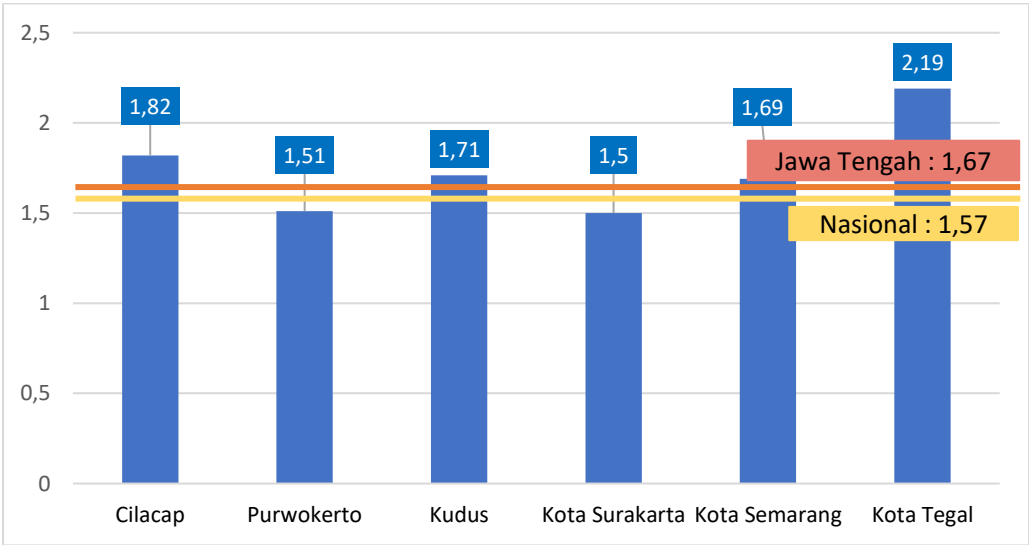
Adapun perbandingan IPG dan IDG Kabupaten Kendal disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 2.75.  
Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Kendal Tahun 2020 – 2024  
(Sumber : BPS Kabupaten Kendal, 2025)

12) Inflasi

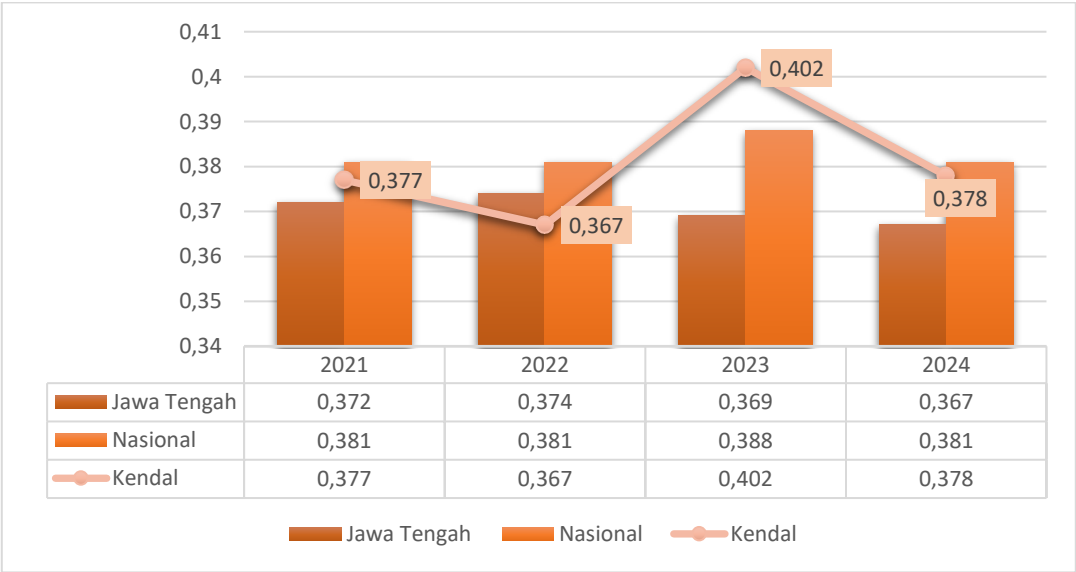
Pada Tahun 2024, inflasi Kabupaten Kendal dapat disetarakan dengan Kota Tegal. Inflasi mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar 3,28% menjadi 2,19% pada tahun 2024. Inflasi Kota Tegal menduduki peringkat tertinggi dari 6 kota di Jawa Tengah. Meskipun, jika dibandingkan dengan Inflasi Jawa Tengah yang sebesar 1,67% dan Inflasi Nasional yang sebesar 1,57%, inflasi Kota Tegal ini masih lebih tinggi. Inflasi terendah di Jawa Tengah dicapai oleh Kota Surakarta dengan capaian 1,50%. Diperlukan perhatian khusus untuk dapat menekan inflasi di setiap Kabupaten/Kota agar tidak semakin tinggi dan mempengaruhi perekonomian Masyarakat.



Gambar 2.76.  
Perbandingan Inflasi 6 Kota di Jawa Tengah Tahun 2024  
(Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025)

13) Rasio Gini

Rasio Gini merupakan alat untuk mengukur ketimpangan ekonomi yang terdapat pada sebuah populasi melalui adanya pemerataan pendapatan. Rasio Gini Kabupaten Kendal pada tahun 2023 adalah sebesar 0,402 dan menurun pada tahun 2024 menjadi sebesar 0,378, sehingga **melampaui target** yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu 0,402. Penurunan tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam distribusi pendapatan, sebagai hasil dari intervensi kebijakan yang lebih adaptif dan berorientasi pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Selain itu, penurunan Rasio Gini pada tahun 2024 dapat dikaitkan dengan membaiknya kualitas pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, antara lain melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam sektor-sektor produktif, penguatan program perlindungan sosial, serta pemerataan pembangunan di berbagai wilayah. Rasio gini Kabupaten Kendal pada tahun 2024 lebih tinggi dibanding Provinsi Jawa Tengah, namun **lebih rendah** dibanding Nasional. Berikut disajikan data rasio gini Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2021-2024.



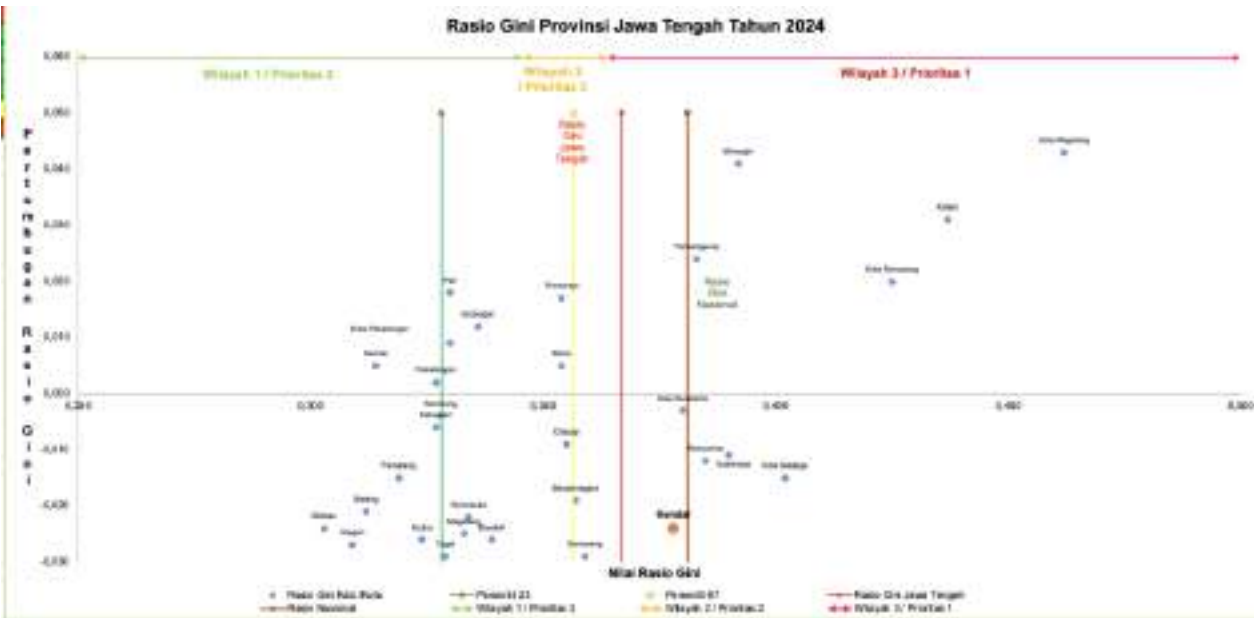
Gambar 2.77.  
Rasio Gini Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2024  
(Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025)

Dibandingkan dengan Kabupaten kota di Jawa Tengah, rasio gini Kabupaten Kendal masuk dalam wilayah dengan rasio gini yang tinggi. Capainnya setara dengan Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kota Magelang,

Kota Surakarta, Kota Salatiga dan Kota Semarang. Selengkapnya, dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

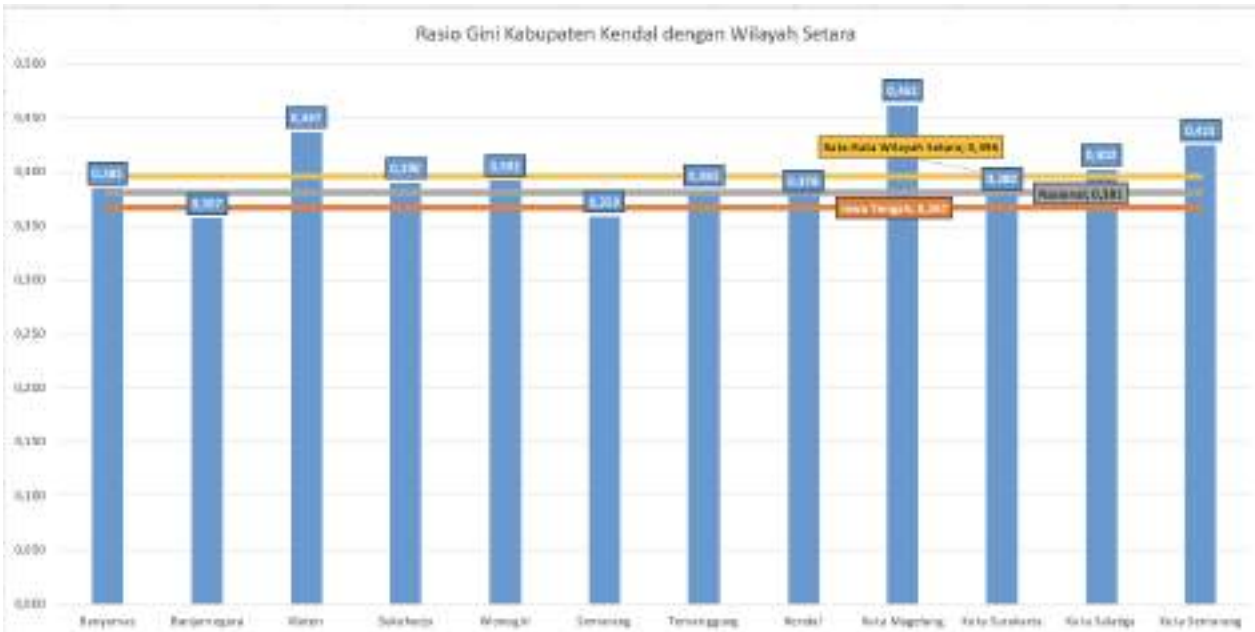
Tabel 2.24  
Tabel Wilayah Setara Rasio Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

| No | Wilayah I |             | Wilayah II |                 | Wilayah III |                |
|----|-----------|-------------|------------|-----------------|-------------|----------------|
| 1  | 0,314     | Purbalingga | 0,355      | Cilacap         | 0,385       | Banyumas       |
| 2  | 0,327     | Kebumen     | 0,354      | Purworejo       | 0,357       | Banjarnegara   |
| 3  | 0,309     | Sragen      | 0,334      | Wonosobo        | 0,437       | Klaten         |
| 4  | 0,328     | Rembang     | 0,333      | Magelang        | 0,390       | Sukoharjo      |
| 5  | 0,324     | Kudus       | 0,339      | Boyolali        | 0,392       | Wonogiri       |
| 6  | 0,277     | Jepara      | 0,352      | Karanganyar     | 0,359       | Semarang       |
| 7  | 0,314     | Demak       | 0,336      | Grobogan        | 0,383       | Temanggung     |
| 8  | 0,312     | Batang      | 0,354      | Blora           | 0,378       | Kendal         |
| 9  | 0,327     | Pekalongan  | 0,330      | Pati            | 0,462       | Kota Magelang  |
| 10 | 0,319     | Pemalang    | 0,329      | Tegal           | 0,380       | Kota Surakarta |
| 11 | 0,303     | Brebes      | 0,330      | Kota Pekalongan | 0,402       | Kota Salatiga  |
| 12 | 0,326     | Kota Tegal  |            |                 | 0,425       | Kota Semarang  |



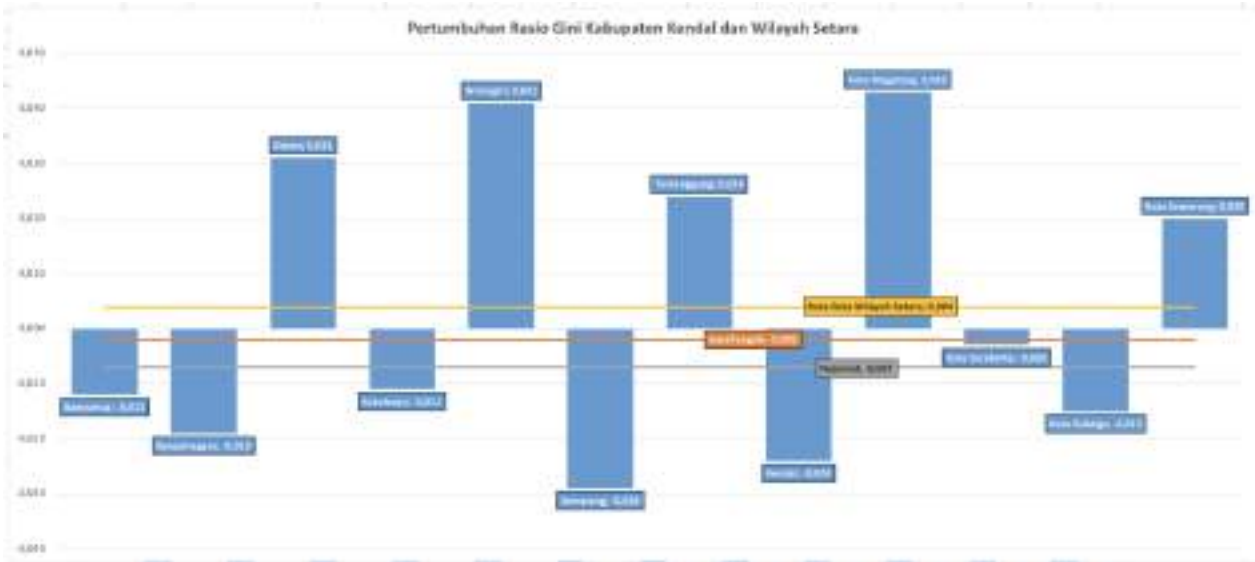
Gambar 2.78.  
Sebaran Rasio Gini Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024

Capaian Kabupaten Kendal tercatat **lebih baik** jika dibandingkan dengan capaian rata-rata wilayah setaranya yang tercatat sebesar 0,396. Selengkapnya, dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.79.  
Perbandingan Rasio Gini Kabupaten Kendal dengan Wilayah Setara Tahun 2024

Dilihat dari sisi pertumbuhannya, pertumbuhan Kabupaten Kendal menurun sebesar -0,024. Capaian ini lebih baik jika dibandingkan dengan penurunan Nasional yang yang tercatat sebesar -0,007, Provinsi Jawa Tengah yang tercatat -0,002, maupun dibandingkan pertumbuhan rata-rata wilayah setara yang justru meningkat sebesar 0,004. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.80.  
Perbandingan Rasio Gini Kabupaten Kendal dengan Wilayah Setara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga.

Kondisi fokus seni budaya dan olahraga adalah untuk melihat sejauh mana prestasi olahraga dan kebudayaan di Kabupaten Kendal. Atlet berprestasi Kabupaten Kendal terus meningkatkan prestasinya, hal ini bisa dilihat dari

jumlah atlet berprestasi yang terus bertambah setiap tahunnya, kecuali tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi COVID-19, sehingga kompetisi olahraga ditiadakan. Budaya lokal maupun cagar budaya yang ada di Kabupaten Kendal juga selalu dilestarikan sehingga indikator persentase budaya lokal yang dilestarikan maupun persentase cagar budaya yang dilestarikan tercapai 100%.

Tabel 2.25  
Kinerja Makro Urusan Seni Budaya dan Olahraga Kabupaten Kendal  
Tahun 2020 – 2024

| NO | URAIAN                                                                                  | SATUAN | Capaian Kinerja |      |      |      |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------|------|------|------|
|    |                                                                                         |        | 2020            | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1  | Jumlah atlet olah raga yang berprestasi di tingkat provinsi, nasional dan internasional | atlet  | 35              | 100  | 264  | 223  | 295  |
| 2  | Persentase budaya lokal yang dilestarikan                                               | %      | N/A             | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 3  | Persentase cagar budaya yang dilestarikan                                               | %      | 3               | 100  | 100  | 100  | 100  |

(Sumber : Evaluasi RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2024)

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum.

Dalam rangka memberikan pelayanan, meningkatkan peran serta, prakarsa dan memberdayakan masyarakat, secara eksplisit terlihat pada kinerja pelaksanaan pembangunan pada masing-masing urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kendal yang terdiri dari fokus layanan wajib dan fokus layanan urusan pilihan.

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

2.1.3.1.1 Wajib Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

Pada urusan Pendidikan, terdapat 11 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 14 Indikator Kinerja Kunci (IKK). Pada tahun 2024 capaian indikator-indikator urusan pendidikan cenderung mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024 meskipun capaiannya masih tergolong sangat tinggi. Sedangkan indikator yang lain, meskipun belum memenuhi target sebesar 100%, tetapi sudah menunjukkan tren meningkat setiap tahun. Belum tercapainya indikator pada urusan Pendidikan salah satunya dikarenakan masih adanya siswa yang putus sekolah.

Tabel 2.26  
Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Urusan Pendidikan  
Kabupaten Kendal Tahun 2020 – 2024

| No  | Indikator                                                                      | Satuan | Capaian Kinerja |       |       |       |       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
|     |                                                                                |        | 2020            | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|     | Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan                                            |        |                 |       |       |       |       |
|     | IKU OPD                                                                        |        |                 |       |       |       |       |
| 1.  | Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun                          | Tahun  | 7,45            | 7,46  | 7,71  | 7,73  | 7,74  |
| 2.  | Harapan lama sekolah                                                           | Tahun  | 12,95           | 12,96 | 12,97 | 12,99 | 13,00 |
| 3.  | Literasi                                                                       | Nilai  | N/A             | N/A   | N/A   | 60,10 | 65,90 |
| 4.  | Numerasi                                                                       | Nilai  | N/A             | N/A   | N/A   | 47,90 | 54,60 |
| 5.  | Angka Partisipasi Sekolah                                                      | %      | 97,50           | 97,54 | 98,45 | 98,78 | 98,48 |
| 6.  | Angka Partisipasi Kasar                                                        | %      | 100,14          | 99,04 | 94,40 | 99,66 | 99,10 |
| 7.  | Angka Partisipasi Murni                                                        | %      | 84,42           | 85,08 | 85,51 | 91,10 | 91,16 |
| 8.  | a) Literasi Membaca SD/Sederajat                                               | Nilai  | N/A             | N/A   | 53,58 | 53,65 | 59,95 |
| 9.  | b) Literasi Membaca SMP/Sederajat                                              | Nilai  | N/A             | N/A   | 64,27 | 66,51 | 71,85 |
| 10. | c) Numerasi SD/Sederajat                                                       | Nilai  | N/A             | N/A   | N/A   | 40,25 | 46,67 |
| 11. | d) Numerasi SMP/Sederajat                                                      | Nilai  | N/A             | N/A   | N/A   | 55,53 | 62,53 |
|     | IKK OPD                                                                        |        |                 |       |       |       |       |
| 1.  | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD | %      | N/A             | N/A   | N/A   | 83,66 | 85,65 |
| 2.  | Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)   | %      | 97,50           | 97,54 | 97,8  | 98,12 | 99,01 |
| 3.  | Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional                   | Nilai  | N/A             | N/A   | 53,58 | 53,65 | 59,95 |
| 4.  | Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional                   | Nilai  | N/A             | N/A   | N/A   | 40,25 | 46,67 |
| 5.  | Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional                  | Nilai  | N/A             | N/A   | 64,27 | 66,51 | 71,85 |
| 6.  | Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional                  | Nilai  | N/A             | N/A   | N/A   | 55,53 | 62,53 |
| 7.  | Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B              | %      | N/A             | N/A   | 87,86 | 80,71 | 79,1  |
| 8.  | Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV                           | %      | N/A             | N/A   | N/A   | 79,34 | 78,42 |
| 9.  | Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD                                       | Nilai  | N/A             | N/A   | 66,51 | 70,28 | 72,85 |
| 10. | Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP                                      | Nilai  | N/A             | N/A   | 72,61 | 67,11 | 68,87 |
| 11. | Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SD                                     | Nilai  | N/A             | N/A   | 60,28 | 70,01 | 74,01 |
| 12. | Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SMP                                    | Nilai  | N/A             | N/A   | 60,08 | 68,36 | 73    |
| 13. | Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SD                                   | Nilai  | N/A             | N/A   | 52,86 | 56,82 | 56,02 |

| No  | Indikator                                     | Satuan | Capaian Kinerja |      |       |       |       |
|-----|-----------------------------------------------|--------|-----------------|------|-------|-------|-------|
|     |                                               |        | 2020            | 2021 | 2022  | 2023  | 2024  |
| 14. | Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP | Nilai  | N/A             | N/A  | 53,35 | 55,45 | 56,46 |

(Sumber : RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029)

Berdasarkan data hasil capaian kinerja di atas dapat dilihat bahwa indikator yang menggambarkan kinerja urusan Pendidikan di Kabupaten Kendal sebanyak 14 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 14 indikator kinerja kunci (IKK). Hal-hal yang sudah/perlu dilakukan untuk meningkatkan capaian urusan Pendidikan antara lain :

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan;
- b. Meningkatkan kualitas mutu pendidikan dari Tenaga Pendidik dan Sarana Prasarana; dan
- c. Pengadaan sekolah inklusi.

Adapun Target dan realisasi SPM urusan pendidikan yang dapat dicapai atau di realisasikan oleh Pemerintahan Daerah tahun anggaran 2024 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.27

Kinerja SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Kendal Tahun 2024

| NO | Jenis Pelayanan Dasar     | Indikator Capaian                                                                                                                                     | Target Tahun 2024        | Realisasi Tahun 2024  |                       |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
|    |                           |                                                                                                                                                       | Jumlah yg Akan terlayani | Jumlah Yang Terlayani | Realisasi Capaian (%) |
| 1  | 2                         | 3                                                                                                                                                     | 4                        | 5                     | 6                     |
| 1  | Pendidikan Anak Usia Dini | Prosentase warga negara usia 5 – 6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan anak usia dini                                                          | 32.668                   | 29.775                | 91,14                 |
| 2  | Pendidikan Dasar          | Prosentase warga negara yang berusia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar                                                          | 151.658                  | 149.974               | 98,89                 |
| 3  | Pendidikan Kesetaraan     | Prosentase warga negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | 3.113                    | 2.300                 | 73,88                 |

(Sumber : Laporan SPM Kabupaten Kendal TA 2024)

Berdasarkan tabel capaian kinerja SPM urusan Pendidikan di atas, capaian kinerja pada masing-masing indikator sudah sangat tinggi, tetapi belum mencapai target yang ditetapkan. Dari tingkat capaian untuk penerima layanan masih belum dapat terealisasi 100%, artinya bahwa masih

terdapat warga masyarakat yang belum menerima layanan Pendidikan PAUD, Pendidikan dasar, dan Pendidikan kesetaraan. Hal itu karena ada beberapa kendala, diantaranya:

1. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya PAUD bagi tumbuh kembangnya anak belum merata.
2. Biaya Kelompok yang masih mahal.
3. Masih rendahnya lembaga PAUD yang sudah memiliki akreditasi sebagai tolak ukur kualitas penyelenggaraan PAUD.
4. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini masih belum memadai.
5. Belum tersedianya lahan untuk pembangunan unit gedung baru bagi penambah TK negeri.
6. Kurangnya kualitas para pengajar pendidikan anak usia dini.
7. SD dan SMP yang memadai, terutama ruang kelas dan perabotnya yang baik, perpustakaan dan perabotnya, serta sanitasi.
8. Prioritas pembangunan pemerintah pusat sudah bergeser dari peningkatan akses ke arah peningkatan mutu.
9. Masih terdapatnya angka putus sekolah pada jenjang SD dan SMP sehingga belum dapat menuntaskan wajib belajar Pendidikan dasar (wajib dikdas) sembilan tahun maupun dua belas tahun.

#### b. Kesehatan

Peningkatan pelayanan kesehatan adalah salah satu program prioritas pembangunan Kabupaten Kendal. Sehingga dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan baik melalui perbaikan dan penyediaan sarana prasarana maupun peningkatan pelayanan kesehatan terhadap pasien. Urusan kesehatan di Kabupaten Kendal diampu oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal dan mempunyai 6 IKU dan 20 IKK. Dalam penyelenggaraan upaya kesehatan di Kabupaten Kendal terdapat beberapa fasilitas pelayanan kesehatan, baik sarana pelayanan kesehatan pemerintah, swasta maupun Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Adapun sarana pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Kendal yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebanyak 1 unit meliputi RSUD dr. H. Soewondo Kendal. 5 Rumah Sakit Swasta yaitu Rumah Sakit Baitul Hikmah, Rumah Sakit Muhammadiyah Darul Istiqomah, Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Kendal, Rumah Sakit Charlie Hospital, dan Rumah Sakit PKU Aisyiyah dengan daya tampung sejumlah 1.002 per 1.000 penduduk. Jumlah Puskesmas di Kabupaten Kendal sejumlah 30 puskesmas dengan

rincian puskesmas dengan rawat inap sebanyak 16 unit, puskesmas non rawat inap sebanyak 14 unit.

Selain penyediaan sarana prasarana kesehatan, pelayanan kesehatan terhadap pasien perlu ditingkatkan. AIDS, Tuberkulosis dan Malaria merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Pemerintah telah menetapkan target eliminasi AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM) pada tahun 2030. Untuk mencapai target eliminasi tersebut diperlukan upaya penguatan komitmen dan kerjasama lintas sektor.

Berdasarkan data Januari-Juni Tahun 2025, dari 8.348 orang yang berisiko terinfeksi HIV yang telah diperiksa, ditemukan kasus Orang dengan HIV (ODHIV) baru sebanyak 95 orang. Pelayanan pada ODHIV ini memiliki tantangan antara lain masih ada diskriminasi atau stigma di masyarakat, serta mulai merebaknya kasus HIV baru pada kelompok usia muda. Kasus Tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Kendal masih memiliki beberapa tantangan antara lain masih rendahnya penemuan kasus TBC, rendahnya angka keberhasilan pengobatan, dan rendahnya cakupan pemberian terapi pencegahan tuberkulosis pada kontak serumah pasien TBC. Pada tahun 2025 TW II, cakupan penemuan kasus TBC di Kabupaten Kendal baru mencapai 39,14% (dari target 90%). Angka keberhasilan pengobatan (treatment success rate) TBC di Kabupaten Kendal selama 3 tahun terakhir masih di bawah target (81% dari target 90%). Rendahnya angka keberhasilan pengobatan ini antara lain karena masih tingginya angka putus pengobatan (*lost to follow up*).

Pada 2025, kasus malaria di Kabupaten Kendal (Januari-Juli) terdapat 2 kasus malaria yang mana semuanya merupakan kasus impor. Mengingat vektor pembawa penyakit malaria yaitu nyamuk *Anopheles* sp ada di Kabupaten Kendal, perlu dilakukan upaya pemeriksaan pada masyarakat yang memiliki riwayat bepergian terutama dari daerah endemis malaria.

Pada urusan kesehatan, masih terdapat beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam pencapaian target kinerja, yakni sebagai berikut :

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan;
- b. Pada kasus ibu hamil diluar nikah terdapat perasaan takut untuk periksa;
- c. Masih ada warga yang melahirkan di tempat dukun bayi;
- d. Sarana dan prasarana untuk melakukan pemeriksaan masih kurang;
- e. Masih banyak ODGJ yang berkeliaran saat dikunjungi pemegang Programmer;

- f. Kepedulian keluarga masih kurang untuk mengantar berobat ke Fasyankes;
- g. Dukungan dari Desa masih sangat minim untuk saling berkolaborasi menuntaskan kasus ODGJ (hanya beberapa desa yang peduli);
- h. Masih adanya keluarga yang menutupi jika ada salah satu keluarga mengalami gangguan jiwa.

Dalam mengatasi beberapa hal tersebut, terdapat beberapa faktor pendukung yang dilaksanakan, yaitu :

- a. Sosialisasi terhadap masyarakat akan pentingnya kesehatan, sehingga diharapkan tidak menunggu sakit baru periksa;
- b. Adanya kebijakan kerjasama antara bidan dan dukun bayi;
- c. Untuk alat di setiap Desa ada satu alat Posbindu Kit, namun belum semua POS memiliki alat Set Posbindu;
- d. Kegiatan Posbindu (Pos Binaan Terpadu) sudah sedikit familiar di lingkungan masyarakat, tetapi masih sangat minim yang berkunjung ke Posbindu hanya sebagian besar ibu-ibu dan lansia;
- e. Kegiatan Posbindu telah dilaksanakan pada Sholat Jumat, dan kegiatan tahlilan bapak-bapak, namun belum semuanya bisa terjaring;
- f. Dukungan dana dari desa untuk kegiatan Posbindu sangat minim (hanya beberapa desa yang menganggarkan) untuk pembelian alat dan BHP;
- g. Sudah terbentuk beberapa Posbindu Khusus di Sekolah dan perusahaan, namun belum memiliki alat Posbindu sendiri, sehingga untuk pelaksanaan kegiatan masih meminjam milik Puskesmas;
- h. Masih banyak yang belum Terdeteksi Dini pada usia anak sekolah dan pekerja.

Untuk lebih jelasnya, kinerja urusan pelayanan kesehatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.28  
Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Urusan Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2020 – 2024

| No | Indikator                          | Satuan     | Capaian Kinerja |       |       |       |       |
|----|------------------------------------|------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                    |            | 2020            | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|    | Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan |            |                 |       |       |       |       |
|    | IKU OPD                            |            |                 |       |       |       |       |
| 1. | Usia Harapan Hidup (UHH)           | Tahun      | 74,43           | 74,48 | 74,53 | 74,58 | 74,73 |
| 2. | Jumlah Kematian Ibu                | Kasus      | 18              | 33    | 19    | 18    | 22    |
| 3. | Angka Kematian Balita              | / 1.000 KH | 12,41           | 9,06  | 9,03  | 12,40 | 12,40 |
| 4. | Angka populasi bebas PTM           | %          | 13,33           | 56,67 | 53,33 | 70,00 | 80,00 |
| 5. | Angka Populasi bebas PM            | %          | N/A             | 60,00 | 66,67 | 56,67 | 33,33 |

| No      | Indikator                                                                                           | Satuan | Capaian Kinerja |       |       |       |       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
|         |                                                                                                     |        | 2020            | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| 6.      | Persentase Fasilitas Kesehatan sesuai Standar                                                       | %      | N/A             | N/A   | 1,92  | 35,57 | 80,00 |
| 7.      | Prevalensi Stunting pada balita                                                                     | %      | -               | 21,2  | 17,5  | 22,4  | 19,2  |
| IKK OPD |                                                                                                     |        |                 |       |       |       |       |
| 1.      | Jumlah Kematian Ibu                                                                                 | Kasus  | 18              | 33    | 19    | 18    | 22    |
| 2.      | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil                                      | %      | 94,79           | 100   | 99,99 | 99,99 | 99,95 |
| 3.      | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan                                            | %      | 99,99           | 99,92 | 99,96 | 99,99 | 99,97 |
| 4.      | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir                          | %      | 100             | 97,89 | 99,44 | 99,25 | 99,98 |
| 5.      | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar                                                   | %      | 99,2            | 93,57 | 99,98 | 100   | 99,92 |
| 6.      | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar           | %      | 62,22           | 58,35 | 92,52 | 100   | 97,8  |
| 7.      | Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar                                   | %      | 57,22           | 77,99 | 81,64 | 89,55 | 94,07 |
| 8.      | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar         | %      | 77,06           | 94,75 | 97,85 | 98,17 | 96,7  |
| 9.      | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                 | %      | 40,97           | 71,81 | 78,8  | 83,22 | 89,6  |
| 10.     | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                         | %      | 87,44           | 95,88 | 98,74 | 100,6 | 99,53 |
| 11.     | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar                      | %      | 75,49           | 81,81 | 95,2  | 98,18 | 99,56 |
| 12.     | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar                               | %      | 52,32           | 49,35 | 75,6  | 90,32 | 72,72 |
| 13.     | Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | %      | 90,7            | 89,64 | 91,12 | 94,95 | 100   |
| 14.     | Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu                                            | %      | 92,5            | 96,84 | 88,46 | 85,71 | 74    |
| 15.     | Persentase Sarana IRTP yang Memenuhi Ketentuan                                                      | %      | 20              | 20,63 | 16,67 | 21,24 | 33    |
| 16.     | Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar                                 | %      | 19              | 13    | 15    | 12    | 19    |
| 17.     | Jumlah desa yang dilakukan pembudayaan keamanan pangan                                              | Desa   | N/A             | N/A   | N/A   | 2     | 4     |
| 18.     | Jumlah pasar yang dilakukan pembudayaan keamanan pangan                                             | Pasar  | N/A             | N/A   | 1     | 1     | 1     |

| No  | Indikator                                                                                                                                | Satuan  | Capaian Kinerja |      |      |      |      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|------|------|------|------|
|     |                                                                                                                                          |         | 2020            | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 19. | Jumlah sekolah yang dilakukan pembudayaan keamanan pangan                                                                                | Sekolah | N/A             | N/A  | N/A  | 5    | 3    |
| 20. | Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan                                                              | %       | 100             | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 21. | Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah | %       | 100             | 100  | 100  | 100  | 100  |

(Sumber : RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029)

Berdasarkan data hasil capaian kinerja di atas dapat dilihat bahwa indikator yang menggambarkan kinerja urusan Kesehatan di Kabupaten Kendal sebanyak 6 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 20 indikator kinerja kunci (IKK). Capaian semua indikator kinerja cenderung menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, namun masih ada beberapa indikator dengan capaian menurun, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan;
- b. Banyak kematian ibu hamil disebabkan bukan karena kehamilan (komplikasi non obstetri);
- c. Ibu hamil kurang pendampingan/pengawalan;
- d. Kurangnya tindak lanjut laporan pasien (ibu nifas) pulang karena tidak semua pasien mendapatkan kunjungan;
- e. ANC terpadu dan screening layak hamil belum ada;
- f. Calon pengantin melakukan pemeriksaan di puskesmas pada detik-detik menjelang pernikahan;
- g. Kunjungan neonat lengkap masih kurang;
- h. capaian SPM tidak bisa tercapai karena ada perbedaan jumlah sasaran capil dan riil.

Dalam mengatasi beberapa hal tersebut, terdapat beberapa upaya yang dapat dilaksanakan, yaitu :

- a. Pemberian pemahaman kepada masyarakat berkaitan dengan ibu hamil (prosedur layanan kesehatan ibu hamil);
- b. Kader dan Bidan melakukan pemantauan kepada ibu hamil sampai dengan pasca persalinan;
- c. Komitmen bidan desa untuk melakukan pelayanan kepada ibu hamil dan pasca melahirkan (ibu nifas);

- d. Memberikan edukasi kepada ibu hamil dan ibu nifas untuk selalu kontrol Kesehatan;
- e. Pembentukan komite AMSPR Kabupaten;
- f. Penyediaan TTK pelatihan petugas pelayanan ANC terpadu dan USG;
- g. Inovasi dokter puskesmas harus punya wilayah dampingan ibu hamil (dokter, bidan, perawat untuk melakukan pendampingan kepada ibu hamil);
- h. Pelacakan kematian ke fasyankes.

Adapun Target dan realisasi SPM urusan kesehatan yang dapat dicapai atau di realisasikan oleh Pemerintahan Daerah tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.29  
Kinerja SPM Urusan Kesehatan Tahun 2024

| NO | Jenis Pelayanan Dasar                           | Indikator Capaian                                                                     | Target Tahun 2024          | Realisasi Tahun 2024  |                       |
|----|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|    |                                                 |                                                                                       | Jumlah yang Akan terlayani | Jumlah yang Terlayani | Realisasi Capaian (%) |
| 1  | 2                                               | 3                                                                                     | 4                          | 5                     | 6                     |
| 1  | Pelayanan Kesehatan Ibu hamil                   | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                  | 11.451                     | 11.445                | 99,95                 |
| 2  | Pelayanan kesehatan ibu bersalin                | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar               | 11.451                     | 11.447                | 99,97                 |
| 3  | Pelayanan kesehatan bayi baru lahir             | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar            | 11.312                     | 11.312                | 100,00                |
| 4  | Pelayanan kesehatan balita                      | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                     | 61.588                     | 61.588                | 100,00                |
| 5  | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar  | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 145.084                    | 145.084               | 100,00                |
| 6  | Pelayanan kesehatan usia produktif              | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar    | 703.643                    | 652.130               | 92,68                 |
| 7  | Pelayanan kesehatan pada usia lanjut            | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai               | 142.590                    | 139.344               | 97,72                 |
| 8  | Pelayanan kesehatan penderita hipertensi        | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar       | 324.953                    | 283.554               | 87,26                 |
| 9  | Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 20.310                     | 20.195                | 99,43                 |

| NO | Jenis Pelayanan Dasar                                       | Indikator Capaian                                                                                 | Target Tahun 2024          | Realisasi Tahun 2024  |                       |
|----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|    |                                                             |                                                                                                   | Jumlah yang Akan terlayani | Jumlah yang Terlayani | Realisasi Capaian (%) |
| 1  | 2                                                           | 3                                                                                                 | 4                          | 5                     | 6                     |
| 10 | Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 2.744                      | 2.744                 | 100,00                |
| 11 | Pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis (TB)          | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar             | 13.986                     | 9.854                 | 70,46                 |
| 12 | Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV      | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                      | 15.252                     | 15.252                | 100,00                |

(Sumber : Laporan SPM Kabupaten Kendal TA 2024)

Berdasarkan tabel capaian kinerja SPM urusan kesehatan di atas, capaian kinerja pada masing-masing indikator sudah sangat tinggi, tetapi belum mencapai target yang ditetapkan. Hal itu karena ada beberapa kendala, diantaranya:

1. Ibu hamil dengan kehamilan tidak diinginkan, sehingga tidak memeriksakan kehamilannya.
2. masih ada persalinan di rumah dengan memanggil dukun bayi, atas inisiatif suami dan keluarga.
3. Pada pelayanan Kesehatan usia lanjut disebabkan karena sasaran meninggal sebelum dilakukan skrining.
4. Masih banyak masyarakat yang belum sadar akan penyakit Hipertensi. Pada saat terjaring Deteksi Dini di posbindu, dirujuk ke puskesmas namun tidak datang.
5. Kurangnya skrining cek gula darah pada Masyarakat.
6. Keterbatasan katrid TCM dan reagen ZN yang digunakan untuk pemeriksaan terduga Tuberkulosis (TBC) di tahun 2023 (ada pembekuan pengadaan katrid TCM bersumber DAK Non Fisik tahun 2023) sehingga pelayanan pada sebagian terduga TBC tidak sesuai standar.
7. Upaya penemuan kasus aktif terduga TBC belum optimal.
8. Pengetahuan Masyarakat tentang HIV/AIDS masih sangat kurang yang mengakibatkan kesadaran masyarakat termasuk populasi berisiko untuk mengetahui status HIV masih relatif rendah dan dianggap tabu.

9. Masih tingginya stigma dan perlakuan diskriminatif masyarakat dan petugas kesehatan kepada ODHA.
10. Belum pembebasan seluruh biaya pemeriksaan dan pengobatan yang memberatkan pasien HIV dan ODHA.
11. Sasaran LSL relatif tertutup & akses layanan ke luar daerah.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, terdapat 6 IKU dan 10 IKK. Pada tahun 2024, terdapat indikator kinerja yang capaiannya meningkat dari tahun sebelumnya, dan ada indikator yang capaiannya menurun. Dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, capaian tahun 2024 cenderung mengalami peningkatan yang tidak signifikan, salah satunya dikarenakan cuaca yang tidak menentu sehingga mempengaruhi kondisi jalan dan drainase jalan, dan juga menghambat pelaksanaan proyek yang sedang dilaksanakan.

Pada indikator Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota mencapai 51,08% pada tahun 2024. Luas daerah irigasi (DI) yang dilayani adalah 6.804 ha, dan luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten adalah 10.427 ha. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi mengamanatkan bahwa evaluasi kinerja sistem irigasi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi kinerja sistem irigasi yang meliputi prasarana fisik, produktifitas tanaman, sarana penunjang, organisasi personalia, dokumentasi dan kondisi kelembagaan P3A. Daerah irigasi di Kabupaten Kendal sebesar 686 DI.

Pada penataan ruang, Pemerintah Kabupaten Kendal telah merilis Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031. Namun, belum ada aturan tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang ditetapkan, sehingga dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang di Kabupaten Kendal belum dilaksanakan secara optimal. Sampai dengan tahun 2024, dokumen RDTR seluruh kecamatan sudah disusun, dan yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Bupati Kendal Nomor 62 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kaliwungu Tahun 2023-2043 dan Peraturan Bupati Kendal Nomor 58 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Brangsong Tahun 2023-2043.

Tabel 2.30  
Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Tahun 2020 – 2024

| No | Indikator                                                                                                                                                                                                        | Satuan | Capaian Kinerja |       |       |        |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------|-------|--------|--------|
|    |                                                                                                                                                                                                                  |        | 2020            | 2021  | 2022  | 2023   | 2024   |
|    | Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                                                                                                                       |        |                 |       |       |        |        |
|    | IKU OPD                                                                                                                                                                                                          |        |                 |       |       |        |        |
| 1. | Persentase capaian infrastruktur pekerjaan umum                                                                                                                                                                  | %      | 60,54           | 60,85 | 61,35 | 72,89  | 76,82  |
| 2. | Persentase jalan dalam kondisi mantap                                                                                                                                                                            | %      | 88,28           | 88,51 | 89,19 | 83,11  | 83,76  |
| 3. | Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW                                                                                                                                                                    | %      | 94,00           | 80,00 | 82,00 | 84,00  | 81,33  |
| 4. | Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                          | indeks | N/A             | N/A   | N/A   | 39,97  | 39,98  |
| 5. | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman                                                                                                                                                                          | %      | N/A             | 0,73  | 0,01  | 0,01   | 0,81   |
| 6. | Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak                                                                                                                                                      | %      | 93,35           | 94,03 | 94,85 | 95,58  | 95,62  |
|    | IKK OPD                                                                                                                                                                                                          |        |                 |       |       |        |        |
| 1. | Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/kota                                                                                                                          | %      | N/A             | N/A   | N/A   | 25,36  | 25,23  |
| 2. | Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota                                                                                                                                                                   | %      | N/A             | N/A   | N/A   | 47,8   | 51,08  |
| 3. | Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota | %      | 93,35           | 94,03 | 94,85 | 95,58  | 95,62  |
| 4. | Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman                                                                                                             | %      | 91,62           | 91,1  | 87,57 | 85,81  | 91,91  |
| 5. | Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                    | %      | 54,82           | 84    | 88,1  | 90,26  | 54,02  |
| 6. | Tingkat kemantapan Jalan kabupaten/kota                                                                                                                                                                          | %      | 88,28           | 88,51 | 89,19 | 83,113 | 83,758 |
| 7. | Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis                            | %      | 28,94           | 47,87 | 56,67 | 59,85  | 71,81  |
| 8. | Persentase Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan                                                                                                                 | %      | N/A             | N/A   | N/A   | N/A    | 13,49  |

| No  | Indikator                                                                                                            | Satuan | Capaian Kinerja |      |      |      |      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------|------|------|------|
|     |                                                                                                                      |        | 2020            | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 9.  | Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah | %      | N/A             | N/A  | N/A  | N/A  | 240  |
| 10. | Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota                                       | %      | N/A             | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  |

(Sumber : RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029)

Adapun Target dan realisasi SPM urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dapat dicapai atau di realisasikan oleh Pemerintahan Daerah tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.31

Kinerja SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024

| No | Jenis Pelayanan Dasar                                    | Target Tahun 2024          | Realisasi Tahun 2024  |                       |
|----|----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|    |                                                          | Jumlah yang akan terlayani | Jumlah yang Terlayani | Realisasi Capaian (%) |
| 1  | Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari (jiwa)   | 1.069.355 Jiwa             | 1.022.568 Jiwa        | 95,62                 |
| 2  | Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik (KK) | 345.512 KK                 | 317.562 KK            | 91,91                 |

(Sumber : Laporan SPM Kabupaten Kendal TA 2024)

Berdasarkan tabel capaian kinerja SPM urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di atas, capaian kinerja pada masing-masing indikator sudah sangat tinggi, tetapi belum mencapai target yang ditetapkan. Hal itu karena ada beberapa kendala, diantaranya:

1. Keterbatasan anggaran dalam pemenuhan sambungan rumah (SR) air minum dengan tanpa tunjangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Air Minum dan Sanitasi.
2. Kabupaten Kendal belum memiliki IPLT sehingga untuk data pengangkutan dan Pengolahan Lumpur Tinja IPLT belum tersedia.
3. Pemahaman OPD yang terbatas terkait kebijakan SPM Bidang PUPR terutama penerapannya pada tahap pengumpulan data dan perhitungan kebutuhan.

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pada bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, terdapat 5 IKU dan 6 IKK dengan capaian kinerja pada tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan dan sudah mencapai target yang ditetapkan. Untuk indikator cakupan ketersediaan rumah layak huni, persentase penanganan kawasan kumuh, dan Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani melampaui dari target yang telah ditetapkan.

Tabel 2.32

Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal Tahun 2020 – 2024

| No | Indikator                                                                                                                               | Satuan | Capaian Kinerja |        |        |        |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------|--------|--------|--------|
|    |                                                                                                                                         |        | 2020            | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|    | Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                                                                        |        |                 |        |        |        |        |
|    | IKU OPD                                                                                                                                 |        |                 |        |        |        |        |
| 1. | Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak                                                                                                  | %      | 58,97           | 60,75  | 62,54  | 64,32  | 64,32  |
| 2. | Persentase Luas Kawasan Kumuh                                                                                                           | %      | 0,24            | 0,47   | 0,42   | 0,27   | 0,12   |
| 3. | Persentase Rumah Layak Huni                                                                                                             | %      | 86,92           | 87,79  | 88,4   | 88,94  | 89,47  |
| 4. | Persentase capaian penanganan kawasan kumuh                                                                                             | %      | N/A             | 0,0145 | 0,0148 | 0,1402 | 0,1987 |
| 5. | Persentase PSU Perumahan yang diserahkan                                                                                                | %      | 1,85            | 7,69   | 8      | 15,38  | 21,54  |
|    | IKK OPD                                                                                                                                 |        |                 |        |        |        |        |
| 1. | Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni                                                  | %      | 100             | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 2. | Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | %      | 100             | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 3. | persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani                                                                   | %      | NA              | 1,35   | 1,87   | 14,02  | 19,87  |
| 4. | Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)                                                                                  | %      | 4,68            | 3,43   | 4,81   | 4,79   | 5,02   |
| 5. | Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani                                                                                       | %      | 3,05            | 3,05   | 3,05   | 3,05   | 3,05   |
| 6. | Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana. Sarana. dan Utilitas Umum)                                                   | %      | 9,29            | 20,23  | 7,56   | 13,07  | 18,19  |

(Sumber : RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029)

Adapun Target dan realisasi SPM urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang dapat dicapai atau di realisasikan oleh Pemerintahan Daerah tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.33  
Kinerja SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024

| No | Jenis Pelayanan Dasar                                                                                                        | Target Tahun 2024          | Realisasi Tahun 2024  |                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|    |                                                                                                                              | Jumlah yang akan terlayani | Jumlah yang Terlayani | Realisasi Capaian (%) |
| 1  | Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota                                         | 4                          | 4                     | 100                   |
| 2  | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten / kota | 0                          | 0                     | 0                     |

(Sumber : Laporan SPM Kabupaten Kendal TA 2024)

Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat bahwa target SPM pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tercapai sesuai target yang ditetapkan. Kegiatan Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten Kendal telah terlaksana dengan capaian 100%. Sedangkan pada kegiatan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten Kendal tidak ada anggaran.

e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Pada urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat terdapat 6 IKU dan 15 IKK yang harus menjadi perhatian. Semua indikator pada urusan ini cenderung meningkat dari tahun sebelumnya dan mencapai target. Selengkapny capaian IKU dan IKK pada urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.34  
Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Urusan  
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten  
Kendal Tahun 2020 – 2024

| No | Indikator                                                                                                                                                                                                | Satuan | Capaian Kinerja |       |       |      |       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------|-------|------|-------|
|    |                                                                                                                                                                                                          |        | 2020            | 2021  | 2022  | 2023 | 2024  |
|    | Urusan Pemerintah Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat                                                                                                                        |        |                 |       |       |      |       |
|    | IKU OPD                                                                                                                                                                                                  |        |                 |       |       |      |       |
| 1. | Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas                                                                                                                                                                   | poin   | N/A             | N/A   | N/A   | N/A  | N/A   |
| 2. | Persentase Kesiapsiagaan Damkar                                                                                                                                                                          | %      | 100             | 100   | 100   | 100  | 100   |
| 3. | Persentase penurunan gangguan Trantibum                                                                                                                                                                  | %      | 0               | 0     | 21,25 | 36,5 | 29,87 |
| 4. | Tingkat waktu tanggap kebakaran ( <i>respond time rate</i> )                                                                                                                                             | %      | 97,44           | 97,97 | 98,16 | 97,1 | 99,21 |
| 5. | Indeks Ketahanan Daerah                                                                                                                                                                                  | poin   | N/A             | 0,52  | 0,59  | 0,70 | 0,72  |
| 6. | Indeks Pencapaian SPM                                                                                                                                                                                    | %      | 100             | 100   | 100   | 100  | 100   |
|    | IKK OPD                                                                                                                                                                                                  |        |                 |       |       |      |       |
| 1. | Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP                                                                                                                                 | %      | 100             | 100   | 100   | 100  | 80,28 |
| 2. | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan                                                                                                                                                             | %      | 100             | 100   | 100   | 100  | 100   |
| 3. | Jumlah PPNS pada Satpol PP                                                                                                                                                                               | Orang  | 5               | 5     | 5     | 8    | 8     |
| 4. | Presentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkara serta Penyelenggaraan Tibumtranmas                                                                                                        | %      | 100             | 100   | 100   | 100  | 100   |
| 5. | Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkara serta penyelenggaraan ketertiban umum. ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat | %      | 100             | 100   | 100   | 100  | 100   |
| 6. | Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar                                                                                                                                    | %      | 100             | 100   | 100   | 100  | 100   |
| 7. | Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana                                                                                                                                  | %      | 100             | 100   | 100   | 100  | 100   |
| 8. | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana                                                                                                                | %      | 100             | 100   | 100   | 100  | 100   |
| 9. | Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana                                                                                               | %      | 100             | 100   | 100   | 100  | 100   |

| No  | Indikator                                                                                          | Satuan | Capaian Kinerja |      |      |      |      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------|------|------|------|
|     |                                                                                                    |        | 2020            | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 10. | Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | %      | 100             | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 11. | Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal                     | %      | 100             | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 12. | Persentase penanganan pra bencana                                                                  | %      | 100             | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 13. | Persentase penanganan pasca bencana                                                                | %      | 100             | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 14. | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana                               | %      | 100             | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 15. | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran                                    | %      | 100             | 100  | 100  | 100  | 100  |

(Sumber : RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029)

Adapun Target dan realisasi SPM urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dapat dicapai atau di realisasikan oleh Pemerintahan Daerah tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.35  
Kinerja SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

| No | Jenis Pelayanan Dasar                                   | Target Tahun 2024        | Realisasi Tahun 2024  |                       |
|----|---------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
|    |                                                         | Jumlah yg Akan terlayani | Jumlah yang Terlayani | Realisasi Capaian (%) |
| 1. | Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum               | 100                      | 0                     | 100%                  |
| 2. | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran    | 254                      | 254                   | 100%                  |
| 3. | Pelayanan Informasi Rawan bencana                       | 1.093.046                | 1.093.046             | 100%                  |
| 4. | Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 430                      | 430                   | 100%                  |
| 5. | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana      | 65.596                   | 65.596                | 100%                  |

(Sumber : Laporan SPM Kabupaten Kendal TA 2024)

Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat bahwa target SPM pada urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tercapai sesuai target. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum dari target 100 orang yang terdampak akibat penegakan Perda dan/atau Perkada terealisasi 0 orang. Hal ini dikarenakan dalam proses penegakan Perda/Perkada

berjalan dengan baik, sesuai dengan SOP dan kegiatan berjalan sesuai dengan tahap-tahap SOP.

f. Sosial

Pada urusan bidang sosial, terdapat 2 IKU dan 16 IKK yang menjadi prioritas. Semua indikator kinerja sudah mencapai target yang ditetapkan. Untuk indikator persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan pemenuhan kesejahteraan sosial di luar panti dan Persentase PSKS Lembaga dan Non Lembaga yang bersertifikat dan terakreditasi berhasil melampaui dari target yang ditetapkan. Dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, capaian tahun 2024 ini cenderung mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, capaian kinerja urusan sosial dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.36  
Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Urusan Sosial  
Kabupaten Kendal Tahun 2020 – 2024

| No | Indikator                                                                                                                                       | Satuan | Capaian Kinerja |      |      |      |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------|------|------|------|
|    |                                                                                                                                                 |        | 2020            | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|    | Urusan Pemerintah Bidang Sosial                                                                                                                 |        |                 |      |      |      |      |
|    | IKU OPD                                                                                                                                         |        |                 |      |      |      |      |
| 1. | Persentase penanganan PPKS                                                                                                                      | %      | 22,1            | 22,3 | 22,5 | 22,7 | 22,9 |
| 2. | Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti                                                                                 | %      | 80              | 83   | 84   | 86   | 88   |
|    | IKK OPD                                                                                                                                         |        |                 |      |      |      |      |
| 1. | Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti                                                     | %      | N/A             | N/A  | N/A  | N/A  | 100  |
| 2. | Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti                                                                       | %      | N/A             | N/A  | N/A  | N/A  | 100  |
| 3. | Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti                                                                | %      | N/A             | N/A  | N/A  | N/A  | 100  |
| 4. | Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti                                                                 | %      | N/A             | N/A  | N/A  | N/A  | 100  |
| 5. | Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti                                                 | %      | N/A             | N/A  | N/A  | N/A  | 100  |
| 6. | Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial. dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar | %      | N/A             | N/A  | N/A  | N/A  | 100  |
| 7. | Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada                                                         | %      | N/A             | N/A  | N/A  | N/A  | 100  |

| No  | Indikator                                                                                                                                                                                             | Satuan       | Capaian Kinerja |      |      |      |      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------|------|------|------|
|     |                                                                                                                                                                                                       |              | 2020            | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|     | saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota                                                                                                                                               |              |                 |      |      |      |      |
| 8.  | Persentase sarana prasarana bagi korban bencana kabupaten/kota yang disediakan sesuai standar                                                                                                         | %            | N/A             | N/A  | N/A  | N/A  | 100  |
| 9.  | Persentase pekerja sosial. tenaga kesejahteraan sosial. dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar | %            | N/A             | N/A  | N/A  | N/A  | 100  |
| 10. | Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti                                                                     | %            | N/A             | N/A  | N/A  | N/A  | 100  |
| 11. | Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar                                                                         | %            | N/A             | N/A  | N/A  | N/A  | NA   |
| 12. | Pesentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar                                                                                                                                             | %            | N/A             | N/A  | N/A  | N/A  | 85   |
| 13. | Pesentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi                                                                                                                                         | %            | N/A             | N/A  | N/A  | N/A  | NA   |
| 14. | Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun                                                                                                             | Kegiata<br>n | 12              | 12   | 12   | 12   | 12   |
| 15. | Tingkat Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti                                   | %            | 100             | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 16. | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasamya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota                                                        | %            | 100             | 100  | 100  | 100  | 100  |

(Sumber : RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029)

Adapun Target dan realisasi SPM urusan Sosial yang dapat dicapai atau di realisasikan oleh Pemerintahan Daerah tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.37  
Kinerja SPM Urusan Sosial Tahun 2024

| No | Jenis Pelayanan Dasar                                                                                              | Target Tahun 2024          | Realisasi Tahun 2024  |                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|    |                                                                                                                    | Jumlah yang akan terlayani | Jumlah yang Terlayani | Realisasi Capaian (%) |
| 1  | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti                                           | 281 orang                  | 277 orang             | 100%                  |
| 2  | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti                                                             | 114 orang                  | 113 orang             | 100%                  |
| 3  | Rehabilitasi sosial dasar Lanjut usia terlantar di luar panti                                                      | 69 orang                   | 69 orang              | 100%                  |
| 4  | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti                             | 166 orang                  | 166 orang             | 100%                  |
| 5  | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten | 87 orang                   | 87 orang              | 100%                  |

(Sumber : Laporan SPM Kabupaten Kendal TA 2024)

Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat bahwa target SPM pada urusan Sosial tercapai sesuai target yang ditetapkan.

2.1.3.1.2   Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Pada urusan tenaga kerja terdapat 5 IKU dan 5 IKK, pada tahun 2024 ini semua indikator sudah melampaui target yang ditetapkan. Rata-rata capaian kinerja meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal, tahun 2024 sebesar 5.451 pencari kerja yang terserap (laki-laki sebanyak 1.744 orang dan perempuan sebanyak 3.707 orang) dari total tenaga kerja yang terdaftar sejumlah 8.000 orang (laki-laki sebanyak 3.662 orang dan perempuan sebanyak 4.338 orang). Saat ini jumlah industri kecil dan menengah berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja di Kabupaten Kendal adalah 17.524 unit. Sedangkan jumlah perusahaan yang terdata sejumlah 253 perusahaan, dengan 160 perusahaan sudah menerapkan tata kelola kerja yang layak. Salah satu isu strategis Kabupaten Kendal adalah tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), hal ini dikarenakan tingginya masyarakat usia produktif yang tidak bekerja. Untuk mengurangi TPT tersebut, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kesempatan kerja masyarakat. Beberapa hal yang dilaksanakan untuk memperluas kesempatan kerja diantaranya adalah Penyelenggaraan job fair. Kegiatan ini rutin dilaksanakan oleh Dinas

Perindustrian dan Tenaga Kerja, untuk mendekatkan masyarakat pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Pada tahun 2024 penyelenggaraan jobfair telah terlaksana bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal, serta 8 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Kendal.

Permasalahan yang dihadapi adalah daya saing tenaga kerja di Kabupaten Kendal yang masih rendah apabila dibandingkan dengan daerah sekitar, sehingga banyak kesempatan kerja yang diisi tenaga kerja dari daerah lain. Untuk itu diperlukan kolaborasi antar instansi pemerintah Kabupaten Kendal dalam memberikan kesempatan/peluang kerja pada pencari kerja, dengan cara sosialisasi, pelatihan dan lain-lain.

Untuk lebih jelasnya, capaian kinerja urusan tenaga kerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.38  
Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal Tahun 2020 – 2024

| No | Indikator                                                                                                                                                   | Satuan | Capaian Kinerja |         |              |             |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------|--------------|-------------|------------|
|    |                                                                                                                                                             |        | 2020            | 2021    | 2022         | 2023        | 2024       |
|    | Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja                                                                                                                       |        |                 |         |              |             |            |
|    | IKU OPD                                                                                                                                                     |        |                 |         |              |             |            |
| 1. | Persentase Penyerapan Tenaga Kerja                                                                                                                          | %      | N/A             | N/A     | N/A          | N/A         | N/A        |
| 2. | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja                                                                                                                          | %      | 70,50           | 69,93   | 73,44        | 76,93       | 76,85      |
| 3. | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja                                                                                                                          | Rupiah | 867.607         | 876.870 | 1.049.966,40 | 946.425,22  | 938.388,00 |
| 4. | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan                                                                                                                | %      | 58,64           | 58,80   | 61,44        | 65,11       | 66,45      |
| 5. | Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan                                                                                                          |        | N/A             | N/A     | N/A          | N/A         | N/A        |
|    | IKK OPD                                                                                                                                                     |        |                 |         |              |             |            |
| 1. | Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja                                                                                  | %      | 2,1             | 4       | 9,71         | 9,71        | 9,71       |
| 2. | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikal Kompetensi                                                                                                            | %      | 19              | 20      | 31,77        | 35,72       | 39,19      |
| 3. | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja                                                                                                                          | Rupiah | 867.607         | 876.870 | 1.049.966,4  | 946.425,218 | 938.388    |
| 4. | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB. LKS Bipartit. Struktur Skala Upah. dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). | %      | 50              | 50      | 55,6         | 60,55       | 63,24      |
| 5. | Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme                                                                          | %      | 51,07           | 55      | 63,7         | 64,81       | 68,14      |

| No | Indikator                                          | Satuan | Capaian Kinerja |      |      |      |      |
|----|----------------------------------------------------|--------|-----------------|------|------|------|------|
|    |                                                    |        | 2020            | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|    | layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota |        |                 |      |      |      |      |

(Sumber : RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029)

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terdapat 7 IKU dan 4 IKK. Indikator-indikator tersebut cenderung menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, namun ada indikator yang juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dengan capaian tahun 2024 sebesar 73,16, menurun dibanding tahun 2023 sebesar 77,58. Untuk lebih jelasnya, capaian kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.39  
Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Urusan  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun  
2020 – 2024

| No | Indikator                                                                                   | Satuan | Capaian Kinerja |       |       |       |       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                                                                             |        | 2020            | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|    | Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                       |        |                 |       |       |       |       |
|    | IKU OPD                                                                                     |        |                 |       |       |       |       |
| 1. | Indeks Pembangunan Gender                                                                   | indeks | 93,19           | 93,30 | 93,79 | 94,29 | 94,34 |
| 2. | Indeks Perlindungan Anak                                                                    | indeks | N/A             | N/A   | N/A   | N/A   | 64,25 |
| 3. | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)                                                            | indeks | 76,96           | 76,95 | 77,05 | 77,58 | 73,16 |
| 4. | Indeks Ketimpangan Gender (IKG)                                                             | indeks | 0,291           | 0,329 | 0,211 | 0,229 | 0,198 |
| 5. | Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)                                                      | poin   | N/A             | N/A   | 77,14 | 73,78 | 77,19 |
| 6. | Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)                                                            | poin   | N/A             | N/A   | N/A   | N/A   | 62,34 |
| 7. | Rasio kekerasan terhadap perempuan. termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)          | poin   | 9,30            | 8,98  | 8,70  | 8,45  | 8,22  |
|    | IKK OPD                                                                                     |        |                 |       |       |       |       |
| 1. | Indeks Pembangunan Gender (IPG)                                                             | indeks | 93,19           | 93,30 | 93,79 | 94,29 | 94,34 |
| 2. | Indeks Ketimpangan Gender (IKG)                                                             | indeks | 0,291           | 0,329 | 0,211 | 0,229 | 0,198 |
| 3. | Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan komprehensif | %      | 100             | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 4. | Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)            | %      | 9,3             | 8,98  | 8,7   | 8,45  | 8,22  |

| No | Indikator                             | Satuan | Capaian Kinerja |      |      |      |      |
|----|---------------------------------------|--------|-----------------|------|------|------|------|
|    |                                       |        | 2020            | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|    | yang mendapatkan layanan komprehensif |        |                 |      |      |      |      |

(Sumber : RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029)

3. Pangan

Pada bidang psangan terdapat 2 IKU dan 4 IKK. Pada tahun 2024, capaian kinerja beberapa indikator ada yang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya dan ada yang mengalami peningkatan. Dari tahun-tahun sebelumnya, indikator kinerja ini juga menunjukkan perbaikan dengan adanya peningkatan capaian kinerja pada setiap tahun. Untuk lebih jelasnya, capaian kinerja urusan pangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.40

Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Urusan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2020 – 2024

| No | Indikator                                                                  | Satuan | Capaian Kinerja |       |       |       |       |
|----|----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                                                            |        | 2020            | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|    | Urusan Pemerintah Bidang Pangan                                            |        |                 |       |       |       |       |
|    | IKU OPD                                                                    |        |                 |       |       |       |       |
| 1. | Indeks ketahanan pangan                                                    | poin   | 85,24           | 85,18 | 84,69 | 85,58 | 84,83 |
| 2. | Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan                                   | %      | 11,72           | 14,62 | 13,87 | 11,90 | 10,03 |
|    | IKK OPD                                                                    |        |                 |       |       |       |       |
| 1. | Persentase Cadangan Pangan                                                 | %      | 0               | 5,33  | 8,5   | 6,85  | 58,97 |
| 2. | Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten/Kota                                    | Nilai  | 87,2            | 90,8  | 96,3  | 96,9  | 95,76 |
| 3. | Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan                                      | %      | 3,49            | 3,14  | 5,94  | 3,49  | 3,14  |
| 4. | Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan | %      | 90              | 70    | 58    | 95    | 86,2  |

(Sumber : RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029)

4. Pertanahan

Pada urusan pertanahan, terdapat 6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi tolok ukur capaian urusan pertanahan. Namun, IKK tersebut belum terlihat capaiannya pada tahun 2020-2024. Pada tahun 2024 pensertifikatan telah dilakukan pada 560 bidang tanah dan sampai dengan tahun 2024 sertifikat tanah pemda sejumlah 1.710 bidang dari 2.430 bidang tanah Pemda yang ada, sehingga masih kurang 720 bidang tanah yang belum bersertifikat. Oleh karena hal tersebut, masih diperlukan sinkronisasi dengan Bagian Aset Pemerintah Daerah dan diusulkan ke Pemerintah Daerah guna sertifikat aset daerah.

Untuk lebih jelasnya, capaian kinerja urusan pertanahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.41  
Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Urusan  
Pertanahan Kabupaten Kendal Tahun 2020 – 2024

| No | Indikator                                                                                                                                                                                                                          | Satuan | Capaian Kinerja |      |      |      |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------|------|------|------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                    |        | 2020            | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|    | Urusan Pemerintah Bidang Pertanahan                                                                                                                                                                                                |        |                 |      |      |      |      |
|    | IKK OPD                                                                                                                                                                                                                            |        |                 |      |      |      |      |
| 1. | jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah dan persentase realisasi dari target luas objek redistribusi yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah dalam tahun anggaran | %      | N/A             | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  |
| 2. | Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi                                                                                                                                            | %      | N/A             | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  |
| 3. | Terpetakannya seluruh bidang tanah dalam satu desa atau kelurahan lengkap secara berkualitas                                                                                                                                       | %      | N/A             | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  |
| 4. | Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah                                                                                                                                                    | %      | N/A             | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  |
| 5. | Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                              | %      | N/A             | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  |
| 6. | Persentase Luas Peta Nilai Tanah yang telah dimanfaatkan dalam pelayanan BPHTB                                                                                                                                                     | %      | N/A             | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  |

(Sumber : RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029)

5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pada bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat 2 IKU dan 8 IKK, yang semua indikatornya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dan sudah memenuhi target. Meskipun semua indikator mengalami peningkatan, namun masih perlu dilakukan upaya untuk lebih meningkatkan capaian kinerja pada tahun mendatang agar capaian tidak mengalami penurunan.

Untuk lebih jelasnya, capaian kinerja urusan administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.42  
Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Urusan  
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Tahun  
2020 – 2024

| No | Indikator                                                                  | Satuan | Capaian Kinerja |       |       |       |       |
|----|----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                                                            |        | 2020            | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|    | Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil    |        |                 |       |       |       |       |
|    | IKU OPD                                                                    |        |                 |       |       |       |       |
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan      | poin   | 82,24           | 86,06 | 89,1  | 91,09 | 93,17 |
| 2. | Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP, KIA, dan Akta Kelahiran) | %      | 76,18           | 76,6  | 79,63 | 87,41 | 90,72 |
|    | IKK OPD                                                                    |        |                 |       |       |       |       |
| 1. | Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan             | %      | 100             | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 2. | Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan           | %      | 100             | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 3. | Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan           | %      | 100             | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 4. | Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan                                 | %      | 95,67           | 96    | 98,32 | 98,96 | 99,24 |
| 5. | Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak                                | %      | 33,09           | 34    | 41    | 64,14 | 73,03 |
| 6. | Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun                               | %      | 100             | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 7. | Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital                      | %      | 0               | 0     | 0     | 5,17  | 10,68 |
| 8. | Perekaman KTP Elektronik                                                   | %      | 99,79           | 99,81 | 99,58 | 99,12 | 99,89 |

(Sumber : RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029)

6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdapat 2 IKU dan 2 IKK. Pada tahun 2024, indikator persentase peningkatan status desa mandiri pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah mencapai target. Pada tahun 2023, tercatat 19 desa yang mendapat status desa mandiri dari jumlah total 266 desa. Kemudian pada tahun 2024, jumlah tersebut meningkat menjadi 33 desa, sehingga persentase desa mandiri meningkat menjadi 15,41%. Indikator ini tercatat cenderung mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, capaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.43  
Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Urusan  
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal Tahun 2020 – 2024

| No | Indikator                                                 | Satuan | Capaian Kinerja |        |        |        |        |
|----|-----------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------|--------|--------|--------|
|    |                                                           |        | 2020            | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|    | Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |        |                 |        |        |        |        |
|    | IKU OPD                                                   |        |                 |        |        |        |        |
| 1. | Persentase Desa Mandiri                                   | %      | 4,51            | 4,89   | 5,64   | 7,14   | 15,41  |
| 2. | Persentase desa yang naik statusnya                       | %      | 1,88            | 5,64   | 6,39   | 4,14   | 7,14   |
|    | IKK OPD                                                   |        |                 |        |        |        |        |
| 1. | Persentase pengentasan desa tertinggal                    | %      | 100,00          | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2. | Persentase peningkatan status desa mandiri                | %      | 4,35            | 11,54  | 13,48  | 13,71  | 29,20  |

(Sumber : RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029)

7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdapat 3 IKU dan 5 IKK. Pada tahun 2024, indikator Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) dari target tahun 2024 sebesar 12% baru tercapai 7,22%, dan turun dari tahun 2023 sebesar 12,27%. Hal tersebut mencerminkan kurang responsifnya akses dan pelayanan KB terhadap kebutuhan Pasangan Usia Subur (PUS). Sedangkan untuk capaian pemakaian kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR*) sudah mencakup 70,52% dari seluruh pasangan usia subur. Hal tersebut menunjukkan bahwa target Pemerintah Kabupaten Kendal terkait keikutsertaan masyarakat mengikuti program KB Modern (MCPR) telah terpenuhi. Sebagai informasi sampai dengan saat ini jumlah PUS adalah sebanyak 165.069 dan yang ber-KB aktif adalah 117.055, dari semua itu pengguna IUD sejumlah 5.736, MOW sejumlah 4.510, MOP sejumlah 195, Kondom sejumlah 3.389, Implan sejumlah 13.989, Suntikan sejumlah 72.888, dan pengguna Pil sejumlah 15.625.

Untuk lebih jelasnya, capaian kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.44  
Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Urusan  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kendal Tahun  
2020 – 2024

| No | Indikator                                                                           | Satuan | Capaian Kinerja |      |       |       |       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------|-------|-------|-------|
|    |                                                                                     |        | 2020            | 2021 | 2022  | 2023  | 2024  |
|    | Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana               |        |                 |      |       |       |       |
|    | IKU OPD                                                                             |        |                 |      |       |       |       |
| 1. | Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)                                               | Indeks | N/A             | N/A  | N/A   | N/A   | 62,42 |
| 2. | Total Fertility Rate                                                                | poin   | 2,02            | 2,02 | 2,01  | 2,00  | 2,03  |
| 3. | Proporsi Kebutuhan KB Yang Terpenuhi                                                | %      | N/A             | N/A  | N/A   | 84,59 | 90,26 |
|    | IKK OPD                                                                             |        |                 |      |       |       |       |
| 1. | TFR (Angka Kelahiran Total)                                                         | Rasio  | 2,02            | 2,02 | 2,01  | 2     | 2,03  |
| 2. | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | %      | N/A             | 56,7 | 59,71 | 66,19 | 70,52 |
| 3. | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi ( <i>unmet need</i> )              | %      | N/A             | 23,1 | 11,8  | 12,27 | 7,22  |
| 4. | Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)    | Poin   | 14,3            | 14,2 | 14    | 14    | 13,9  |
| 5. | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)                                               | Indeks | N/A             | N/A  | N/A   | N/A   | 62,42 |

(Sumber : RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029)

8. Perhubungan

Pada urusan Perhubungan terdapat 4 IKU dan 2 IKK Perangkat Daerah. Pada tahun 2024, indikator Rasio konektivitas Kabupaten mencapai 0,67%, menurun dari tahun 2023 sebesar 0,78%. Jaringan jalan yang memiliki trayek sejumlah 1.447 dari total jumlah jalan sebanyak 2.550 atau persentase jaringan jalan yang memiliki trayek sebesar 54%.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam pencapaian target kinerja adalah :

- a. Trayek yang sudah ada tidak berjalan;
- b. Armada semakin berkurang dikarenakan penumpang lebih memilih angkutan lain/ kendaraan sendiri;
- c. Terjadi penurunan jumlah arus penumpang angkutan umum disebabkan meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi, sehingga berpengaruh pada jumlah angkutan umum yang masih beroperasi dan mengurus ijin trayek.

Beberapa hal yang menjadi faktor pendorong/upaya/solusi yang dilakukan adalah :

- a. Ijin trayek dan retribusi pengujian tidak dipungut biaya atau gratis;
- b. Melakukan pengembangan feeder; dan

- c. Diperlukan komitmen bersama untuk meningkatkan minat pengguna transportasi darat, salah satunya adalah dengan pengurangan penggunaan kendaraan pribadi.

Untuk lebih jelasnya, capaian kinerja urusan Perhubungan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.45  
Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Urusan Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2020 – 2024

| No | Indikator                                                                                          | Satuan | Capaian Kinerja |      |      |      |         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------|------|------|---------|
|    |                                                                                                    |        | 2020            | 2021 | 2022 | 2023 | 2024    |
|    | Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan                                                               |        |                 |      |      |      |         |
|    | IKU OPD                                                                                            |        |                 |      |      |      |         |
| 1. | Indeks Pelayanan Transportasi                                                                      | indeks | N/A             | N/A  | N/A  | N/A  | 0.41808 |
| 2. | Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota | %      | N/A             | N/A  | N/A  | N/A  | 31.00   |
| 3. | Persentase kelengkapan fasilitas sarana prasarana pelayaran                                        | %      | N/A             | N/A  | N/A  | N/A  | 52.00   |
| 4. | Indeks Keterlayanan Trayek Angkutan                                                                | indeks | N/A             | N/A  | N/A  | N/A  | 0.800   |
|    | IKK OPD                                                                                            |        |                 |      |      |      |         |
| 1. | Rasio konektivitas kabupaten/kota                                                                  | Rasio  | 0.82            | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.67    |
| 2. | Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten/Kota | %      | N/A             | N/A  | N/A  | N/A  | 30      |

(Sumber : RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029)

9. Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika berdasarkan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terdiri atas 2 sub urusan yaitu: 1) Informasi dan Komunikasi Publik dan 2) Aplikasi Informatika. Pada urusan Komunikasi dan Informatika terdapat 3 IKU dan 6 IKK Perangkat Daerah. Capaian indikator kinerja pada tahun 2024 cenderung mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Dalam pencapaian target kinerja tersebut terdapat beberapa catatan antara lain:

- a. Pusat data Pemda belum optimal baik dari sisi kapasitas server maupun fisik bangunan gedung pusat data;
- b. Sistem penghubung layanan masih menggunakan SIMANTRA, belum terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang baru ditetapkan Kementerian Kominfo.

Tindak lanjut yang dibutuhkan dalam mencapai kinerja antara lain adalah dengan adanya interoperabilitas data antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah.

Untuk lebih jelasnya, capaian kinerja urusan Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.46  
Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Urusan  
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2020 – 2024

| No | Indikator                                                                                                                                      | Satuan | Capaian Kinerja             |                              |                              |                       |                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|    |                                                                                                                                                |        | 2020                        | 2021                         | 2022                         | 2023                  | 2024                  |
|    | Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika                                                                                            |        |                             |                              |                              |                       |                       |
|    | IKU OPD                                                                                                                                        |        |                             |                              |                              |                       |                       |
| 1. | Indeks Pemerintah Digital                                                                                                                      | poin   | N/A                         | N/A                          | N/A                          | N/A                   | N/A                   |
| 2. | Indeks Keterbukaan Informasi Publik                                                                                                            | Poin   | 88,8<br>(menuju informatif) | 82,96<br>(menuju informatif) | 76,77<br>(kurang informatif) | 95,88<br>(informatif) | 96,32<br>(informatif) |
| 3. | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi                                                                  | %      | 19,77                       | 56,96                        | 53,82                        | 50,15                 | 50,15                 |
|    | IKK OPD                                                                                                                                        |        |                             |                              |                              |                       |                       |
| 1. | Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo | %      | 41,31                       | 45,87                        | 50,00                        | 56,42                 | 65,14                 |
| 2. | Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah                              | %      | 64,22                       | 69,35                        | 72,48                        | 81,19                 | 83,49                 |
| 3. | Persentase Perangkat Dearah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)                                              | %      | 0                           | 0                            | 0                            | 0                     | 0                     |
| 4. | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo                           | %      | 18,75                       | 18,75                        | 18,75                        | 18,75                 | 29,17                 |
| 5. | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi                                                                  | %      | 19,77                       | 56,96                        | 53,82                        | 50,15                 | 50,15                 |
| 6. | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik. mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan              | %      | 51,48                       | 62,72                        | 100                          | 100                   | 100                   |

| No | Indikator                          | Satuan | Capaian Kinerja |      |      |      |      |
|----|------------------------------------|--------|-----------------|------|------|------|------|
|    |                                    |        | 2020            | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|    | pemerintah daerah kabupaten / kota |        |                 |      |      |      |      |

(Sumber : RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029)

10. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Pada bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah terdapat 3 IKU dan 3 IKK yang capaian semua indikatornya meningkat dibanding tahun sebelumnya. Jumlah seluruh koperasi di Kabupaten Kendal tahun 2024 adalah 605 koperasi, dengan jumlah koperasi aktif pada tahun 2023 sebanyak 269 koperasi, dan koperasi tidak aktif sebanyak 346 koperasi. Jumlah koperasi aktif tahun 2024 meningkat dibanding tahun 2023 yang terdapat 258 koperasi. Selain itu, Pemberdayaan UMKM diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim usaha yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan peran dan potensi UMKM di Kabupaten Kendal. Tetapi jumlah UMKM Kabupaten Kendal tahun 2023 sebanyak 25.321 unit usaha sedangkan tahun 2024 sebanyak 25.321 unit usaha dan tidak mengalami kenaikan. Sedangkan jumlah UMKM yang diberdayakan sejumlah 1.715 unit usaha.

Capaian indikator Persentase Koperasi yang berkualitas di Kabupaten Kendal pada tahun 2024 meningkat sebesar 99,47% dari tahun 2023 sebesar 80,23% dari koperasi yang ada. Untuk indikator Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha masuk dalam kategori sangat tinggi atau 8,72%, dan meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar 5,92%. Hal tersebut dikarenakan adanya pendataan yang lebih baik terhadap keberadaan usaha mikro dan kecil di Kabupaten Kendal sehingga pertumbuhannya dapat dievaluasi setiap tahun dengan lebih baik.

Berikut beberapa hal yang menjadi faktor penghambat pencapaian indikator kinerja urusan Urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, antara lain :

- a. Belum adanya update database UMKM;
- b. Penghapusan koperasi yang tidak aktif;
- c. Meningkatnya PKL (Pedagang Kaki Lima) yang tidak terdaftar;
- d. Terdapat program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tidak fokus pada pencapaian kinerja.

Hal-hal yang diupayakan menjadi faktor pendorong dalam mencapai

target adalah :

- a. Pendataan ulang terhadap UMKM secara berkala;
- b. Pembayaran retribusi pasar yang bagus, dengan menggunakan QRIS;
- c. Sinergitas pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Secara lengkap, indikator urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dapat dilihat tabel dibawah ini.

Tabel 2.47  
Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal Tahun 2020 – 2024

| No | Indikator                                                  | Satuan | Capaian Kinerja |      |      |       |       |
|----|------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------|------|-------|-------|
|    |                                                            |        | 2020            | 2021 | 2022 | 2023  | 2024  |
|    | Urusan Pemerintah Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah |        |                 |      |      |       |       |
|    | IKU OPD                                                    |        |                 |      |      |       |       |
| 1. | Rasio Kewirausahaan Daerah                                 | %      | 2,44            | 2,31 | 4,1  | 3,26  | 3,3   |
| 2. | Persentase pertumbuhan unit usaha mikro                    | %      | 5,35            | 5,45 | 5,92 | 6,75  | 8,72  |
| 3. | Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB                  | %      | 1,22            | 0,96 | 0,82 | 0,86  | 0,86  |
|    | IKK OPD                                                    |        |                 |      |      |       |       |
| 1. | Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi                          | %      | N/A             | N/A  | N/A  | N/A   | N/A   |
| 2. | Persentase Koperasi yang berkualitas                       | %      | 78              | 78   | 78,4 | 80,23 | 99,47 |
| 3. | Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha            | %      | 5,1             | 0,12 | 6,54 | 6,54  | 8,72  |

(Sumber : RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029)

11. Lingkungan Hidup

Pada bidang Lingkungan Hidup mempunyai 6 IKU dan 3 IKK. Indikator yang sudah mencapai target dan meningkat dibanding tahun sebelumnya adalah Indeks Kualitas Udara sebesar 81,24, dan Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota sebesar 96%. Terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target. Hal tersebut dikarenakan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Armada pengangkutan sampah kurang memadai;
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengolahan sampah;
- c. Pengambilan *sample* di titik lokasi dan waktu yang kurang tepat.

Hal-hal yang diupayakan antara lain adalah :

- a. Waktu dan tempat yang tepat menurut perhitungan karena *sample* tidak bisa diulangi;
- b. Penambahan armada pengangkutan sampah;
- c. Mendorong masyarakat terkait pengelolaan sampah;
- d. Adanya pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST).

Indikator Kinerja Kunci Dinas Lingkungan Hidup sudah sangat baik,

dari tiga indikator hanya terdapat satu indikator yang tidak tercapai, namun capaiannya dalam kategori Sangat Tinggi. Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota merupakan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah atasan terhadap akumulasi kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Kendal. Berdasarkan Surat Edaran dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL.1.1/B/02/2024, perhitungan IKLH tahun 2025-2045 mengalami beberapa perubahan diantaranya adalah:

- a. Metode perhitungan IKA dihitung dengan menggunakan rumus baru yang disebut IKA-INA. Metode IKA INA mengacu pada NSF-WQI (National Sanitation Foundation Water Quality Index).
- b. Parameter untuk perhitungan IKU mengalami perubahan dengan adanya penambahan parameter baru yaitu *Particulate Matter* 2.5 mikron (PM 2.5).
- c. Rumus perhitungan IKL mengalami perubahan yaitu, semua kelas tutupan lahan (23 kelas tutupan lahan) diperhitungkan dalam menentukan besarnya nilai IKL.

Komponen IKLH yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Nilai konversi terhadap capaian tahun 2024 pada indeks komponen IKLH tersebut, yaitu:

- a. Nilai konversi IKA sebesar 42,38
- b. Nilai konversi IKU sebesar 81,24
- c. Nilai konversi IKL sebesar 39,68
- d. Nilai konversi IKLH sebesar 57,53

Skor yang masih rendah terdapat pada kinerja pengelolaan persampahan. Jumlah timbulan sampah di Kabupaten Kendal tahun 2024 adalah 159.584,72 ton/tahun. Indikator Jumlah Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah pada tahun 2024 mencapai 1,00 %. Persentase sampah yang terkelola di Kabupaten Kendal tahun 2024 yakni 0,74%. Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Pada indikator Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota tahun 2024 di Kabupaten Kendal mencapai 44,37%, meningkat dibanding tahun 2023 sebesar 42,95%. Sebagai informasi, kontribusi penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Kabupaten Kendal tahun 2024 adalah sebesar 32.817,84 TonCO<sub>2</sub>eq. Penurunan emisi GRK dihitung dari kegiatan yang secara langsung menurunkan emisi GRK empat sektor/sub sektor prioritas yaitu

transportasi, AFOLU, pengelolaan sampah. Perlunya intervensi kebijakan dan program lebih yang efektif dalam mendukung target penurunan emisi GRK.

Secara lengkap, indikator urusan lingkungan hidup dapat dilihat tabel dibawah ini.

Tabel 2.48  
Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2020 – 2024

| No | Indikator                                                                                                                                         | Satuan | Capaian Kinerja |       |       |       |       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                                                                                                                                   |        | 2020            | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|    | Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup                                                                                                         |        |                 |       |       |       |       |
|    | IKU OPD                                                                                                                                           |        |                 |       |       |       |       |
| 1. | Indeks Kualitas Air                                                                                                                               | Indeks | 46,70           | 36,67 | 45,00 | 44,29 | 42,38 |
| 2. | Indeks Kualitas Udara                                                                                                                             | Indeks | 75,16           | 78,08 | 80,81 | 79,56 | 81,24 |
| 3. | Indeks Kualitas Tutupan Lahan                                                                                                                     | indeks | 72,05           | 36,88 | 36,87 | 40,52 | 39,68 |
| 4. | Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah                                                                                            | %      | N/A             | N/A   | N/A   | N/A   | 1,178 |
| 5. | Cakupan RTH Publik yang terkelola                                                                                                                 | Ha     | 12,06           | 12,46 | 12,86 | 12,96 | 12,96 |
| 6. | Persentase Pengendalian Kerusakan Lingkungan                                                                                                      | %      | 30              | 35    | 48,28 | 50    | 96,00 |
|    | IKK OPD                                                                                                                                           |        |                 |       |       |       |       |
| 1. | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota                                                                                                  | Indeks | 65,37           | 53,49 | 57,72 | 57,75 | 57,53 |
| 2. | Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)                                                                                                          | %      | N/A             | 38,43 | 39,07 | 38,43 | 38,51 |
| 3. | Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota                                                                                              | %      | 51,24           | 33,74 | 41,11 | 42,95 | 44,37 |
| 4. | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan. izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota | %      | 30              | 35    | 48,28 | 50    | 96    |

(Sumber : RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029)

12. Penanaman Modal

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam pelayanan perizinan baik dibidang penanaman modal/investasi maupun pelayanan izin usaha dengan sistem *One Stop Service*. Dengan sistem ini, akan terwujud pelayanan yang efektif, efisien serta transparan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Bupati Kendal kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal. Terdapat 1.462 (seribu empat ratus enam puluh dua) jenis ijin kepada investor baru dengan realisasi investasi sebesar Rp.4.140.259.461.613,-. Pada urusan bidang penanaman modal terdapat 3 IKU dan 2 IKK yang cenderung mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

Beberapa hal yang menjadi faktor penghambat adalah:

- a. Tambahan investor masuk ketika ada kegiatan pameran atau temu bisnis;
- b. Investor besar bisa masuk ketika ada temu bisnis;
- c. Adanya *refocussing* membuat terbatasnya promosi kepada calon investor;
- d. Kurangnya armada guna promosi investasi.

Upaya yang dilaksanakan dalam upaya meningkatkan capaian kinerja adalah :

- a. Penambahan fitur pada peta investasi;
- b. Membuat aplikasi untuk kemitraan usaha (SI MITRA HARUM);
- c. Membuat pelayanan keliling.

Untuk lebih lengkapnya, capaian indikator pada urusan penanaman modal dapat dilihat pada tabel data yang terdapat di bawah ini.

Tabel 2.49  
Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Urusan  
Penanaman Modal Kabupaten Kendal Tahun 2020 – 2024

| No | Indikator                                                                 | Satuan         | Capaian Kinerja |        |        |        |        |
|----|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|
|    |                                                                           |                | 2020            | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|    | Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal                                  |                |                 |        |        |        |        |
|    | IKU OPD                                                                   |                |                 |        |        |        |        |
| 1. | Persentase peningkatan investasi                                          | %              | 114,76          | 20,68  | 36,35  | 23,16  | 122,02 |
| 2. | Nilai Investasi Daerah                                                    | Triliun Rupiah | 3,157           | 4,470  | 5,195  | 6,398  | 14,205 |
| 3. | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | Poin           | 91,27           | 91,75  | 92,49  | 94,4   | 98,25  |
|    | IKK OPD                                                                   |                |                 |        |        |        |        |
| 1. | Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota                        | %              | 114,76          | 20,68  | 36,35  | 23,16  | 122,02 |
| 2. | Realisasi Total terhadap Target Investasi                                 | %              | 196,09          | 177,21 | 109,60 | 110,31 | 160,51 |

(Sumber : RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029)

13. Kepemudaan dan Olahraga

Pada urusan kepemudaan dan olahraga terdapat 4 IKU dan 2 IKK, dengan indikator kinerja mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun sebelumnya. Terdapat 1.266 wirausaha muda yang tercatat dibanding dengan jumlah penduduk berusia 16-30 tahun di Kabupaten Kendal sejumlah 235.195 orang. Permasalahan-permasalahan yang ada dalam pencapaian target kinerja Urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga antara lain :

- a. Rendahnya capaian tersebut dikarenakan masih kurangnya minat pemuda untuk berwirausaha;

- b. Kurangnya respon pemuda pada saat pendataan wirausaha;
- c. Belum adanya program bantuan permodalan bagi pemuda yang berwirausaha;
- d. Belum adanya regulasi resmi tentang penyelenggaraan kepemudaan dan keolahragaan.

Hal-hal yang dilakukan guna menjadi upaya/faktor pendorong dalam pencapain kinerja Urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga antara lain :

- a. Penguatan dan penyadaran pemuda terhadap masalah sosial dan kebangsaan melalui pendampingan dan pembinaan kegiatan kepemudaan dan minat pemuda berwirausaha;
- b. Menyusun draft regulasi resmi tentang penyelenggaraan kepemudaan dan Keolahragaan di Kabupaten Kendal.

Untuk lebih lengkapnya, capaian indikator pada urusan kepemudaan dan olahraga dapat dilihat pada tabel data yang terdapat di bawah ini.

Tabel 2.50  
Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Urusan  
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kendal Tahun 2020 – 2024

| No | Indikator                                                                                   | Satuan | Capaian Kinerja |       |       |       |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------|-------|-------|------|
|    |                                                                                             |        | 2020            | 2021  | 2022  | 2023  | 2024 |
|    | Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga                                            |        |                 |       |       |       |      |
|    | IKU OPD                                                                                     |        |                 |       |       |       |      |
| 1. | Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)                                                             | poin   | 51,79           | 62,27 | 69,12 | 65,75 | N/A  |
| 2. | Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)                                                           | poin   | N/A             | N/A   | N/A   | N/A   | 0,33 |
| 3. | Persentase Atlet yang Berprestasi                                                           | %      | 13,36           | 44,27 | 50,57 | 68,99 | 66,3 |
| 4. | Tingkat pemuda berprestasi                                                                  | %      | 23,63           | 50,57 | 59,09 | 52,9  | 52,9 |
|    | IKK OPD                                                                                     |        |                 |       |       |       |      |
| 1. | Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat | %      | 0,44            | 0,88  | 0,92  | 0,98  | 1,01 |
| 2. | Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi                     | %      | N/A             | N/A   | N/A   | N/A   | 2,93 |

(Sumber : RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029)

14. Statistik

Pada urusan statistik terdapat 1 IKU dan 3 IKK, pada tahun 2024 ini indikator tersebut sudah mencapai target yang ditetapkan. Capaian indikator prosentase perangkat daerah dengan ketersediaan statistik sektoral yang memiliki standar data dan metadata sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia meningkat dari tahun 2021 lalu.

Dengan meningkatnya indikator ini, diharapkan data-data yang dirilis

dapat dipertanggungjawabkan kevalidannya, dan dapat digunakan untuk peningkatan pembangunan di Kabupaten Kendal.

Untuk lebih lengkapnya, capaian indikator pada urusan statistik dapat dilihat pada tabel data yang terdapat di bawah ini.

Tabel 2.51  
Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Urusan Statistik Kabupaten Kendal Tahun 2020 – 2024

| No | Indikator                                                                                                                  | Satuan | Capaian Kinerja |      |      |      |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------|------|------|------|
|    |                                                                                                                            |        | 2020            | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|    | Urusan Pemerintah Bidang Statistik                                                                                         |        |                 |      |      |      |      |
|    | IKU OPD                                                                                                                    |        |                 |      |      |      |      |
| 1. | Indeks Pembangunan Statistik (IPS)                                                                                         | %      | N/A             | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  |
|    | IKK OPD                                                                                                                    |        |                 |      |      |      |      |
| 1. | Indeks Pembangunan Statistik (IPS)                                                                                         | skor   | N/A             | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  |
| 2. | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | %      | 100             | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 3. | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah                                 | %      | 100             | 100  | 100  | 100  | 100  |

(Sumber : RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029)

15. Persandian

Pada bidang Persandian terdapat 2 indikator kinerja, satu IKU yaitu Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI), dan IKK yaitu Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah. Kedua indikator tersebut mengalami peningkatan capaian kinerja dari tahun sebelumnya dan melampaui target yang ditetapkan. Dalam pencapaian Urusan Pemerintahan bidang Persandian Kabupaten Kendal menggunakan indikator indeks KAMI (Indeks Keamanan Informasi). Indeks Keamanan Informasi (KAMI) merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan asesmen dan evaluasi tingkat kesiapan (Kelengkapan dan Kematangan) penerapan keamanan informasi berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001. Proses evaluasi dilakukan melalui sejumlah pertanyaan di beberapa area berikut: 1) Kategori Sistem Elektronik yang digunakan; 2) Tata Kelola Keamanan Informasi; 3) Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi; 4) Kerangka Kerja Keamanan Informasi; 5) Pengelolaan Aset Informasi; 6) Teknologi dan Keamanan Informasi; dan 7) Suplemen (Tambahan pengukuran dilakukan untuk aspek Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga

Penyedia Layanan, Pengamanan Layanan Infrastruktur Awan (*Cloud Service*) dan Perlindungan Data Pribadi. Skor Indeks KAMI Kabupaten Kendal tahun 2024 adalah 539, skor tersebut meningkat dari tahun 2023 dengan skor 515.

Untuk lebih lengkapnya, capaian indikator pada urusan persandian dapat dilihat pada tabel data yang terdapat di bawah ini.

Tabel 2.52  
Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Urusan  
Persandian Kabupaten Kendal Tahun 2020 – 2024

| No | Indikator                                               | Satuan | Capaian Kinerja |        |       |       |       |
|----|---------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------|-------|-------|-------|
|    |                                                         |        | 2020            | 2021   | 2022  | 2023  | 2024  |
|    | Urusan Pemerintah Bidang Persandian                     |        |                 |        |       |       |       |
|    | IKU OPD                                                 |        |                 |        |       |       |       |
| 1. | Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)                 | poin   | N/A             | 207,56 | 359   | 515   | 539   |
|    | IKK OPD                                                 |        |                 |        |       |       |       |
| 1. | Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah | %      | N/A             | 32,18  | 55,66 | 79,84 | 83,57 |

(Sumber : RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029)

16. Kebudayaan

Pada bidang Kebudayaan, terdapat 3 IKU dan 2 IKK yang capaian indikatornya cenderung mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Namun capaian indikator Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan tahun 2024 sebesar 20,00%, menurun dibandingkan tahun 2023 sebesar 23,53%. Dengan capaian indikator yang meningkat, dapat diartikan bahwa Kabupaten Kendal berkomitmen melestarikan budaya lokal, maupun cagar budaya yang ada di Kabupaten Kendal, sehingga nilai-nilai kebudayaan dapat diteruskan ke generasi selanjutnya.

Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) yang ada di Kabupaten Kendal pada tahun 2024 sejumlah 206 cagar budaya, serta terdapat bangunan cagar budaya di Kabupaten Kendal yang dilestarikan oleh Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) sejumlah 20. Di Kabupaten Kendal terdapat Ritual Khusus dengan nama “KALANG OBONG”, dimana Ritual tersebut merupakan upacara adat peringatan kematian seseorang dengan cara membakar pakaian dan benda yang dipakai semasa hidup dan lokasi kegiatan ritual tersebut saat ini berada di 5 (lima) Kecamatan yaitu : Rowosari, Weleri, Ringinarum, Gemuh, dan Pegandon.

Untuk lebih lengkapnya, capaian indikator pada urusan kebudayaan dapat dilihat pada tabel data yang terdapat di bawah ini.

Tabel 2.53  
Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Urusan  
Kebudayaan Kabupaten Kendal Tahun 2020 – 2024

| No | Indikator                                                                          | Satuan | Capaian Kinerja |       |       |       |       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                                                                    |        | 2020            | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|    | Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan                                                |        |                 |       |       |       |       |
|    | IKU OPD                                                                            |        |                 |       |       |       |       |
| 1. | Tingkat pelestarian budaya lokal                                                   | Nilai  | N/A             | 6,67  | 7,22  | 7,78  | 12,02 |
| 2. | Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan | %      | 5,88            | 11,76 | 17,65 | 23,53 | 20,00 |
| 3. | Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Benda (WBB) yang dilestarikan      | %      | N/A             | N/A   | N/A   | 6,13  | 11,04 |
|    | IKK OPD                                                                            |        |                 |       |       |       |       |
| 1. | Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan                                 | %      | N/A             | 6,13  | 6,13  | 6,13  | 11,04 |
| 2. | Persentase Jumlah Cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan       | %      | N/A             | 11,76 | 17,65 | 23,53 | 20,00 |

(Sumber : RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029)

17. Kearsipan

Pada tahun 2024 terdapat 3 IKU dan 1 IKK pada urusan pemerintah bidang kearsipan. Dari semua indikator tersebut, sudah melampaui target dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal tersebut didasarkan pada Pemerintah Kabupaten Kendal yang sudah melaksanakan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Awal tahun 2023 Dinarpus Kabupaten Kendal telah mengadakan sosialisasi dan pendampingan terhadap Perangkat Daerah dalam penyelamatan arsip pada kantor/dinas/instansi pemerintah Kabupaten Kendal, hal tersebut sebagai upaya peningkatan kesadaran pada keberadaan dan keutuhan arsip di Kabupaten Kendal. Untuk lebih lengkapnya, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.54  
Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Urusan  
Kearsipan Kabupaten Kendal Tahun 2020 – 2024

| No | Indikator                                  | Satuan | Capaian Kinerja |       |       |       |       |
|----|--------------------------------------------|--------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                            |        | 2020            | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|    | Urusan Pemerintah Bidang Kearsipan         |        |                 |       |       |       |       |
|    | IKU OPD                                    |        |                 |       |       |       |       |
| 1. | Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan Daerah   | poin   | N/A             | 61,29 | 71,42 | 79,18 | 86,44 |
| 2. | Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal | Poin   | N/A             | 69,55 | 76,61 | 87,99 | 93,61 |
| 3. | Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal  | poin   | N/A             | 48,90 | 63,63 | 65,95 | 75,70 |

| No | Indikator                                                          | Satuan | Capaian Kinerja |       |       |       |       |
|----|--------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                                                    |        | 2020            | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|    | IKK OPD                                                            |        |                 |       |       |       |       |
| 1. | Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah | Nilai  | N/A             | 61,29 | 71,42 | 79,18 | 86,44 |

(Sumber : RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029)

18. Perpustakaan

Pada bidang Perpustakaan terdapat 2 IKU dan 2 IKK, yang capaian kinerjanya menunjukkan peningkatan dan sudah mencapai indikator yang ditentukan. Ketercapaian indikator tersebut didukung dengan upaya peningkatan perpustakaan keliling, pembinaan perpustakaan sekolah dan perpustakaan desa, mengadakan lomba-lomba yang sifatnya meningkatkan literasi serta mengadakan promosi di media sosial untuk mengajak masyarakat gemar membaca.

Capaian indikator Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat mengalami peningkatan cukup sigfikan dari tahun 2023 sebesar 56,08%, sampai dengan akhir tahun 2024 meningkat mencapai 84,69%. Jumlah pemustaka yang berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan berasal dari kunjungan harian perpustakaan (*onsite* dan *online*) dan kunjungan pemustaka yang terlibat dalam kegiatan perpustakaan. Pada Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat tahun 2024 mencapai 66,59%, meningkat dibanding tahun 2023.

Untuk lebih jelasnya, capaian indikator pada urusan perpustakaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.55

Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Urusan  
Perpustakaan Kabupaten Kendal Tahun 2020 – 2024

| No | Indikator                                  | Satuan | Capaian Kinerja |       |       |       |       |
|----|--------------------------------------------|--------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                            |        | 2020            | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|    | Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan      |        |                 |       |       |       |       |
|    | IKU OPD                                    |        |                 |       |       |       |       |
| 1. | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat     | Indeks | N/A             | 37,51 | 47,87 | 55,72 | 66,59 |
| 2. | Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan           | %      | N/A             | N/A   | N/A   | N/A   | N/A   |
|    | IKK OPD                                    |        |                 |       |       |       |       |
| 1. | Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat | Indeks | 50,2            | 55,1  | 53,98 | 56,08 | 84,69 |
| 2. | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat     | Indeks | N/A             | 37,51 | 47,87 | 55,72 | 66,59 |

(Sumber : RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029)

### 2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

#### a. Kelautan dan Perikanan

Pada bidang Kelautan dan Perikanan terdapat 4 IKU dan 3 IKK. Capaian indikator-indikator tersebut meningkat dari tahun sebelumnya, hanya satu indikator yang mengalami penurunan yakni Produksi Perikanan Budidaya, dengan capaian tahun 2023 sebesar 78,2% menurun menjadi 76,2% pada tahun 2024. Penurunan produksi tersebut dikarenakan beberapa hal, yaitu:

- a. Cuaca ekstrem.
- b. Semakin menurunnya luas tambak di wilayah pesisir Kabupaten Kendal, terutama di Kecamatan Kaliwungu penyebab utama penurunan luas lahan tambak karena terjadinya alih fungsi lahan untuk kawasan industri yang mana setiap tahun semakin banyak tambak yang dijadikan pabrik, karena Kecamatan Kaliwungu merupakan pusat Kawasan Industri Kendal (KIK) bahkan telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Tambak yang masih ada dan masih memungkinkan untuk budidaya, masih tetap dimanfaatkan oleh masyarakat untuk budidaya ikan. Aktivitas tersebut akan terhenti dengan sendirinya apabila dilaksanakan pembangunan pabrik baru oleh pengelola KIK. Penurunan luas lahan di Kecamatan Patebon dan Kangkung disebabkan karena tingginya abrasi laut air laut menyebabkan tanggul tambak rusak/hilang dan tambak terendam air laut khususnya di Desa Kartikaja dan Desa Pidodokulon.
- c. Tidak adanya alokasi pupuk bersubsidi bagi pembudidaya ikan di tambak (terutama ikan bandeng) dan mahal nya harga pupuk urea di pasaran, sehingga pembudidaya memberikan pupuk sekedarnya/semampunya serta mengurangi kepadatan tebar benih maka produksi ikan bandeng juga berkurang. Hal ini terjadi karena kebijakan dari pemerintah pusat terkait regulasi pupuk bersubsidi yang hanya diperuntukkan kepada petani.
- d. Harga pakan pabrikan (pelet) yang terus meningkat, sedangkan harga ikan bandeng tidak stabil atau berfluktuasi (naik turun) karena tingginya ketergantungan pada bahan baku impor terutama jagung dan bahan sumber protein.
- e. Terjadi gagal panen akibat air pasang tinggi (rob) dan bencana banjir pada musim penghujan.
- f. Banyak lahan tambak yang tidak produktif atau di kawasan KIK sudah semakin banyak yang diuruk untuk pembangunan industri. Sampai saat

ini jumlah tambak tersisa seluas ± 500 hektar dari lebih kurang 2.000 Ha.

Untuk lebih lengkapnya, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.56

Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal Tahun 2020 – 2024

| No | Indikator                                                             | Satuan | Capaian Kinerja |                 |                 |                 |                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |                                                                       |        | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            |
|    | Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan                       |        |                 |                 |                 |                 |                 |
|    | IKU OPD                                                               |        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1. | Nilai produksi perikanan                                              | Rupiah | 694.850.830.677 | 741.662.523.812 | 663.198.084.606 | 545.429.474.775 | 564.018.391.271 |
| 2. | Nilai produksi perikanan tangkap                                      | Rupiah | 57.541.277.140  | 74.670.649.994  | 88.947.742.242  | 86.964.888.046  | 93.823.795.225  |
| 3. | Nilai produksi perikanan budidaya                                     | Rupiah | 617.733.580.000 | 646.079.400.000 | 554.539.950.000 | 441.203.510.000 | 452.447.470.000 |
| 4. | Nilai produksi pengolahan hasil perikanan                             | Rupiah | 19.575.973.537  | 20.912.473.818  | 19.710.392.364  | 17.261.076.729  | 17.747.126.046  |
|    | IKK OPD                                                               |        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1. | Produksi Perikanan Tangkap                                            | %      | 100             | 103,0           | 118,0           | 115,0           | 131,2           |
|    |                                                                       | kg/th  | 3.801.077       | 4.317.979       | 5.191.438       | 5.314.014       | 6.365.695       |
| 2. | Produksi Perikanan Budi Daya                                          | %      | 100             | 100,4           | 88,4            | 78,2            | 76,2            |
|    |                                                                       | kg/th  | 22.509.480      | 23.233.300      | 21.035.200      | 19.115.600      | 19.169.100      |
| 3. | Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota | %      |                 | 100,8           | 93,0            | 84,0            | 85,1            |
|    |                                                                       | kg/th  | 26.310.557      | 27.551.279      | 26.226.638      | 24.429.614      | 25.534.795      |

(Sumber : RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029)

b. Pariwisata

Pada bidang Pariwisata terdapat 5 IKU dan 3 IKK. Pada tahun 2024, Persentase peningkatan kunjungan wisatawan sebesar 4,33% mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 sebesar 18,87%. Tahun 2024 kunjungan wisata sejumlah 2.351.194 orang yang terdiri dari Pengunjung event sebanyak 466.616 orang, Pengunjung nusantara 1.884.431 orang, Pengunjung mancanegara 147 orang, dan pelaku ekonomi kreatif yang dikembangkan sejumlah 128 pelaku ekonomi dari 366 pelaku ekonomi yang ada di Kendal.

Untuk PAD sektor pariwisata (semua DTW), realisasi pada tahun 2023 tercapai sebesar Rp. 11.080.052.160,-, kemudian meningkat pada tahun 2024 menjadi Rp. 12.756.501.816,-. Ketercapaian indikator kinerja tersebut didukung oleh pajak/retribusi pendukung sektor pariwisata seperti penginapan, restoran, yang pemungutannya dilaksanakan oleh Bapenda Kabupaten Kendal. Meskipun penerimaan PAD sektor pariwisata meningkat, namun masih diperlukan pembenahan sarana prasarana pariwisata di Kabupaten Kendal, peningkatan profesionalitas pengelola obyek wisata yang

ada serta perlunya peningkatan promosi pariwisata di Kabupaten Kendal, agar PAD sektor pariwisata dapat semakin meningkat.

Untuk lebih lengkapnya, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.57

Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Urusan  
Pariwisata Kabupaten Kendal Tahun 2020 – 2024

| No | Indikator                                                            | Satuan | Capaian Kinerja |               |               |                |                |
|----|----------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|    |                                                                      |        | 2020            | 2021          | 2022          | 2023           | 2024           |
|    | Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata                                  |        |                 |               |               |                |                |
|    | IKU OPD                                                              |        |                 |               |               |                |                |
| 1. | PAD Sektor Pariwisata dari semua DTW                                 | Rupiah | 4.359.140.787   | 5.257.302.406 | 9.953.938.637 | 11.080.052.160 | 12.756.501.816 |
| 2. | Persentase peningkatan kunjungan wisatawan                           | %      | -46             | 5             | 21,61         | 18,87          | 4,33           |
| 3. | Jumlah tamu wisatawan mancanegara                                    | orang  | 0               | 58            | 107           | 139            | 147            |
| 4. | Jumlah tamu wisatawan nusantara                                      | orang  | 459             | 500           | 1.519.447     | 1.806.225      | 1.884.431      |
| 5. | Persentase pelaku ekraf yang dikembangkan                            | %      | N/A             | N/A           | 61            | 56             | 70             |
|    | IKK OPD                                                              |        |                 |               |               |                |                |
| 1. | Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum             | %      | N/A             | N/A           | N/A           | N/A            | N/A            |
| 2. | Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang)      | %      | -86,48          | 0,00          | 84,48         | 29,91          | 5,76           |
| 3. | Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual | %      | N/A             | N/A           | 23,50         | 35,52          | 32,99          |

(Sumber : RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029)

c. Pertanian

Pada urusan pertanian, terdapat 10 IKU dan 7 IKK, indikator-indikator tersebut mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun sebelumnya. Peningkatan capaian tersebut didukung oleh beberapa faktor yaitu pengadaan gabah 50 ton di tahun 2024, adanya demplot dan pelatihan-pelatihan, adanya dana DAK untuk pemanfaatan lahan pekarangan untuk budidaya tanaman hortikultura seperti cabai, sayur-sayuran, vaksinasi secara rutin, adanya pelayanan kesehatan hewan, dan pemanfaatan lahan pekarangan untuk pengembangan pangan.

Produktivitas pertanian di Kabupaten Kendal tahun 2024 mencapai target yang telah ditentukan, namun ada capaian indikator yang meningkat dari tahun sebelumnya, dan ada yang menurun. Indikator produktivitas pertanian pada tahun 2024 yang mengalami peningkatan yakni produksi padi, jagung, dan kopi. Sedangkan produksi bawang merah sebesar 98,44 dan cabai sebesar 72,53, menurun dibandingkan produksi tahun 2023.

Untuk produksi daging sapi dan ayam ras juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Di Kabupaten Kendal, terdapat populasi ternak ruminansia dan non ruminansia. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal, populasi ternak ruminansia tahun 2024 di Kabupaten Kendal ada sejumlah 106.790 ekor, meliputi sapi potong 17.156 ekor, sapi perah 31 ekor, kerbau 697 ekor, kambing 70.070 ekor, dan domba 18.836 ekor. Sedangkan untuk populasi ternak non ruminansia ada sejumlah 868 ekor, meliputi kelinci 840 ekor, dan kuda 28 ekor. Populasi ternak ruminansia pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023, namun untuk populasi ternak non ruminansia mengalami penurunan cukup signifikan. Selengkapnya disajikan data populasi ternak ruminansia dan non ruminansia tahun 2020-2024 pada tabel berikut:

| No | Ternak         | Jumlah Populasi Ternak |               |               |               |                |
|----|----------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|    |                | 2020                   | 2021          | 2022          | 2023          | 2024           |
| 1. | Ruminansia     |                        |               |               |               |                |
|    | a. Sapi potong | 22.258                 | 24.568        | 16.664        | 15.369        | 17.156         |
|    | b. Sapi perah  | 6                      | 6             | 6             | 13            | 31             |
|    | c. Kerbau      | 1.460                  | 1.173         | 1.173         | 1.104         | 697            |
|    | d. Kambing     | 43.857                 | 43.523        | 37.020        | 41.718        | 70.070         |
|    | e. Domba       | 30.002                 | 30.136        | 26.944        | 30.495        | 18.836         |
|    | <b>Jumlah</b>  | <b>97.583</b>          | <b>99.406</b> | <b>81.807</b> | <b>88.699</b> | <b>106.790</b> |
| 2. | Non Ruminansia |                        |               |               |               |                |
|    | a. Kelinci     | 10.517                 | 10.415        | 11.608        | 11.979        | 840            |
|    | b. Kuda        | 370                    | 345           | 345           | 293           | 28             |
|    | <b>Jumlah</b>  | <b>10.887</b>          | <b>10.760</b> | <b>11.953</b> | <b>12.272</b> | <b>868</b>     |

(Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal, 2025)

Untuk lebih lengkapnya, capaian indikator pada urusan pertanian dapat dilihat pada tabel data yang terdapat di bawah ini.

Tabel 2.58  
Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Urusan  
Pertanian Kabupaten Kendal Tahun 2020 – 2024

| No | Indikator                          | Satuan         | Capaian Kinerja   |                   |                   |                   |                   |
|----|------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|    |                                    |                | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              |
|    | Urusan Pemerintah Bidang Pertanian |                |                   |                   |                   |                   |                   |
|    | IKU OPD                            |                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1. | Nilai produksi pertanian           | Rupiah         | 2.125.902.549.275 | 2.611.373.909.872 | 4.544.228.508.427 | 5.599.161.047.933 | 6.556.631.436.848 |
| 2. | Produktivitas padi                 | kuintal per ha | 54,25             | 54,91             | 56,47             | 55,78             | 56,75             |
| 3. | Produktivitas jagung               | kuintal per ha | 68,06             | 66,43             | 67,45             | 67,31             | 70,35             |
| 4. | Produktivitas bawang merah         | kuintal per ha | 93,35             | 95,13             | 95,06             | 101,32            | 98,57             |

| No      | Indikator                                                                                                                  | Satuan         | Capaian Kinerja |        |        |        |        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|
|         |                                                                                                                            |                | 2020            | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| 5.      | Produktivitas kopi                                                                                                         | kuintal per ha | 6,34            | 6,96   | 7,52   | 6,52   | 7,92   |
| 6.      | Produktivitas Cabai                                                                                                        | kuintal per ha | 69,00           | 70,73  | 73,85  | 63,42  | 72,41  |
| 7.      | Produktivitas Tembakau                                                                                                     | kuintal per ha | 13,80           | 15,70  | 14,46  | 15,44  | 15,10  |
| 8.      | Produksi daging sapi                                                                                                       | ton            | 908             | 1.407  | 1.111  | 1.273  | 1.608  |
| 9.      | Produksi daging ayam ras                                                                                                   | ton            | 9.623           | 9.000  | 15.893 | 14.923 | 20.681 |
| 10.     | Produksi telur ayam ras                                                                                                    | ton            | 46.739          | 62.991 | 42.330 | 75.769 | 94.712 |
| IKK OPD |                                                                                                                            |                |                 |        |        |        |        |
| 1.      | Peningkatan produksi tanaman pangan                                                                                        | %              | 0,63            | -0,66  | 3,24   | -2     | 4      |
| 2.      | Peningkatan Produksi Hortikultura                                                                                          | %              | 1,69            | 4,2    | -1,11  | 4,35   | -0,36  |
| 3.      | Peningkatan Produksi komoditas Peternakan                                                                                  | %              | N/A             | 37,42  | 12,12  | 12,13  | 22,63  |
| 4.      | Peningkatan Produksi komoditas Perkebunan                                                                                  | %              | 32,47           | 12,89  | -3,44  | 25,77  | 9,06   |
| 5.      | Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI Tanaman Pangan. Hortikultura dan Perkebunan                         | %              | 88,62           | 92,16  | 95,47  | 95,68  | 97,72  |
| 6.      | Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 PHMS) | %              | 100             | 90     | 85,3   | 87     | 88     |
| 7.      | Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular                                                      | %              | 0               | -44,50 | 40,36  | 59,42  | 31,74  |

(Sumber : RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029)

d. Perdagangan

Pada urusan perdagangan, terdapat 2 IKU dan 2 IKK. Pada tahun 2024, ada indikator yang mengalami peningkatan dan ada yang mengalami penurunan. Capaian LPE Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun 2024 mengalami penurunan yakni 8,54%, menurun dari tahun 2023 sebesar 10,37%.

Persentase pasar yang layak fungsi diukur berdasarkan pada Standar Layak Fungsi (SLF) oleh Kementerian atau diukur dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan IMB dan SLF dan SNI 8152 2021 Pasar Rakyat Se-Kabupaten Kendal. Pengukuran indikator sendiri berdasarkan pada Sanitasi, Ruang merokok, Ruang Laktasi, tempat Parkir yang tersedia di pasar. Pasar yang layak fungsi di Kabupaten Kendal sesuai dengan Permen PUPR baru 5 yaitu pasar Kaliwungu, pasar Kendal, Pasar Gladak, pasar Weleri I, dan Sukorejo. Sedangkan Persentase ketersediaan barang pokok

dan barang penting dari target 150% sudah tercapai 151%, hal tersebut didasarkan pada jumlah jenis barang dari target 25 jenis sudah tercapai 26 jenis barang yang ada di seluruh pasar di Kabupaten Kendal.

Untuk lebih lengkapnya, capaian indikator pada urusan perdagangan dapat dilihat pada tabel data yang terdapat di bawah ini.

Tabel 2.59  
Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Urusan  
Perdagangan Kabupaten Kendal Tahun 2020 – 2024

| No | Indikator                                                                                                                           | Satuan | Capaian Kinerja |       |       |       |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------|-------|-------|--------|
|    |                                                                                                                                     |        | 2020            | 2021  | 2022  | 2023  | 2024   |
|    | Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan                                                                                                |        |                 |       |       |       |        |
|    | IKU OPD                                                                                                                             |        |                 |       |       |       |        |
| 1. | LPE Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor                                                                   | %      | -2,4            | 7,42  | 8,9   | 10,37 | 8,54   |
| 2. | Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran. Reparasi Mobil dan Sepeda Motor                                                            | %      | 11,89           | 12,05 | 11,93 | 12,03 | 12,07  |
|    | IKK OPD                                                                                                                             |        |                 |       |       |       |        |
| 1. | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) | %      | N/A             | N/A   | N/A   | 100   | 100    |
| 2. | Persentase alat - alat ukur. takar. timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku                               | %      | 19,18           | 40,86 | 66,67 | 77,78 | 136.86 |

(Sumber : RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029)

e. Perindustrian

Pada urusan perindustrian terdapat 2 IKU dan 10 IKK, dengan capaian kinerja cenderung mengalami peningkatan. Indikator Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah sampai dengan tahun 2024 mencapai 50,86%. Industri kecil dan menengah di Kabupaten Kendal tahun 2024 sejumlah 81 industri, jumlah tersebut dihitung dari aplikasi sIINas. Dalam Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah dibutuhkan pembinaan, promosi, pendampingan dan kolaborasi antar pelaku industri. Untuk lebih lengkapnya, capaian indikator pada urusan perindustrian dapat dilihat pada tabel data yang terdapat di bawah ini.

Tabel 2.60  
Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Urusan  
Perindustrian Kabupaten Kendal Tahun 2020 – 2024

| No | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Satuan | Capaian Kinerja |       |       |       |       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 2020            | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|    | Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                 |       |       |       |       |
|    | IKU OPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                 |       |       |       |       |
| 1. | Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | %      | 42,29           | 42,27 | 41,94 | 41,73 | 41,70 |
| 2. | Persentase pertumbuhan IKM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | %      | N/A             | N/A   | N/A   | N/A   | N/A   |
|    | IKK OPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                 |       |       |       |       |
| 1. | Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %      | N/A             | N/A   | 23,53 | 50,7  | 50,86 |
| 2. | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %      | N/A             | N/A   | 0     | 100   | 100   |
| 3. | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait                                                                                                                                                                                                                                                                                                | %      | N/A             | N/A   | 100   | 100   | 100   |
| 4. | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang dikeluarkan oleh instansi terkait                                                                                                                                                                        | %      | N/A             | N/A   | 0     | 0     | 0     |
| 5. | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang dikeluarkan oleh instansi terkait                                                                                                                                                                        | %      | N/A             | N/A   | 100   | 100   | 100   |
| 6. | Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah. meliputi:<br>1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota 3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota | %      | N/A             | N/A   | N/A   | N/A   | NA    |
| 7. | Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %      | N/A             | N/A   | N/A   | N/A   | NA    |

| No  | Indikator                                                                                                                                                                                                               | Satuan | Capaian Kinerja |      |      |       |      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------|------|-------|------|
|     |                                                                                                                                                                                                                         |        | 2020            | 2021 | 2022 | 2023  | 2024 |
| 8.  | Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan. | %      | N/A             | N/A  | N/A  | N/A   | NA   |
| 9.  | Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik' dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan.          | %      | N/A             | N/A  | N/A  | N/A   | NA   |
| 10. | Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini                                                                                                                                                               | %      | N/A             | N/A  | 55   | 51,66 | 55,4 |

(Sumber : RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029)

2.1.3.3 Urusan Penunjang

a. Perencanaan

Pada urusan perencanaan terdapat 2 IKU dan 1 IKK. Kedua indikator tersebut pada tahun 2024 belum mencapai target yang ditetapkan. Nilai perencanaan dalam SAKIP, tercatat meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu mencapai 23,22% dari target sebesar 23,5%. Untuk Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan tahun 2024 mencapai 83,30. Untuk lebih lengkapnya, capaian indikator pada urusan perencanaan dapat dilihat pada tabel data yang terdapat di bawah ini.

Tabel 2.61

Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Urusan Perencanaan Kabupaten Kendal Tahun 2020 – 2024

| No | Indikator                                                          | Satuan | Capaian Kinerja |       |       |       |       |
|----|--------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                                                    |        | 2020            | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|    | Urusan Pemerintah Bidang Perencanaan                               |        |                 |       |       |       |       |
|    | IKU OPD                                                            |        |                 |       |       |       |       |
| 1. | Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan                            | Skor   | N/A             | N/A   | N/A   | N/A   | 83,30 |
| 2. | Nilai Perencanaan Dalam SAKIP                                      | Skor   | 22,52           | 22,79 | 22,95 | 23,00 | 23,22 |
|    | IKK OPD                                                            |        |                 |       |       |       |       |
| 1. | Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah | %      | N/A             | N/A   | N/A   | N/A   | 100   |

(Sumber : RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029)

b. Keuangan

Pada urusan keuangan, terdapat 6 IKU dan 3 IKK. Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) pada tahun 2024 tercapai sebesar

75,567 dari target 79,328, namun capaian tersebut sudah meningkat dari tahun 2023 sebesar 70,641. Untuk lebih lengkapnya, capaian indikator pada urusan keuangan dapat dilihat pada tabel data yang terdapat di bawah ini.

Tabel 2.62  
Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Urusan  
Keuangan Kabupaten Kendal Tahun 2020 – 2024

| No | Indikator                                                                                                              | Satuan   | Capaian Kinerja |         |        |        |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------|--------|--------|--------|
|    |                                                                                                                        |          | 2020            | 2021    | 2022   | 2023   | 2024   |
|    | Urusan Pemerintah Bidang Keuangan                                                                                      |          |                 |         |        |        |        |
|    | IKU OPD                                                                                                                |          |                 |         |        |        |        |
| 1. | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                     | poin     | 17,81           | 20,56   | 57,553 | 70,641 | 75,567 |
| 2. | Opini BPK                                                                                                              | Predikat | WTP             | WTP     | WTP    | WTP    | WTP    |
| 3. | Persentase Tindak Lanjut Temuan Pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terkait BMD | %        | 100             | 100     | 100    | 100    | 100    |
| 4. | Derajat Otonomi Fiskal Daerah                                                                                          | %        | 16,74           | 19,09   | 19,33  | 22,3   | 20,54  |
| 5. | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB                                                                                       | %        | 0,32            | 0,36    | 0,44   | 0,55   | 0,42   |
| 6. | Rasio penggunaan alat perekam data transaksi ( <i>tapping box</i> ) wajib pajak                                        | %        | N/A             | N/A     | N/A    | N/A    | N/A    |
|    | IKK OPD                                                                                                                |          |                 |         |        |        |        |
| 1. | Rasio PAD                                                                                                              | %        | 16,74           | 19,09   | 19,33  | 22,30  | 20,54  |
| 2. | Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap                                                                                 | %        | 11              | 9       | 8      | 7      | 16     |
| 3. | Persentase Penurunan SILPA                                                                                             | %        | -86,33          | -128,42 | 63,63  | 31,8   | 71,13  |

(Sumber : RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029)

c. Kepegawaian

Pada urusan Kepegawaian terdapat 5 IKU dan 1 IKK dan sudah mencapai target yang ditetapkan. Capaian indikator Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) sebesar 226,02% dari target 215%. Sedangkan indikator Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) sudah tercapai 20,22% dari target sebesar 8,11. Sedangkan capaian indikator Jumlah Nilai Dimensi Disiplin, Dimensi Kualifikasi, Dimensi Kinerja sebesar 51,98 dari target sebesar 42,72.

Untuk lebih lengkapnya, capaian indikator pada urusan kepegawaian dapat dilihat pada tabel data yang terdapat di bawah ini.

Tabel 2.63  
Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Urusan  
Kepegawaian Kabupaten Kendal Tahun 2020 – 2024

| No | Indikator                                                                                               | Satuan | Capaian Kinerja |        |        |        |        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------|--------|--------|--------|
|    |                                                                                                         |        | 2020            | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|    | Urusan Pemerintah Bidang Kepegawaian                                                                    |        |                 |        |        |        |        |
|    | IKU OPD                                                                                                 |        |                 |        |        |        |        |
| 1. | Indeks Sistem Merit                                                                                     | skor   | N/A             | 179,00 | 201,50 | 255,00 | 255,00 |
| 2. | Indeks Profesionalitas ASN                                                                              | indeks | 76,28           | 49,42  | 53,62  | 79,02  | 82,42  |
| 3. | Nilai aspek perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi mutasi, dan manajemen kinerja | poin   | N/A             | N/A    | 148,50 | 167,50 | 167,50 |
| 4. | Nilai Aspek Penggajian. Penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, dan sistem informasi      | poin   | N/A             | N/A    | 70,00  | 87,50  | 87,50  |
| 5. | IP ASN dimensi kualifikasi, kinerja, disiplin                                                           | poin   | 42,66           | 40,17  | 41,05  | 51,04  | 51,97  |
|    | IKK OPD                                                                                                 |        |                 |        |        |        |        |
| 1. | Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN                                                            | Indeks | N/A             | N/A    | N/A    | 0      | 0      |

(Sumber : RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029)

d. Pendidikan dan Pelatihan

Pada urusan Pendidikan dan Pelatihan, terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi dengan capaian 30,42 pada tahun 2024. Capaian tersebut meningkat dari tahun 2023 sebesar 27,98. Namun masih diperlukan upaya untuk meningkatkan capaian, salah satunya dengan meningkatkan kesadaran PNS dalam administrasi kepegawaian seperti mengupload sertifikat Pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan pada aplikasi Simpeg.

Untuk lebih lengkapnya, capaian indikator pada urusan pendidikan dan pelatihan dapat dilihat pada tabel data yang terdapat di bawah ini.

Tabel 2.64  
Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Urusan  
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal Tahun 2020 – 2024

| No | Indikator                                         | Satuan | Capaian Kinerja |      |       |       |       |
|----|---------------------------------------------------|--------|-----------------|------|-------|-------|-------|
|    |                                                   |        | 2020            | 2021 | 2022  | 2023  | 2024  |
|    | Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan dan Pelatihan |        |                 |      |       |       |       |
|    | IKU OPD                                           |        |                 |      |       |       |       |
| 1. | Indeks Profesionalitas ASN<br>Dimensi Kompetensi  | indeks | 32,62           | 9,25 | 12,63 | 27,98 | 30,42 |

(Sumber : RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029)

e. Pengawasan

Pada urusan Pengawasan terdapat 4 IKU dan 2 IKK. Indikator Nilai Rata-Rata AKIP Perangkat Daerah yang dievaluasi pada tahun 2024

menurun dari tahun sebelumnya. Kapabilitas APIP meningkat dari level 2 menjadi level 3 pada tahun 2023 dan 2024, mencerminkan meningkatnya kapasitas pengawasan internal. Di bidang pengendalian korupsi, nilai MCP KPK mencapai 94,19 pada 2022 dan tetap tinggi pada 2023, dengan IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi) naik dari 2,026 menjadi 2,766 di 2024. Hal tersebut diperlukan komitmen antar instansi dalam peningkatan nilai.

Untuk lebih lengkapnya, capaian indikator pada urusan pengawasan dapat dilihat pada tabel data yang terdapat di bawah ini.

Tabel 2.65  
Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Urusan  
Pengawasan Kabupaten Kendal Tahun 2020 – 2024

| No | Indikator                                                          | Satuan | Capaian Kinerja |       |       |       |       |
|----|--------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                                                    |        | 2020            | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|    | Urusan Pemerintah Bidang Pengawasan                                |        |                 |       |       |       |       |
|    | IKU OPD                                                            |        |                 |       |       |       |       |
| 1. | Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi                                  | Level  | 3,04            | 3,04  | 3,05  | 2,71  | 3,03  |
| 2. | Nilai Rata-Rata AKIP Perangkat Daerah yang dievaluasi              | Angka  | 74,17           | 84,11 | 79,50 | 79,95 | 73,92 |
| 3. | Kapabilitas APIP                                                   | Level  | 2,00            | 2,00  | 2,00  | 3,00  | 3,00  |
| 4. | Indeks efektivitas pengendalian korupsi                            | Level  | -               | -     | 2,026 | 2,026 | 2,766 |
|    | IKK OPD                                                            |        |                 |       |       |       |       |
| 1. | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)             | Indeks | 3,04            | 3,04  | 3,05  | 2,30  | 3,03  |
| 2. | Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | Indeks | 2,00            | 2,00  | 2,00  | 3,00  | 3,00  |

(Sumber : RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029)

f. Penelitian dan Pengembangan

Pada urusan Penelitian dan Pengembangan, terdapat 2 IKU dan 2 IKK. Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kendal dalam kurun waktu 2021 hingga 2024 menunjukkan penurunan. Pada tahun 2021, indeks berada di angka 59,43 dan sedikit turun menjadi 59 pada tahun 2022. Penurunan lebih tajam terjadi pada tahun 2023 dengan capaian 52,18, yang hanya mengalami peningkatan tipis menjadi 52,27 pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan tantangan dalam mempertahankan ekosistem inovasi di daerah, baik dari sisi kebijakan, kelembagaan, maupun kapasitas sumber daya manusia. Untuk itu, diperlukan strategi penguatan inovasi yang lebih terintegrasi guna mendorong perbaikan kinerja daerah dalam menciptakan solusi-solusi pembangunan yang kreatif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Untuk lebih lengkapnya, capaian indikator pada urusan penelitian dan

pengembangan dapat dilihat pada tabel data yang terdapat di bawah ini.

Tabel 2.66  
Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Urusan  
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal Tahun 2020 – 2024

| No | Indikator                                                                                                                 | Satuan | Capaian Kinerja |       |       |       |       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                                                                                                           |        | 2020            | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|    | Urusan Pemerintah Bidang Penelitian dan Pengembangan                                                                      |        |                 |       |       |       |       |
|    | IKU OPD                                                                                                                   |        |                 |       |       |       |       |
| 1. | Indeks Inovasi Daerah                                                                                                     | Skor   | 42,39           | 59,43 | 59,00 | 52,18 | 52,27 |
| 2. | Kapabilitas Inovasi                                                                                                       | Angka  | N/A             | N/A   | N/A   | N/A   | 2,36  |
|    | IKK OPD                                                                                                                   |        |                 |       |       |       |       |
| 1. | Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah | %      | N/A             | N/A   | 80    | 87,4  | 92,93 |
| 2. | Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah                        | Rasio  | 0,636           | 0,598 | 0,644 | 0,731 | 0,756 |

(Sumber : RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029)

g. Sekretariat Daerah

Pada urusan Sekretariat Daerah terdapat 13 indikator kinerja utama. Indikator-indikator tersebut cenderung mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Berikut gambaran capaian tahun 2024 :

- a. SAKIP Kabupaten mengalami peningkatan pada tahun 2024 sebesar 69,97.
- b. Indek Tata Kelola Pengadaan tahun 2024 terealisasi pada 83,15, meningkat dibanding tahun 2023 sebesar 53,79.
- c. Indeks Kematangan UKPBJ meningkat dari tahun 2023 sebesar 1,33, menjadi 3,00 pada tahun 2024.
- d. Indeks Reformasi Hukum mengalami peningkatan cukup signifikan, tahun 2023 sebesar 45,9 meningkat pada tahun 2024 menjadi 86,24.

Untuk lebih lengkapnya, capaian indikator pada urusan Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel data yang terdapat di bawah ini.

Tabel 2.67  
Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Urusan  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 – 2024

| No | Indikator                                    | Satuan | Capaian Kinerja |       |       |       |       |
|----|----------------------------------------------|--------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                              |        | 2020            | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|    | Urusan Pemerintahan Unsur Sekretariat Daerah |        |                 |       |       |       |       |
|    | IKU OPD                                      |        |                 |       |       |       |       |
| 1. | Nilai SAKIP Kabupaten                        | skor   | 66,31           | 68,88 | 68,8  | 68,97 | 69,97 |
| 2. | Indeks Tata Kelola Pengadaan                 | indeks | 30,00           | 46,85 | 35,30 | 53,79 | 83,15 |
| 3. | Indeks Kualitas Kebijakan                    | skor   | N/A             | N/A   | N/A   | N/A   | N/A   |

| No  | Indikator                                       | Satuan | Capaian Kinerja |       |       |       |       |
|-----|-------------------------------------------------|--------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
|     |                                                 |        | 2020            | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| 4.  | Indeks Pelayanan Publik                         | indeks | 3,95            | 4,34  | 4,54  | 4,42  | 4,44  |
| 5.  | Indeks Kematangan Kelembagaan                   | indeks | 32,88           | 32,88 | 37,27 | 38,18 | 38,22 |
| 6.  | Return On Assets (ROA) BUMD                     | persen | N/A             | N/A   | N/A   | N/A   | 7,08  |
| 7.  | Nilai SAKIP Setda                               | skor   | 74,58           | 75,42 | 78,65 | 78,65 | 78,25 |
| 8.  | Indeks Kematangan UKPBJ                         | level  | N/A             | 0     | 0     | 1,33  | 3,00  |
| 9.  | Indeks Reformasi Hukum                          | indeks | N/A             | N/A   | N/A   | 45,9  | 86,24 |
| 10. | Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | nilai  | N/A             | 2,640 | 3,087 | 3,323 | 3,323 |
| 11. | Nilai Kualitas Kebijakan Kesra                  | skor   | N/A             | N/A   | N/A   | N/A   | N/A   |
| 12. | Tingkat Kepatuhan Standart Pelayanan Publik     | indeks | 70,66           | 72,88 | 93,47 | 95,79 | 97,13 |
| 13. | Indeks Berahlak                                 | indeks | N/A             | N/A   | 61,81 | 61,60 | 63,30 |

(Sumber : RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029)

h. Sekretariat DPRD

Pada urusan Sekretariat DPRD, terdapat 2 IKU dan 2 IKK dengan capaian kinerja cenderung mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, indikator Persentase Perda yang ditetapkan sebesar 75% menurun dibanding tahun 2025 sebesar 85%. Persentase Peraturan Daerah (Perda) yang ditetapkan di Kabupaten Kendal selama periode 2020–2024 menunjukkan fluktuasi, namun secara umum berada dalam kisaran tinggi. Pada tahun 2020, sebesar 70% dari usulan perda berhasil ditetapkan, sempat menurun menjadi 65% pada 2021, lalu mengalami peningkatan signifikan menjadi 85% pada 2022 dan 2023, sebelum sedikit menurun menjadi 75% pada 2024. Capaian ini mencerminkan adanya komitmen antara eksekutif dan legislatif dalam menyelesaikan program legislasi daerah, meskipun masih diperlukan penguatan dari sisi perencanaan legislasi agar kualitas dan ketepatan waktu penetapan perda semakin optimal.

Untuk lebih lengkapnya, capaian indikator pada urusan Sekretariat DPRD dapat dilihat pada tabel data yang terdapat di bawah ini.

Tabel 2.68  
Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Unsur  
Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal Tahun 2020 – 2024

| No | Indikator                                                         | Satuan | Capaian Kinerja |       |       |       |      |
|----|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------|-------|-------|------|
|    |                                                                   |        | 2020            | 2021  | 2022  | 2023  | 2024 |
|    | Urusan Pemerintahan Unsur Sekretariat DPRD                        |        |                 |       |       |       |      |
|    | IKU OPD                                                           |        |                 |       |       |       |      |
| 1. | Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD | %      | 94,04           | 99,24 | 97,01 | 92,61 | 96   |
| 2. | Persentase Perda yang ditetapkan                                  | %      | 70              | 65    | 85    | 85    | 75   |



| No                          | Indikator                                                                                              | Satuan | Capaian Kinerja |       |       |       |       |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
|                             |                                                                                                        |        | 2020            | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| 1.                          | Persentase desa mandiri di Kecamatan                                                                   | %      | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2.                          | Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan | %      | 83,00           | 84,00 | 92,00 | 94,89 | 94,39 |
| 3.                          | Jumlah Desa yang Naik Statusnya                                                                        | %      | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Kecamatan Gemuh             |                                                                                                        |        |                 |       |       |       |       |
| 1.                          | Persentase desa mandiri di Kecamatan                                                                   | %      | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2.                          | Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan | %      | 87,91           | 88,00 | 96,86 | 95,20 | 95,20 |
| 3.                          | Jumlah Desa yang Naik Statusnya                                                                        | %      | 0,00            | 1,00  | 0,00  | 1,00  | 3,00  |
| Kecamatan Kaliwungu         |                                                                                                        |        |                 |       |       |       |       |
| 1.                          | Persentase desa mandiri di Kecamatan                                                                   | %      | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 11,11 |
| 2.                          | Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan | %      | 83,42           | 96,35 | 94,20 | 97,79 | 97,92 |
| 3.                          | Jumlah Desa yang Naik Statusnya                                                                        | %      | 1,00            | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  |
| Kecamatan Kaliwungu Selatan |                                                                                                        |        |                 |       |       |       |       |
| 1.                          | Persentase desa mandiri di Kecamatan                                                                   | %      | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 25,00 |
| 2.                          | Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan | %      | 87,67           | 86,25 | 85,03 | 99,11 | 94,53 |
| 3.                          | Jumlah Desa yang Naik Statusnya                                                                        | %      | 1,00            | 1,00  | 0,00  | 0,00  | 2,00  |
| Kecamatan Kangkung          |                                                                                                        |        |                 |       |       |       |       |
| 1.                          | Persentase desa mandiri di Kecamatan                                                                   | %      | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6,67  |
| 2.                          | Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan | %      | 87,55           | 88,00 | 94,15 | 95,88 | 95,44 |
| 3.                          | Jumlah Desa yang Naik Statusnya                                                                        | %      | 0,00            | 0,00  | 1,00  | 0,00  | 4,00  |
| Kecamatan Limbangan         |                                                                                                        |        |                 |       |       |       |       |
| 1.                          | Persentase desa mandiri di Kecamatan                                                                   | %      | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 6,25  | 12,50 |
| 2.                          | Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan | %      | 82,58           | 91,44 | 92,86 | 94,27 | 95,92 |
| 3.                          | Jumlah Desa yang Naik Statusnya                                                                        | %      | 0,00            | 1,00  | 0,00  | 2,00  | 2,00  |
| Kecamatan Ngampel           |                                                                                                        |        |                 |       |       |       |       |
| 1.                          | Persentase desa mandiri di Kecamatan                                                                   | %      | 0,00            | 8,30  | 8,30  | 8,30  | 8,30  |

| No                   | Indikator                                                                                              | Satuan | Capaian Kinerja |       |       |       |       |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
|                      |                                                                                                        |        | 2020            | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| 2.                   | Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan | %      | 82,38           | 82,38 | 90,35 | 96,92 | 97,34 |
| 3.                   | Jumlah Desa yang Naik Statusnya                                                                        | %      | 0,00            | 2,00  | 0,00  | 0,00  | 5,00  |
| Kecamatan Plantungan |                                                                                                        |        |                 |       |       |       |       |
| 1.                   | Persentase desa mandiri di Kecamatan                                                                   | %      | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 8,33  |
| 2.                   | Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan | %      | 84,53           | 84,60 | 90,20 | 91,37 | 91,37 |
| 3.                   | Jumlah Desa yang Naik Statusnya                                                                        | %      | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Kecamatan Pageruyung |                                                                                                        |        |                 |       |       |       |       |
| 1.                   | Persentase desa mandiri di Kecamatan                                                                   | %      | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2.                   | Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan | %      | 82,00           | 82,72 | 89,63 | 96,63 | 89,46 |
| 3.                   | Jumlah Desa yang Naik Statusnya                                                                        | %      | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Kecamatan Patean     |                                                                                                        |        |                 |       |       |       |       |
| 1.                   | Persentase desa mandiri di Kecamatan                                                                   | %      | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2.                   | Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan | %      | 82,00           | 84,00 | 98,63 | 91,11 | 91,11 |
| 3.                   | Jumlah Desa yang Naik Statusnya                                                                        | %      | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Kecamatan Patebon    |                                                                                                        |        |                 |       |       |       |       |
| 1.                   | Persentase desa mandiri di Kecamatan                                                                   | %      | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2.                   | Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan | %      | 80,00           | 90,28 | 96,50 | 90,90 | 90,90 |
| 3.                   | Jumlah Desa yang Naik Statusnya                                                                        | %      | 0,00            | 1,00  | 1,00  | 0,00  | 0,00  |
| Kecamatan Pegandon   |                                                                                                        |        |                 |       |       |       |       |
| 1.                   | Persentase desa mandiri di Kecamatan                                                                   | %      | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 8,33  |
| 2.                   | Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan | %      | 82,90           | 84,82 | 87,50 | 85,25 | 88,72 |
| 3.                   | Jumlah Desa yang Naik Statusnya                                                                        | %      | 0,00            | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 2,00  |
| Kecamatan Ringinarum |                                                                                                        |        |                 |       |       |       |       |
| 1.                   | Persentase desa mandiri di Kecamatan                                                                   | %      | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2.                   | Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pelayanan                                                | %      | 85,58           | 84,75 | 88,62 | 91,84 | 89,71 |

| No                  | Indikator                                                                                              | Satuan | Capaian Kinerja |       |       |       |       |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
|                     |                                                                                                        |        | 2020            | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|                     | penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan                                                         |        |                 |       |       |       |       |
| 3.                  | Jumlah Desa yang Naik Statusnya                                                                        | %      | 0,00            | 2,00  | 0,00  | 1,00  | 0,00  |
| Kecamatan Rowosari  |                                                                                                        |        |                 |       |       |       |       |
| 1.                  | Persentase desa mandiri di Kecamatan                                                                   | %      | 25,00           | 25,00 | 31,25 | 37,50 | 50,00 |
| 2.                  | Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan | %      | 84,00           | 86,00 | 90,35 | 81,19 | 91,22 |
| 3.                  | Jumlah Desa yang Naik Statusnya                                                                        | %      | 0,00            | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 2,00  |
| Kecamatan Singorojo |                                                                                                        |        |                 |       |       |       |       |
| 1.                  | Persentase desa mandiri di Kecamatan                                                                   | %      | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2.                  | Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan | %      | 91,18           | 91,20 | 92,85 | 91,67 | 91,67 |
| 3.                  | Jumlah Desa yang Naik Statusnya                                                                        | %      | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1,00  |
| Kecamatan Sukorejo  |                                                                                                        |        |                 |       |       |       |       |
| 1.                  | Persentase desa mandiri di Kecamatan                                                                   | %      | 0,00            | 0,00  | 5,50  | 11,11 | 16,67 |
| 2.                  | Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan | %      | 82,49           | 82,03 | 83,57 | 96,08 | 96,03 |
| 3.                  | Jumlah Desa yang Naik Statusnya                                                                        | %      | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1,00  |
| Kecamatan Weleri    |                                                                                                        |        |                 |       |       |       |       |
| 1.                  | Persentase desa mandiri di Kecamatan                                                                   | %      | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 37,50 |
| 2.                  | Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan | %      | 85,39           | 80,47 | 95,92 | 98,51 | 98,61 |
| 3.                  | Jumlah Desa yang Naik Statusnya                                                                        | %      | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1,00  |

(Sumber : RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029)

j. Pemerintahan Umum

Pada urusan Pemerintahan Umum terdapat 2 indikator kinerja utama yaitu Indeks Stabilitas Politik dan Keamanan Daerah (ISPKD) dan Tingkat Efektivitas Kewaspadaan Dini Daerah (TEKDD). Capaian kinerja tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 tidak ada angka dikarenakan indikator tersebut merupakan indikator baru.

Untuk lebih lengkapnya, capaian indikator pada urusan Pemerintahan umum dapat dilihat pada tabel data yang terdapat di bawah ini.

Tabel 2.70  
Capaian Indikator Kinerja Utama Urusan Pemerintahan Umum Kabupaten  
Kendal Tahun 2020 – 2024

| No | Indikator                                             | Satuan | Capaian Kinerja |      |      |      |      |
|----|-------------------------------------------------------|--------|-----------------|------|------|------|------|
|    |                                                       |        | 2020            | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|    | Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Umum          |        |                 |      |      |      |      |
|    | IKU OPD                                               |        |                 |      |      |      |      |
| 1. | Indeks Stabilitas Politik dan Keamanan Daerah (ISPKD) | poin   | N/A             | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  |
| 2. | Tingkat Efektivitas Kewaspadaan Dini Daerah (TEKDD)   | Poin   | N/A             | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  |

(Sumber : RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029)

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah  
2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari perkembangan produktivitas sektor-sektor pembentuk PDRB, berikut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.71  
Kemampuan Kabupaten Kendal dalam Sektor Poduktivitas PDRB Tahun  
2020 – 2024

| No  | Uraian                                                         | 2020      | 2021      | 2022      | 2023*     | 2024**    |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| (1) | (2)                                                            | (3)       | (4)       | (5)       | (6)       | (7)       |
| A   | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                            | 8.194,42  | 8.609,87  | 9.223,61  | 9.963,19  | 10.631,13 |
| B   | Pertambangan dan Penggalian                                    | 590,69    | 614,91    | 604,50    | 639,87    | 685,79    |
| C   | Industri Pengolahan                                            | 18.008,01 | 19.090,09 | 20.827,75 | 22.686,20 | 24.533,94 |
| D   | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 75,17     | 78,95     | 84,33     | 91,41     | 97,55     |
| E   | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 29,09     | 30,83     | 31,65     | 34,42     | 37,26     |
| F   | Konstruksi                                                     | 2.757,25  | 3.100,96  | 3.432,17  | 3.747,42  | 4.116,16  |
| G   | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 5.065,36  | 5.441,24  | 5.925,70  | 6.540,49  | 7.099,08  |
| H   | Transportasi dan Pergudangan                                   | 584,51    | 620,38    | 1.204,59  | 1.426,43  | 1.529,95  |
| I   | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 1.384,36  | 1.499,15  | 1.809,64  | 2.111,66  | 2.405,49  |
| J   | Informasi dan Komunikasi                                       | 1.558,63  | 1.655,74  | 1.719,08  | 1.923,23  | 2.102,01  |
| K   | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 853,98    | 912,15    | 1.018,62  | 1.070,54  | 1.095,15  |
| L   | Real Estate                                                    | 388,25    | 400,68    | 435,58    | 479,95    | 510,91    |
| M,N | Jasa Perusahaan                                                | 130,76    | 136,22    | 152,55    | 171,28    | 190,91    |
| O   | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 862,36    | 848,57    | 902,40    | 968,11    | 1.048,64  |
| P   | Jasa Pendidikan                                                | 1.194,68  | 1.208,32  | 1.255,07  | 1.357,87  | 1.502,96  |
| Q   | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 366,20    | 369,35    | 389,72    | 429,58    | 471,61    |

| No                             | Uraian       | 2020      | 2021      | 2022      | 2023*     | 2024**    |
|--------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| (1)                            | (2)          | (3)       | (4)       | (5)       | (6)       | (7)       |
| R,S,T,U                        | Jasa lainnya | 542,47    | 547,40    | 645,02    | 722,75    | 778,43    |
| PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO |              | 42.586,19 | 45.164,80 | 49.661,96 | 54.364,40 | 58.836,99 |

(Sumber: *Buku Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kendal Menurut Lapangan Usaha 2020-2024*)

Ket : \*Angka Sementara

\*\*Angka Sangat Sementara

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah dan Infrastruktur

a. Panjang Jalan.

Kabupaten Kendal memiliki luas wilayah 1.002,23 km<sup>2</sup> dan terbagi ke dalam 20 wilayah Kecamatan. Untuk menghubungkan wilayah-wilayah tersebut telah tersedia jalan dengan total panjang 782,710 km (jalan kewenangan Kabupaten Kendal). Dari jumlah tersebut sebagian besar jenis permukaannya aspal. Kondisi jalan di Kabupaten Kendal pada tahun 2024 sebesar 83,75 % dalam kondisi mantap, yaitu kondisi sedang dan baik.

b. Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum.

Kabupaten Kendal merupakan wilayah yang strategis karena berada di poros utama transportasi Pulau Jawa bagian utara. Tersedia 4 (empat) terminal di wilayah Kabupaten Kendal yang melayani transportasi baik dalam kota maupun keluar kota yaitu Terminal Kendal, Terminal Weleri, Terminal Boja dan Terminal Sukorejo. Jumlah orang yang terangkut angkutan umum melalui terminal-terminal yang ada menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 penumpang angkutan umum sebanyak 1.441.478 orang, menurun sangat signifikan menjadi 219.394 orang pada tahun 2023.

c. Luas Wilayah Industri.

Sesuai RTRW Kabupaten Kendal tahun 2011-2031 di alokasikan pengembangan kawasan peruntukan industri seluas 5.109 Ha yang terdiri atas Kawasan Industri dan sentra industri kecil dan menengah yang berada di Kecamatan Kaliwungu, Brangsong, Kendal dan Patebon. Berdasarkan hasil rekomendasi dari Dewan Nasional KEK, Kawasan Industri Kendal (KIK) ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal seluas 1.000 Ha yang terletak di Kecamatan Kaliwungu dan Brangsong. Zona KEK Kendal yaitu Zona Pengolahan Ekspor, Zona Logistik, dan Zona Industri.

d. Luas Wilayah Kebanjiran.

Secara detail data mengenai luas wilayah yang mengalami banjir memang belum tersedia, namun jika dilihat dari kawasan yang rawan terkena bencana banjir dapat diketahui ternyata terdapat 10 (sepuluh) wilayah kecamatan yang rawan terkena bencana banjir. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah Kecamatan Kendal, Patebon, Ngampel, Kaliwungu, Brangsong, Cepiring, Kangkung, Rowosari, Ringinarum, dan Weleri. Luas wilayah yang berpotensi terkena banjir di Kabupaten Kendal mencapai 47.724 ha (empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh empat hektar).

e. Luas Wilayah Kekeringan.

Selain banjir, Kabupaten Kendal juga berpotensi terkena bencana kekeringan. Kawasan yang rawan terkena dampak kekeringan adalah Kecamatan Patebon, Kangkung, Weleri, Pegandon, Brangsong, dan Patean. Meskipun tidak menutup kemungkinan juga daerah-daerah lain juga berpotensi terkena bencana kekeringan. Luas daerah yang berpotensi terkena bencana kekeringan adalah 99.597 ha (sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tujuh hektar).

f. Luas Wilayah Perkotaan.

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011 – 2031 menetapkan bahwa wilayah perkotaan terbagi atas 3 (tiga) pusat kegiatan. Pertama adalah Pusat kegiatan nasional yang selanjutnya di sebut sebagi PKN adalah kawasan perkotaaan yang melayani kegiatan skala nasional. Kedua Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. Dan yang ketiga adalah Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

Kabupaten Kendal sebagai Pusat Kegiatan Nasional bersama dengan Demak, Ungaran, Semarang, dan Purwodadi (KEDUNGSEPUR). Wilayah yang termasuk dalam pusat kegiatan lokal adalah Kendal, Weleri, Boja,

Kaliwungu, dan Sukorejo. Sedangkan pusat pelayanan kawasan adalah Kecamatan Pegandon.

g. Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran/Rumah Makan.

Jumlah restoran/Rumah Makan yang ada di Kabupaten Kendal dari tahun 2010 sampai tahun 2024 menunjukkan peningkatan. Tahun 2010 restoran di Kabupaten Kendal berjumlah 70 unit, dan di tahun 2024 meningkat menjadi 117 unit.

h. Pelayanan Air Bersih.

Rumah tangga pengguna air bersih dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal tersebut karena indikator ini menjadi salah satu indikator kunci pembangunan. Tahun 2010 persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih di Kabupaten Kendal sebesar 60 %. Pada tahun 2023 pencapaiannya sudah sampai pada angka 94,29 %. Kemudian pada tahun 2024 meningkat menjadi 96,74%.

#### 2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi.

a. Angka Kriminalitas.

Kasus kriminal yang terjadi di Kabupaten Kendal selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung menunjukkan penurunan. Pada tahun 2020 sampai 2022, kasus kriminal terus mengalami penurunan, namun pada tahun 2023 mengalami sedikit peningkatan tercatat 190 kasus. Pada tahun 2024, kasus kriminal di Kabupaten Kendal kembali menurun menjadi 144 kasus.

Kasus kriminal yang paling menonjol terjadi di wilayah Kabupaten Kendal adalah pencurian yaitu sebanyak 52 kasus, sedangkan perjudian sebanyak 19 kasus, penipuan sebanyak 18 kasus, penganiayaan sebanyak 16 kasus, penggelapan sebanyak 11 kasus, pengeroyokan sebanyak 8 kasus, KDRT sebanyak 3 kasus dan pembunuhan sebanyak 1 kasus.

b. Kemudahan perizinan.

Pelayanan perizinan di Kabupaten Kendal saat ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. dengan metode satu pintu ini diharapkan akan lebih mempermudah pelayanan dan meningkatkan minat masyarakat untuk melakukan investasi.

Jenis perijinan yang ditangani meliputi Izin Prinsip, Izin Lokasi/Keterangan Lokasi, Izin Gangguan, Izin Mendirikan dan Merobohkan Bangunan (IMMB), Izin Trayek, Izin Kartu Pengawasan Angkutan Dengan Kendaraan Umum, Izin Usaha Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum, Izin Usaha Angkutan Barang Dengan Kendaraan Umum, Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Industri (SIUI), Tanda Daftar Gudang (TDP), Izin Reklame, Izin Usaha Jasa Konstruksi, Izin Usaha Kepariwisata/ Dan Pengelolaan Obyek Wisata, Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT), dan Izin Usaha Toko Modern.

Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan perijinan bervariasi, mulai dari 2 (dua) hari sampai 12 (dua belas) hari. Untuk perizinan yang melalui Online Single Submission (OSS) tidak dapat dipastikan waktu terbit izinnnya, dikarenakan penerbitan izin dilakukan oleh Kementerian, sehingga menunggu selesainya proses di sistem tersebut.

Lebih rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.72  
Jenis Izin dan Lama Proses Pengurusannya

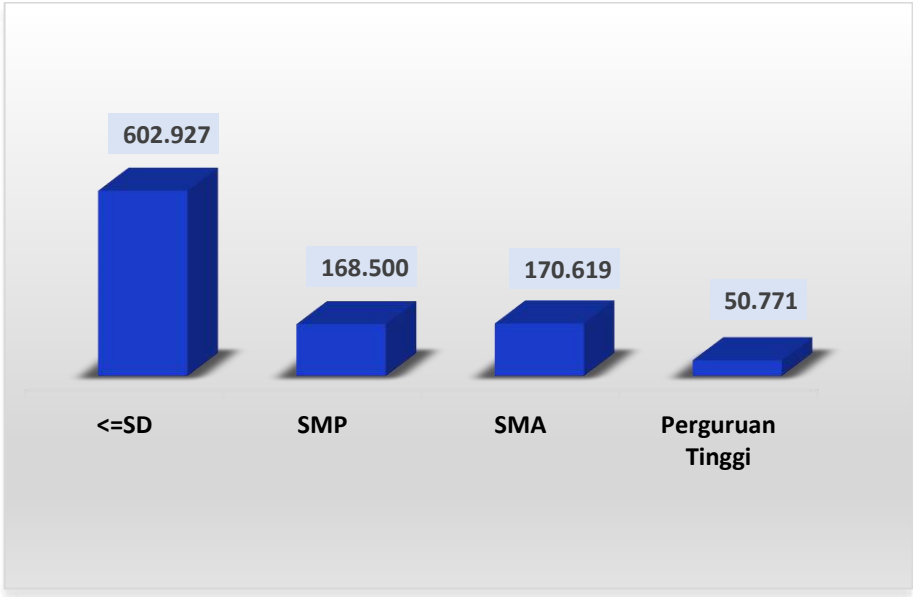
| NO. | JENIS PERIZINAN                                                                                                       | JANGKA WAKTU PELAYANAN |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1.  | Izin/ Persetujuan Prinsip                                                                                             | 7 hari                 |
| 2.  | Izin Lokasi                                                                                                           | 7 hari                 |
| 3.  | Izin IPPT                                                                                                             | 7 hari                 |
| 4.  | Izin penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Puskesmas                                                                    | 7 hari                 |
| 5.  | Izin Kawasan Industri                                                                                                 | OSS                    |
| 6.  | Izin Mendirikan dan Merobohkan Bangunan (IMMB) selain rumah tinggal dengn luas sampai 100 m <sup>2</sup>              | 7 hari                 |
| 7.  | Izin usaha angkutan orang dengan kendaraan umum                                                                       | 2 hari                 |
| 8.  | Izin usaha angkutan barang dengan kendaraan umum                                                                      | 2 hari                 |
| 9.  | Izin trayek angkutan dengan kendaraan umum                                                                            | 2 hari                 |
| 10. | Kartu pengawasan angkutan dengan kendaraan umum                                                                       | 2 hari                 |
| 11. | Izin prinsip angkutan                                                                                                 | 2 hari                 |
| 12. | Izin reklame, selain izin pemasangan reklame dengan luas maksimal                                                     | 7 hari                 |
| 13. | Surat Izin Usaha Industri (SIUI)                                                                                      | 3 hari                 |
| 14. | Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS)                                                     | OSS                    |
| 15. | Tanda Daftar Gudang (TDG)                                                                                             | OSS                    |
| 16. | Izin Usaha Toko Modern (IUTM)                                                                                         | OSS                    |
| 17. | Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)                                                                                     | OSS                    |
| 18. | Izin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA) setelah bukti setor diupload oleh pemohon dan diinformasikan ke DPMPTSP | OSS                    |
| 19. | Izin Usaha dibidang peternakan dan kesehatan hewan                                                                    | OSS                    |
| 20. | Izin warung internet/komputer                                                                                         | OSS                    |
| 21. | Izin prinsip dan izin usaha                                                                                           | OSS                    |

(Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal 2024)

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

- a. Persentase Penduduk berdasarkan pendidikan tertinggi.

Komposisi penduduk berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut.



Gambar 2.81.  
Persentase Penduduk Kabupaten Kendal Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2024  
(Sumber: Kabupaten Kendal Dalam Angka 2025)

Dari data di atas terlihat bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Kendal berpendidikan SD sederajat, kemudian kelompok besar kedua adalah kelompok lulusan SMP sederajat, dan kelompok lulusan SMA sederajat. Kelompok dengan pendidikan terendah adalah kelompok lulusan Perguruan Tinggi.

**2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Indikator Kinerja RKPD sampai Tahun Anggaran 2024**

2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Indikator Kinerja RKPD 2024

Evaluasi hasil indikator kinerja dilakukan pada capaian indikator kinerja RPJMD Kabupaten Kendal periode 2025-2029 sampai dengan tahun 2024 yang terdiri atas indikator tujuan dan indikator sasaran Pemerintah Daerah, Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah. Selain itu juga dilakukan evaluasi terhadap capaian kinerja RKPD Tahun 2024 yang meliputi Indikator Program, Indikator Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan. Dalam evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2024 dan capaian indikator kinerja RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

### 2.2.1.1 Capaian Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran Tahun 2024 Mendasarkan RPJMD Kabupaten Kendal 2025-2029

Perencanaan daerah jangka menengah telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang ditetapkan pada tanggal 20 Agustus 2025. Pelaksanaan rencana pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2024 tidak lepas dari peraturan tersebut. Evaluasi capaian indikator kinerja dilakukan pada capaian indikator kinerja RPJMD Kabupaten Kendal periode 2025-2029 sampai dengan tahun 2024 dan pengukuran kinerja RKPD sampai dengan triwulan IV Tahun 2024.

Mendasarkan Perda Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029, Visi Bupati dan Wakil Bupati Kendal adalah **“Bersama Membangun Kendal Semakin Maju, Sejahtera, Adil, Makmur, Lestari dan Berkelanjutan”**, dengan 5 (lima) misi pembangunan yaitu:

#### **1) MISI 1: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Sesuai Kompetensi**

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Kendal sebagai subjek utama dalam pembangunan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

#### **2) MISI 2: Tata Kelola Pemerintah yang Efektif, Akuntabel, Inklusif**

Reformasi birokrasi merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kendal berkomitmen untuk membangun tata kelola pemerintah yang efektif, akuntabel, dan inklusif.

#### **3) MISI 3: Pengembangan Infrastruktur Desa Berbasis Lingkungan**

Pemenuhan kebutuhan sarana infrastruktur khususnya di daerah pedesaan berbasis lingkungan.

#### **4) MISI 4: Pemberdayaan Sektor Perikanan, Pertanian, dan Ekonomi Masyarakat**

Sektor perikanan dan pertanian merupakan potensi Kabupaten Kendal yang dapat dioptimalkan melalui pemberdayaan kelompok masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

#### **5) MISI 5: Penciptaan Lapangan Pekerjaan dan Kesempatan Usaha yang Luas**

Bertujuan untuk memastikan ketersediaan lapangan kerja yang memadai bagi masyarakat Kabupaten Kendal dan pelatihan

keterampilan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun secara lengkap capaian indikator kinerja Kabupaten Kendal indikator kinerja utama dan sasaran pembangunan Kabupaten Kendal seperti tabel dibawah ini :

Tabel 2.73

Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten Kendal 2025-2029 sampai dengan Tahun 2024

| TUJUAN/ SASARAN                                                    | INDIKATOR TUJUAN           | SASARAN                                                     | INDIKATOR SASARAN                               | CAPAIAN |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                    |                            |                                                             |                                                 | 2020    | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kompetitif      | Laju Pertumbuhan Ekonomi   |                                                             |                                                 | -1,51   | 3,89  | 5,68  | 5,56  | 5,42  |
|                                                                    |                            | Meningkatnya nilai tambah produk sektor unggulan daerah     | LPE Kategori Industri Pengolahan                | N/A     | 3,26  | 4,29  | 4,4   | 4,36  |
|                                                                    |                            |                                                             | LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | N/A     | 2,72  | 2,45  | 2,91  | 2,88  |
|                                                                    |                            |                                                             | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum | 3.25    | 3,32  | 3,64  | 3,88  | 4,09  |
|                                                                    |                            | Meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat               | PDRB per Kapita                                 | 43,9    | 41,9  | 47,7  | 51,6  | 55,25 |
| Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani | Indeks Reformasi Birokrasi |                                                             |                                                 | 63,70   | 64,25 | 66,51 | 66,71 | 77,53 |
|                                                                    |                            | Meningkatnya kualitas efektivitas tata kelola dan pelayanan | Nilai Reformasi Birokrasi General               | 63,7    | 64,25 | 66,51 | 60,16 | 71,25 |

| TUJUAN/ SASARAN                                                                         | INDIKATOR TUJUAN                             | SASARAN                                                                                     | INDIKATOR SASARAN            | CAPAIAN |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                                         |                                              |                                                                                             |                              | 2020    | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, berdaya saing dan sejahtera | Indeks Pembangunan Manusia                   |                                                                                             |                              | 72,29   | 72,5   | 73,19  | 73,86  | 74,34  |
|                                                                                         | Tingkat Kemiskinan                           |                                                                                             |                              | 9,99    | 10,24  | 9,48   | 9,39   | 9,35   |
|                                                                                         |                                              | Meningkatnya derajat pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas                   | Indeks Pendidikan            | 60,81   | 60,87  | 61,73  | 61,85  | 61,91  |
|                                                                                         |                                              |                                                                                             | Indeks Kesehatan             | 83,74   | 83,82  | 83,89  | 83,97  | 84,20  |
|                                                                                         |                                              | Menurunnya kesenjangan sosial ekonomi masyarakat                                            | Indeks Gini                  | 0,22    | 0,377  | 0,367  | 0,402  | 0,378  |
|                                                                                         |                                              | Meningkatnya kapasitas dan kemampuan desa dalam mewujudkan pembangunan berbasis kewilayahan | Indeks Desa                  | N/A     | 0,719  | 0,730  | 0,736  | 0,745  |
|                                                                                         |                                              | Meningkatnya angkatan kerja yang terampil dan kompeten                                      | Tingkat Pengangguran Terbuka | 7,56    | 7,55   | 7,34   | 5,76   | 5,01   |
| Meningkatkan kualitas infrastruktur pembangunan yang ramah lingkungan                   | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) |                                                                                             |                              | N/A     | N/A    | N/A    | N/A    | N/A    |
|                                                                                         | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup             |                                                                                             |                              | 65,37   | 53,49  | 57,72  | 57,75  | 57,53  |
|                                                                                         |                                              | Meningkatnya infrastruktur wilayah                                                          | Persentase Infrastruktur     | 72,034  | 72,289 | 72,005 | 70,717 | 72,191 |

| TUJUAN/ SASARAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN                                                     | INDIKATOR SASARAN                        | CAPAIAN |        |           |           |           |
|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|
|                 |                  |                                                             |                                          | 2020    | 2021   | 2022      | 2023      | 2024      |
|                 |                  | yang merata                                                 | Wilayah terbangun                        |         |        |           |           |           |
|                 |                  | Meningkatnya integrasi moda transportasi antar wilayah      | Rasio konektivitas                       | 0,82    | 0,77   | 0,77      | 0,78      | 0,67      |
|                 |                  | Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan | Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif | N/A     | N/A    | 17.752,19 | 51.402,41 | 32.871,84 |
|                 |                  | Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana wilayah         | Indeks Risiko Bencana                    | 98,97   | 124,57 | 100,4     | 91,74     | 86,54     |

(Sumber: RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029)

2.2.1.2 Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2024 Mendasarkan RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029

Dalam pelaksanaannya Perangkat Daerah dalam mendukung Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal didukung dengan Indikator Kinerja Kunci dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, adapun capaiannya adalah sebagai berikut :

A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Capaian Kinerja Program Urusan Pendidikan pada tahun 2024 selengkapnya tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 2.74

Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

| No | Kode         | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah dan Program /<br>Kegiatan    | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                  | Target Kinerja<br>dan Anggaran<br>RKPD<br>Tahun berjalan<br>(Tahun 2024)<br>yang dievaluasi | Realisasi<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Anggaran<br>RKPD yang<br>dievaluasi | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran RKPD<br>yang dievaluasi | Unit SKPD<br>Penanggungjawab       | Ket |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|
| 1  | 2            | 3                                                                           | 4                                                                                                                                | 5                                                                                           | 6                                                                          | 7                                                                               | 8                                  | 9   |
|    | 1            |                                                                             |                                                                                                                                  |                                                                                             |                                                                            |                                                                                 |                                    |     |
|    | 1.01         | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PENDIDIKAN                                    |                                                                                                                                  |                                                                                             |                                                                            | 75,44                                                                           |                                    |     |
| 1  | 1.01.01      | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/KOTA           | Nilai SAKIP (skor)                                                                                                               | 75,25                                                                                       | 0                                                                          | 0,00                                                                            | DINAS PENDIDIKAN<br>DAN KEBUDAYAAN |     |
|    |              |                                                                             | Persentase ketercapaian penunjang<br>urusan Perangkat Daerah (%)                                                                 | 100                                                                                         | 100                                                                        | 100,00                                                                          |                                    |     |
|    | 1.01.01.2.01 | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah   | Jumlah dokumen perencanaan dan<br>evaluasi kinerja yang tersusun<br>(Dokumen)                                                    | 9                                                                                           | 9                                                                          |                                                                                 |                                    |     |
|    | 1.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                   | Jumlah bulan terbayarnya Gaji dan<br>tunjangan ASN (Bulan)                                                                       | 14                                                                                          | 14                                                                         |                                                                                 |                                    |     |
|    | 1.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik<br>Daerah pada Perangkat<br>Daerah                | Prosentase laporan aset yang<br>tersusun (Persen)                                                                                | 100                                                                                         | 100                                                                        |                                                                                 |                                    |     |
|    | 1.01.01.2.06 | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                       | Jumlah bulan pemenuhan<br>kebutuhan rutin (Bulan)                                                                                | 12                                                                                          | 12                                                                         |                                                                                 |                                    |     |
|    | 1.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                  | Jumlah bulan pemenuhan<br>kebutuhan rutin (Bulan)                                                                                | 12                                                                                          | 12                                                                         |                                                                                 |                                    |     |
|    | 1.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah | Jumlah unit barang milik daerah<br>yang terpelihara (Unit)                                                                       | 188                                                                                         | 188                                                                        |                                                                                 |                                    |     |
|    |              |                                                                             |                                                                                                                                  |                                                                                             |                                                                            |                                                                                 |                                    |     |
| 2  | 1.01.02      | PROGRAM PENGELOLAAN<br>PENDIDIKAN                                           | Angka Partisipasi Kasar (APK)<br>PAUD, Pendidikan Kesetaraan, SD<br>dan SMP (%)                                                  | 87,7                                                                                        | 91,63                                                                      | 104,48                                                                          | DINAS PENDIDIKAN<br>DAN KEBUDAYAAN |     |
|    | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan<br>Sekolah Dasar                                     | Tingkat partisipasi warga usia 7-12<br>tahun (SPM tingkat SD : jumlah<br>siswa usia 7-12 yang sekolah di<br>SD/APM SD). (Persen) | 100                                                                                         | 99,78                                                                      |                                                                                 |                                    |     |

| No | Kode         | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah dan Program /<br>Kegiatan                                                                   | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                                                                                    | Target Kinerja<br>dan Anggaran<br>RKPD<br>Tahun berjalan<br>(Tahun 2024)<br>yang dievaluasi | Realisasi<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Anggaran<br>RKPD yang<br>dievaluasi | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran RKPD<br>yang dievaluasi | Unit SKPD<br>Penanggungjawab    | Ket |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|
| 1  | 2            | 3                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                                                                           | 6                                                                          | 7                                                                               | 8                               | 9   |
|    | 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                                                                                            | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (SPM yang SMP : jumlah warga negara usia 13 - 15 tahun yang bersekolah SMP/APM SMP) (Persen)                               | 100                                                                                         | 97,84                                                                      |                                                                                 |                                 |     |
|    | 1.01.02.2.03 | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                                                                                               | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (SPM PAUD) (Persen)                                                                                                                                 | 100                                                                                         | 86                                                                         |                                                                                 |                                 |     |
|    | 1.01.02.2.04 | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                                                                                | Jumlah warga anegara usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah, yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan. (Persen)                                                                      | 100                                                                                         | 67                                                                         |                                                                                 |                                 |     |
| 3  | 1.01.03      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>                                                                                                      | <b>Prosentase Kurikulum muatan lokal yang ditetapkan (%)</b>                                                                                                                                                                       | <b>13,65</b>                                                                                | <b>13,65</b>                                                               | <b>100,00</b>                                                                   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |     |
|    | 1.01.03.2.02 | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal                                                        | umlah kompetensi dasar muatan lokal PAUD yang ditetapkan (Buah)                                                                                                                                                                    | 1                                                                                           | 1                                                                          |                                                                                 |                                 |     |
| 4  | 1.01.04      | <b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>                                                                                            | <b>Prosentase Pendidik Bersertifikat (%)</b>                                                                                                                                                                                       | <b>56,87</b>                                                                                | <b>47,84</b>                                                               | <b>84,12</b>                                                                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |     |
|    | 1.01.04.2.01 | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah guru profesional - Jumlah Peserta Diklat Pengawas - Hibah Pendidik dan tenaga Kependidikan Wiyata Bhakti SD dan SMP Swasta - Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan eks K2 yang diberi upah selama 11 bulan (Orang) | 824                                                                                         | 824                                                                        |                                                                                 |                                 |     |
| 5  | 1.01.05      | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN</b>                                                                                           | <b>Prosentase Penerbitan Rekomendasi Pendirian PAUD, SD dan SMP (%)</b>                                                                                                                                                            | <b>79</b>                                                                                   | <b>70</b>                                                                  | <b>88,61</b>                                                                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |     |

| No | Kode         | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah dan Program /<br>Kegiatan           | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)              | Target Kinerja<br>dan Anggaran<br>RKPD<br>Tahun berjalan<br>(Tahun 2024)<br>yang dievaluasi | Realisasi<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Anggaran<br>RKPD yang<br>dievaluasi | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran RKPD<br>yang dievaluasi | Unit SKPD<br>Penanggungjawab | Ket |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
| 1  | 2            | 3                                                                                  | 4                                                                            | 5                                                                                           | 6                                                                          | 7                                                                               | 8                            | 9   |
|    | 1.01.05.2.02 | Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Prosentase rekomendasi ijin operasional yang dikeluarkan jenjang PAUD (Buah) | 2                                                                                           | 2                                                                          |                                                                                 |                              |     |

Mendasarkan tabel diatas, diketahui bahwa capaian kinerja program Urusan Pemerintahan bidang Pariwisata masih dalam kategori sangat rendah. Kelima program tersebut mendukung ketercapaian Indikator Kinerja Kunci dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan.

2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Urusan kesehatan di Kabupaten Kendal diampu oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal dan didukung 1 Rumah Sakit Daerah yaitu RSUD dr. H. Soewondo Kendal. Dalam penyelenggaraan upaya kesehatan di Kabupaten Kendal terdapat beberapa fasilitas pelayanan kesehatan, baik sarana pelayanan kesehatan pemerintah, swasta maupun Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Adapun sarana pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Kendal yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebanyak 1 unit meliputi RSUD dr. H. Soewondo Kendal. 5 Rumah Sakit Swasta yaitu Rumah Sakit Baitul Hikmah, Rumah Sakit Muhammadiyah Darul Istiqomah, Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Kendal, Rumah Sakit Charlie Hospital, dan Rumah Sakit PKU Aisyiyah dengan daya tampung sejumlah 1.002 per 1.000 penduduk. Jumlah Puskesmas di Kabupaten Kendal sejumlah 30 puskesmas dengan rincian puskesmas dengan rawat inap sebanyak 16 unit, puskesmas non rawat inap sebanyak 14 unit. Capaian Kinerja Program Urusan Pendidikan pada tahun 2024 selengkapnya tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 2.75

## Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

| No | Kode         | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah dan<br>Program / Kegiatan              | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)          | Target Kinerja<br>dan Anggaran<br>RKPD<br>Tahun berjalan<br>(Tahun 2024)<br>yang dievaluasi | Realisasi<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Anggaran<br>RKPD yang<br>dievaluasi | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran<br>RKPD yang<br>dievaluasi | Unit SKPD<br>Penanggungjawab | Ket |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
| 1  | 2            | 3                                                                                  | 4                                                                        | 5                                                                                           | 6                                                                          | 7                                                                                     | 8                            | 9   |
|    | 1            |                                                                                    |                                                                          |                                                                                             |                                                                            |                                                                                       |                              |     |
|    | 1.02         | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>                                        |                                                                          |                                                                                             |                                                                            | 103,74                                                                                |                              |     |
| 6  | 1.02.01      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                 | <b>Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah (%)</b>     | 12                                                                                          | 12                                                                         | 100,00                                                                                | DINAS KESEHATAN              |     |
|    | 1.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                   | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun (Dokumen)  | 5                                                                                           | 5                                                                          |                                                                                       |                              |     |
|    | 1.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                             | jumlah dokumen keuangan yang disusun (12)                                | 12                                                                                          | 12                                                                         |                                                                                       |                              |     |
|    | 1.02.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                             |                                                                          | 12                                                                                          | 12                                                                         |                                                                                       |                              |     |
|    | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                 | Jumlah layannan administrasi umum yang difasilitasi (bulan)              | 12                                                                                          | 12                                                                         |                                                                                       |                              |     |
|    | 1.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                   | Jumlah sarana prasarana yang diadakan (Unit)                             | 30                                                                                          | 0                                                                          |                                                                                       |                              |     |
|    | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                               | Jumlah jasa penundjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi (Unit) | 4                                                                                           | 0                                                                          |                                                                                       |                              |     |
|    | 1.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              | Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang terpelihara (Unit)                  | 0                                                                                           | 0                                                                          |                                                                                       |                              |     |
| 7  | 1.02.02      | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b> | <b>Rata rata capain SPM (%)</b>                                          | 100                                                                                         | 72,68                                                                      | 72,68                                                                                 | DINAS KESEHATAN              |     |

| No | Kode         | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah dan<br>Program / Kegiatan                                             | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)               | Target Kinerja<br>dan Anggaran<br>RKPD<br>Tahun berjalan<br>(Tahun 2024)<br>yang dievaluasi | Realisasi<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Anggaran<br>RKPD yang<br>dievaluasi | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran<br>RKPD yang<br>dievaluasi | Unit SKPD<br>Penanggungjawab | Ket |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
| 1  | 2            | 3                                                                                                                 | 4                                                                             | 5                                                                                           | 6                                                                          | 7                                                                                     | 8                            | 9   |
|    | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                       | Jumlah Fasilitas Pelayanan kesehatan yang difasilitasi (Unit)                 | 37                                                                                          | 7                                                                          |                                                                                       |                              |     |
|    | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                              | Jumlah Layanan kesehatan yang disediakan (Unit)                               | 34                                                                                          | 4                                                                          |                                                                                       |                              |     |
|    | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi                                                    | Jumlah SIK yang terintegrasi (Unit)                                           | 1                                                                                           | 1                                                                          |                                                                                       |                              |     |
|    | 1.02.02.2.04 | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota            | jumlah rumah sakit daerah tipe C dan D yang dibina (Unit)                     | 6                                                                                           | 1                                                                          |                                                                                       |                              |     |
| 8  | 1.02.03      | <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>                                                | <b>Proporsi puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar (%)</b>          | <b>75</b>                                                                                   | <b>93,3</b>                                                                | <b>124,40</b>                                                                         | DINAS KESEHATAN              |     |
|    | 1.02.03.2.01 | Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota                                                 |                                                                               |                                                                                             |                                                                            |                                                                                       |                              |     |
|    | 1.02.03.2.02 | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan SDK (Dokumen)                            | 1                                                                                           | 1                                                                          |                                                                                       |                              |     |
|    | 1.02.03.2.03 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah tenaga SDM yang meningkat kapasitasnya (Orang)                         | 80                                                                                          | 297                                                                        |                                                                                       |                              |     |
| 9  | 1.02.04      | <b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>                                                | <b>Proporsi fasyankes yang melakukan pelayanan farmasi sesuai standar (%)</b> | <b>91</b>                                                                                   | <b>120</b>                                                                 | <b>131,87</b>                                                                         | DINAS KESEHATAN              |     |
|    |              |                                                                                                                   | <b>Proporsi pembinaan Mutu makanan dan minuman (%)</b>                        | <b>11,7</b>                                                                                 | <b>10</b>                                                                  | <b>85,47</b>                                                                          |                              |     |
|    | 1.02.04.2.01 | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)            | Jumlah ijin yang diterbitkan (Ijin)                                           | 100                                                                                         | 0                                                                          |                                                                                       |                              |     |

| No | Kode         | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah dan<br>Program / Kegiatan                                                                                                                     | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output) | Target Kinerja<br>dan Anggaran<br>RKPD<br>Tahun berjalan<br>(Tahun 2024)<br>yang dievaluasi | Realisasi<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Anggaran<br>RKPD yang<br>dievaluasi | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran<br>RKPD yang<br>dievaluasi | Unit SKPD<br>Penanggungjawab | Ket |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                         | 4                                                               | 5                                                                                           | 6                                                                          | 7                                                                                     | 8                            | 9   |
|    | 1.02.04.2.03 | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Jumlah sertifikat P-IRT yang diterbitkan (Lokasi)               | 70                                                                                          | 0                                                                          |                                                                                       |                              |     |
|    | 1.02.04.2.06 | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga                                                                | Jumlah produk IRTP yang dilakukan pemeriksaan (lokasi)          | 35                                                                                          | 0                                                                          |                                                                                       |                              |     |
| 10 | 1.02.05      | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN<br/>MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>                                                                                                                               | <b>Prosentase Rumah Tangga<br/>PHBS (%)</b>                     | <b>87</b>                                                                                   | <b>94</b>                                                                  | <b>108,05</b>                                                                         | DINAS<br>KESEHATAN           |     |
|    | 1.02.05.2.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                     | Prosentase desa siaga aktif mandiri (%)                         | 22                                                                                          | 33                                                                         |                                                                                       |                              |     |
|    | 1.02.05.2.02 | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                           | Jumlah pilar GERMAS yang dilaksanakan (pilar)                   | 7                                                                                           | 7                                                                          |                                                                                       |                              |     |
|    | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                               | Jumlah UKBM yang difasilitasi (Unit)                            | 3                                                                                           | 3                                                                          |                                                                                       |                              |     |

Mendasarkan tabel diatas, diketahui bahwa capaian kinerja program Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan sebesar 103,74. Kelima program tersebut mendukung ketercapaian Indikator Kinerja Kunci dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan. Capaian semua indikator kinerja pada tahun 2024 masih berada pada kategori sangat tinggi.

Namun masih ada beberapa indikator dengan capaian tinggi dan sedang disebabkan oleh beberapa faktor. Dalam mengatasi faktor penghambat tersebut, terdapat beberapa upaya yang dapat dilaksanakan, yaitu :

- a. Pemberian pemahaman kepada masyarakat berkaitan dengan ibu hamil (prosedur layanan kesehatan ibu hamil);
- b. Kader dan Bidan melakukan pemantauan kepada ibu hamil sampai dengan pasca persalinan;
- c. Komitmen bidan desa untuk melakukan pelayanan kepada ibu hamil dan pasca melahirkan (ibu nifas);
- d. Memberikan edukasi kepada ibu hamil dan ibu nifas untuk selalu kontrol Kesehatan;
- e. Pembentukan komite AMSPR Kabupaten;
- f. Penyediaan TTK pelatihan petugas pelayanan ANC terpadu dan USG;
- g. Inovasi dokter puskesmas harus punya wilayah dampingan ibu hamil (dokter, bidan, perawat untuk melakukan pendampingan kepada ibu hamil);
- h. Pelacakan kematian ke fasyankes.

### 3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Kendal diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal. Urusan ini sangat penting dalam pembangunan daerah karena berhubungan dengan berbagai kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pelayanan umum seperti Jalan, Jembatan, Bendung, Jaringan Irigasi, Ruang Terbuka Hijau, Sungai dan lain-lain dengan harapan fasilitas umum tersebut dapat dinikmati dan difungsikan oleh masyarakat secara optimal. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal mempunyai UPTD yang terdiri dari :

1. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi UPTD I Kendal;
2. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi UPTD II Weleri;
3. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi UPTD III Kaliwungu;
4. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi UPTD IV Sukorejo;
5. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi UPTD V Boja.

Sesuai dengan Keputusan Bupati Kendal Nomor 056/321/2023 tentang Penetapan Ruas Jalan menurut Statusnya sebagai Jalan Kabupaten di Kabupaten Kendal sepanjang 782,710 Km. Jumlah kondisi Panjang jalan mantap sampai dengan tahun 2023 sejumlah 655,58 km atau 83,76% (jika dihitung dari Keputusan Bupati Kendal Nomor : 056 / 381 / 2023 tanggal 27 November 2023). Capaian Kinerja Program Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2024 selengkapnya tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 2.76  
Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

| No  | Kode         | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah dan<br>Program / Kegiatan  | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                           | Target Kinerja<br>dan Anggaran<br>RKPD<br>Tahun berjalan<br>(Tahun 2024)<br>yang dievaluasi | Realisasi<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Anggaran<br>RKPD yang<br>dievaluasi | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran RKPD<br>yang dievaluasi | Unit SKPD<br>Penanggungjawab                        | Ket |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|
| 1   | 2            | 3                                                                      | 4                                                                                                                         | 5                                                                                           | 6                                                                          | 7                                                                               | 8                                                   | 9   |
|     | 1            |                                                                        |                                                                                                                           |                                                                                             |                                                                            |                                                                                 |                                                     |     |
|     | 1.03         | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG<br>PEKERJAAN UMUM DAN<br>PENATAAN RUANG     |                                                                                                                           |                                                                                             |                                                                            | 79,14                                                                           |                                                     |     |
| 103 | 1.03.01      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA      | Persentase ketercapaian pelayanan umum,<br>kepegawaian dan keuangan Perangkat<br>Daerah (%)                               | 100                                                                                         | 100                                                                        | 100,00                                                                          | DINAS<br>PEKERJAAN<br>UMUM DAN<br>PENATAAN<br>RUANG |     |
|     |              |                                                                        | Persentase ketercapaian perencanaan dan<br>evaluasi kinerja Perangkat Daerah (%)                                          | 100                                                                                         | 100                                                                        | 100,00                                                                          |                                                     |     |
|     | 1.03.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran,<br>dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah | 1. Jumlah Laporan /Dokumen Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah yang tersusun (Dokumen) | 24                                                                                          | 24                                                                         |                                                                                 |                                                     |     |
|     | 1.03.01.2.02 | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                              | 1. Jumlah bulan tersedianya administrasi<br>keuangan perangkat daerah (Bulan)                                             | 12                                                                                          | 12                                                                         |                                                                                 |                                                     |     |
|     | 1.03.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                           | 1. Persentase Kecukupan Sarana Administrasi<br>Kepegawaian (%)                                                            | 100                                                                                         | 0                                                                          |                                                                                 |                                                     |     |
|     | 1.03.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah                                  | 1. Jumlah bulan tersedianya administrasi<br>umum perangkat daerah (Bulan)                                                 | 12                                                                                          | 12                                                                         |                                                                                 |                                                     |     |
|     | 1.03.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintah<br>Daerah | 1. Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Unit)                                      | 2                                                                                           | 1                                                                          |                                                                                 |                                                     |     |

| No  | Kode         | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah dan<br>Program / Kegiatan                                                                                                 | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                          | Target Kinerja<br>dan Anggaran<br>RKPD<br>Tahun berjalan<br>(Tahun 2024)<br>yang dievaluasi | Realisasi<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Anggaran<br>RKPD yang<br>dievaluasi | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran RKPD<br>yang dievaluasi | Unit SKPD<br>Penanggungjawab                        | Ket |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|
| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                        | 5                                                                                           | 6                                                                          | 7                                                                               | 8                                                   | 9   |
|     | 1.03.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                               | 1. Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah (Bulan)                                                                         | 12                                                                                          | 12                                                                         |                                                                                 |                                                     |     |
|     | 1.03.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                                                           | 1. Jumlah Bulan Terpeliharanya Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan<br>Daerah (Bulan)                                                    | 12                                                                                          | 12                                                                         |                                                                                 |                                                     |     |
| 104 | 1.03.02      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN<br/>SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>                                                                                                                  | <b>Persentase luas kawasan permukiman rawan<br/>banjir yang terlindungi oleh infrastruktur<br/>pengendalian banjir di WS Kewenangan<br/>Kab/Kota (%)</b> | <b>15,19</b>                                                                                | <b>15,38</b>                                                               | <b>101,25</b>                                                                   | DINAS<br>PEKERJAAN<br>UMUM DAN<br>PENATAAN<br>RUANG |     |
|     |              |                                                                                                                                                                       | <b>Persentase infrastruktur daerah irigasi<br/>kewenangan kab/kota dalam kondisi baik<br/>(%)</b>                                                        | <b>45,48</b>                                                                                | <b>51,08</b>                                                               | <b>112,31</b>                                                                   |                                                     |     |
|     | 1.03.02.2.01 | Pengelolaan SDA dan Bangunan<br>Pengaman Pantai pada Wilayah<br>Sungai (WS) dalam 1 (Satu)<br>Daerah Kabupaten/Kota                                                   | 2. Panjang infrastruktur Pengendali Banjir<br>yang terbangun (M)                                                                                         | 500                                                                                         | 9.361,6                                                                    |                                                                                 |                                                     |     |
|     |              |                                                                                                                                                                       | 1. Persentase luasan wilayah banjir dan<br>tergenang (%)                                                                                                 | 15,19                                                                                       | 15,38                                                                      |                                                                                 |                                                     |     |
|     | 1.03.02.2.02 | Pengembangan dan Pengelolaan<br>Sistem Irigasi Primer dan<br>Sekunder pada Daerah Irigasi<br>yang Luasnya di Bawah 1000 Ha<br>dalam 1 (Satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota | 1. Persentase infrastruktur daerah irigasi<br>kewenangan kab/kota dalam kondisi baik (%)                                                                 | 45,48                                                                                       | 51,08                                                                      |                                                                                 |                                                     |     |
| 105 | 1.03.03      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN<br/>PENGEMBANGAN SISTEM<br/>PENYEDIAAN AIR MINUM</b>                                                                                       | <b>Prosentase rumah tangga yang menempati<br/>hunian dengan akses air minum layak (%)</b>                                                                | <b>98,48</b>                                                                                | <b>95,62</b>                                                               | <b>97,10</b>                                                                    | DINAS<br>PEKERJAAN<br>UMUM DAN<br>PENATAAN<br>RUANG |     |
|     | 1.03.03.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan<br>Sistem Penyediaan Air Minum<br>(SPAM) di Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                     | 1. Prosentase rumah tangga yang menempati<br>hunian dengan Jaringan perpipaan (%)                                                                        | 75,54                                                                                       | 73,51                                                                      |                                                                                 |                                                     |     |
| 106 | 1.03.05      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN<br/>PENGEMBANGAN SISTEM AIR<br/>LIMBAH</b>                                                                                                 | <b>Prosentase rumah tangga yang menempati<br/>hunian dengan akses Sanitasi (air limbah<br/>domestik) Aman (%)</b>                                        | <b>1,28</b>                                                                                 | <b>0,81</b>                                                                | <b>63,28</b>                                                                    | DINAS<br>PEKERJAAN<br>UMUM DAN                      |     |

| No         | Kode           | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah dan<br>Program / Kegiatan                                                                                 | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                            | Target Kinerja<br>dan Anggaran<br>RKPD<br>Tahun berjalan<br>(Tahun 2024)<br>yang dievaluasi | Realisasi<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Anggaran<br>RKPD yang<br>dievaluasi | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran RKPD<br>yang dievaluasi | Unit SKPD<br>Penanggungjawab            | Ket |
|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|
| 1          | 2              | 3                                                                                                                                                     | 4                                                                                                          | 5                                                                                           | 6                                                                          | 7                                                                               | 8                                       | 9   |
|            |                |                                                                                                                                                       | <b>Prosentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses Sanitasi (air limbah domestik) layak (%)</b> | <b>91,13</b>                                                                                | <b>91,91</b>                                                               | <b>100,86</b>                                                                   | PENATAAN RUANG                          |     |
|            | 1.03.05.2.01   | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                   | Prosentase rumah tangga yang menempati hunian dengan layanan pengolahan air limbah Domestik (%)            | 92,41                                                                                       | 91,91                                                                      |                                                                                 |                                         |     |
| <b>107</b> | <b>1.03.06</b> | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>                                                                                           | <b>Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik (%)</b>                                                | <b>79,26</b>                                                                                | <b>63,08</b>                                                               | <b>79,59</b>                                                                    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |     |
|            | 1.03.06.2.01   | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota                                        | 1. Panjang drainase yang dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi dan dipelihara (M)                         | 6.230                                                                                       | 14.036                                                                     |                                                                                 |                                         |     |
| <b>108</b> | <b>1.03.08</b> | <b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>                                                                                                               | <b>Persentase rekomendasi SLF (Sertifikat Laik Fungsi) yang diterbitkan (%)</b>                            | <b>100</b>                                                                                  | <b>0</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                                     | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |     |
|            |                |                                                                                                                                                       | <b>Persentase rekomendasi teknis IMB (PBG) yang diterbitkan (%)</b>                                        | <b>87</b>                                                                                   | <b>54,02</b>                                                               | <b>62,09</b>                                                                    |                                         |     |
|            | 1.03.08.2.01   | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | 1. Persentase rekomendasi teknis IMB (PBG) yang diterbitkan (%)                                            | 87                                                                                          | 54,02                                                                      |                                                                                 |                                         |     |
|            |                |                                                                                                                                                       | 2. Persentase rekomendasi SLF (Sertifikat Laik Fungsi) yang diterbitkan (%)                                | 100                                                                                         | 0                                                                          |                                                                                 |                                         |     |
| <b>109</b> | <b>1.03.09</b> | <b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>                                                                                                    | <b>Persentase bangunan/ lingkungan/ kawasan yang ditingkatkan/ tertata (%)</b>                             | <b>100</b>                                                                                  | <b>0</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                                     | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |     |
|            | 1.03.09.2.01   | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota                                                                          | 1. Persentase bangunan/ lingkungan/ kawasan yang ditingkatkan/ tertata (%)                                 | 100                                                                                         | 0                                                                          |                                                                                 |                                         |     |
| <b>110</b> | <b>1.03.10</b> | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>                                                                                                                  | <b>Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik (%)</b>                                                | <b>97,8</b>                                                                                 | <b>63,06</b>                                                               | <b>64,48</b>                                                                    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN                |     |
|            |                |                                                                                                                                                       | <b>Persentase permukaan jalan kabupaten dalam kondisi baik (%)</b>                                         | <b>71,17</b>                                                                                | <b>52,8</b>                                                                | <b>74,19</b>                                                                    |                                         |     |

| No  | Kode         | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah dan<br>Program / Kegiatan                                   | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                              | Target Kinerja<br>dan Anggaran<br>RKPD<br>Tahun berjalan<br>(Tahun 2024)<br>yang dievaluasi | Realisasi<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Anggaran<br>RKPD yang<br>dievaluasi | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran RKPD<br>yang dievaluasi | Unit SKPD<br>Penanggungjawab                        | Ket |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|
| 1   | 2            | 3                                                                                                       | 4                                                                                                                            | 5                                                                                           | 6                                                                          | 7                                                                               | 8                                                   | 9   |
|     | 1.03.10.2.01 | Penyelenggaraan Jalan<br>Kabupaten/Kota                                                                 | 1. Panjang permukaan jalan kabupaten dalam<br>kondisi baik (Km)<br>2. Panjang jembatan kabupaten dalam kondisi<br>baik (M)   | 63,39<br>239                                                                                | 52,8<br>60                                                                 |                                                                                 | PENATAAN<br>RUANG                                   |     |
| 111 | 1.03.11      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA<br/>KONSTRUKSI</b>                                                         | <b>Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis<br/>yang memiliki sertifikat kompetensi (%)</b>                                  | <b>72,87</b>                                                                                | <b>71,81</b>                                                               | <b>98,55</b>                                                                    | DINAS<br>PEKERJAAN<br>UMUM DAN<br>PENATAAN<br>RUANG |     |
|     | 1.03.11.2.01 | Penyelenggaraan Pelatihan<br>Tenaga Terampil Konstruksi                                                 | 1. Jumlah tenaga terampil konstruksi yang<br>tersertifikasi (Orang)                                                          | 150                                                                                         | 79                                                                         |                                                                                 |                                                     |     |
|     | 1.03.11.2.02 | Penyelenggaraan Sistem<br>Informasi Jasa Konstruksi<br>Cakupan Daerah<br>Kabupaten/Kota                 | 1. Jumlah Sistem Informasi Pembina Jasa<br>Konstruksi Cakupan kabupaten/ kota yang<br>aktif dengan data termutakhir (Sistem) | 1                                                                                           | 1                                                                          |                                                                                 |                                                     |     |
|     | 1.03.11.2.04 | Pengawasan Tertib Usaha, Tertib<br>Penyelenggaraan dan Tertib<br>Pemanfaatan Jasa Konstruksi            | 1. Jumlah Laporan pengawasan Tertib Usaha,<br>Tertib Penyelenggaraan dan Tertib<br>Pemanfaatan Jasa Konstruksi (Dokumen)     | 1                                                                                           | 1                                                                          |                                                                                 |                                                     |     |
| 112 | 1.03.12      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN<br/>PENATAAN RUANG</b>                                                       | <b>Persentase penyimpangan pemanfaatan<br/>ruang (%)</b>                                                                     | <b>14</b>                                                                                   | <b>18,67</b>                                                               | <b>133,36</b>                                                                   | DINAS<br>PEKERJAAN<br>UMUM DAN<br>PENATAAN<br>RUANG |     |
|     | 1.03.12.2.01 | Penetapan Rencana Tata Ruang<br>Wilayah (RTRW) dan Rencana<br>Rinci Tata Ruang (RRTR)<br>Kabupaten/Kota | 1. Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang<br>Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang<br>(RRTR) yang disusun (Dokumen)         | 2                                                                                           | 1                                                                          |                                                                                 |                                                     |     |
|     | 1.03.12.2.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Perencanaan Tata Ruang Daerah<br>Kabupaten/Kota                          | 1. Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi<br>Kebijakan Penataan Ruang Daerah (Dokumen)                                         | 2                                                                                           | 2                                                                          |                                                                                 |                                                     |     |
|     | 1.03.12.2.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Pemanfaatan Ruang Daerah<br>Kabupaten/Kota                               | 2. Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan<br>koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan<br>ruang daerah (Bulan)                      | 12                                                                                          | 12                                                                         |                                                                                 |                                                     |     |
|     | 1.03.12.2.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Pengendalian Pemanfaatan<br>Ruang Daerah Kabupaten/Kota                  | 2. Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan<br>sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang<br>(Bulan)                         | 12                                                                                          | 12                                                                         |                                                                                 |                                                     |     |

Mendasarkan tabel diatas, diketahui bahwa capaian kinerja program Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar 79,14. Program-program tersebut mendukung ketercapaian Indikator Kinerja Kunci dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Capaian semua indikator kinerja pada tahun 2024 masih berada pada kategori sangat tinggi. Namun masih ada beberapa indikator dengan capaian tinggi dan rendah.

Hal-hal sebagai faktor pendorong dalam pencapaian indikator kinerja, antara lain sebagai berikut :

1. Dalam perbaikan jalan harap mengacu terhadap status kondisi jalan yang ada di DPUPR;
2. Menambah alokasi anggaran pemeliharaan bangunan irigasi, sehingga perbaikan bisa tertangani secara menyeluruh agar produktifitas pertanian meningkat;
3. Dalam penghitungan kelayakan sanitasi, masih mengacu terhadap penghitungan oleh Dinas Kesehatan;
4. Adanya penambahan tenaga operator dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Dalam mengatasi beberapa hal tersebut, terdapat beberapa upaya yang dapat dilaksanakan, yaitu :

- a. Menyusun Peraturan Bupati tentang standar kelayakan sanitasi;
- b. Meningkatkan kualitas tenaga operator;
- c. Memperbaiki target kinerja mengacu terhadap Peraturan-peraturan yang berlaku.

#### 4. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman sangat penting dan mendesak karena berkaitan dengan kebutuhan warga negara dalam mendapatkan tempat tinggal yang layak. Perubahan sosial ekonomi yang cepat membawa dampak berubahnya kondisi perumahan dimana perubahan kebutuhan perumahan dan permukiman tidak pernah menurun sementara disisi lain tidak diikuti dengan bertambahnya persediaan perumahan dan permukiman secara proporsional. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Kendal diampu oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal. Capaian Kinerja Program Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun 2024 selengkapnya tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 2.77

Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

| No  | Kode         | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah dan<br>Program / Kegiatan       | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                          | Target Kinerja<br>dan Anggaran<br>RKPD<br>Tahun berjalan<br>(Tahun 2024)<br>yang dievaluasi | Realisasi<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Anggaran<br>RKPD yang<br>dievaluasi | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran RKPD<br>yang dievaluasi | Unit SKPD<br>Penanggungjawab                              | Ket |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|
| 1   | 2            | 3                                                                           | 4                                                                                                                        | 5                                                                                           | 6                                                                          | 7                                                                               | 8                                                         | 9   |
|     | 1            |                                                                             |                                                                                                                          |                                                                                             |                                                                            |                                                                                 |                                                           |     |
|     | 1.04         | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG<br>PERUMAHAN DAN KAWASAN<br>PERMUKIMAN           |                                                                                                                          |                                                                                             |                                                                            | 169,35                                                                          |                                                           |     |
| 113 | 1.04.01      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA           | Skor nilai SAKIP perangkat daerah<br>(persen)                                                                            | 72,5                                                                                        | 72,5                                                                       | 100,00                                                                          | DINAS<br>PERUMAHAN<br>RAKYAT DAN<br>KAWASAN<br>PERMUKIMAN |     |
|     | 1.04.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah      | Jumlah dokumen perencanaan dan<br>evaluasi kinerja yang tersusun<br>(Dokumen)                                            | 11                                                                                          | 11                                                                         |                                                                                 |                                                           |     |
|     | 1.04.01.2.02 | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                   | Jumlah bulan terbayarnya Gaji dan<br>tunjangan ASN (Orang/bulan)                                                         | 24                                                                                          | 24                                                                         |                                                                                 |                                                           |     |
|     | 1.04.01.2.03 | Administrasi Barang Milik<br>Daerah pada Perangkat Daerah                   | jumlah kegiatan administrasi barang<br>milik daerah (kegiatan)                                                           | 2                                                                                           | 2                                                                          |                                                                                 |                                                           |     |
|     | 1.04.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                | Jumlah ASN yang terlayani (orang)                                                                                        | 60                                                                                          | 60                                                                         |                                                                                 |                                                           |     |
|     | 1.04.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah                                       | Jumlah bulan pemenuhan<br>kebutuhan rutin (bulan)                                                                        | 12                                                                                          | 12                                                                         |                                                                                 |                                                           |     |
|     | 1.04.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                     | Jumlah bulan pemenuhan<br>kebutuhan rutin (bulan)                                                                        | 12                                                                                          | 12                                                                         |                                                                                 |                                                           |     |
|     | 1.04.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah | Jumlah Unit Barang Milik Daerah<br>yang terpelihara (Unit)                                                               | 75                                                                                          | 75                                                                         |                                                                                 |                                                           |     |
| 114 | 1.04.02      | PROGRAM PENGEMBANGAN<br>PERUMAHAN                                           | Fasilitasi penyediaan rumah layak<br>huni bagi masyarakat terdampak<br>relokasi program Pemerintah<br>kabupaten/kota (%) | 100                                                                                         | 100                                                                        | 100,00                                                                          | DINAS<br>PERUMAHAN<br>RAKYAT DAN<br>KAWASAN<br>PERMUKIMAN |     |
|     |              |                                                                             | Penyediaan dan rehabilitasi rumah<br>layak huni bagi korban bencana<br>kabupaten/kota (%)                                | 100                                                                                         | 100                                                                        | 100,00                                                                          |                                                           |     |

| No         | Kode           | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah dan<br>Program / Kegiatan                                           | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                          | Target Kinerja<br>dan Anggaran<br>RKPD<br>Tahun berjalan<br>(Tahun 2024)<br>yang dievaluasi | Realisasi<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Anggaran<br>RKPD yang<br>dievaluasi | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran RKPD<br>yang dievaluasi | Unit SKPD<br>Penanggungjawab                  | Ket |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|
| 1          | 2              | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                                                        | 5                                                                                           | 6                                                                          | 7                                                                               | 8                                             | 9   |
|            |                |                                                                                                                 | <b>Persentase Pengembangan<br/>Perumahan Berijin (%)</b>                                                                                                 | <b>100</b>                                                                                  | <b>100</b>                                                                 | <b>100,00</b>                                                                   |                                               |     |
|            | 1.04.02.2.01   | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota                 | Jumlah dokumen pendataan rumah korban bencana atau rekolasi program kab/kota (Dokumen)                                                                   | 1                                                                                           | 1                                                                          |                                                                                 |                                               |     |
|            | 1.04.02.2.02   | Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah masyarakat yang meningkat pemahamannya terkait Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota (masyarakat) | 15                                                                                          | 15                                                                         |                                                                                 |                                               |     |
|            | 1.04.02.2.03   | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota                          | Jumlah rumah korban bencana/ relokasi program yang dibangun dan direhabilitasi (Unit Rumah)                                                              | 15                                                                                          | 15                                                                         |                                                                                 |                                               |     |
|            | 1.04.02.2.05   | Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus                                                    | Jumlah Rumah susun yang terkelola dengan baik (twinblok)                                                                                                 | 4                                                                                           | 4                                                                          |                                                                                 |                                               |     |
|            | 1.04.02.2.06   | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan                                                          | Jumlah rekomendasi siteplan perumahan yang diterbitkan (Dokumen)                                                                                         | 12                                                                                          | 12                                                                         |                                                                                 |                                               |     |
| <b>115</b> | <b>1.04.03</b> | <b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>                                                                               | <b>Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani (%)</b>                                                            | <b>2,97</b>                                                                                 | <b>19,87</b>                                                               | <b>669,02</b>                                                                   | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |     |
|            | 1.04.03.2.01   | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman                                                 | Jumlah koordinasi yang dilaksanakan (Koordinasi)                                                                                                         | 12                                                                                          | 12                                                                         |                                                                                 |                                               |     |
|            | 1.04.03.2.02   | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha                 | Jumlah Luasan Kumuh yang ditata dan ditingkatkan kualitasnya (Ha)                                                                                        | 1                                                                                           | 1                                                                          |                                                                                 |                                               |     |
|            | 1.04.03.2.03   | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha                              | Jumlah Luasan Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang ditingkatkan kualitas lingkungannya (Ha)                                                                  | 1                                                                                           | 0                                                                          |                                                                                 |                                               |     |

| No  | Kode         | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah dan<br>Program / Kegiatan              | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                     | Target Kinerja<br>dan Anggaran<br>RKPD<br>Tahun berjalan<br>(Tahun 2024)<br>yang dievaluasi | Realisasi<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Anggaran<br>RKPD yang<br>dievaluasi | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran RKPD<br>yang dievaluasi | Unit SKPD<br>Penanggungjawab                              | Ket |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|
| 1   | 2            | 3                                                                                  | 4                                                                                                   | 5                                                                                           | 6                                                                          | 7                                                                               | 8                                                         | 9   |
| 116 | 1.04.04      | <b>PROGRAM PERUMAHAN DAN<br/>KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>                          | <b>Berkurangnya jumlah unit RTLH<br/>(Rumah Tidak Layak Huni) (%)</b>                               | <b>11,72</b>                                                                                | <b>10,5</b>                                                                | <b>89,59</b>                                                                    | DINAS<br>PERUMAHAN<br>RAKYAT DAN<br>KAWASAN<br>PERMUKIMAN |     |
|     | 1.04.04.2.01 | Pencegahan Perumahan dan<br>Kawasan Permukiman Kumuh<br>pada Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah RTLH yang diberi bantuan<br>dan peningkatan rumah swadaya<br>(Unit Rumah)                    | 175                                                                                         | 175                                                                        |                                                                                 |                                                           |     |
| 117 | 1.04.05      | <b>PROGRAM PENINGKATAN<br/>PRASARANA, SARANA DAN<br/>UTILITAS UMUM (PSU)</b>       | <b>Jumlah perumahan yang sudah<br/>dilengkapi PSU (Prasarana, sarana<br/>dan Utilitas Umum) (%)</b> | <b>100</b>                                                                                  | <b>100</b>                                                                 | <b>100,00</b>                                                                   | DINAS<br>PERUMAHAN<br>RAKYAT DAN<br>KAWASAN<br>PERMUKIMAN |     |
|     |              |                                                                                    | <b>Prasarana sarana utilitas umum<br/>(PSU) kondisi baik (%)</b>                                    | <b>100</b>                                                                                  | <b>96,17</b>                                                               | <b>96,17</b>                                                                    |                                                           |     |
|     | 1.04.05.2.01 | Urusan Penyelenggaraan PSU<br>Perumahan                                            | Prasarana sarana utilitas umum<br>(PSU) kondisi baik (Sertifikat PSU<br>yang diserahkan)            | 5                                                                                           | 5                                                                          |                                                                                 |                                                           |     |

Mendasarkan tabel diatas, diketahui bahwa capaian kinerja program Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar 169,35. Program-program tersebut mendukung ketercapaian Indikator Kinerja Kunci dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Capaian semua indikator kinerja pada tahun 2024 masih berada pada kategori sangat tinggi. Namun dalam prakteknya masih mengalami beberapa kendala. Dalam mengatasi kendala tersebut, terdapat beberapa upaya yang dapat dilaksanakan, yaitu :

- Penyesuaian SK Kumuh;
- Berkoordinasi dengan dinas terkait penanganan kerusakan rumah akibat bencana alam;
- Pendataan rumah secara berkala baik di pedesaan/perkotaan;
- Mendorong pengembang untuk segera menyerahkan aset PSU agar dapat dilakukan pemeliharaan terhadap aset PSU yang rusak.

5. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum merupakan pengharapan Pemerintah Daerah dimana masyarakat dapat melaksanakan segala kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kendal diampu oleh tiga Perangkat Daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Capaian Kinerja Program Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada tahun 2024 selengkapnya tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 2.78

Capaian Kinerja Program Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

| No  | Kode         | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah dan<br>Program / Kegiatan                              | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                  | Target Kinerja<br>dan Anggaran<br>RKPD<br>Tahun berjalan<br>(Tahun 2024)<br>yang dievaluasi | Realisasi<br>Capaian Kinerja<br>dan Anggaran<br>RKPD yang<br>dievaluasi | Tingkat<br>Capaian Kinerja<br>dan Realisasi<br>Anggaran RKPD<br>yang dievaluasi | Unit SKPD<br>Penanggungjawab                              | Ket |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|
| 1   | 2            | 3                                                                                                  | 4                                                                                                | 5                                                                                           | 6                                                                       | 7                                                                               | 8                                                         | 9   |
|     | 1            |                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                             |                                                                         |                                                                                 |                                                           |     |
|     | 1.05         | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG<br>KETENTERAMAN DAN<br>KETERTIBAN UMUM SERTA<br>PERLINDUNGAN MASYARAKAT |                                                                                                  |                                                                                             |                                                                         | 96,93                                                                           |                                                           |     |
| 118 | 1.05.01      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                                  | Persentase ketercapaian penunjang<br>urusan Perangkat Daerah (%)                                 | 100                                                                                         | 100                                                                     | 100,00                                                                          | SATUAN POLISI<br>PAMONG PRAJA<br>DAN PEMADAM<br>KEBAKARAN |     |
|     |              |                                                                                                    | Persentase ketercapaian perencanaan<br>dan evaluasi kinerja OPD (Persen)                         | 100                                                                                         | 100                                                                     | 100,00                                                                          |                                                           |     |
|     | 1.05.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                             | ()                                                                                               | 0                                                                                           | 0                                                                       |                                                                                 |                                                           |     |
|     | 1.05.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah                                                          | Persentase ketercapaian pelayanan<br>umum, kepegawaian dan keuangan<br>perangkat daerah (Persen) | 100                                                                                         | 75                                                                      |                                                                                 |                                                           |     |
|     | 1.05.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                                       | Persentase kedisiplinan administrasi<br>pegawai (Persen)                                         | 100                                                                                         | 125                                                                     |                                                                                 |                                                           |     |

| No  | Kode         | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah dan<br>Program / Kegiatan                                                               | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                     | Target Kinerja<br>dan Anggaran<br>RKPD<br>Tahun berjalan<br>(Tahun 2024)<br>yang dievaluasi | Realisasi<br>Capaian Kinerja<br>dan Anggaran<br>RKPD yang<br>dievaluasi | Tingkat<br>Capaian Kinerja<br>dan Realisasi<br>Anggaran RKPD<br>yang dievaluasi | Unit SKPD<br>Penanggungjawab                     | Ket |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|
| 1   | 2            | 3                                                                                                                                   | 4                                                                                                   | 5                                                                                           | 6                                                                       | 7                                                                               | 8                                                | 9   |
|     | 1.05.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                  | Persentase terpenuhinya kebutuhan rutin perkantoran (Persen)                                        | 100                                                                                         | 75                                                                      |                                                                                 |                                                  |     |
|     | 1.05.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                    | Persentase terpenuhinya pengadaan sarana dan prasarana perkantoran (persen)                         | 100                                                                                         | 0                                                                       |                                                                                 |                                                  |     |
|     | 1.05.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                | Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana perkantoran (Persen)                             | 100                                                                                         | 100                                                                     |                                                                                 |                                                  |     |
|     | 1.05.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Persentase terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran (Persen)                      | 100                                                                                         | 100                                                                     |                                                                                 |                                                  |     |
| 119 | 1.05.02      | <b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>                                                                         | <b>Cakupan petugas Linmas di kabupaten per RT (Rasio)</b>                                           | <b>1,4</b>                                                                                  | <b>1,6</b>                                                              | <b>114,29</b>                                                                   | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |     |
|     |              |                                                                                                                                     | <b>% pelanggaran Perda/perkada yang diselesaikan (%)</b>                                            | <b>83</b>                                                                                   | <b>63</b>                                                               | <b>75,90</b>                                                                    |                                                  |     |
|     |              |                                                                                                                                     | <b>Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)</b>                                    | <b>100</b>                                                                                  | <b>76</b>                                                               | <b>76,00</b>                                                                    |                                                  |     |
|     | 1.05.02.2.01 | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                           | Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan perda dan perkada (Persen)    | 100                                                                                         | 100                                                                     |                                                                                 |                                                  |     |
|     | 1.05.02.2.02 | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota                                                            | jumlah perda/perkada yang ditertibkan (Persen)                                                      | 18                                                                                          | 18                                                                      |                                                                                 |                                                  |     |
|     | 1.05.02.2.03 | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota                                                                       | % PPNS yang dibina (Persen)                                                                         | 100                                                                                         | 100                                                                     |                                                                                 |                                                  |     |
| 120 | 1.05.04      | <b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>                                    | <b>Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)</b>                          | <b>100</b>                                                                                  | <b>100</b>                                                              | <b>100,00</b>                                                                   | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |     |
|     |              |                                                                                                                                     | <b>Prosentase Kelompok Balakar per Kecamatan (%)</b>                                                | <b>100</b>                                                                                  | <b>100</b>                                                              | <b>100,00</b>                                                                   |                                                  |     |
|     | 1.05.04.2.01 | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (Persen) | 100                                                                                         | 100                                                                     |                                                                                 |                                                  |     |

| No  | Kode         | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah dan<br>Program / Kegiatan                   | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                              | Target Kinerja<br>dan Anggaran<br>RKPD<br>Tahun berjalan<br>(Tahun 2024)<br>yang dievaluasi | Realisasi<br>Capaian Kinerja<br>dan Anggaran<br>RKPD yang<br>dievaluasi | Tingkat<br>Capaian Kinerja<br>dan Realisasi<br>Anggaran RKPD<br>yang dievaluasi | Unit SKPD<br>Penanggungjawab              | Ket |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|
| 1   | 2            | 3                                                                                       | 4                                                                                                                                            | 5                                                                                           | 6                                                                       | 7                                                                               | 8                                         | 9   |
|     | 1.05.04.2.02 | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran                                                   | Persentase peralatan proteksi kebakaran yang terinspeksi (Persen)                                                                            | 100                                                                                         | 100                                                                     |                                                                                 |                                           |     |
|     | 1.05.04.2.04 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran                                      | Persentase masyarakat dalam pencegahan kebakaran yang diberdayakan (Persen)                                                                  | 100                                                                                         | 100                                                                     |                                                                                 |                                           |     |
|     | 1.05.04.2.05 | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia | Persentase Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyela matan dan Evakuasi yang diselenggarakan (Persen) | 100                                                                                         | 100                                                                     |                                                                                 |                                           |     |
| 121 | 1.05.01      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                      | <b>Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah (%)</b>                                                                         | <b>100</b>                                                                                  | <b>100</b>                                                              | <b>100,00</b>                                                                   | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |     |
|     | 1.05.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                  | Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)                                                                              | 100                                                                                         | 100                                                                     |                                                                                 |                                           |     |
|     | 1.05.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                               | Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian (%)                                                                                            | 100                                                                                         | 0                                                                       |                                                                                 |                                           |     |
|     | 1.05.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                      | Persentase pemenuhan administrasi umum PD (%)                                                                                                | 100                                                                                         | 100                                                                     |                                                                                 |                                           |     |
|     | 1.05.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                        | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah (jenis)                                                                                                 | 15                                                                                          | 15                                                                      |                                                                                 |                                           |     |
|     | 1.05.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                    | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang (%)                                                                                                     | 100                                                                                         | 100                                                                     |                                                                                 |                                           |     |
|     | 1.05.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   | Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah (unit)                                                                                          | 64                                                                                          | 64                                                                      |                                                                                 |                                           |     |
| 122 | 1.05.03      | <b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>                                                   | <b>Persentase desa/kelurahan yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan (%)</b>                                                    | <b>6,85</b>                                                                                 | <b>6,85</b>                                                             | <b>100,00</b>                                                                   | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |     |
|     |              |                                                                                         | <b>Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap. (%)</b>                            | <b>100</b>                                                                                  | <b>100</b>                                                              | <b>100,00</b>                                                                   |                                           |     |
|     |              |                                                                                         | <b>Persentase lokasi pemulihan pasca bencana yang terealisasi (%)</b>                                                                        | <b>100</b>                                                                                  | <b>100</b>                                                              | <b>100,00</b>                                                                   |                                           |     |

| No | Kode         | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah dan<br>Program / Kegiatan | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                | Target Kinerja<br>dan Anggaran<br>RKPD<br>Tahun berjalan<br>(Tahun 2024)<br>yang dievaluasi | Realisasi<br>Capaian Kinerja<br>dan Anggaran<br>RKPD yang<br>dievaluasi | Tingkat<br>Capaian Kinerja<br>dan Realisasi<br>Anggaran RKPD<br>yang dievaluasi | Unit SKPD<br>Penanggungjawab | Ket |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
| 1  | 2            | 3                                                                     | 4                                                                                              | 5                                                                                           | 6                                                                       | 7                                                                               | 8                            | 9   |
|    | 1.05.03.2.01 | Pelayanan Informasi Rawan<br>Bencana Kabupaten/Kota                   | Persentase warga negara yang<br>memperoleh layanan informasi rawan<br>bencana (%)              | 100                                                                                         | 100                                                                     |                                                                                 |                              |     |
|    | 1.05.03.2.02 | Pelayanan Pencegahan dan<br>Kesiapsiagaan Terhadap Bencana            | Persentase warga negara yang<br>memperoleh layanan pencegahan dan<br>kesiapsiagaan bencana (%) | 100                                                                                         | 100                                                                     |                                                                                 |                              |     |
|    | 1.05.03.2.03 | Pelayanan Penyelamatan dan<br>Evakuasi Korban Bencana                 | Persentase warga negara yang<br>mendapatkan layanan penyelamatan dan<br>evakuasi (%)           | 100                                                                                         | 100                                                                     |                                                                                 |                              |     |
|    | 1.05.03.2.04 | Penataan Sistem Dasar<br>Penanggulangan Bencana                       | Jumlah Penataan Sistem Dasar<br>Penanggulangan Bencana (dokumen)                               | 6                                                                                           | 10                                                                      |                                                                                 |                              |     |

Mendasarkan tabel diatas, diketahui bahwa capaian kinerja program Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sebesar 96,93. Program-program tersebut mendukung ketercapaian Indikator Kinerja Kunci dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Capaian semua indikator kinerja pada tahun 2024 masih berada pada kategori sangat tinggi. Namun masih ada beberapa indikator dengan capaian rendah, sehingga dilaksanakan beberapa upaya, diantaranya :

- Melakukan pratoli rutin di wilayah rawan gangguan trantibum dan mengidentifikasi potensi masalah sebelum menjadi kasus besar;
- Mengutamakan dialog dan mediasi dalam menyelesaikan konflik untuk menjaga harmoni di masyarakat;
- Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban umum melalui kampanye dan pertemuan warga;
- Memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat proses pelaporan, penanganan dan monitoring kasus;
- Penempatan armada dan personil di titik-titik strategis untuk memperpendek waktu tanggap;

- f. Optimalisasi kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang meliputi gladi dan pelatihan serta sistem peringatan dini bencana;
- g. Meningkatkan koordinasi antar stakeholder terkait penanggulangan bencana.

Berikut ini beberapa faktor pendukung untuk meningkatkan capaian kinerja, yaitu :

- a. Dukungan dari kepolisian, perangkat desa dan tokoh Masyarakat dalam mepercepat penyelesaian kasus;
- b. Personil yang sigap dan terlatih dalam penanganan gangguan trantibum meningkatkan efektivitas penyelesaian kasus;
- c. Peran aktif Masyarakat dan perangkat desa dalam melaporkan kejadian sehingga dapat membantu mempercepat tanggap kasus/bencana.

6. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Urusan Pemerintahan Bidang Sosial di Kabupaten Kendal diampu oleh Dinas Sosial Kabupaten Kendal. Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Sosial pada tahun 2024 selengkapnya tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 2.79

Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

| No  | Kode         | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah dan<br>Program / Kegiatan | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                       | Target Kinerja<br>dan Anggaran<br>RKPD<br>Tahun berjalan<br>(Tahun 2024)<br>yang dievaluasi | Realisasi<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Anggaran<br>RKPD yang<br>dievaluasi | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran RKPD<br>ynag dievaluasi | Unit SKPD<br>Penanggungjawab | Ket |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
| 1   | 2            | 3                                                                     | 4                                                                                                     | 5                                                                                           | 6                                                                          | 7                                                                               | 8                            | 9   |
|     | 1            |                                                                       |                                                                                                       |                                                                                             |                                                                            |                                                                                 |                              |     |
|     | 1.06         | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG<br>SOSIAL                                  |                                                                                                       |                                                                                             |                                                                            | 101,85                                                                          |                              |     |
| 123 | 1.06.01      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA     | Persentase ketercapaian penunjang urusan<br>Perangkat Daerah (%)                                      | 100                                                                                         | 100                                                                        | 100,00                                                                          | DINAS SOSIAL                 |     |
|     | 1.06.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Tabel 4.1. Prosentase Dokumen<br><b>Perencanaan</b> Penganggaran dan<br>Evaluasi Perangkat Daerah (%) | 100                                                                                         | 100                                                                        |                                                                                 |                              |     |

| No  | Kode         | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah dan<br>Program / Kegiatan                                                                              | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                                              | Target Kinerja<br>dan Anggaran<br>RKPD<br>Tahun berjalan<br>(Tahun 2024)<br>yang dievaluasi | Realisasi<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Anggaran<br>RKPD yang<br>dievaluasi | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran RKPD<br>yang dievaluasi | Unit SKPD<br>Penanggungjawab | Ket |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                            | 5                                                                                           | 6                                                                          | 7                                                                               | 8                            | 9   |
|     | 1.06.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                             | Prosentase Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah (%)                                                                                                                     | 100                                                                                         | 100                                                                        |                                                                                 |                              |     |
|     | 1.06.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                          | Prosentase Ketertiban Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)                                                                                                          | 100                                                                                         | 0                                                                          |                                                                                 |                              |     |
|     | 1.06.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                 | Prosentase Ketersediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)                                                                                                        | 100                                                                                         | 100                                                                        |                                                                                 |                              |     |
|     | 1.06.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                   | Prosentase Pengadaan Sarana Aset Penunjang Administrasi Perkantoran (%)                                                                                                      | 100                                                                                         | 100                                                                        |                                                                                 |                              |     |
|     | 1.06.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                               | Prosentase Pengadaan Sarana Jasa Penunjang Perangkat Daerah (%)                                                                                                              | 100                                                                                         | 100                                                                        |                                                                                 |                              |     |
|     | 1.06.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                              | Prosentasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)                                                                                           | 100                                                                                         | 100                                                                        |                                                                                 |                              |     |
| 124 | 1.06.02      | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>                                                                                                                 | <b>Persentase peningkatan peran serta PSKS (%)</b>                                                                                                                           | <b>100</b>                                                                                  | <b>100</b>                                                                 | <b>100,00</b>                                                                   | DINAS SOSIAL                 |     |
|     | 1.06.02.2.03 | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota                                                                             | Prosentase Peningkatan Kapasitas PSKS Lembaga dan Non Lembaga (%)                                                                                                            | 100                                                                                         | 100                                                                        |                                                                                 |                              |     |
| 125 | 1.06.04      | <b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>                                                                                                                 | <b>Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandang Pengemis yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (%)</b>         | <b>100</b>                                                                                  | <b>100</b>                                                                 | <b>100,00</b>                                                                   | DINAS SOSIAL                 |     |
|     | 1.06.04.2.01 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Prosentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjur Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang Mendapatkan Bantuan Sosial Dasar (%) | 100                                                                                         | 100                                                                        |                                                                                 |                              |     |
|     | 1.06.04.2.02 | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial                    | Prosentase PPKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (%)                                                                  | 100                                                                                         | 100                                                                        |                                                                                 |                              |     |

| No  | Kode         | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah dan<br>Program / Kegiatan | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                                             | Target Kinerja<br>dan Anggaran<br>RKPD<br>Tahun berjalan<br>(Tahun 2024)<br>yang dievaluasi | Realisasi<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Anggaran<br>RKPD yang<br>dievaluasi | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran RKPD<br>yang dievaluasi | Unit SKPD<br>Penanggungjawab | Ket |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
| 1   | 2            | 3                                                                     | 4                                                                                                                                                           | 5                                                                                           | 6                                                                          | 7                                                                               | 8                            | 9   |
| 126 | 1.06.05      | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>                        | <b>Persentase PPKS fakir miskin dan PPKS anak terlantar yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial (%)</b>                                            | 100                                                                                         | 100                                                                        | 100,00                                                                          | DINAS SOSIAL                 |     |
|     | 1.06.05.2.01 | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar                                      | Prosentase Anak Terlantar yang Mendapatkan Pelayanan Sosial (%)                                                                                             | 100                                                                                         | 0                                                                          |                                                                                 |                              |     |
|     | 1.06.05.2.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota           | Prosentase PPKS Fakir Miskin yang Mendapatkan Perlindungan Jaminan Sosial (%)                                                                               | 75,18                                                                                       | 100                                                                        |                                                                                 |                              |     |
| 127 | 1.06.06      | <b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>                                     | <b>Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/ Kota (%)</b> | 100                                                                                         | 100                                                                        | 100,00                                                                          | DINAS SOSIAL                 |     |
|     | 1.06.06.2.01 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota     | ()                                                                                                                                                          | 0                                                                                           | 0                                                                          |                                                                                 |                              |     |
|     |              |                                                                       | Prosentase PPKS Korban Bencana Alam dan Sosial yang Menerima Bantuan Selama Masa Tanggap Darurat (%)                                                        | 100                                                                                         | 100                                                                        |                                                                                 |                              |     |
| 128 | 1.06.07      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>                       | <b>Prosentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan (%)</b>                                                                           | 90                                                                                          | 100                                                                        | 111,11                                                                          | DINAS SOSIAL                 |     |
|     | 1.06.07.2.01 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota             | Prosentase Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan (%)                                                                                  | 95                                                                                          | 100                                                                        |                                                                                 |                              |     |

Mendasarkan tabel diatas, diketahui bahwa capaian kinerja program Urusan Pemerintahan Bidang Sosial sebesar 101,85. Program-program tersebut mendukung ketercapaian Indikator Kinerja Kunci dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Sosial. Capaian semua indikator kinerja pada tahun 2024 berada pada kategori sangat tinggi. Perlu disampaikan, bahwa Jumlah PPKS di Kabupaten Kendal 7.731. Berikut secara lengkap data PPKS Kabupaten Kendal tahun 2024 :

Tabel 2.80

## REKAP DATA PPK KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024

| No | Kode PPKS | Jenis PPKS                                                        | Jenis Kelamin |           |                    | Total |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------------|-------|
|    |           |                                                                   | Laki-laki     | Perempuan | Tanpa input Gender |       |
| 1  | '1'       | Anak Balita Terlantar (ABT)                                       | 38            | 15        | 0                  | 53    |
| 2  | '2'       | Anak Terlantar (AT)                                               | 56            | 44        | 0                  | 100   |
| 3  | '3'       | Anak Yang Mengalami Masalah Hukum (AMH)                           | 1             | 0         | 0                  | 1     |
| 4  | '4'       | Anak Jalanan (AJ)                                                 | 3             | 2         | 0                  | 5     |
| 5  | '5a'      | Anak Dengan Disabilitas Fisik --> Tubuh (Tuna Daksa)              | 145           | 90        | 0                  | 235   |
| 6  | '5b1'     | Anak Dengan Disabilitas Sensorik --> Mata (Tuna Netra)            | 7             | 11        | 0                  | 18    |
| 7  | '5b2'     | Anak Dengan Disabilitas Sensorik --> Tuli (Tuna Rungu)            | 2             | 1         | 0                  | 3     |
| 8  | '5b3'     | Anak Dengan Disabilitas Sensorik --> Bisu (Tuna Wicara)           | 2             | 2         | 0                  | 4     |
| 9  | '5b4'     | Anak Dengan Disabilitas Sensorik --> Rungu / Wicara (Bisu Tuli)   | 11            | 18        | 0                  | 29    |
| 10 | '5c1'     | Anak Dengan Disabilitas Mental --> Mantan Penderita Gangguan Jiwa | 2             | 4         | 0                  | 6     |
| 11 | '5c2'     | Anak Dengan Disabilitas Mental --> Gangguan Jiwa                  | 12            | 6         | 0                  | 18    |
| 12 | '5d'      | Anak Dengan Disabilitas Intelektual --> Gangguan Retardasi        | 135           | 73        | 0                  | 208   |
| 13 | '5e1'     | Anak Dengan Disabilitas Ganda --> Netra & Fisik                   | 1             | 1         | 0                  | 2     |
| 14 | '5e2'     | Anak Dengan Disabilitas Ganda --> Netra, Rungu & Wicara           | 1             | 0         | 0                  | 1     |
| 15 | '5e3'     | Anak Dengan Disabilitas Ganda --> Netra, Rungu, Wicara & Fisik    | 1             | 0         | 0                  | 1     |
| 16 | '5e4'     | Anak Dengan Disabilitas Ganda --> Mental & Fisik                  | 9             | 14        | 0                  | 23    |
| 17 | '5e5'     | Anak Dengan Disabilitas Ganda --> Mental & Intelektual            | 5             | 8         | 0                  | 13    |
| 18 | '5e6'     | Anak Dengan Disabilitas Ganda --> Fisik, Mental & Intelektual     | 16            | 5         | 0                  | 21    |
| 19 | '6'       | Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan                         | 2             | 4         | 0                  | 6     |
| 20 | '7'       | Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus                          | 5             | 6         | 0                  | 11    |
| 21 | '8'       | Lanjut Usia Terlantar                                             | 539           | 705       | 0                  | 1244  |
| 22 | '9a'      | Penyandang Disabilitas Fisik --> Tubuh (Tuna Daksa)               | 765           | 540       | 0                  | 1305  |
| 23 | '9b1'     | Penyandang Disabilitas Sensorik --> Mata (Tuna Netra)             | 74            | 68        | 0                  | 142   |
| 24 | '9b2'     | Penyandang Disabilitas Sensorik --> Tuli (Tuna Rungu)             | 8             | 8         | 0                  | 16    |
| 25 | '9b3'     | Penyandang Disabilitas Sensorik --> Bisu (Tuna Wicara)            | 17            | 8         | 0                  | 25    |
| 26 | '9b4'     | Penyandang Disabilitas Sensorik --> Rungu / Wicara (Bisu Tuli)    | 47            | 36        | 0                  | 83    |
| 27 | '9c1'     | Penyandang Disabilitas Mental > Mantan Penderita Gangguan Jiwa    | 45            | 58        | 0                  | 103   |
| 28 | '9c2'     | Penyandang Disabilitas Mental --> Gangguan Jiwa                   | 120           | 99        | 0                  | 219   |

| No | Kode PPKS | Jenis PPKS                                                    | Jenis Kelamin |             |                    | Total       |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------|
|    |           |                                                               | Laki-laki     | Perempuan   | Tanpa input Gender |             |
| 29 | '9d'      | Penyandang Disabilitas Intelektual --> Gangguan Retardasi     | 366           | 291         | 0                  | 657         |
| 30 | '9e1'     | Penyandang Disabilitas Ganda --> Netra & Fisik                | 8             | 4           | 0                  | 12          |
| 31 | '9e2'     | Penyandang Disabilitas Ganda --> Netra, Rungu & Wicara        | 3             | 4           | 0                  | 7           |
| 32 | '9e3'     | Penyandang Disabilitas Ganda --> Netra, Rungu, Wicara & Fisik | 2             | 0           | 0                  | 2           |
| 33 | '9e4'     | Penyandang Disabilitas Ganda --> Mental & Fisik               | 28            | 25          | 0                  | 53          |
| 34 | '9e5'     | Penyandang Disabilitas Ganda --> Mental & Intelektual         | 39            | 21          | 0                  | 60          |
| 35 | '9e6'     | Penyandang Disabilitas Ganda --> Fisik, Mental & Intelektual  | 17            | 12          | 0                  | 29          |
| 36 | '10'      | Tuna Susila (TS)                                              | 0             | 8           | 0                  | 8           |
| 37 | '11'      | Gelandangan                                                   | 12            | 4           | 0                  | 16          |
| 38 | '12'      | Pengemis                                                      | 9             | 9           | 0                  | 18          |
| 39 | '13'      | Pemulung                                                      | 28            | 12          | 0                  | 40          |
| 40 | '14a'     | Kelompok Minoritas --> Waria                                  | 2             | 0           | 0                  | 2           |
| 41 | '14b'     | Kelompok Minoritas --> Gay                                    | 1             | 0           | 0                  | 1           |
| 42 | '15'      | Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (LP)                | 113           | 2           | 0                  | 115         |
| 43 | '16'      | Orang Dengan HIV / AIDS (ODHA)                                | 7             | 9           | 0                  | 16          |
| 44 | '17'      | Korban Penyalahgunaan NAPZA                                   | 3             | 1           | 0                  | 4           |
| 45 | '18'      | Korban Trafficking                                            | 2             | 1           | 0                  | 3           |
| 46 | '19'      | Korban Tindak Kekerasan                                       | 0             | 2           | 0                  | 2           |
| 47 | '20'      | Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)                       | 0             | 4           | 0                  | 4           |
| 48 | '21'      | Korban Bencana Alam                                           | 147           | 147         | 0                  | 294         |
| 49 | '22'      | Korban Bencana Sosial                                         | 135           | 110         | 0                  | 245         |
| 50 | '23'      | Perempuan Rawan Sosial Ekonomi                                | 4             | 2149        | 0                  | 2153        |
| 51 | '25'      | Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis                         | 65            | 30          | 0                  | 95          |
| 52 | '26'      | Komunitas Adat Terpencil                                      | 0             | 0           | 0                  | 0           |
|    |           | <b>TOTAL</b>                                                  | <b>3060</b>   | <b>4671</b> | <b>0</b>           | <b>7731</b> |

(Sumber data Dinas Sosial Kabupaten Kendal, 2024)

B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja di Kabupaten Kendal diampu oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal. Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja pada tahun 2024 selengkapnya tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 2.81  
Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

| No  | Kode         | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah dan<br>Program / Kegiatan       | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                      | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan<br>(Tahun 2024) yang<br>dievaluasi | Realisasi<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>yang dievaluasi | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran RKPD<br>yang dievaluasi | Unit SKPD<br>Penanggungjawab                  | Ket |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|
| 1   | 2            | 3                                                                           | 4                                                                                    | 5                                                                                        | 6                                                                       | 7                                                                                  | 8                                             | 9   |
|     | 2            |                                                                             |                                                                                      |                                                                                          |                                                                         |                                                                                    |                                               |     |
|     | 2.07         | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG<br>TENAGA KERJA                                  |                                                                                      |                                                                                          |                                                                         | 65,58                                                                              |                                               |     |
| 129 | 2.07.01      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA           | Persentase ketercapaian penunjang<br>urusan Perangkat Daerah (%)                     | 100                                                                                      | 75                                                                      | 75,00                                                                              | DINAS<br>PERINDUSTRIAN<br>DAN TENAGA<br>KERJA |     |
|     | 2.07.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah         | Jumlah dokumen perencanaan dan<br>evaluasi (Dokumen)                                 | 3                                                                                        | 3                                                                       |                                                                                    |                                               |     |
|     | 2.07.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah                                   | Jumlah bulan terbayarnya gaji dan<br>honor ASN (Bulan)                               | 12                                                                                       | 9                                                                       |                                                                                    |                                               |     |
|     | 2.07.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah                                       | Jumlah penyediaan barang keperluan<br>kantor (Buah)                                  | 16                                                                                       | 12                                                                      |                                                                                    |                                               |     |
|     | 2.07.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                     | Jumlah Penyediaan jasa penunjang<br>urusan pemerintah daerah (Buah)                  | 4                                                                                        | 2                                                                       |                                                                                    |                                               |     |
|     | 2.07.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah pemeliharaan barang milik<br>daerah penunjang urusan daerah (Unit)            | 40                                                                                       | 0                                                                       |                                                                                    |                                               |     |
| 130 | 2.07.02      | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA<br>KERJA                                         | Persentase kegiatan yang<br>dilaksanakan yang mengacu ke<br>rencana tenaga kerja (%) | 14                                                                                       | 0                                                                       | 0,00                                                                               | DINAS<br>PERINDUSTRIAN<br>DAN TENAGA<br>KERJA |     |
|     | 2.07.02.2.01 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja<br>(RTK)                                    | Jumlah dokumen RTK (Dokumen)                                                         | 2                                                                                        | 0                                                                       |                                                                                    |                                               |     |

| No  | Kode         | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah dan<br>Program / Kegiatan | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                 | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun berjalan<br>(Tahun 2024) yang<br>dievaluasi | Realisasi<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>yang dievaluasi | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran RKPD<br>yang dievaluasi | Unit SKPD<br>Penanggungjawab         | Ket |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| 1   | 2            | 3                                                                     | 4                                                                                                                               | 5                                                                                        | 6                                                                       | 7                                                                                  | 8                                    | 9   |
| 131 | 2.07.03      | <b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>         | <b>Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%)</b>                                                                     | <b>35</b>                                                                                | <b>0</b>                                                                | <b>0,00</b>                                                                        | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |     |
|     | 2.07.03.2.01 | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi                     | Jumlah peserta pelatihan (Orang)                                                                                                | 400                                                                                      | 256                                                                     |                                                                                    |                                      |     |
|     | 2.07.03.2.02 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta                              | Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina (Lembaga)                                                                     | 10                                                                                       | 70                                                                      |                                                                                    |                                      |     |
|     | 2.07.03.2.04 | Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil                       | Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultansi peningkatan produktivitas (Perusahaan)                                        | 5                                                                                        | 25                                                                      |                                                                                    |                                      |     |
|     | 2.07.03.2.05 | Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                | Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di tingkat daerah (Lembaga)                           | 2                                                                                        | 0                                                                       |                                                                                    |                                      |     |
| 132 | 2.07.04      | <b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>                                | <b>Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah (%)</b> | <b>63</b>                                                                                | <b>98,8</b>                                                             | <b>156,83</b>                                                                      | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |     |
|     | 2.07.04.2.01 | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota                        | Jumlah pelayanan antar kerja (Orang)                                                                                            | 1.120                                                                                    | 372                                                                     |                                                                                    |                                      |     |
|     | 2.07.04.2.03 | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja                                     | Jumlah informasi pasar kerja yang dikelola (Perusahaan)                                                                         | 1.002                                                                                    | 2.640                                                                   |                                                                                    |                                      |     |
|     | 2.07.04.2.04 | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah CPMI yang dilindungi (pra dan purna) penempatan (Orang)                                                                  | 3.110                                                                                    | 2.489                                                                   |                                                                                    |                                      |     |
|     |              |                                                                       |                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                         |                                                                                    |                                      |     |

Mendasarkan tabel diatas, diketahui bahwa capaian kinerja program Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja sebesar 65,58. Program-program tersebut mendukung ketercapaian Indikator Kinerja Kunci dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja. Capaian semua indikator kinerja pada tahun 2024 berada pada kategori sangat tinggi. Namun dalam prakteknya masih mengalami beberapa kendala.

Upaya mendukung mengatasi kendala tersebut, antara lain :

- a. Memberikan pelatihan/softskill kepada para pencari kerja mealui jobfair;

- b. Kerjasama dengan KIK dalam penerimaan pekerja di lingkungan Kabupaten Kendal;
- c. Kerjasama dengan PT. KIK yang saat ini sudah tersedia 116 perusahaan dengan 61.664 jobs.

2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Kendal diampu oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal. Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2024 selengkapnya tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 2.82

Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

| No  | Kode         | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah dan<br>Program / Kegiatan                                                               | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                             | Target Kinerja<br>dan Anggaran<br>RKPD<br>Tahun berjalan<br>(Tahun 2024)<br>yang dievaluasi | Realisasi<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Anggaran<br>RKPD yang<br>dievaluasi | Tingkat<br>Capaian Kinerja<br>dan Realisasi<br>Anggaran RKPD<br>yang dievaluasi | Unit SKPD<br>Penanggungjawab                                                                                 | Ket |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1   | 2            | 3                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                           | 5                                                                                           | 6                                                                          | 7                                                                               | 8                                                                                                            | 9   |
|     | 2            |                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                             |                                                                            |                                                                                 |                                                                                                              |     |
|     | 2.08         | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG<br>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN ANAK                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                             |                                                                            | 100,00                                                                          |                                                                                                              |     |
| 135 | 2.08.02      | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN<br>GENDER DAN PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN                                                                     | persentase OPD yang<br>Mengimplemetasikan PUG (%)                                                                                           | 100                                                                                         | 100                                                                        | 100,00                                                                          | DINAS PENGENDALIAN<br>PENDUDUK, KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN ANAK |     |
|     | 2.08.02.2.01 | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender<br>(PUG) pada Lembaga Pemerintah<br>Kewenangan Kabupaten/Kota                                    | Jumlah Peserta Sosialisasi dan launching<br>Desa layak Anak (orang/kegiatan)                                                                | 105                                                                                         | 105                                                                        |                                                                                 |                                                                                                              |     |
|     |              |                                                                                                                                     | Jumlah pelembagaan PHA pada lembaga<br>pemerintah, non pemerintah, dan<br>duniausaha kewenangan Kab/Kota (%)                                | 70                                                                                          | 65                                                                         |                                                                                 |                                                                                                              |     |
|     | 2.08.02.2.02 | Pemberdayaan Perempuan Bidang<br>Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi<br>pada Organisasi Kemasyarakatan<br>Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah pemberdayaan perempuan<br>bidang politik, hukum, sosial, dan<br>ekonomi pada organisasi<br>kemasyarakatan kewenangan kab/kota<br>(%) | 100                                                                                         | 100                                                                        |                                                                                 |                                                                                                              |     |

| No  | Kode         | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah dan<br>Program / Kegiatan                                                                | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                                                          | Target Kinerja<br>dan Anggaran<br>RKPD<br>Tahun berjalan<br>(Tahun 2024)<br>yang dievaluasi | Realisasi<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Anggaran<br>RKPD yang<br>dievaluasi | Tingkat<br>Capaian Kinerja<br>dan Realisasi<br>Anggaran RKPD<br>yang dievaluasi | Unit SKPD<br>Penanggungjawab                                                                                 | Ket |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1   | 2            | 3                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                        | 5                                                                                           | 6                                                                          | 7                                                                               | 8                                                                                                            | 9   |
|     | 2.08.02.2.03 | Penguatan dan Pengembangan<br>Lembaga Penyedia Layanan<br>Pemberdayaan Perempuan Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                        | Jumlah penguatan dan pengembangan<br>lembaga penyedia layanan pemberdayaan<br>perempuan kewenangan Kab/Kota (%)                          | 70                                                                                          | 70                                                                         |                                                                                 |                                                                                                              |     |
| 136 | 2.08.03      | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>                                                                                                | <b>Persentase kekerasan terhadap<br/>perempuan yang ditangani (%)</b>                                                                    | <b>100</b>                                                                                  | <b>100</b>                                                                 | <b>100,00</b>                                                                   | DINAS PENGENDALIAN<br>PENDUDUK, KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN ANAK |     |
|     | 2.08.03.2.01 | Pencegahan Kekerasan Terhadap<br>Perempuan Lingkup Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                          | Jumlah layanan pencegahan kekerasan<br>terhadap perempuan (%)                                                                            | 100                                                                                         | 100                                                                        |                                                                                 |                                                                                                              |     |
|     | 2.08.03.2.02 | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan<br>bagi Perempuan Korban Kekerasan<br>yang Memerlukan Koordinasi<br>Kewenangan Kabupaten/Kota    | Jumlah penyediaan layanan rujukan<br>lanjutan bagi perempuan korban<br>kekerasan yang memerlukan koordinasi<br>kewenangan kab/kota (%)   | 100                                                                                         | 100                                                                        |                                                                                 |                                                                                                              |     |
| 138 | 2.08.05      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA<br/>GENDER DAN ANAK</b>                                                                           | <b>Prosentase OPD yang memiliki data<br/>pilah gender (%)</b>                                                                            | <b>100</b>                                                                                  | <b>100</b>                                                                 | <b>100,00</b>                                                                   | DINAS PENGENDALIAN<br>PENDUDUK, KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN ANAK |     |
|     | 2.08.05.2.01 | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan<br>Penyajian Data Gender dan Anak<br>Dalam Kelembagaan Data di Tingkat<br>Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pengumpulan pengolahan<br>analisis dan penyajian data gender dan<br>anak dalam kelembagaan data di tingkat<br>daerah Kab/Kota (%) | 100                                                                                         | 100                                                                        |                                                                                 |                                                                                                              |     |
| 139 | 2.08.06      | <b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK<br/>(PHA)</b>                                                                                          | <b>Persentase Kecamatan Layak Anak (%)</b>                                                                                               | <b>100</b>                                                                                  | <b>100</b>                                                                 | <b>100,00</b>                                                                   | DINAS PENGENDALIAN<br>PENDUDUK, KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN ANAK |     |
|     | 2.08.06.2.01 | Pelebagaan PHA pada Lembaga<br>Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia<br>Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota                               | Jumlah pelembagaan PHA pada lembaga<br>pemerintah, nonpemerintah, dan Dunia<br>Usaha kewenangan Kabupaten/Kota (%)                       | 100                                                                                         | 100                                                                        |                                                                                 |                                                                                                              |     |
|     | 2.08.06.2.02 | Penguatan dan Pengembangan<br>Lembaga Penyedia Layanan<br>Peningkatan Kualitas Hidup Anak<br>Kewenangan Kabupaten/Kota               | Jumlah penguatan dan pengembangan<br>lembaga penyedia layanan peningkatan<br>kualitas hidup anak kewenangan<br>Kab/Kota (%)              | 100                                                                                         | 100                                                                        |                                                                                 |                                                                                                              |     |
| 140 | 2.08.07      | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS<br/>ANAK</b>                                                                                          | <b>Presentase kekerasan pada anak yang<br/>ditangani (%)</b>                                                                             | <b>100</b>                                                                                  | <b>100</b>                                                                 | <b>100,00</b>                                                                   | DINAS PENGENDALIAN<br>PENDUDUK, KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN ANAK |     |
|     | 2.08.07.2.01 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak<br>yang Melibatkan para Pihak Lingkup<br>Daerah Kabupaten/Kota                                    | Jumlah layanan pencegahan kekerasan<br>terhadap anak yang melibatkan para<br>pihak lingkup daerah Kab/Kota (%)                           | 100                                                                                         | 100                                                                        |                                                                                 |                                                                                                              |     |
|     | 2.08.07.2.02 | Penyediaan Layanan bagi Anak yang<br>Memerlukan Perlindungan Khusus                                                                  | Jumlah penyediaan layanan bagi anak<br>yang memerlukan perlindungan khusus                                                               | 100                                                                                         | 100                                                                        |                                                                                 |                                                                                                              |     |

| No  | Kode         | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah dan<br>Program / Kegiatan       | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                           | Target Kinerja<br>dan Anggaran<br>RKPD<br>Tahun berjalan<br>(Tahun 2024)<br>yang dievaluasi | Realisasi<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Anggaran<br>RKPD yang<br>dievaluasi | Tingkat<br>Capaian Kinerja<br>dan Realisasi<br>Anggaran RKPD<br>yang dievaluasi | Unit SKPD<br>Penanggungjawab                                                                                 | Ket |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1   | 2            | 3                                                                           | 4                                                                                         | 5                                                                                           | 6                                                                          | 7                                                                               | 8                                                                                                            | 9   |
|     |              | yang memerlukan Koordinasi Tingkat<br>Daerah Kabupaten/Kota                 | yang memerlukan koordinasi tingkat<br>daerah Kab/Kota (%)                                 |                                                                                             |                                                                            |                                                                                 |                                                                                                              |     |
| 141 | 2.14.01      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN<br/>PEMERINTAHAN DAERAH<br/>KABUPATEN/KOTA</b>  | <b>Persentase Ketercapaian Penunjang<br/>Urusan Perangkat Daerah (%)</b>                  | <b>100</b>                                                                                  | <b>100</b>                                                                 | <b>100,00</b>                                                                   | DINAS PENGENDALIAN<br>PENDUDUK, KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN ANAK |     |
|     | 2.14.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah         | Persentase ketecapaian penunjang<br>urusan perangkat daerah (%)                           | 100                                                                                         | 100                                                                        |                                                                                 |                                                                                                              |     |
|     | 2.14.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah                                   | ()                                                                                        | 100                                                                                         | 30                                                                         |                                                                                 |                                                                                                              |     |
|     | 2.14.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat<br>Daerah                                |                                                                                           |                                                                                             |                                                                            |                                                                                 |                                                                                                              |     |
|     | 2.14.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                          | Jumlah administrasi umum perangkat<br>daerah (persentase)                                 | 100                                                                                         | 100                                                                        |                                                                                 |                                                                                                              |     |
|     | 2.14.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah         |                                                                                           |                                                                                             |                                                                            |                                                                                 |                                                                                                              |     |
|     | 2.14.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                     | Jumlah penyediaan jasa penunjang<br>urusan pemerintahan daerah (unit)                     | 600                                                                                         | 600                                                                        |                                                                                 |                                                                                                              |     |
|     | 2.14.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah pemeliharaan barang milik<br>daerah penunjang urusan pemerintahan<br>daerah (Unit) | 100                                                                                         | 100                                                                        |                                                                                 |                                                                                                              |     |

Mendasarkan tabel diatas, diketahui bahwa capaian kinerja program Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar 100. Program-program tersebut mendukung ketercapaian Indikator Kinerja Kunci dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Peningkatan sumber daya manusia (SDM) dapat dilihat dari keberhasilan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) serta didukung dengan pencapaian penduduk yang tumbuh seimbang dan berkarakter. Pencapaian sasaran tersebut salah satunya ditentukan oleh terkendalinya pertumbuhan penduduk, meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH), dan meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup perempuan dan anak. Demikian juga dengan peningkatan

kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak merupakan rangkaian yang tak terpisahkan untuk pencapaian sasaran pembangunan secara keseluruhan.

Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2024 sudah sesuai progres, berikut ini beberapa faktor pendukung tercapainya indikator kinerja :

- a. Jalinan kerjasama yang baik lintas OPD, lintas sektor dalam menangani korban kekerasan;
- b. Adanya sosialisasi ke jejaring sosial seperti sekolah, pondok pesantren serta masyarakat;
- c. Adanya kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan.

Dari beberapa faktor pendukung tersebut, masih terdapat faktor penghambat ketercapaian indikator yaitu Kabupaten Kendal belum memiliki rumah aman bagi korban kekerasan. Sedangkan upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai target indikator, antara lain :

- a. Percepatan pembentukan UPTD;
- b. Peningkatan sosialisasi ke Masyarakat dalam penanganan kekerasan;
- c. Pengadaan SDM untuk tenaga Psikiater guna menangani korban kekerasan kepada perempuan dan anak serta SDM penyuluh keluarga berencana.

### 3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

Tercatat bahwa Kabupaten Kendal memiliki luas wilayah sebesar 1.005,86 Km<sup>2</sup>. Wilayah Kabupaten Kendal di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah timur berbatasan dengan Kota Semarang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang, serta di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Batang. Kabupaten Kendal merupakan wilayah dengan karakter agraris. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya luas lahan yang digunakan untuk pertanian, yaitu tanah sawah pada tahun 2023 seluas 23.649 Ha (23,60%), dan tanah tegalan 22.331 Ha (22,28%). Sedangkan sisanya dipergunakan untuk peruntukan lain (hutan, perkebunan, lahan bukan pertanian dan lain-lain). Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Pangan pada tahun 2024 selengkapnya tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 2.83  
Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

| No  | Kode         | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah dan Program<br>/ Kegiatan                                                                                      | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)                                        | Target Kinerja<br>dan Anggaran<br>RKPD<br>Tahun berjalan<br>(Tahun 2024)<br>yang dievaluasi | Realisasi<br>Capaian Kinerja<br>dan Anggaran<br>RKPD yang<br>dievaluasi | Tingkat<br>Capaian Kinerja<br>dan Realisasi<br>Anggaran RKPD<br>yang dievaluasi | Unit SKPD<br>Penanggungjawab | Ket |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                          | 4                                                                                                      | 5                                                                                           | 6                                                                       | 7                                                                               | 8                            | 9   |
|     | 2            |                                                                                                                                                            |                                                                                                        |                                                                                             |                                                                         |                                                                                 |                              |     |
|     | 2.09         | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                             |                                                                         | 106,52                                                                          |                              |     |
| 142 | 2.09.01      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                | Persentase ketercapaian penunjang Urusan Perangkat Daerah (%)                                          | 100                                                                                         | 100                                                                     | 100,00                                                                          | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN   |     |
|     | 2.09.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                           | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja dinas (Dokumen)                                        | 9                                                                                           | 9                                                                       |                                                                                 |                              |     |
|     | 2.09.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                     | Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan tunjangan ASN (Bulan)                                                 | 14                                                                                          | 14                                                                      |                                                                                 |                              |     |
|     | 2.09.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                         | Tersedianya administrasi umum perangkat daerah (Bulan)                                                 | 12                                                                                          | 12                                                                      |                                                                                 |                              |     |
|     | 2.09.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                       | Jumlah bulan tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Bulan)                             | 12                                                                                          | 12                                                                      |                                                                                 |                              |     |
|     | 2.09.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                      | Jumlah jenis barang milik daerah yang dipelihara (Jenis)                                               | 26                                                                                          | 26                                                                      |                                                                                 |                              |     |
| 143 | 2.09.03      | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT                                                                                          | Persentase ketersediaan bahan pokok utama (beras) (%)                                                  | 135                                                                                         | 157,95                                                                  | 117,00                                                                          | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN   |     |
|     | 2.09.03.2.01 | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Angka Ketersediaan protein (gram/kap/hari)                                                             | 56                                                                                          | 83                                                                      |                                                                                 |                              |     |
|     |              |                                                                                                                                                            | Angka Ketersediaan Energi (Kkal/kap/hari)                                                              | 2.060                                                                                       | 2.489                                                                   |                                                                                 |                              |     |
|     | 2.09.03.2.02 | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota                                                                                                | Jumlah pengadaan cadangan pangan pemerintah (gabah) (Ton)                                              | 50                                                                                          | 50                                                                      |                                                                                 |                              |     |
|     | 2.09.03.2.04 | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi                                                           | Jumlah kelompok yang memenuhi konsumsi pangannya secara beragam, bergizi, seimbang dan aman (Kelompok) | 10                                                                                          | 10                                                                      |                                                                                 |                              |     |

| No  | Kode         | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah dan Program<br>/ Kegiatan | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)            | Target Kinerja<br>dan Anggaran<br>RKPD<br>Tahun berjalan<br>(Tahun 2024)<br>yang dievaluasi | Realisasi<br>Capaian Kinerja<br>dan Anggaran<br>RKPD yang<br>dievaluasi | Tingkat<br>Capaian Kinerja<br>dan Realisasi<br>Anggaran RKPD<br>yang dievaluasi | Unit SKPD<br>Penanggungjawab     | Ket |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|
| 1   | 2            | 3                                                                     | 4                                                                          | 5                                                                                           | 6                                                                       | 7                                                                               | 8                                | 9   |
| 144 | 2.09.04      | <b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>                            | <b>Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan (%)</b>                | <b>54,39</b>                                                                                | <b>58,99</b>                                                            | <b>108,46</b>                                                                   | DINAS<br>PERTANIAN DAN<br>PANGAN |     |
|     | 2.09.04.2.01 | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan             | Jumlah dokumen FSVA (Dokumen)                                              | 1                                                                                           | 1                                                                       |                                                                                 |                                  |     |
|     | 2.09.04.2.02 | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota                 | Jumlah desa mandiri pangan yang terfasilitasi (Desa)                       | 11                                                                                          | 11                                                                      |                                                                                 |                                  |     |
|     |              |                                                                       | Jumlah daerah rentan rawan pangan yang ditangani (desa)                    | 0                                                                                           | 0                                                                       |                                                                                 |                                  |     |
| 145 | 2.09.05      | <b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>                             | <b>Persentase pangan yang aman dikonsumsi (%)</b>                          | <b>80</b>                                                                                   | <b>85,71</b>                                                            | <b>107,14</b>                                                                   | DINAS<br>PERTANIAN DAN<br>PANGAN |     |
|     | 2.09.05.2.01 | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota    | Jumlah sampel pangan yang diperiksa (Sampel)                               | 20                                                                                          | 28                                                                      |                                                                                 |                                  |     |
| 146 | 3.27.01      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>    | <b>Persentase ketercapaian penunjang Urusan Perangkat Daerah (%)</b>       | <b>100</b>                                                                                  | <b>100</b>                                                              | <b>100,00</b>                                                                   | DINAS<br>PERTANIAN DAN<br>PANGAN |     |
|     | 3.27.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja dinas (dokumen)            | 9                                                                                           | 9                                                                       |                                                                                 |                                  |     |
|     | 3.27.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan tunjangan ASN (bulan)                     | 14                                                                                          | 14                                                                      |                                                                                 |                                  |     |
|     | 3.27.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Tersedianya administrasi umum perangkat daerah (bulan)                     | 12                                                                                          | 12                                                                      |                                                                                 |                                  |     |
|     | 3.27.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah bulan tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (bulan) | 12                                                                                          | 12                                                                      |                                                                                 |                                  |     |
|     | 3.27.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah jenis barang milik daerah yang dipelihara (jenis)                   | 26                                                                                          | 26                                                                      |                                                                                 |                                  |     |

Mendasarkan tabel diatas, diketahui bahwa capaian kinerja program Urusan Pemerintahan Bidang Pangan sebesar 106,52. Program-program tersebut mendukung ketercapaian Indikator Kinerja Kunci dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pangan. Beberapa faktor pendukung dalam pencapaian target antara lain :